

**DISERTASI**

**ETNISISASI KEBIJAKAN PUBLIK**

(Suatu Studi Etnisitas dalam Persaingan  
Politik Lokal Di Kota Kendari)



**EKA SUAIB**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

# **ETNISIASI KEBIJAKAN PUBLIK**

**(Suatu Studi Etnisitas dalam Persaingan  
Politik Lokal Di Kota Kendari)**

## **DISERTASI**

**Untuk memperoleh Gelar Doktor  
dalam Program Studi Ilmu Sosial  
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga  
Telah dipertahankan di hadapan  
Panitia Ujian Doktor Terbuka  
Pada hari : Kamis  
Tanggal : 10 Maret 2005  
Pukul 10.<sup>00</sup> WIB**

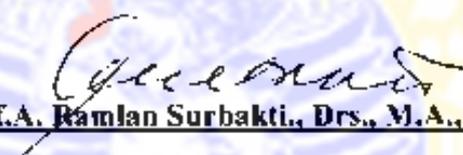
**Oleh :**

**EKA SUAIB  
NIM. 09913671/D**

## LEMBAR PERSETUJUAN

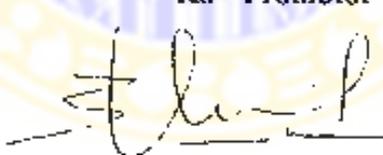
Disertasi Ini Telah Disetujui  
Tanggal 31 Maret 2005

Promotor



Prof. A. Ramlan Surbakti., Drs., M.A., Ph.D

Ka - Promotor



Dr. Pradjarta Dirdjosanjoto., SH., M.A



## RINGKASAN

## ETNISISASI KEBIJAKAN PUBLIK

## (SUATU STUDI ETNISITAS DALAM PERSAINGAN POLITIK LOKAL DI KOTA KENDARI)

Eka Suaib

Salah satu fenomena yang menonjol akhir-akhir ini terutama setelah otonomi daerah bergulir, adalah menonjolnya etnisitas sebagai faktor penting yang mempengaruhi perilaku elite parpol. Bagi elite parpol, etnisitas sengaja dibangkitkan sebagai akibat dari persaingan antarkelompok dalam memperebutkan sumber daya, menggalang solidaritas kelompok, mempertegas identitas, dan digunakan dalam membentuk jaringan.

Ada dua pertanyaan dalam penelitian ini. Pertama, kriteria apa yang elite parpol gunakan dalam menggolongkan orang lain sebagai satu etnisnya? mengapa elite parpol memilih kriteria tersebut dan bukan kriteria yang lain? Kedua, bagaimana elite politik membangkitkan etnisitas dalam membentuk jaringan sosial di dalam organisasi yang distruktur oleh paham nasionalisme?

Metode yang digunakan adalah etnografi dalam menghimpun bahan di lapangan melalui wawancara mendalam, pengamatan, dan penelusuran dokumen. Informasi yang diperoleh dari informan merupakan *first order understanding*, kemudian dibaca ulang melalui kerangka berpikir Berger agar diperoleh makna baru yang merupakan *second order understanding*.

Studi etnografi yang mengambil unit analisis Kota Kendari sebagai setting penelitian, yang pada zaman kolonial Belanda dahulu diabaikan secara politik. Memasuki kemerdekaan, status kota ini masih menjadi subdistrik dari wilayah Sulawesi Selatan Tenggara. Baru pada awal tahun 1964, pertumbuhannya sudah semakin dinamis karena kota sudah otonom dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Sebagai daerah yang baru berkembang, Kota Kendari banyak didatangi oleh etnis pendatang, utamanya etnis Bugis-Makassar. Awalnya, struktur lingkungan yang ditetapkan tidak akan terganggu oleh bergabungnya para etnis pendatang dengan penduduk asli. Hal ini biasanya dikondisikan karena tidak adanya persaingan memperebutkan sumber daya ekonomi dan politik, baik karena suplai sumber daya yang masih melimpah maupun karena pendatang membentuk komunitasnya sendiri.

Tetapi ketika etnis pendatang terus berdatangan dibarengi dengan jumlah populasi yang melampaui sumber daya lingkungan yang tersedia, struktur hubungan antar etnis pun berubah antara etnis asli dengan etnis pendatang. Akhirnya, hubungan simbiotik keduanya berubah menjadi perebutan sumber daya, termasuk kekuasaan. Pada saat itulah, aktor membangkitkan etnisitas guna memelihara dan memperkuat batasan-batasan etnis untuk semakin membedakan siapa etnis asli dan etnis pendatang. Dalam terminologi Simmel menyebutnya 'kita' dan 'mereka'.

Bagi elite parpol, kriteria seseorang untuk digolongkan satu rumpun etnis karena kesamaan asal usul, darah, budaya. Etnisitas, oleh elite parpol diterjemahkan dengan istilah *putera daerah*. Kosakata ini diproduksi secara massal di tingkat lokal yang Appdurai menyebutnya dengan *production of natives*. Pentingnya penekanan pada keaslian, menyebabkan budaya lokal mempunyai idiom sendiri tentang etnis pendatang. Etnis Tolaki menyebut pendatang dengan *tonoleu*, sementara etnis Muna menyebutnya dengan *dayu*.

Oleh karena etnisitas dimanfaatkan sebagai salah satu medium untuk membentuk jaringan, maka konstruksi mereka atas sesama etnisnya tidak dapat dipisahkan. Elite parpol merekrut orang dan memposisikan pengikut yang sama dengan latar belakang

sosial etnis dengan dirinya. Dengan demikian kriteria etnis dijadikan sebagai dasar kriteria siapa yang akan direkrut dan pada saat yang sama siapa yang harus tersingkir. Semua itu dilakukan oleh elite parpol dengan pembenaran legal, yuridis dan argumentatif.

Tindakan yang ditempuh oleh elite parpol tersebut, sangat pragmatis dan realistis mengenai real politik. Ia yakin bahwa politik sebagai *the art of the possible* atau "tidak ada kawan abadi, yang ada ialah kepentingan abadi" cenderung berlaku. Pendefinisian seperti itu cocok pada masa transisi karena masa ini memang biasanya tak menentu dan tak dapat dilalui tanpa kompromi terus menerus. Perilaku itu, bersifat jangka pendek sekaligus taktikus.

Ada dua kesimpulan umum penelitian ini. Pertama, elite parpol memiliki kecenderungan mengkategorikan seseorang satu etnis hanya atas dasar kelahiran, hubungan darah, kekerabatan, dan asal daerah seseorang. Kedua, dalam prakteknya elite parpol berupaya untuk membangkitkan sentiment etnis. Sarana utama untuk mewujudkannya adalah melalui jaringan yang ada di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Di organisasi inilah, paling banyak merekrut dengan latar belakang sosial etnis yang sama untuk menjadi pengurus partai.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat teori Berger dan Luckmann, dan Rabushka dan Shepsle. Dengan konsepsi Berger dan Luckman, alasan utama mengapa elite membangkitkan etnis adalah adanya tindakan *the other* terhadap *the self*. Dalam perspektif berpikir Berger, pemanfaatan etnisitas itu dikaitkan karena adanya *the other*. Singkatnya, manipulasi etnisitas karena ada *the other* yang juga bermain di ranah kekuasaan. Karena itu peninggiran *the other* merupakan suatu cita-cita yang harus diimplementasikan tanpa syarat. Hal inilah yang menjadi justifikasi para elite menurut perspektif Berger. Sementara Rabushka dan Shepsle (1979) menyatakan bahwa timbulnya etnisitas dalam masyarakat majemuk karena koalisi multi-etnik tidak bertahan lama dan menjadi tidak lagi penting. Dalam situasi seperti itu, kriteria etnis dijadikan alasan utama bagi elite untuk menentukan siapa yang tersingkir dan siapa yang bertahan. Koalisi yang ingin dibentuk oleh elite parpol PDI-P sama dengan koalisi yang dimaksud oleh Rabushka dan Shepsle yaitu koalisi multi-etnik. Elite PDI-P ingin membangun partai dengan mengkomodasi semua etnis penting yang ada di Sulawesi Tenggara. Akan tetapi koalisi itu tidak dapat dipertahankan karena elite parpol lebih mementingkan dan mendahulukan etnis Muna dibanding etnis lain yang ada. Elite PDI-P mempergunakan kriteria etnis untuk menentukan siapa yang tersingkir dan siapa yang bertahan.

Kontribusi penting dari disertasi ini adalah perilaku membangkitkan etnis dari elite parpol dapat menimbulkan loyalitas atas dasar etnis di kalangan anggota pengikut. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa faktor etnisitas yang mempengaruhi kesetiaan dan perilaku politik. Dengan merujuk pada hasil penelitian Liddle loyalitas etnis juga terjadi pada dunia parpol. Misalnya, anggota PNI, pengikut setianya etnis Jawa, Batak Tapanuli Utara. Anggota-anggota Parkindo kebanyakan dari etnis Batak Tapanuli Utara, Masyumi beranggotakan etnis Tapanuli Selatan dan beberapa etnis kelompok tertentu. Jelaslah Liddle melihat bahwa ada pemilih tradisional atas dasar etnis. Kesamaan penelitian ini dengan Liddle yakni faktor etnisitas menjadi hal penting dalam partai politik. Perbedaannya, yakni Liddle tidak melihat seberapa kuat etnis itu dikelola oleh dan melalui apa etnis itu disebarkan atau ditanamkan. Dalam penelitian ini, temuan empiris menunjukkan bahwa elite memompakan sentimen etnis kepada anggota sehingga dapat setia dan menjadi anggota dari jaringan yang dibentuk oleh elite bersangkutan. Dengan kata lain temuan penelitian ini menyempurnakan dan temuan Liddle.

Sementara itu, ditempatkan dalam perspektif imajiner dapat dikatakan bahwa elite membayangkan adanya kriteria-kriteria tertentu sehingga seseorang masuk dalam rumpun etnisnya. Meskipun imajiner, ini berbeda dengan konsep komunitas yang

dibayangkan (*imagined community*) dari Anderson (1991) karena komunitas yang dibayangkan bukan sebuah pembayangan suatu kebangsaan, tetapi suatu etnis, yaitu komunitas yang dibayangkan karena adanya persamaan darah, kelahiran, tempat kelahiran, dan geneologis.



## Abstrak

## ETNISASI KEBLIKARAN PUBLIK

(SUATU STUDI ETNISITAS DALAM PERSAINGAN POLITIK LOKAL  
DI KOTA KENDARI)

Eka Suaib

Fokus penelitian ini adalah memahami kompleksitas hubungan antara elite parpol dengan etnisitas di PDI-P Kota Kendari. Masalah penelitian adalah pertama, kriteria apa yang elite parpol pergunakan dalam menggolongkan orang lain sebagai satu etnisnya? Mengapa elite parpol memilih kriteria tersebut dan bukan kriteria yang lain?, kedua, bagaimana elite parpol membangkitkan etnisitas dalam membentuk jaringan di dalam organisasi yang distruktur oleh paham nasionalisme.

Studi etnografi kali ini mengambil unit analisis kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang pada zaman Belanda dahulu tidak dipandang penting, dan karenanya ditempatkan sebagai bagian dari Sulawesi Selatan. Setelah memasuki Indonesia modern, pertumbuhan kotanya menjadi heterogen dari segi etnis dibanding kota-kota lain yang ada di Sulawesi Tenggara.

Hasil penelitian ini yakni pertama, etnisitas oleh elite politik diterjemahkan dengan istilah "putera daerah". Makna etnisitas, yang dalam terminologi praktisnya dengan putera daerah, berdasarkan darah dan tempat lahir. Semua yang sedarah dengan aktor, adalah satu etnis. Demikian juga semua yang dilahirkan di tanah sama dapat digolongkan sebagai satu etnis. Kedua, kebangkitan etnisitas dapat diperiksa dalam suatu jaringan. Keberhasilan suatu jaringan yakni jika melahirkan pola-pola otoritas yang membenarkan kedudukan tinggi pada individu tertentu yang memegang peran kunci. Adapun yang memegang peran kunci tersebut yakni elite parpol. Dengan posisi itu, ia menjadi pusat kekuasaan di tubuh parpol. Akibatnya, kekuasaannya bersifat terpusat pada dirinya.

Alasan yang mendasari perilaku yang memanfaatkan etnisitas dapat dilihat dari teori dari Berger dan Luckmann, sementara untuk memahami perilaku elite dalam melakukan koalisi dan aliansi dapat dilihat dari teori dari Rabushka dan Shepsle. Teori konstruksi sosial yang berpendapat bahwa etnis yang dibangkitkan oleh elite, mencerminkan berpikir ala Berger dan Luckman, yang menganggap tindakan itu dilakukan karena adanya kompetisi dari *the other* terhadap *the self*. Teori Rabushka dan Shepsle dapat menerangkan terjadinya aliansi dan koalisi yang dilakukan elite, yang menjadikan kriteria etnis sebagai alasan utama bagi elite untuk menentukan siapa yang tersingkir dan siapa yang bertahan dalam jaringan yang dibentuk.

Studi ini menghasilkan pemahaman teoretik tentang perilaku yang memanfaatkan etnisitas yang merupakan saling-silang antara politik dan etnis, karena keduanya bertujuan untuk mendapatkan legitimasi di organisasi. Perilaku yang seperti itu dalam studi etnisitas dikategorikan dalam perspektif *instrumentalist/constructed* (Kuper&Kuper,2000, E. Hale, 2003). Asumsi dari perspektif ini, etnisitas adalah sesuatu yang tidak alamiah karena merupakan sumber politik, sarana kohesi bagi orang yang dipromosikan guna memfasilitasi artikulasi politik dari kepentingan orang dan kelompok.

Dengan merujuk pada hasil penelitian Liddle loyalitas etnis juga terjadi pada dunia parpol. Misalnya, anggota PNI, pengikut setianya etnis Jawa. Batak Tapanuli Utara Anggota-anggota Parkindo kebanyakan dari etnis Batak Tapanuli Utara. Masyumi beranggotakan etnis Tapanuli Selatan dan beberapa etnis kelompok tertentu. Jelaslah Liddle melihat bahwa ada pemilih tradisional atas dasar etnis. Kesamaan penelitian ini

dengan Liddle yakni faktor etnisitas menjadi hal penting dalam partai politik. Perbedaananya, yakni Liddle tidak melihat seberapa kuat etnis itu dikelola oleh dan melalui apa etnis itu disebarkan atau ditanamkan. Dalam penelitian ini, temuan empiris menunjukkan bahwa elite memompakan sentimen etnis kepada anggota sehingga dapat setia dan menjadi anggota dari jaringan yang dibentuk oleh elite bersangkutan. Dengan kata lain temuan penelitian ini menyempurnakan dari temuan Liddle.

Diletakkan dalam perspektif imajiner dari Anderson (1991), dapat dikatakan bahwa elite membayangkan adanya kriteria-kriteria tertentu sehingga seseorang masuk dalam rumpun etnisnya. Meskipun imajiner, ini berbeda dengan konsep komunitas yang dibayangkan (*imagined communiti*) dari Anderson tersebut, karena komunitas yang dibayangkan bukan sebuah pembayangan suatu kebangsaan, tetapi suatu etnis, yaitu komunitas yang dibayangkan karena adanya persamaan darah, kelahiran, tempat kelahiran, dan geneologis.

**Kata Kunci:** etnisitas, putera daerah, jaringan, elite partai politik, kebangkitan etnisitas.



## SUMMARY

**Ethnicization of Public Policy  
(An Ethnicity Study in the Competition of Local Politics in Kendari City)**

Eka Suaib

One of noticeable phenomena at recent time, particularly after the regional autonomy has been launched by the government is the dominance of ethnicity as the most important factor which may influence political party elite behavior. To the political party elites, ethnicity is intentionally generated as the result of competition among many political parties for the purpose of searching for resources, mobilizing solidarity of many social groups, strengthening identity, and this is used to establish a social networking.

The focus of this research is to comprehend the complexity of the relationship between the political parties elites and the ethnicity in PDI-P Kendari. The problem of the research : first, what kind of criteria used by political party elite in grouping other people as their own same ethnic. Why political party elite choose such a criteria and not others. Second, how do political parties elite revival ethnicity in forming network in the organization structures by nationalism understanding.

This ethnographic research was done at Kendari, South East of Sulawesi, which during the Dutch occupation was not considered important and therefore, was placed as part of South of Sulawesi. In the beginning of 1964, Kendari City developed and grew dynamically since it had achieved an autonomy in organizing its house keeping affairs by its own efforts. As the newly developed region, many immigrant ethnic people, particularly Buginess-Makassariness came in Kendari City. Initially, the predetermined environmental structure would not be distorted by an integration between the immigrant ethnic people and indigenous people. This has been generally conditioned since there was no competition in searching for economic and political resources, both because supply of resources was still abundant and immigrant people formed their own community.

When number of the immigrant people increased consistently accompanied by number of population exceeding the existing resources, then the relationship structure between the immigrant ethnic people and indigenous ethnic people changed dramatically. Ultimately, the symbiotic relationship between these two different people groups had turned into competition in pursuing resources for their respective groups. At this time, the political party actors intentionally generated ethnicity to maintain and strengthening the ethnic division to separate who the immigrant ethnic people and the indigenous ethnic people were. In Simmel's terminology, word "we" and "they".

For the political party elites, the criteria that they used to classify other people as their ethnic group consisted of similarities of the geneology, blood relationship and culture. The ethnicity was often interpreted by the political party elite by term native representative of the region (*putera daerah*). This term was produced massively at local level in which Appadurai called it as production of natives. Because the nativeness was more emphasized, the local culture possessed a distinct idiom for the immigrant ethnic people. For example, Tolakiness called the immigrant people as *tonoleu*, while Munaness called them as *daya*.

Therefore, the political party elite deliberately employed the ethnicity as medium to establish social networking. Hence, their construction of the same ethnic people could not be separated. The elites recruited and positioned followers from similar background as they belonged. Consequently, the similarity of ethnic origin was used as basic criteria to determine who should included in their ethnic group and who should excluded from the

ethnic group. The elites classified other people based on the similarity of the origin under legal, juridical and argumentative justifications.

Those political elites pursued this action in pragmatical and realistic senses when viewed from the real political situation. They believed that in the political world as the art of possible, the "eternal interest" tended to apply for them. This definition was remarkably fitted to the transitory period was mainly characterized by the quite uncertain condition and people could not passed through it without continual compromise. Such a behavior was only short term and tactical in nature.

The findings of the research are, first, ethnicity was translated into native representative of the region by political elites. The meaning of ethnicity practically is native representative of the region (*putera daerah*) based on blood and place of birth. Those who have the same blood as the actor belong to one ethnic group. The same case happened with those who were born in the same place can be categorized as belonging to one ethnic group. Second, the ethnic revivalism can be examined in one network. The main vehicle to realize this ethnic sentiment in Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). This organization most often recruited people as the party followers from the similar ethnic background.

In theoretical term, this study supported theory of Berger and Luckmann, and Rabushka and Shepsle. Under Berger and Luckmann's conception, the main reason of why the political party elite intentionally generated ethnicity was that since the other acted against the self. Put another way, the political party elite manipulated ethnicity since the presence of the other was also involved within the domain of power. Thus, exclusion of the other was the only way that the elites must do for their survival. Similarly, Rabushka and Shepsle (1979) argued the ethnicity might emerge in plural society as multiethnic coalition would not endure for long time and became unimportant any longer. In such a situations, the political party elites taking the ethnic criteria as the reason for the elite to decided who are eliminated and who sustain. Elite parpol from PDI-P wanted to form a coalition as suggested by Rabushka and Shepsle, namely multiethnic coalition. The elites in PDI-P wanted to build their party by accommodating all important ethnic people existing in Sulawesi Tenggara. However, the multiethnic coalition could not endure for long term since many elites from this party more emphasized Munaness rather than others. Again, the elites of PDI-P used ethnic criteria to decided who are eliminated and who sustain.

This study results in theoretical comprehension upon the behavior utilizing ethnicity which is multiplex between politics and ethnic, since both of them intend to obtain the legitimacy in organization. Such behavior, under the ethnicity study, is classified into the instrumentalist/contracted perspective (Kuper & Kuper, 2000; E.Hale, 2004). This perspective assumes that ethnicity is something non natural, since it is the source of politics, the means of cohesion for the promoted people in order to facilitate political articulation for the interest of people and group.

Significant contribution of this dissertation is the elites behavior of generating ethnicity can result in ethnic loyalty or ethnic base among the followers. Thus, it can be said that itu is ethnicity factor that influences ethnic loyalty and political behavior. Referring to results of Liddle's research, the ethnic loyalty may also occur in political party. For example, in PNI its loyal followers are people come from Java and Batak Tapanuli Utara. The loyal followers of Parkindo come from Batak Tapanuli Utara, while of Masyumi from Tapanuli Selatan and several certain ethnic group. Liddle explains clearly that the traditional voters exist on the basis of ethnic base. This research has similarity with that of Liddle. That is, the ethnicity factors becomes important in political party. The difference between the two is that Liddle doesn't investigate how strong the ethnicity is managed by and through what mechanism the ethnicity is distributed or embedded. In this research, empirical findings indicate that the political party elite

revival ethnic sentiment to their followers so that they become loyal followers and members of the social networking formed by the elites. In other words, these findings are complementary to Liddle's.

Put under the imagine perspective of Anderson (1991), it can be stated that the elite considers that there is a certain criteria so that someone will include into his ethnic group. Although it is imagine, it is completely different from Anderson concept of imagine community. because imagined community is not imagination of a certain nationality, but just and ethnic, namely the imagined community to the similarities in blood, place of birth and geneology.



## DAFTAR ISI

	halaman
Sampul Depan .....	i
Sampul Dalam .....	ii
Persetujuan .....	iii
Ucapan terima kasih .....	iv
Ringkasan .....	v
Summary .....	vi
Abstract .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Permasalahan Penelitian .....	13
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
1.4 Perspektif Teoretik .....	16
1.4.1 Etnisitas, Elite, dan Jaringan .....	18
1.4.1.1 Konseptualisasi Etnisitas .....	18
A. Apa Itu Etnisitas .....	18
B. Etnisitas Kebijakan Publik .....	24
1.4.1.2 Politik Elite dan Patronase .....	28
1.4.1.3 Etnik dan Perilaku Elite .....	34
1.4.1.4 Propaganda Elite Dalam Membangkitkan Etnisitas .....	41
1.4.5 Etnis sebagai Dasar Jaringan .....	53
1.4.5 Konstruksi Sosial Dalam Menjelaskan Fenomena .....	64
1.5 Metodologi Penelitian .....	74
1.5.1 Rancangan Penelitian .....	74
1.5.2 Informan .....	76
1.5.3 Pengumpulan Data .....	78
1.5.3.1 Wawancara Mendalam .....	78
1.5.3.2 Observasi Penelitian .....	81
1.5.3.3 Kendari Sebagai Setting Penelitian .....	84
1.5.3.4 Penelusuran Riwayat Hidup, dan Dokumen-Dokumen .....	86
1.5.4 Pengolahan dan Analisis Data .....	86
<b>BAB II PROFIL KOTA KENDARI: KOTA MULTI ETNIS DALAM TRANSISI</b>	
2.1 Latar Sejarah Sosial .....	90
2.1.1 Sejarah Kota .....	90
2.1.2 Awal Kedatangan Masing-Masing Etnis .....	94
2.1.3 Sejarah Kampung dan Pemukiman di Kendari .....	102
2.2 Relasi Antaretnis di Kendari .....	110
2.3 Etnis Mina di Kendari .....	124

**BAB III KEBANGKITAN ETNISITAS ETNIS MUNA**

3.1 Perspektif Reaktif : Kolonialisme Internal .....	130
3.2 Perspektif Kompetitif .....	139
3.2.1 Sumber Politik .....	139
3.2.2 Sumber Ekonomi .....	151
3.2.3 Sumber <i>Political Entrepreneur</i> .....	160
3.3 Perwujudan Etnisitas Etnis Muna .....	171
3.3.1 Asosiasi Etnis Muna .....	171
3.3.2 Wadah Parpol PDI-P .....	177

**BAB IV ELITE MUNA-ELITE BUKAN MUNA DI PDI-P**

4.1 Perilaku Elite Muna .....	181
4.1.1 Perekrutan Pengurus Atas Dasar Etnisitas .....	181
4.1.2 Perekrutan Caleg Atas Dasar Etnisitas .....	185
4.1.3 Mobilisasi Orang Muna .....	189
4.2 Perilaku Elite Bukan Muna .....	193
4.3 Interaksi Sosial Antara Muna-Bukan Muna .....	198

**BAB V PENGKATEGORIAN ELITE TENTANG ETNIS MUNA**

5.1 Pengkategorian Etnis Muna menurut Munabim .....	205
5.2 Pengkategorian Etnis Muna menurut Munajab, S.E .....	212
5.3 Pengkategorian Etnis Muna menurut La Ode Munadora .....	216
5.4 Pengkategorian Etnis Muna menurut La Ode Munasir .....	224
5.5 Pengkategorian Etnis Muna menurut Munabil .....	229
5.6 Pengkategorian Etnis Muna menurut Andika .....	237
5.7 Pola Pengkategorian Elite Parpol .....	241
5.7.1. Pengkategorian karena Kesamaan Bahasa .....	241
5.7.2. Pengkategorian karena Kesamaan Kultural .....	243
5.7.3. Pengkategorian karena adanya Hubungan Kekkerabatan .....	244

**BAB VI JARINGAN DASAR ETNISITAS**

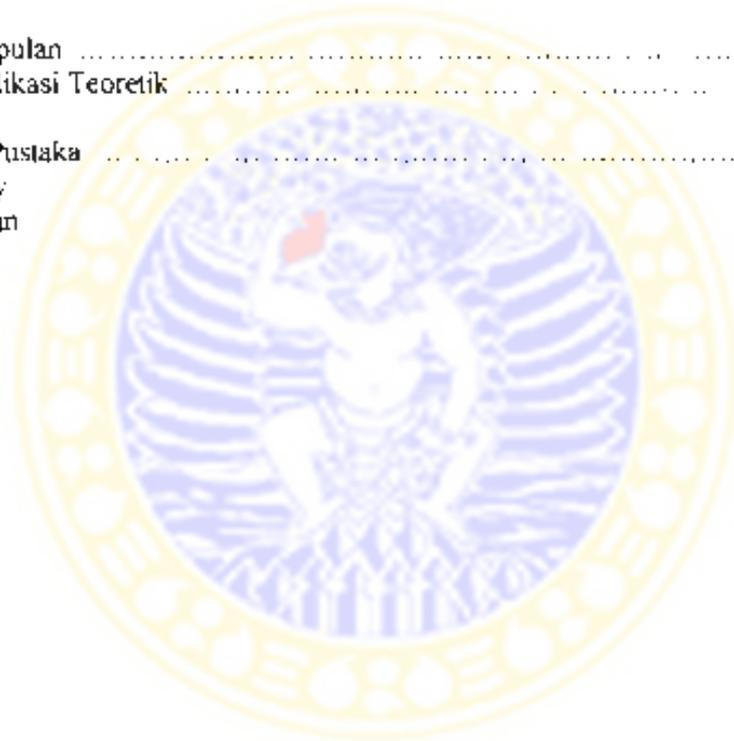
6.1 Persaingan Munajab, S.E., -- Andika .....	251
6.2 Analisis Jaringan .....	266
6.2.1 Hubungan Munajab, S.E.,-- Jaringan Pengurus DPC .....	267
6.3.2 Hubungan Munajab, S.E.,-- Pengurus PAC .....	267
6.3.2 Hubungan Munajab, S.E.,-- Basis Massa .....	277
6.3.3 Koneksi-Koneksi Polirik .....	281
6.3.4 Hubungan Kekkerabatan di PDI-P .....	284
6.4 Jenis Jaringan di PDI-P : <i>Bandung</i> dan <i>Bridging</i> .....	287

**BAB VII ANALISIS**

7.1 Interpretasi Hasil Penelitian .....	293
7.2 Memahami Konstruksi Sosial Elite tentang Etnis Muna .....	299
7.2.1 Etnis Muna : Penanda-Penanda Penting .....	299
7.2.2 Konstruksi Sosial Elite Atas Etnisitas .....	303
7.2.2.1 Internalisasi .....	305
7.2.2.2 Eksternalisasi .....	308
7.2.2.3 Objektivasi .....	309

**BAB VIII SIMPULAN DAN REFLEKSI TEORITIK**

7.1 Simpulan .....	314
7.2 Implikasi Teoretik .....	315
Daftar Pustaka .....	325
Glossary .....	337
Lampiran .....	



## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	: Komposisi Penduduk Kendari Berdasarkan Etnis, 2003 .....	3
Tabel 1.2	: Komposisi Pengurus DPC PDI-P Kota Kendari .....	4
Tabel 1.3	: Peta Teoretis dan Penelitian yang Digunakan .....	12
Tabel 3.1	: Etnisitas Bupati Kendari .....	144
Tabel 3.2	: Etnisitas Walikota Kendari .....	146
Tabel 3.3	: Etnisitas Pejabat Pemkot.....	147
Tabel 3.4	: Etnisitas Organisasi Yang Bergerak di Bidang Usaha/Bisnis	155
Tabel 3.5	: Pemohon IMB Khusus Ruko, Hotel dan Restoran, Lokasi Bangunan, dan Latar Belakang Etnis .....	156
Tabel 3.6	: Bakal Calon Walikota Masing-Masing Fraksi .....	162
Tabel 4.1	: Pola Pembobotan PDI-P dalam Pencalonan Anggota Legislatif .....	186
Tabel 4.2	: Daftar Caleg PDI-P yang Menempati Nomor Urut Utama Di Masing-Masing Daerah Pemilihan .....	188
Tabel 4.3	: Perbedaan Pola Relasi Elite Etnis Asli dan Elite Etnis Pendatang .....	202
Tabel 6.1	: Tokoh Parpol Penting Dalam Konfercabsus PDI-P.....	252
Tabel 6.2	: Tokoh-Tokoh Partai dan Keanggotaannya dalam Lima Macam Golongan .....	253
Tabel 6.3	: Perbedaan Karakteristik Jaringan Mumajab,S.E., dan Andika	265
Tabel 6.4	: Nama Ketua dan Sekretaris Hasil Konsolidasi Organisasi	275
Tabel 7.1	: Dialcktika Internalisasi, Eksternalisasi dan Objektivasi	312

## BAB I PENDAHULUAN



### 1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena etnisitas di Indonesia sudah lama muncul ke permukaan, yang dinamikanya seiring dengan upaya bangsa ini untuk merumuskan nasionalisme. Bagi Indonesia yang mempunyai karakter multietnik, fenomena ini perlu disimak dengan cermat, karena pemujaan etnisitas selain bisa menjadi energi untuk menggerakkan pembangunan bangsa, etnisitas juga dapat menceraiberaikan suatu bangsa (Isaacs, 1993: vi). Hal itu dapat dilihat pada kasus-kasus pemberontakan yang bersifat kedaerahan<sup>1</sup> yang kemudian menjelma menjadi isu regionalisme etnisitas.

Walau bukan fenomena baru, tetapi menguatnya *self determination* dari berbagai kelompok etnik, perlu dicermati lebih mendalam. Beberapa fenomena seperti sejak awal tahun 2000 sewaktu pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah masyarakat daerah ramai-ramai menuntut calon gubernur, walikota dan wakilnya berasal dari putera daerah. Demikian juga halnya pada arena Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) KDH, kelompok etnis dibawa-bawa untuk mendukung atau menolak LPJ. Perkembangan etnisitas semakin tampak ketika otonomi dilaksanakan sejak tahun 2001. Sebagian PNS eks Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kandep yang dilikuidasi ditolak pengalihannya oleh Pemda, karena PNS tersebut bukan berasal dari etnis daerah bersangkutan. Dalam lingkup birokrasi, pejabat-pejabat yang dipromosikan untuk menduduki struktur

<sup>1</sup> Hal itu dapat dilihat dari pemberontakan diawali oleh Darul Islam di Jawa Barat tahun 1949, Permesta di Sulawesi Selatan tahun 1950, Darul Islam di Aceh tahun 1953, Republik Maluku Selatan (RMS) tahun 1950, pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) tahun 1962 dan pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tahun 1976

organisasi Pemda lebih diutamakan putera daerah kendati kualifikasi objektif lainnya tidak memadai. Begitu juga dalam penerimaan PNS baru, orang-orang di daerah tersebut menuntut CPNS harus berasal dari etnis daerah itu. Belakangan ini, 'wabah' etnisitas melanda dunia parpol. Penelitian ini akan memotret etnisitas dengan fokus *linkage* elite politik dan etnisitas, dengan studi kasus pada PDI-P.

Ruang lingkup penelitian ini adalah level lokal dengan latar PDI-P Kendari Sulawesi Tenggara. Secara administratif, Kendari sebagai basis utama PDI-P Kendari, terdiri atas 5 kecamatan dan 52 kelurahan. Pada 2001, penduduknya berjumlah 162.400 jiwa yang terdiri atas etnik asli Kendari dan etnik dari luar Kendari. Di Kendari terdapat beberapa etnis<sup>2</sup> yakni (1) etnik asli dari Sulawesi Tenggara -- etnis Tolaki<sup>3</sup>, etnik Muna<sup>4</sup>, etnik Buton<sup>5</sup> dan etnik Moronene<sup>6</sup> (Hidayah, 1997:194); (2) kaum pendatang antara lain etnik Bugis (termasuk Makassar), Jawa (termasuk Sunda dan Madura), Bima, dan lain-lain. Keanekaragaman etnik itu membawa pengaruh pada politik lokal di Kendari. Adapun jumlahnya dapat dilihat pada tabel 1.1.

<sup>2</sup> Dalam disertasi ini kata yang dipergunakan adalah etnis yang dalam kepustakaan di Indonesia sering dipergunakan silih berganti dengan kata suku bangsa.

<sup>3</sup> Dalam kepustakaan asing, ada juga yang menyebutnya dengan Lolaki atau Lalaki. Menurut Kennedy (1953) etnis ini terbagi lagi menjadi beberapa sub etnis, yaitu Wiwiraho, Labeau, Ascrawana, Mowewe, Mekongga, dan Tambolaki.

<sup>4</sup> Etnik Muna sering juga disebut Tomuna menetap di Pulau Muna. Daerah mereka dalam wilayah Kabupaten Muna, yang terletak di sebelah selatan Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Pada zaman dulu Pulau Muna termasuk dalam wilayah Kesultanan Buton.

<sup>5</sup> Etnik Buton atau Butung mendiami Pulau Buton yang terletak di jazirah Sulawesi bagian tenggara. Secara administratif wilayah kepulauan Buton masuk dalam wilayah Sulawesi Tenggara.

<sup>6</sup> Etnik Moronene sering juga disebut etnik Kabaena. Asal usulnya masih satu kelompok dengan etnik Tolaka, dimana pemisahan diri sudah terjadi sejak lama sekali. Masyarakat ini sekarang mendiami daratan Pulau Kabaena, yang terletak di sebelah selatan jazirah Sulawesi Tenggara.

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Penduduk Kendari Berdasarkan Etnis, 2003**

Kawasan	Buton	Bugis	Tolaki	Muna	Jawa	Bali	Begon	Madura	Lanusa	Jumlah
Perkotaan	12.451	40.228	29.921	30.896	12.299	1.431	416	154	34.469	162.265
Pedesaan	1.644	8.352	11.916	9.211	3.515	103	558	42	4.861	38.202
Jumlah	14.095	48.580	41.837	40.107	15.814	1.534	974	196	39.330	200.467

Sumber : BPS Sultra, 2003

Dari tabel di atas terlihat bahwa ada lima etnis besar di Kota Kendari yakni etnis Bugis (24,23%), etnis Tolaki (20,86%), etnis Muna (20%), etnis Buton (7,03%), dan etnis Jawa (6,89%). Dari lima etnis besar itu, ada 3 etnis asli yakni Tolaki, Buton, dan Muna sementara pendatang yakni etnis Bugis dan etnis Jawa.

Salah satu fenomena yang sering muncul dalam arena politik lokal di Kendari saat ini adalah kecenderungan menguatnya etnisitas etnis yang terlihat pada pemunculan terminologi putera daerah. Fenomena ini sangat terlihat menguat pada saat peristiwa pergantian gubernur, walikota/bupati, dan sudah sampai melebar ke pengisian jabatan-jabatan teknis administrasi.<sup>7</sup> Pada kasus pemilihan gubernur, beberapa aktor di daerah mengumandangkan perlunya putera daerah dikukuhkan sebagai salah satu kriteria utama. Beberapa aktor penting, dapat disebutkan antara lain Endang S.A<sup>8</sup>, Ketua BMAST H. Tanolaki<sup>9</sup>, LPM (Lembaga pers Mahasiswa) Unhalu.<sup>10</sup> Dari aktor-aktor tersebut, Endang S.A, misalnya, membuat pernyataan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2002--2007

<sup>7</sup> Salah satu contoh dari kecenderungan tersebut dapat dilihat dari komposisi pejabat yang menduduki posisi eselon II dan eselon III di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari. Data yang penulis peroleh dari Bagian Kepegawaian Pemkot Kendari menunjukkan putera daerah yang menduduki eselon II yakni 100%, putera daerah yang memegang jabatan eselon III yakni 72%, dan hanya 28% non putera daerah yang menduduki jabatan eselon III

<sup>8</sup> Pernyataan yang ditandatangani oleh Endang S.A dengan mengatasnamakan FORBESS dan diserahkan langsung ke panitia pemilihan gubernur

<sup>9</sup> Kendari Ekspres, 10 Juli 2002

<sup>10</sup> Kendari Pos, 13 Juli 2002

adalah putera daerah Sulawesi Tenggara. Adapun kriteria dari putera daerah tersebut dapat dilihat dalam lampiran disertasi ini. Demikian halnya pada pemilihan Walikota Kendari, isu putera daerah juga dikumandangkan oleh aktor-aktor perorangan dan organisasi. Aktor tersebut adalah Mahadi Tongasa (pernyataan terlampir). Sementara dari organisasi isu putera daerah dikumandangkan antara lain Karang Taruna Sehati (pernyataan terlampir), mahasiswa pencinta Musholla Al Ghifari Fak.Pertanian Uohalu (pernyataan terlampir), dan Badan Musyawarah Antar Tokoh Masyarakat (BMAST).

Dalam konteks organisasi parpol, seperti PDI-P, etnisitas juga diracik (*crafting*) oleh elite parpol. Munajab, S.E yang dipercaya menjadi Ketua PDI-P Kota Kendari dalam tingkah laku politiknya, ia memanfaatkan etnisitas guna menjalin jaringan dengan sesama elite dari Muna. Ada beberapa momen yang bisa diperiksa yakni perekrutan pengurus, seperti terlihat pada komposisi pengurus DPC PDI-P Kendari pada tabel 1.2 di bawah ini.

**Tabel 1.2**  
**Komposisi Pengurus DPC PDI-P Kendari**

No	Nama	Posisi	Latar Belakang Etnik
1	Munajab, S.E.	Ketua	Muna
2	Anani Abd. Rahman	Wakil Ketua	Buton
3	Buttu H. Malaka, S.E.	Wakil Ketua	Buton
4	Zeth Sialla, S.E.	Wakil Ketua	Toraja
5	La Ode Abdul Rahman	Wakil Ketua	Muna
6	La Tongkuno	Wakil Ketua	Muna
7	Andika	Sekretaris	Muna
8	Munabil	Wk. Sekretaris	Muna
9	Wa Ode Guna Darma	Wk. Sekretaris	Muna
10	Dra. St. Wuna	Bendahara	Muna
11	La Tobelo	Bendahara	Muna

Sumber : Kantor DPC PDI-P Kendari, 2003

Berdasar atas tabel 1.2 di atas, dari 11 orang pengurus, 8 orang di antaranya adalah etnik Muna, sementara 3 orang sisanya adalah dari etnik Toraja dan Buton. Penyusunan pengurus DPC PDI-P Kendari di atas merupakan hasil konferensi Cabang DPC Kendari pada Februari 2001 yang dihadiri oleh utusan/perwakilan masing-masing Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI se-Kendari. Dibandingkan dengan komposisi pengurus sebelumnya yakni pengurus PDI-P Periode 1999 –2001, latar belakang etnik pengurusnya juga didominasi oleh etnis Muna.<sup>11</sup>

Upaya untuk menjelaskan fenomena di atas, secara teoretis menarik untuk dikaji. Dalam ilmu sosial, perilaku yang mengedepankan aspek etnisitas (perasaan kesukubangsaan) disebut dengan etnonasionalisme yaitu suatu ikatan rasa yang didasarkan ikatan-ikatan yang lebih primordialistik dengan kesetiaan pada suatu teritorialitas, bahasa dan budaya tertentu (Connor, 1994: 21).

Secara umum, perdebatan dalam etnonasionalisme dapat dikelompokkan dalam dua perspektif (Kuper dan Kuper, 2000:309). *Pertama*, perspektif *primordualist* yang memandang kelompok etnis berakar pada sentimen “primordial”, kesadaran kultural yang diperoleh dari bekerjanya institusi paling dasar seperti keluarga, klan, kelompok kepercayaan, dan komunitas. Perspektif ini memandang bahwa etnonasionalisme berkembang sebagai kelanjutan dari suatu kelompok etnis melalui suatu proses *self contained process*. Dalam proses ini ide tentang etnis diwariskan secara turun temurun dengan memanfaatkan medium bahasa, sastra, terikat dengan tanah

---

<sup>11</sup> Berdasarkan informasi dari Munabim, komposisi pengurus PDI Periode 1999-2001 yakni Ketua Ahmad Hasan (Muna), Wakil Ketua Buhannuddin, S.E (Muna), Sekretaris Yusuf Wiwirahe (Tolaki), Bendahara Kadir Buto (Muna)

kelahiran, keturunan geneologis yang sama, berbagi memori sejarah tertentu, dan agama (Kellas, 1998: 47).

*Kedua*, perspektif *constructed manipulated* yang menafsirkan isu etnisitas sebagai *an exercise in boundary maintenance* dan berasumsi bahwa gerakan komunal merupakan respons terhadap perlakuan pilih kasih. Jadi mereka berpolitik dengan menggunakan simbol-simbol etnik yang didasarkan atas alasan praktis sebagai sarana yang efektif untuk menimbulkan dukungan emosional. Perspektif ini menekankan peran elite dalam konstruksi identitas etnik melalui mobilisasi politik dan sumber daya ekonomi (Enloe, 1973: 45). Penelitian ini dikategorikan dalam perspektif *constructed manipulated* yang memandang etnisitas merupakan kecenderungan alamiah dalam suatu negara dan karenanya ada kreasi dari elite yang menggunakan faktor ini untuk mobilisasi massa. Dengan kata lain, ada membangkitkan etnisitas sehingga konsep ini mempunyai dimensi politis seperti yang diungkapkan oleh Epstein (1978) bahwa : "*ethnicity is essentially a politics phenomenon, involving a struggle for power among ethnic groups in defence of their collective interest.*" Dari pengertian yang dikemukakan Epstein tersebut etnisitas terkait dengan aspek kekuasaan yakni bagaimana memperebutkan suatu posisi dalam rangka meraih keuntungan. Olehkarena itu, etnisitas adalah *latent*, menunjukkan ekspresi perasaan primordial yang lama tersumbat dan sekarang dibangkitkan kembali atau merupakan suatu strategi terpilih oleh pihak yang dirugikan sebagai suatu model politik yang diterapkan. Dalam kompetisi memperebutkan posisi, etnisitas itu direalisasikan oleh politik karena dapat mengklaim suatu posisi atau suatu keuntungan tertentu (Bell dalam Glazer dan Moynihan, 197 : 168-169).

Beberapa penelitian dapat dikategorikan dalam perspektif itu adalah Stockwell (dalam [http://www.grofman:stockwellpaper\\_CSD](http://www.grofman:stockwellpaper_CSD)) yang mengamati proses demokratisasi di Guyana. Stockwell menemukan bukti bahwa dalam proses demokratisasi, elite di Guyana memainkan kartu etnik yang ditandai oleh penonjolan etnik, yang kemudian digunakan untuk mengakomodasi dan mengkonstruksi rezim atas dasar etnik.

Snyder (2000) mengulas bagaimana peran elite dalam merekayasa konflik etnik untuk membelokkan demokratisasi. Snyder mengemukakan bahwa ruang demokratis yang sudah terbuka ternyata diisi bukan oleh demokrat tulen tetapi oleh antidemokratis untuk membelokkan tuntutan rakyat akan demokrasi. Sama dengan Snyder, Diamond dan Platner (1998) menemukan bahwa para politikus memanfaatkan konflik etnik demi keuntungan politik mereka secara langsung. Konflik yang ada bukan ledakan baru dari 'kebencian masa lalu', tetapi ciptaan para politikus yang mengira bahwa mereka dapat memperoleh kekuasaan dengan suatu cara pemujaan monoteistik. Dengan pembahasan yang sama, Wilson (dalam Christie, 1998: 108--127), menemukan bahwa konflik yang berkepanjangan di Srilanka karena adanya manuver dari kelompok etnik Sinhala terutama kelompok *power elites* yang didukung kelompok-kelompok militan, kelompok lobby, birokrat, elemen-elemen feodal, orang-orang yang frustrasi karena tidak memperoleh pekerjaan.

Beberapa ilmuwan juga pernah melakukan penelitian di Indonesia yang menelaah perspektif di atas adalah Liddle (1970), Harvey (1984), Bahar (1997), dan Klinken (2001). Liddle (1970) menemukan bahwa masalah integrasi nasional di Indonesia pada dasarnya menyangkut loyalitas etnik.

Di samping itu, Bahar (1997) melakukan penelitian bagaimana kaitan elite dengan etnisitas. Dengan melakukan pengamatan terhadap figur Soekarno dan Soeharto, ditemukan bahwa Soekarno tidak mampu memperoleh loyalitas dari etnik Minangkabau, sementara Soeharto mampu memperoleh dukungan dari etnik Minangkabau. Bahar berusaha menganalisis dan menginterpretasikan faktor-faktor yang melatarbelakangi pemberontakan etnik Minangkabau di daerah Sumatra Barat pada 1958-1961 selama masa jabatan Soekarno, serta dukungan mereka terhadap kebijaksanaan pembangunan Soeharto sejak 1969. Bahar berkesimpulan bahwa ada kaitan antara elite dengan etnik.

Klinken (dalam Nordholt dan Abdullah, 2000: 24–41) yang melakukan penelitian di Kalimantan Tengah menemukan bahwa elite politik memanfaatkan etnisitas sebagai kendaraan politiknya. Organisasi LMDD-KT dapat dikatakan menjadi kekuatan politis riil di balik layar, sehingga membuat dunia kepartaian di tingkat lokal menjadi tak tertandingi. Prof. Usop, Ketua LMDD-KT pada pemilihan gubernur di Kalimantan Tengah pada Januari 2000 hampir menang dalam pemilihan tersebut. Gagal menjadi Gubernur, Usop dengan LMDD-KT tak henti-hentinya melancarkan serangan terhadap Gubernur Asmawi. Klinken menemukan bukti bahwa simbol-simbol etnik yang dimainkan elite politik pada tingkat lokal sangat merusak tatanan negara. Aliran uang, komunikasi, wewenang seluruhnya informal dan tidak kasat mata. Di bidang politik, elite politik sering memobilisasi massa untuk kepentingan kelompok dengan simbol-simbol etnik. Di bidang penegakan hukum, elite tersebut mengadakan lobi tingkat tinggi agar pelaku-pelaku kekerasan dilepas saja dengan ancaman akan ada tindakan perlawanan dari masyarakat lokal.

sebagai realitas objektif dan mempunyai sudut pandang yang sama yakni adanya proses demokratisasi yang gagal. Dalam asumsi Stockwell, hal itu disebabkan elite yang memainkan kartu etnisitas, kemudian mengkonstruksi rezim otoritarian atas dasar etnik. Sementara itu, Snyder, Wilson, serta Diamond & Plattner memandang bahwa kegagalan proses demokratisasi karena ruang demokratis dimanfaatkan oleh elite-elite yang tidak demokratis. Tulisan tersebut berusaha membuktikan bahwa hubungan antara elite dengan etnisitas bersifat struktural dan atas dasar realitas objektif. Berbeda dengan argumen penulis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hubungan elite politik dan etnisitas yang bersifat kultural yang berakar pada pemahaman elite untuk merespons isu etnisitas.

Klinken melihat hubungan antara elite dan etnisitas dengan menguraikan cara elite dalam mengelola atau mempertahankan kekuasaan, dengan 'memainkan kartu' etnisitas. Uraian Klinken lebih menitikberatkan faktor struktur politik yakni reformasi dan tidak masuk lebih 'ke dalam', mengapa elite politik melakukan tindakan seperti itu.

Seiring dengan transisi demokratisasi di tingkat lokal, muncul suasana yakni politik lokal yang diwarnai oleh perilaku elite politik yang memanfaatkan etnisitas. Setidaknya, ada beberapa respons yang diberikan oleh elite politik lokal berkaitan dengan etnisitas di Kendari, yaitu 'nilai' etnisitas itu sendiri dan pemanfaatannya dalam perilaku politik mereka.

Dengan cara pandang seperti itu, asumsi-asumsi peneliti sebelumnya bahwa etnisitas adalah hanya sebatas menunjukkan batas-batas kultural suatu kelompok etnik, dan sifatnya immaterial saja, kiranya perlu ditinjau kembali. Hal itu dikarenakan etnisitas 'menyediakan' fasilitas sebagai sumber jaringan

dan alat efektif untuk memobilisasi massa itu bersifat material, dan tentunya hal tersebut mempengaruhi cara bertindak para elite politik di tingkat lokal.

Upaya pemanfaatan etnisitas tersebut akan dapat lebih dipahami jika ditelusuri melalui konstruksi sosial karena dapat menganalisis proses itu sehingga bisa terjadi (Berger dan Luckman, 1990: 1). Penelitian ini mencoba mencermati ranah kesadaran diri tindakan dan konstruk elite atas dunianya. Secara lebih rinci perdebatan tersebut dapat digambarkan dalam tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3  
Peta Teoretis dan Penelitian yang Digunakan

Peneliti/Penulis, Tahun	Judul	Temuan
	<i>Perspektif instrumentalist</i>	
William Liddle, 1970	<i>Ethnicity, party and national integration: an Indonesian case study</i>	Sentimen dan loyalitas etnisitas diarahkan oleh kelompok kekerabatan sehingga semua aspek kehidupan sosial, yaitu tempat tinggal, pendidikan dan kesempatan bekerja, keyakinan dan praktek religius, organisasi politik terpengaruh oleh persepsi perbedaan-perbedaan etnik.
Barbara Sillars Harvey, 1984	<i>Pemesta: Pemberontakan Setengah Hati</i>	Elite lokal memanfaatkan etnisitas guna memperoleh dukungan dari rakyat terhadap pemberontakan pemesta.
Safruddin Bahar, 1997	<i>Elite dan etnik serta negara nasional</i>	Ada beberapa hubungan antara pemerintah pusat dengan etnik yakni pertama ada kebijaksanaan pemerintah pusat berupa kebijaksanaan kebudayaan, kelembagaan dan keadilan sumber daya, kedua, reaksi etnik terhadap kebijaksanaan elit dapat berupa tuntutan partisipasi maupun separatisme; ketiga, reaksi pemerintah pusat terhadap reaksi etnik berupa rekonsiliasi, menindasnya dan mengabaikannya saja.
A. Jeyaratnam Wilson, 1998	<i>Tribalism and elites in a democratic state: the case of Sri Lanka</i>	konflik yang berkepanjangan di Sri Lanka karena adanya manuver dari kelompok etnik Sinhalese terutama <i>power elites</i> Sinhalese

Laary Diamond & Marc F Plattner, 1998	<i>Nasionalisme, konflik etnik dan demokrasi</i>	yang didukung kelompok-kelompok militan, kelompok lobby, burokrasi, elemen feodal, orang-orang yang frustrasi karena tidak memperoleh pekerjaan. Para politikus memanfaatkan konflik etnik demi keuntungan politik mereka secara langsung. Konflik yang ada bukan ledakan dari dari "kebencian masa lalu", tetapi ciptaan para politikus demi memperoleh kekuasaan
Robert Stockwell, 2000	<i>Democracy and Ethnic Conflict: A Comparative Analysis of Fiji, Guyana, Mauritius dan Trinidad</i>	Elite di Guyana memainkan kartu etnik yang kemudian digunakan sebagai faktor untuk mengakomodasi etnik yang ada dan mengkonstruksi regim atas dasar etnik.
Jack Snyder, 2000	<i>From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict</i>	Elite yang merencanakan konflik etnik untuk membelokkan demokratisasi. Ruang demokratis yang sudah terbuka diisi bukan oleh elite demokrat tulus, tetapi elite anti demokrasi
Gerry van Klinken, 2001	<i>Indonesia's New Ethnic Elite</i>	Elite politik memanfaatkan etnisitas sebagai kendaraan politik
Eka Suaib, 2004	<i>Pemanfaatan Etnisitas oleh Elite Parpol: Suatu Studi Etnisitas dalam Persangan Politik Lokal di Kota Kendari</i>	Perilaku elite politik ditandai oleh membangkitkan etnisitas, sebagai upaya untuk membentuk jaringan antarelite parpol

## 1.2. Permasalahan

Bingkai permasalahan penelitian ini adalah implikasi pertumbuhan politik lokal terhadap elite politik lokal tertentu, yakni elite parpol PDI-P. Adapun fokus penelitian ini adalah memahami kompleksitas hubungan antara elite parpol lokal dengan etnisitas di PDI-P Kendari dengan masalah pokok studi bagaimana perilaku elite parpol yang membangkitkan etnis? Masalah pokok studi ini akan dirinci menjadi dua pertanyaan penelitian sebagai berikut

1. Kriteria apa yang elite parpol gunakan dalam menggolongkan orang lain sebagai satu etnisnya? Mengapa elite parpol memilih kriteria tersebut dan bukan kriteria lain?

kepentingan yang lain. Oleh karena itu, melalui pembahasan ini penulis akan mendapat cara pandang baru tentang etnisitas.

2. Dapat lebih memahami strategi elite dalam membangkitkan etnisitas. Selama ini di kalangan ilmuwan sosial, pembahasan tentang etnisitas hanya berfokus pada kebudayaan yang dimiliki suatu etnis saja. Padahal dalam konstruksi etnisitas ada peran elite melalui membangkitkan. Oleh karena itu, dari studi ini penulis akan melihat perilaku elite yang membangkitkan etnisitas sehingga secara teoretis penelitian ini diarahkan untuk turut menyumbangkan khazanah pemikiran dalam bidang etnisitas, khususnya dalam perspektif *"instrumentalist constructed ethnicity"*. Menurut perspektif ini, etnisitas terbentuk karena ada pihak yang mengkonstruksinya. Etnisitas terbentuk karena para elite politik lokal yang memompakan kepada anggota pengikutnya dengan memanfaatkan warisan primordial walaupun itu dilakukan dalam suatu lingkungan yang bercorak nasionalisme. Dalam hal ini, tindakan aktor dikembangkan dalam perspektif *political behavior* – dalam konteks penelitian ini yang berkaitan dengan pembentukan jaringan.

### 1.3.2.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memahami tindakan-tindakan elite politik, terutama bagaimana mereka merepresentasikan etniknya dalam suatu arena kekuasaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar merumuskan kebijakan publik yang tidak diskriminatif. Sementara bagi etnik asli, informasi penelitian ini diharapkan dapat melahirkan strategi-strategi seputar representasi dan

atas dasar warna kulit, bahasa, dan kepercayaan. Berbeda dengan Hertzberg, Rudolf (1986: 2) melihat faktor batas-batas wilayah dalam sistem politik tertentu sebagai pertimbangan utama. Jadi, walaupun orang tersebut berbeda warna kulit dan bahasa, tetapi jika ia berdiam dalam satu wilayah tertentu, maka ia sudah dapat dikatakan satu etnis. Dari tinjauan psikologi, seseorang dikategorikan suatu etnis apabila (a) siap secara mental untuk berkorban baik untuk kepentingan etnisnya maupun untuk dirinya sendiri, (b) orang yang bergabung dalam kelompok etnis cocok dan dapat dipercaya oleh anggota kelompok etnis yang lain ( Hogg& Mullin, 1999 dalam E. Hale, 2004: 473).

Walaupun ada perbedaan dari berbagai sudut pandang, tetapi pada dasarnya pendapat di atas mempunyai satu persamaan yakni predikat etnis tersebut diperoleh begitu saja, *taken for granted*. Terhadap hal ini Rex (1994: 8) mengungkapkan bahwa kategori suatu etnis adalah suatu kategori yang diterapkan pada kelompok dalam kebersamaan dan kolektivita. Lazimnya, berdasarkan kategori dan ciri-ciri umum, umat manusia dikelompokkan ke dalam berbagai ras. Bila ras tersebut dikaitkan dengan kebudayaan mereka, maka terbentuk kelompok etnis. Setiap manusia pasti menjadi salah satu ras dan kelompok etnis.

Lebih jauh lagi Naroll (dalam Barth, 1988: 1) mengasumsikan suatu kelompok etnis sebagai suatu populasi yang mempunyai empat ciri berikut : (1) secara biologis mampu berkembang biak, (2) mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan kebersamaannya dalam suatu bentuk budaya, (3) membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, dan (4) menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain. Dari asumsi tersebut terlihat bahwa

kebanyakan. Sensus yang diperkenalkan oleh Belanda menunjukkan dan mengkategorikan mereka berdasarkan pada kualifikasi etnis dan ras tersebut.

Statistik kolonial juga menyebut kategori agama yang lambat laun diidentikkan dengan soal etnisitas. Hal ini seperti yang ditulis oleh Anderson (dalam Baso, 2002: 42–43) bahwa hal itu dibuat untuk membangun aliansi bersama, aliansi “mayoritas asing” berhadapan dengan mayoritas lainnya di tanah jajahan, yaitu “mayoritas pribumi”. Mayoritas asing terdiri atas orang-orang yang dianggap nonpribumi, yakni orang Eropa, Cina sebagai komunitas Kristen, sementara orang pribumi dengan Islam, Hindu, dan Budha. Lalu, tidak lama kemudian menyebut komunitas Maluku umpamanya diidentikkan dengan Kristen sebagai sebuah etnis. Orang Bali identik dengan identitas ke-Hinduannya. Juga disusun dan dipilah-pilah orang-orang gunung yang non-Islam, seperti orang-orang Papua, Batak dan Dayak. Dalam kerangka aliansi bersama ini, representasi etnisitas itu dibangun, dibuat, dan diracik, yang diambil oleh Belanda dari masing-masing kelompok anasir-anasir kaum bangsawan dan unsur-unsur kolaborator lainnya.

Racikan etnisitas kemudian diproduksi lagi oleh kalangan “mayoritas pribumi” menjadi konstruksi baru tentang “mayoritas-minoritas”. Mayoritas asing versi Belanda, berkulit putih, Cina, orang-orang gunung, dan bukan Islam, sudah tersingkir bersamaan dengan berakhirnya kolonialisme. Yang tersisa kini yakni mayoritas pribumi yang “Islam” yang pada saat kolonial melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pribumi yang Islam pun menjadi “kartu as” guna membangun administrasi negara, dan juga memilih presiden dengan label “orang Indonesia asli”.

Fungsi etnis ada dua yakni eksternal dan internal. Secara eksternal etnis secara intrinsik merupakan sumber potensi yang sangat efektif dalam menggerakkan massa untuk menggalang integrasi sosial. Di sini etnis menjadi penegas identitas kelompok "kita" dan "mereka". Kelompok "kita" dibenarkan dan kelompok "mereka" ditidakbenarkan. Identitas "kita", "mereka" yang membutuhkan legitimasi, dan dikembangkan dalam narasi besar dan diperkukuh dalam bentuk-bentuk ekspresi etnis seperti kekhasan nama, arsitektur, bahasa, dan dialek yang berbeda. Fungsi etnis yang seperti itu, dan ekspresi yang menopangnya berlangsung dengan beberapa cara, misalnya dengan membangkitkan (*revival*) yang menunjukkan situasi-situasi khusus di mana penggunaan etnis dapat dibenarkan.

Sementara itu, secara internal etnis berfungsi untuk menjaga integrasi, memperkokoh, dan menjaga kesinambungan budaya suatu kelompok. Hal itu dapat terjadi karena didalam kelompok etnis terdapat jaringan hubungan persoalan yang padat yang sebagian besar didasarkan pada kekerabatan dan pada kontak langsung, tatapan muka yang terjadi di sebuah komunitas. Norma-norma yang berlaku di dalam kelompok etnis itu sebagian besar tidak tertulis, dan individu diikat satu dengan yang lain dalam jaringan kesalingterghantungan yang menyentuh seluruh kehidupan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis kemudian memberi dua makna etnisitas. *Pertama*, etnisitas sebagai suatu model pembacaan dalam kaitannya dengan relasi sosial. *Kedua*, etnisitas merupakan kategori politik identitas yang memainkan sejarah yang panjang. Dalam makna pertama, etnisitas itu merupakan hal yang menyejarah dari masing-masing etnis, asal usul, dan sebagainya. Dalam makna kedua, etnisitas berfungsi sebagai penegas "kita",

“mereka”. Orang Jawa bukan Madura, Batak, Bugis, Dayak dan lainnya. Demikian pula ada budaya etnik tertentu, seperti “*siri*” sebagai ciri khas budaya Bugis-Makassar, *kalawara* sebagai simbol budaya etnik Tolaki, dan lain-lain.

## **B. Etnisasi Kebijakan Publik**

Dalam masyarakat majemuk, preferensi etnik menjadi cirikhas dari kompetisi politik yang terjadi. Ini berarti setiap komunitas kultural yang memasuki arena politik akan selalu membawa serta nilai-nilai kultural mereka masing-masing. Inilah yang kemudian memunculkan salisi etnik (menonjolkan etnik), yang kurang lebih melihat sesuatu dengan sudut pandang kepentingan etniknya yang terpenting. Salah satu ciri dari masyarakat majemuk, etnisitas sangat penting karena menjadi basis utama dari alokasi otoritatif nilai dalam masyarakat majemuk. Dengan kata lain, etnisitas merupakan dasar utama “alokasi nilai-nilai pengikat”. Mengutip Geertz (1963), Rabushka dan Shepsle berpendapat bahwa jaringan aliansi primordial dan oposisi bersifat mendalam, rumit namun diartikulasikan secara presisi, yang merupakan produk kristalisasi secara perlahan.

Dalam karyanya yang berjudul *Politics in Plural Societies*, Rabushka dan Shepsle (1972: 63—64) menyatakan bahwa dalam masyarakat plural, isu-isu menjadi penting secara politis karena para politisi dan pemimpin komunitas menganggapnya demikian. Dalam bukunya, ia mengemukakan bahwa etnisitas seringkali mendominasi konflik politik dalam masyarakat di mana komunitas etnik terorganisasi secara politis, dan kelompok didalamnya

memiliki sejarah yang permanent dan terpisah, institusi sosial, budaya dan praktek-praktek yang terpisah, juga kepemimpinan yang terpisah.

Lebih lanjut lagi, dasar territorial tatanan kelompok ini, dan homogenitas cultural konstituensi mereka, menyebabkan perlunya diambil langkah komunal untuk *survive* elite mereka. Ini kemudian mengarah pada seruan sentiment komunitas yang membedakannya dari kelompok lain yang berkompetisi. Bila beberapa komunitas demikian digabungkan dalam satu entitas politik tunggal setelah terbentuknya negara modern dalam era pascakolonial, adalah hal yang alami bahwa politisi lokal menggunakan komunitas mereka sebagai dasar.

Pertanyaannya kemudian, mengapa konflik dalam masyarakat mejemuk tidak diorganisir berdasar hal lain selain etnisitas? mengapa para politisi, dalam berusaha mengendalikan definisi alternatif politik, seringkali menggunakan etnisitas? Sebagian penjelasan dari pilihan ini menurut Rabushka dan Shepsle adalah keberadaan sumberdaya dan organisasi untuk mobilisasi, yang bermanfaat untuk kepentingan politik dengan menggunakan isu etnik. Jadi, politik menjadi masalah penting "dengan memperhatikan fakta bahwa kelompok-kelompok komunal biasanya lebih mudah terorganisir untuk aksi-aksi politik dan lebih mampu mempertahankan usahanya dibandingkan kelompok-kelompok penekan lainnya". Politik dalam masyarakat demikian, menurut penjelasan ini, secara alami mengikuti "garis etnik"

Berdasarkan argumentasi demikian, Rabushka dan Shepsle memaparkan apa yang mereka sebuat sebagai paradigma politik dalam masyarakat plural untuk menjelaskan lebih lanjut mengapa setelah runtuhnya rejim otoriter, proses transisi menuju demokrasi dalam masyarakat demikian

merupakan arah yang sukar ditempuh. Mereka menjelaskan lima ciri utama masyarakat plural : (1) kerjasama etnik pada masa kemerdekaan; (2) ambiguitas kerjasama etnik pada masa pasca-kemerdekaan; (3) timbulnya tuntutan dan semakin menonjolnya etnisitas; (4) kalahnya koalisi multietnis; dan (5) kecenderungan dan ketidakpercayaan dalam pemilihan umum.

Dengan meneliti pengalaman historis berbagai masyarakat plural untuk menjelaskan ciri pertama, Rabushka dan Shepsle menemukan ciri umum, *pertama*, keberadaan kerjasama etnis pada tingkat elite pada masa prakemerdekaan, yang diikuti masalah dalam memelihara koalisi multietnik ini dalam masa kemerdekaan. Pada masa kolonial, kelompok etnik tidaklah saling bersaing satu sama lain, karena mereka bersama-sama berkompetisi dengan musuh bersama. Keberadaan pemerintah penjajahan memberikan dorongan untuk kerjasama antar etnik dan kurangnya perhatian pada perbedaan antar etnik. Kelas menengah pribumi, yang menderita di bawah pemerintahan penjajahan sangat menyadari kesempatan yang ditutup bagi masyarakat pribumi. Meskipun massa pribumi pada umumnya mampu merasionalisasi semua ketidakadilan yang mereka alami dalam masa kolonial, tidak demikian dengan kelas menengah. Anggota kelas menengah jadi memiliki insentif untuk bekerjasama satu sama lain untuk menjadikan eksploitasi asing menjadi sedemikian mahal dan kurang berhasil.

Ketika kemerdekaan tercapai atau berada di depan mata, koalisi multietnis yang mendominasi perjuangan kemerdekaan menjadi terancam. Masa kemerdekaan menyaksikan usaha untuk memelihara koalisi multietnis yang terlalu besar ini. Alasannya relatif sederhana. Setelah kemerdekaan, isi perpolitikan adalah distribusi, sementara kekuatan kolonial (atau ekuivalennya)

menjadi semakin menonjol. Keterbatasan sumber daya, selain inkompatibilitas lain yang lebih serius, berarti bahwa kepentingan kelompok tertentu dipenuhi, sementara yang lain tidak. Fakta bahwa pemerintah menjadi kekuatan pribumi yang makin penting dalam alokasi sumber daya yang terbatas itu menjadikan masalah semakin parah.

*Kedua*, peningkatan konflik etnis, adalah ukuran koalisi multietnis yang terlalu besar. Dalam situasi seperti itu, kriteria etnis seringkali dijadikan alasan untuk menentukan siapa yang tersingkir dan siapa yang bertahan. Beberapa kejadian dari para politisi dengan basis massa dari etnik sering kali menjadi katalis dalam menggerakkan proses ini. Para pemimpin etnik, yang disingkirkan dari koalisi multietnik, atau yang komunitasnya diabaikan secara sistematis, akan mendapatkan insentif untuk "mengetnikkan" politik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa preferensi etnik menjadi ciri khas dari kompetisi etnik dalam suatu masyarakat majemuk. Ini berarti setiap komunitas kultural yang memasuki arena politik akan selalu membawa serta nilai-nilai kultural mereka masing-masing. Inilah yang disebut dengan etnisisasi kebijakan publik yang kurang lebih melihat sesuatu dengan sudut pandang kepentingan etniknya yang terpenting. Etnisitas menjadi basis utama dari alokasi otoritatif nilai dalam masyarakat.

#### **1.4.1.2 Politik Elite dan Patronase**

Literatur ilmu sosial yang membahas tentang elite cukup banyak. Dari sejumlah teori elite selama ini, Usman (1990: 2) menggolongkan dalam dua perspektif yakni perspektif elitis dan perspektif pluralis. Perspektif elitis, seperti yang dipelopori oleh Pareto, Mosca, Michells, dan Mills menganggap

bahwa di setiap masyarakat ada sekelompok orang yang terpilih menempati fungsi-fungsi atau posisi-posisi penting dalam organisasi. Mereka dikategorikan sebagai kelompok kunci yang memiliki wewenang dan dipercaya menjaga organisasi terutama dalam kegiatan merencanakan, mengelola, mengerahkan, dan mengontrol program yang dicanangkan. Mereka itu, Pareto dan Mosca menyebutnya dengan *governing elite* dan *non governing elite* (Usman, 1990: 6).

Menurut Pareto, cara yang dilakukan *the governing elite* dalam mengontrol massa adalah dengan kecerdikan dan kelicikan. Dalam hal ini Pareto menegaskan bahwa ada dua sumber kekuatan besar dalam aktivitas manusia yaitu perasaan sentimen dan perhatian. Dalam usaha untuk mengabsahkan kekuasaannya atau merasionalisasikan penggunaan kekuasaan mereka, elite-elite itu melakukan dengan penuh kekerasan (*the application of violence*) dan dengan penuh tipu daya (*by fraud*). Untuk cara yang pertama, para elite mengerahkan segala macam kekuatan fisik yang dimiliki sekaligus melakukan persuasi moral dan intelektual. Adapun untuk yang kedua para elite menggunakan kecerdikan yang dimiliki sedemikian rupa sehingga massa rela menuruti kehendaknya.

Sementara itu, uraian Mosca mempunyai kemiripan dengan uraian Pareto. Berbeda dengan Pareto yang dalam analisisnya semata-mata hanya menekankan berpengaruhnya faktor-faktor psikologis, Mosca dalam analisisnya mulai memperhatikan berperannya faktor-faktor struktural dan organisasional, di samping tetap memperhitungkan karakteristik personal. Menurut Mosca, kelompok elite dapat lestari berkuasa karena memiliki kelebihan, relatif terorganisasi, kontak dan jaringan antarmereka terpelihara.

Dari uraian Mosca tersebut, tampak ada tiga elemen yang menyertai eksistensi kelompok elite yakni (1) organisasi, (2) atribut personal, dan (3) kekuatan-kekuatan sosial. Elemen-elemen tersebut berkombinasi sedemikian rupa sehingga membuat kelompok elite terusmenerus berada pada puncak hierarkhis. Ada satu lagi elemen lagi yang menurut Mosca membuat kelompok elite mampu memelihara dan mempertahankan kekuasaannya yaitu ideologi kelas yang disebutnya *a political formula*. Ia menjelaskan masalah ini sebagai : “no political class, however constituted, will say outright that it rules because ... its members are the ones must fit to rule. Instead, that class will always try to justify its power on the ground of an abstraction which we shall call the *political formula*” (Mosca dalam Merger, 1987: 55). Meskipun *political formula* ini adalah ideologi yang dipergunakan untuk melestarikan dominasi elite, eksistensinya dalam masyarakat tidak dipaksakan. Sebaliknya, justru ideologi tersebut merupakan kebutuhan nyata, yang diyakini memiliki fungsi positif bagi upaya memelihara struktur dan distribusi kekuasaan.

Asumsi dari kaum elitis ditentang oleh kaum *pluralist* yang memandang bahwa kekuasaan berkonsentrasi pada sekelompok kecil elite. Dengan dipelopori oleh Robert Dahl, kaum ini berpandangan bahwa politik pada hakekatnya melibatkan kompetisi antara bermacam-macam kelompok kepentingan. Oleh karena setiap kelompok kepentingan memiliki kelemahan sekaligus keunggulan, maka dalam perjalanan politik sebenarnya tidak ada satu pun kelompok kepentingan yang dominan (Usman, 1990: 25). Kaum ini percaya bahwa kekuasaan tersebar merata ke berbagai macam kelompok kepentingan.

untuk menyuarakan kepentingannya, sedang *client* tergantung dalam hal otoritas dan wewenang yang dimiliki oleh elite

Pada masa-masa "normal", tatanan *patron-client* ini relatif stabil. Dominasi elemen-elemen aristokratik dalam berbagai bentuknya di semua lingkup pemerintahan, terutama di wilayah-wilayah yang dahulu diperintah secara tidak langsung di luar Jawa, mungkin merupakan faktor penjelas mengapa Golkar tetap dominan pada Pemilihan Umum 1999 dan 2004. Dalam pandangan ini, rasa hormat pada mereka dan patronase yang mereka kendalikan, di tempat-tempat di mana terdapat ketergantungan tinggi terhadap pekerjaan dalam sistem kepegawaian mengalahkan preferensi personal di dalam bilik suara (Klinken, 2003: 42).

Namun, hubungan *patron-client* amat rentan terhadap kekerasan pada saat perubahan politik yang cepat. Pengungkapan arus patronase di sekitar jaringan etnik yang tidak tampak ini perlu untuk memahami konflik etnik. Mungkin lebih banyak uang yang mengalir dalam jaringan etnis tersebut daripada dalam anggaran negara.<sup>13</sup> Di semua konflik etnik yang besar setelah runtuhnya orde baru, mantan-mantan elite Golkar menggunakan patronase mereka untuk memobilisasi pengikut menurut garis etnis atau agama. Hal ini bisa dianalisis dengan tajam oleh model Ted Gurr (dalam Klinken, 2003: 42) sebagai "model perseteruan komunal"<sup>14</sup> - dimana elite-elite lokal memobilisasi

<sup>13</sup> Dalam penelitiannya di Kalimantan Tengah, Klinken menemukan bahwa peran asosiasi etnis, setidaknya pada masa konflik etnik telah banyak menggantikan peran partai politik karena aliran uang, komunikasi, dan wewenang lebih banyak diambillah oleh asosiasi etnis tersebut. Uraian lebih lengkap dapat dibaca pada Gerry van Klinken, "Elite Etnis Baru", makalah yang dipersiapkan untuk *Workshop in Transition*, Yogyakarta, 22 Agustus 2001.

<sup>14</sup> Kategorisasi model lainnya yakni etnonasional, masyarakat dapat karena kelas etnik, dan sekte religius militan.

yang ada dalam kelompok itu kemudian memunculkan adanya kubu etnis sehingga melahirkan kesadaran akan kebersamaan (*consciousness of kind*).

Kesadaran seperti itu merupakan kesadaran identitas paling dasar, yang akan mendahului segala macam bentuk identitas lainnya, seperti identitas personal, kelas, partai politik, warganegara dari sebuah negara. Identitas ini merupakan sesuatu yang diterima apa adanya tanpa ada yang bisa menolaknya (Isaacs, 1975: 8). Karena sifatnya yang melekat dalam kesadaran setiap individu, maka sentimen primordial selalu mempengaruhi setiap bentuk pengelompokan sosial, baik ekonomi, politik, dan kebudayaan.

Secara operasional, perspektif *primordialist* diterangkan Parsons (dalam Henry, 1976: 380) etnisitas mempunyai "*pattern variables, roles are based on ascription, particularism, diffuseness, collectivity orientalism and affectivity.*" Hampir mirip dengan Parson, Eller (1999: 78--79) mengungkapkan etnisitas membawa tiga atribut yakni *apriority, ineffability, dan affectivity*. *Apriority* menjelaskan bahwa etnisitas diterima atau diperoleh berdasarkan karakteristik yang dibawa sejak lahir. *Ineffability* berarti etnisitas diterima tanpa ekspresi, tidak dapat dijelaskan, menyergap, dan koersif pada kekuatan sosial. *Affectivity* berarti etnisitas sebagai dasar emosi, sentimen, kelahiran, tali persahabatan, dan kasih sayang.

Pendekatan etnisitas sebagai *primordialist* menekankan sikap setiap etnik yang sangat ketat dalam mempertahankan nilai kelompok etnik sebagai sesuatu yang terbaik dibandingkan dengan kelompok lain. Keterikatan itu memperkuat rasa kita (*in group*) dan selalu berprasangka negatif terhadap rasa mereka (*out group*). Tiap-tiap kelompok berkeyakinan bahwa peraturan, tata tertib, dan ajarannya adalah yang paling baik. Sikap itu menimbulkan

oportunistik, dan dibentuk oleh orang-orang tertentu. Akibatnya aktor-aktor yang aktif dalam suatu hubungan dan kebudayaan tidak hanya diterima begitu saja tetapi juga mengkonstruksinya ke dalam dunia sosial mereka sesuai dengan alam pikiran, norma estetika, dan simbol-simbol kebudayaan (Delanty dalam Ritzer dan Smart, 2001: 472)

Perspektif *instrumentalist* memandang etnisitas sebagai sesuatu yang membantu individu dan kelompok, khususnya kepentingan elite dan institusi untuk kekuasaan. Biasanya hal itu digunakan pada saat kelompok minoritas yang berada pada posisi *extremely poor* dan/atau *powerless* sehingga membutuhkan suatu *privileged*, yang dalam hal ini individu-individu dalam kelompok itu direkrut guna promosi yang lebih tinggi. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa isu etnisitas merupakan respons terhadap perlakuan pilih kasih.

Perspektif *instrumental* ini dimulai dengan mengobservasi keanggotaan dalam kelompok sosial dan kemudian membandingkan dengan kultur luar. Ini diperlukan sebagai upaya untuk agregasi kesadaran sehingga mempunyai relevansi dengan ideologi dan politik. Dalam antropologi dan sosiologi, kebangkitan etnisitas dapat dijelaskan sebagai suatu respons dari tekanan situasi kelompok dominan lain, dan juga upaya defensif dari suatu kelompok. Persepsi "mereka" mencerminkan pengembangan dari konsep "kita".

Kaum *instrumentalist* berpandangan bahwa etnisitas merupakan upaya dari elite untuk merespons, memiliki sikap pragmatis, dan merasionalkan lingkungan. Etnisitas bagi kaum *instrumentalist* adalah sesuatu yang tidak alamiah. Hal itu merupakan sumber politik sebagai sarana untuk kohesi bagi orang yang akan dipromosikan guna memfasilitasi artikulasi politik dari



tidak seimbang. Pandangan Gellner pada intinya tidak berbeda dengan Hechter, namun berbeda dalam penekanan saja. Gellner menekankan perbedaan kultural harus tajam, sedangkan Hechter menekankan ciri-ciri kultural bisa menjadi dasar penyingkiran. Hechter mengabaikan kaitan-kaitan temporal yang pasti antara mobilisasi etnis dengan periode-periode industrialisasi. Dalam pandangan Gellner, industrialisasi memperdalam sentimen etnis nasional jika tidak segera terjadi asimilasi. Namun, Hechter berpandangan bahwa potensi mobilisasi etnis bisa tetap laten selama beberapa dasawarsa berjalannya industrialisasi, yang akan bangkit hanya oleh faktor-faktor politik dan ekonomi tertentu.

Sementara Mughan (1973: 307) mengemukakan pandangannya bahwa :

Dalam arti luas, bangkitnya etnisitas berasal dari ketidakkonsistenan status karena pembalikan-pembalikan yang terjadi dalam pola-pola modernisasi yang telah mapan. Sementara itu pendistribusian sumber-sumber kekuasaan adalah penjelasan utama bangkitnya konflik etnis yang berdasarkan penyingkiran dewasa ini.

Lebih jauh Mughan memilih dua faktor utama yang mempengaruhi terwujudnya redistribusi sumber daya menjadi konflik politik. Pertama, kemunculan – yang belum pernah terjadi sebelumnya – para pemimpin yang rela bekerja untuk pembaruan di luar orbit partai-partai politik yang sudah mapan di negara masing-masing. Kedua, kecenderungan sekuler yang mendarah daging dalam proses modernisasi itu sendiri dan telah membantu mengikis pentingnya kantong-kantong yang sebelumnya membungkam pemilahan etnis dalam masyarakat (Mughan, 1973: 306).

Penjelasan Mughan mengenai bertahannya identifikasi etnis sesuai dengan pandangan Hechter, kecuali kecenderungan pandangan Mughan yang menekankan pentingnya peranan kepemimpinan daripada pandangan Hechter

akibat proses globalisasi yakni ada keinginan dari suatu komunitas untuk mengekspresikan aspirasi, tempat, dan keinginannya pada aras lokal

Depres (1975: 41) dan Horowitz (1971: 78) merupakan dua ilmuwan yang dapat dikategorikan ke dalam perspektif ini. Dalam studi-studi yang dilakukan mengenai konflik-konflik di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, mereka berpendapat bahwa konflik disebabkan karena adanya persaingan etnis atas sumber-sumber dan posisi-posisi yang langka dalam suatu masyarakat. Melalui mekanisme itu penduduk yang termobilisasi akan terpolansasi secara politik berdasarkan garis-garis etnis. Dalam beberapa hal, perspektif ini sama dengan perspektif etnisitas reaktif.

Argumen dasar yang mendasari pandangan ini adalah keterikatan etnis menjadi penting ketika kelompok-kelompok etnis bersaing untuk peran-peran dan sumber-sumber yang sama. Menurut perspektif ini, hubungan etnis akan stabil apabila kondisi kelompok-kelompok etnis tersebut beragam. Dalam hal ini pembagian kerja fungsional masing-masing kelompok menempati posisi struktural yang berbeda, atau apabila mereka terpisah secara teritorial

Persoalannya sekarang bukanlah terletak pada kebangkitan etnis yang memberi peluang bagi elite untuk melanggengkan kekuasaannya, akan tetapi elite itu "mengatur" etnisitas demi kehendak untuk mendapatkan pengikutnya. Lebih dari apa yang dikatakan Keller (1985: 153), elite strategis sebagai simbol dan agen kolektif yang memakai aspek instrumental seperti etnis dan agama sebagai usaha menampilkan peranan ke-elitannya, agar publik terkesan terhadap apa yang mereka buat. Dalam kognisi, elite dianggap sebagai ahli, berwenang menentukan dan cara mencapai tujuan, dan dalam moral mereka menjadi standar

Karena itu, elite membangkitkan etnis agar ia tetap berkuasa. Etnisitas dibangkitkan oleh elite dalam berbagai aspek, mulai dalam organisasi sosial politik, birokrasi sampai pada pemilihan presiden. Dalam organisasi sosial politik, dapat dilihat dari keberhasilan partai bernuansa etnik, seperti *One Nation Party* (ONP) pimpinan Pauline Hanson, yang meraih 10 kursi di Parlemen Negara Bagian Queensland, dan 3 kursi di Senat Federal Australia.

Kasus membangkitkan yang dilakukan oleh elite menunjukkan bahwa etnisitas hadir dalam arena parpol. Sebagai gambaran, berikut adalah kutipan pernyataan Pauline Hanson sebagai pimpinan *One Nation Party* dalam sebuah kampanye. *So you can make up your own minds on whether I'm simplistic or not in what my views are. But I believe that things need to be changed. They say, 'oh, she wants to go back to the 50s and 60s'* (Kingstone dalam Manne, 1998: 104). Para pendukung partai ini pun seolah membenarkan dengan penuh semangat kebijakan berorientasi etnik yang ditempuh oleh *One Nation Party*.

Birokrat juga memembangkitkan etnisitas. Fenomena umum dari birokrasi-birokrasi di dunia modern tetap mencerminkan adanya representasi berlebih dari kelompok-kelompok rasial, bahasa dan agama yang dominan di suatu negara. Hal itu tampak jika dilihat melalui struktur birokrasi di tingkat nasional dengan fokus perhatian pada posisi-posisi kunci. Data yang dikumpulkan Peters (1978: 102) menunjukkan bahwa di AS, Kanada, Israel, Malaysia, dan India kelompok-kelompok etnis dominan menguasai antara 67% sampai 87% posisi-posisi kunci birokrasi pada tingkat nasional.

Masih menurut Peters, birokrasi di Amerika Serikat, para kelompok-kelompok minoritas etnik berjuang melalui saluran-saluran politik untuk memperoleh porsi dalam posisi-posisi birokrasi. Perjuangan politik

mereka tidak terbatas pada bagaimana memperoleh porsi yang lebih besar dalam struktur birokrasi dan institusi politik, tetapi juga secara terang-terangan menyatakan keinginan untuk membebaskan kepulauan Hawaii dari apa yang mereka sebut sebagai “penjajahan” Amerika.

Bagaimana dengan teori tersebut jika dipakai dalam memahami fenomena khususnya dalam menerangkan perilaku elite politik dengan membangkitkan etnik? Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan, penulis mengajukan beberapa pertanyaan penting sebagai pijakan lanjutan untuk membangun kerangka teori. Atas dasar apa elite mempunyai pilihan atas etnisitas?

Untuk menjawab hal tersebut, penulis mengemukakan teori dari Rabushka dan Shepsle (1972: 63) yang mengemukakan bahwa dalam masyarakat plural etnis menjadi penting karena etnisitas mendominasi arena politik di dalam masyarakat di mana komunitas etnis terorganisasi secara politis, dan kelompok di dalamnya memiliki sejarah permanen. Lebih lanjut diuraikan bahwa dasar teritorial tatanan kelompok ini, dan homogenitas kultural konstituensi mereka, menyebabkan perlunya diambil langkah komunal untuk survival para elite mereka.

Hal ini kemudian mengarah pada seruan sentimen komunitas yang membedakannya dari kelompok lain yang berkompetisi. Bila beberapa komunitas demikian digabungkan dalam satu entitas politik tunggal setelah terbentuknya negara modern dalam era pascakolonial, adalah hal yang alami apabila para elite lokal menggunakan komunitas mereka sebagai dasar.

Dengan meneliti pengalaman historis berbagai masyarakat plural, Rabushka dan Shepsle menemukan adanya ciri umum yakni keberadaan

kerjasama etnis pada tingkat elite pada masa kemerdekaan, yang diikuti dengan masalah dalam pemeliharaan koalisi multietnik ini dalam masa kemerdekaan. Pada masa pra kemerdekaan, kelompok etnis tidaklah bersaing satu sama lain dalam menghadapi musuh bersama.

Ketika kemerdekaan telah tercapai, koalisi multietnik menjadi terancam. Alasannya karena setelah kemerdekaan, isi perpolitikan adalah distribusi, sementara kekuatan kolonial tidak lagi menjadi peserta, sehingga hanya ada sesama kelompok pribumi untuk mempertengkarakan "siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana". Situasi politik sudah berubah yang semula persoalan *ekstraksi*, menjadi persoalan *pembagian* antara anggota koalisi yang sudah menang

Menghadapi kebuntuan itu, elite menempuh dua cara. Pertama, elite menciptakan tuntutan untuk isu-isu nasional (bukan komunal) seperti pembangunan ekonomi dan integrasi teritorial. Kedua, memperlakukan isu-isu etnis yang berpotensi memecah belah secara ambigu. Akibat dari cara yang kedua tersebut maka Rabushka dan Shepsle melihat bahwa timbulnya etnisitas sebagai pertimbangan politik yang dominan. Karena loyalitas dalam masyarakat bersifat komunal, bukan nasional, karena isu nasional biasanya berumur pendek, koalisi multietnik pun tidak bertahan lama.

Dalam situasi seperti itu, kriteria etnis dijadikan alasan utama untuk menentukan siapa yang tersingkir dan siapa yang bertahan. Elite etnis yang disingkirkan dari koalisi multietnik, atau yang komunitasnya diabaikan secara sistematis, akan mendapatkan momentum untuk "mengetikkan" politik. Dengan kata lain, sebagai respon terhadap pengurangan perhatian pada

komunalisme oleh koalisi yang berkuasa, para elite yang diabaikan ini memiliki peluang untuk mempropagandakan sentimen etnis.

Setidaknya terdapat empat bentuk perwujudan kebangkitan tersebut. *Pertama*, mewujudkan entitas tersendiri dalam masyarakat industrial yang semakin terintegrasi dan diwarnai oleh birokrasi yang semakin kental. *Kedua*, sumber-sumber keamanan yang dapat dipercaya dan kesempatan material yang lebih besar melalui lembaga ekonomi berdasarkan kelas atau pemerintahan sendiri; *Ketiga*, cara-cara efisien untuk memobilisasi dan mewakili kepentingan perorangan dan kelompok dalam masyarakat modern; *Keempat*, konsekuensi disintegrasi imperium kolonial dan negara-negara yang mempunyai warga negara dengan ras majemuk, yang telah meninggalkan warisan yang eksplosif.

Dalam beberapa kasus representasi etnik ditampilkan secara kental, tawar-menawar biasanya tak terhindarkan. Di Belgia misalnya, ada semacam konsensus untuk memberi posisi di menteri sebagai jatah tetap kelompok-kelompok etnik (berdasarkan perbedaan bahasa). Hal serupa juga terjadi di Australia.

Sehubungan dengan hal itu, Horowitz (dalam Diamond dan Platner, 1994: 43--70) menemukan bahwa pemanfaatan etnisitas terjadi pada perebutan kekuasaan tertinggi di suatu negara, seperti yang terjadi di Kenya. Di negara tersebut, dengan pemerintahan minoritas yang didominasi Kalenjin, Presidennya Daniel Arap Moi, mampu menggunakan panduan intimidasi, kekerasan, dan pemecahan belahan etnik di kalangan oposisi guna memenangkan kursi kepresidenan dan mayoritas parlemen dengan

memenangkan suara dari berbagai kalangan, terutama dari kelompok etniknya sendiri dan kelompok etnik kecil lainnya.

Hasilnya adalah pemerintahan yang terus-menerus menolak keikutsertaan dua kelompok etnis terbesar, yaitu Kikuyu dan Luo. Hal serupa juga dilakukan oleh Paul Biya, Presiden Kamerun, yang memimpin pemerintahan yang didukung oleh kelompok etnik Beti dan Bulu, walau ditentang oleh seluruh komponen etnik lainnya. Sama halnya dengan keberhasilan Slobodan Milosevic dan para sekutu komunis garis kerasnya dapat membangkitkan kesan-kesan kepada rakyatnya tentang adanya ancaman terhadap rakyat Serbia dan perasaan kebencian etnik untuk mengalahkannya dengan kekuatan jumlah suara para lawannya dari partai demokrat Vesna Pesic mengemukakan dalam risalahnya bahwa tragedi Serbia mencerminkan suatu pola regional kaum elite komunis yang "telah memanfaatkan" semua perasaan dan kekhawatiran nasional untuk memenuhi ambisi mereka sendiri.

Bagaimana dengan konteks Indonesia? Liddle (1970) telah menemukan adanya hubungan antara etnisitas dengan organisasi politik. Di awal tulisannya ia menulis denominator umum kehidupan politik di negara baru pasca-kolonial adalah dominannya primordialisme, terutama etnisitas sebagai variabel yang mempengaruhi kesetiaan dan perilaku politik. Hasil studi dari Liddle menemukan bahwa di beberapa negara baru, termasuk Indonesia, bentuk kesetiaan primordialisme-- kekerabatan, etnis, ras, bahasa, agama, budaya- adalah hal penting dalam menemukan kesetiaan politik di tingkat lokal. Partai yang tidak melakukan itu akan gagal dalam lokalitasnya. Dalam wilayah yang masih penuh dengan unsur tradisional, partai politik lokal tanpa

kaitan yang melampaui komunitas lokal mungkin memperoleh dukungan berharga dan sebaliknya organisasi politik nasional mungkin tidak mampu menyesuaikan dirinya terhadap kondisi khusus lokalitas tersebut.

Hasil studi Liddle di atas memperlihatkan bahwa elite tradisional yang berorientasi dan mencari legitimasinya dalam masa lalu masyarakat yang unik dan berbeda, memberikan (melaksanakan) kepemimpinan pascakemerdekaan. Jelaslah, bahwa elite yang kuat menjadi faktor yang menentukan kuat tidaknya sebuah partai politik di tingkat lokal. Hanya saja, Liddle tidak melihat seberapa jauh orang kuat itu berpengaruh, dan melalui apa pengaruhnya itu disebarkan atau ditanamkan. Selain itu, juga tidak bisa dilihat seberapa dalam orang kuat itu berkuasa dan mempertahankan kekuasaannya.

Pada masa kini, manifestasi kebangkitan etnisitas terlihat pada tiga momen penting. *Pertama*, dalam pemekaran daerah. Pada level pemekaran provinsi (Banten, Maluku Utara, Gorontalo sampai Bangka Belitung) nuansa faktor etnis sangat kuat. Orang Banten, Ternate, Gorontalo, dan Bangka Belitung ingin mandiri masing-masing dari orang Bandung, Ambon, Manado, dan Palembang. *Kedua*, dalam pemilihan pemimpin pemerintahan daerah. Fenomena kebangkitan etnisitas banyak menyertai pemilihan KDH/Wakil KDH, bahkan jabatan KDH dan Wakil KDH harus dibagi antaretnis. Di provinsi-provinsi yang telah menggelar pemilihan, putera daerah kebanyakan mengisi jabatan-jabatan gubernur dan walikota/bupati KDH. *Ketiga*, dalam pengisian badan legislatif daerah. Fenomena etnisitas tampak dari penolakan masyarakat terhadap anggota DPRD yang pulang ke daerah pemekaran dari daerah induk, khususnya mereka yang bukan dari etnis setempat.

Bagi anggota masyarakat, pemanfaatan etnisitas dilakukan untuk menggalang dirinya berdasarkan identitas etnis. Mereka melakukan semamamata karena "identitas publik yang bentrok" dengan kelompok etnik lain, atau pantulan dari "suatu percepatan aspirasi kesukuan". Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa etnisitas terkait dengan kekuasaan yakni memperebutkan posisi dalam meraih keuntungan.

Membangkitkan etnisitas dilakukan karena sekian lama tersumbat, kini diaktifkan kembali. Ini merupakan strategi yang dipilih oleh aktor kelompok etnis yang dirugikan akibat tekanan struktur politik yang diterapkan. Dalam konteks tersebut, aktor yang membangkitkan etnisitas memiliki komitmen terhadap *local area* dan *local people*. Inilah yang dikatakan oleh Cohen (dalam Mitchell, 1974: 1--35) sebagai politik etnisitas. Cohen mengemukakannya sebagai berikut :

*A process by which a group or group from one ethnic category whose members are involved in a struggle for power and privileges with the members of a group another ethnic category, within the framework of a formal political system, manipulate some customs, values, myths, symbols or ceremonials from their culture tradition in order to articulate an informal political organization which is used as a weapon in that struggle.*

Implikasi pengertian seperti itu adalah bahwa etnisitas dimanfaatkan jika suatu suku bangsa merupakan suatu oposisi atau terpinggirkan dari suku bangsa lain. Oleh karenanya tidak mengherankan kalau etnisitas dipergunakan dalam suatu partai politik dan birokrasi dalam pembentukan dan konsolidasi suatu partai politik.

Keinginan membangkitkan etnisitas dikarenakan selama ini adanya keinginan dari "orang daerah" untuk mengekspresikan identitas etniknya masing-masing. Mengutip pandangan Liddle (1996: 63--99), adanya

uniformitas kebijakan berdasarkan konsepsi orang Jawa dibuat begitu saja di Jakarta, seperti UU No. 5 tahun 1979 yang mengakibatkan rusaknya nilai dan pranata sosial masyarakat etnis luar Jawa. Penghargaan hanya diberikan pemerintah terhadap upacara-upacara adat, tetapi tidak dalam soal politik dan otonomi. Pemerintahan sebelum orde baru diatur dengan "selera kolonial", yaitu pemerintah pusat menumbuhkan kekuasaannya di daerah seolah-olah ia adalah pemerintahan asing (Sjamsuddin, 1989: 24).

Reformasi dalam segala bidang yang mengantar bangsa Indonesia pada situasi transisi menuju demokrasi, telah melahirkan kembali (*revivalism*) dan memperkuat kembali (*revitalism*) etnisitas, dan energi itu dimanfaatkan sedemikian rupa oleh elite politik guna memobilisasi massa. Tindakan tersebut didorong oleh harapan-harapan yang dikalkulasikan sedemikian rupa untuk dapat dikejar atau diraih oleh elite politik tersebut.

#### **1.4.1.5 Etnis sebagai Dasar Jaringan**

Aspek paling nyata dari membangkitkan elite sebaaimana diuraikan di depan adalah pada pembentukan suatu jaringan atas dasar etnis. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Barth (1988: 1) bahwa salah satu ciri dari kelompok etnis adalah terbentuknya suatu jaringan dan interaksi sendiri. Pada bagian ini penulis akan menguraikan bentuk-bentuk jaringan sosial. Sejumlah ilmuwan telah mempergunakan konsep ini, seperti Southall (1956,1961), Potts (1961), Mayer (1961; 1962, 1964), Eipstein (1961), dan Putnam (2000).

Di antara studi-studi itu, yang menonjol adalah karya Mayer, Eipstein, dan Putnam. Mayer (dalam Suparlan,1988: 43) menyatakan bahwa hakikat suatu jaringan dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa sejumlah

pendatang ke kota tetap berorientasi ke desa, sedangkan sejumlah lainnya berorientasi ke kota. Mayer memperlihatkan bahwa sejumlah pendatang yang berasal dari sejumlah golongan tertentu cenderung memperlihatkan diri mereka dengan dan dalam hubungan sosial yang terwujud sebagai suatu rangkaian jaringan yang ketat. Jaringan-jaringan ini membatasi kegiatan-kegiatan untuk tidak terlibat dalam kegiatan sosial anggotanya, untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang pada dasarnya perkotaan.

Sementara Epstein (dalam Suparlan, 1988: 43) menyatakan bahwa melalui konsep jaringan dapat diperoleh data mengenai bagaimana sebenarnya norma-norma dan nilai-nilai tersebar di suatu komunitas dan bagaimana suatu proses perubahan yang berasal dari respons anggota-anggota komunitas terhadap sesuatu persebaran norma dan nilai sebenarnya terjadi.

Putnam dalam pembahasannya tentang modal sosial membagi dua tipe modal sosial yakni *bonding* dan *bridging*. *Bonding* terdiri atas ikatan-ikatan sosial antara para anggotanya yang berasal dari segmen yang sama dari suatu masyarakat, misalnya etnis, kelas, dan agama. Dalam bentuk *bonding*, terdapat keteradian internal dan solidaritas sub kelompok menjadi lebih besar dan sangat bernilai bagi anggota-anggota individual. Ciri khusus dari jenis jaringan ini yakni para aktor membuat keputusan dalam keadaan terpisah dari aktor di luar, lebih memusatkan perhatian pada "ciri pribadi" aktor.

Sebaliknya, modal sosial *bridging* terdiri atas ikatan-ikatan sosial antara anggota-anggotanya yang berasal dari subkelompok yang berbeda dari suatu masyarakat. Dalam *bridging* ini dimungkinkan terciptanya kerja sama dan hubungan yang saling menguntungkan dengan warga dari kelompok etnis lain. Ciri khusus dari bentuk jaringan ini adalah para aktor memusatkan

perhatian pada pola ikatan objektif yang menghubungkan anggota kelompok lain.

Pemanfaatan konsep *bonding* dan *bridging* ditunjukkan dalam artikel van Bruinessen (2004) tentang "Keterikatan Sosial Muslim dengan Civil Society dan demokratisasi di era Post Suharto". Bruinessen mengambil studi kasus kelompok *Jama'ah Islamiyah*, yang merupakan jenis jaringan *bonding*, siapa saja yang masuk dalam jama'ah itu memutuskan ikatan-ikatan lama dengan teman dan keluarga. Semua ikatan-ikatan *bridging* dengan kelompok-kelompok dan ide-ide diluar kelompok mereka sendiri salah. Ini karena kelompok itu berpegang pada ayat *Al-wala' wa ul-bara'* dan dirangkum dalam slogan "*bonding yes, bridging no!*".

Dalam sosiologi, suatu jaringan lazim dikonsepsikan sebagai suatu tipe hubungan antaraktor dengan ditandai oleh bentuk interaksi timbale balik yang simetris (Usman, 1991: 14). Sementara itu, Mitchell (1969: 1-2) mengungkapkan bahwa suatu jaringan adalah seperangkat hubungan khusus atau spesifik yang terbentuk di antara sekelompok orang di mana karakteristik hubungan-hubungan tersebut dapat dipergunakan untuk menginterpretasikan motif-motif perilaku sosial dari orang-orang yang terlibat, termasuk dimensi-dimensi terselubung (*hidden dimenstons*) di dalamnya.

Hubungan-hubungan sosial yang terbentuk dalam suatu jaringan tidak terjadi secara acak, tetapi menunjukkan suatu keteraturan yang jelas. Berdasarkan keteraturan ini maka dalam jaringan terkandung struktur interaksi berupa pola-pola yang relatif tahan lama, rangkaian hubungan-hubungan sosial yang mencakup aturan-aturan *recrutmen* anggota, tipe-tipe hubungan sosial,

dan posisi-posisi sosial di mana setiap anggota dipetakan serta saling keterhubungan anggota-anggota yang menduduki posisi-posisi di dalamnya

Suatu jaringan terbentuk dalam masyarakat karena manusia tidak dapat berhubungan dengan semua manusia, tetapi hubungan selalu terbatas pada orang-orang tertentu saja. Begitu juga, setiap orang belajar dari pengalamannya untuk masing-masing memilih dan mengembangkan hubungan-hubungan sosial yang terbatas jumlahnya dibandingkan dengan jumlah rangkaian hubungan sosial yang tersedia dalam masyarakat yang dapat dimanfaatkannya.

Ada dua macam jaringan sosial, yakni terbatas dan tak terbatas. Jaringan terbatas meliputi sejumlah individu yang masih sekerabat, jaringan tetangga, dan jaringan pertemuan. Sementara itu, jaringan tidak terbatas adalah hubungan-hubungan sosial yang menghubungkan satu dengan lainnya sehingga meliputi seluruh warga komunitas tersebut.

Satu ciri khas teori jaringan adalah pemusatan perhatiannya pada struktur mikro hingga makro. Artinya, bagi teori jaringan, aktor mungkin saja individu, tetapi mungkin pula kelompok, perusahaan, dan masyarakat (Ritzer dan Goodman, 2004: 383). Hubungan dapat terjadi di tingkat struktur sosial skala luas maupun di tingkat yang lebih mikroskopik. Granoveter (1985: 490) melukiskan hubungan di tingkat mikro itu seperti tindakan "yang melekat" dalam hubungan pribadi konkret dan dalam struktur jaringan hubungan itu.

Dalam teori jaringan dikenal pula dengan analisis jaringan (*analysis network*), yakni suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi interaksi aktor antara yang satu dengan yang lain. Ada tiga fokus yang menjadi perhatian analisis jaringan (Boissevain, 1979: 394). Pertama, analisis jaringan yang memfokuskan perhatian pada antarmubungan dari suatu unit. Dari

hubungan yang ada, analisis jaringan memperjelas saling keterkaitan satu sama lain. Kedua, dengan mengetahui saling keterkaitan, analisis jaringan lalu melihat apa isi hubungan yang ada sehingga menuntun peneliti untuk melihat ketegangan antarhubungan sosial antara orang-orang yang mempunyai akses dengan orang yang tidak mempunyai akses terhadap risorsis dalam suatu institusi. Ketiga, dengan memusatkan perhatian pada antarhubungan dan interdependensi memungkinkan terbentuknya karakteristik hubungan, seperti halnya *patron-client*, koalisi pemimpin-pengikut, klik, faksi, kartel, aliansi, dan sebagainya.

Literatur yang ada tentang jaringan, dan tentang organisasi pada umumnya, mengidentifikasi berbagai macam syarat teknis yang menandai munculnya jaringan. Dengan menekankan kecocokan antara aspek sosial dan ekonomi, Dasgupta (2002: 19--24) memberikan penjelasan akan munculnya suatu jaringan.

Ketika menelaah ciri-ciri umum jaringan, Dasgupta mengidentifikasi tiga faktor teknis yang harus diperhatikan. Pertama, *communication channels and personal relationships* (hendaknya ada saluran komunikasi dan hubungan personal). Biasanya suatu jaringan merupakan saluran sistem komunikasi untuk melindungi dan memperkenalkan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal adalah lebih jelas, dan merefleksikan siapa orang yang dipercaya dalam melakukan kontak-kontak komunikasi. Di dalam jaringan dapat transitif: bila ada ikatan antara A dan B dan C, ada kemungkinan ada ikatan antara A dan C. Akibatnya adalah bahwa lebih besar kemungkinan adanya jaringan yang meliputi A, B, dan C. Oleh karena itu, jaringan juga memainkan

peranan untuk mempermudah koalisi, koordinasi, yang oleh Putnam disebutnya dengan *civic engagement*

Kedua, *network externalities* (jaringan keluar). Sebuah jaringan bukan merupakan pulau-pulau di lautan lepas, tetapi jaringan-jaringan yang ada berhubungan satu sama lain, membentuk sebuah jaringan dari jaringan-jaringan. Apabila ingin menjalin hubungan dan kontak, yang pertama-tama dicari adalah orang yang "tepat". Hubungan kerja sama antarorang dalam jaringan dilandaskan pada kepercayaan pribadi antarorang. Kalau kepercayaan sudah ada, maka koalisi, koordinasi, dan kerjasama tidak sulit dijalin. Putnam (dalam Dasgupta, 2002: 21) merumuskan bahwa dalam jaringan itu hendaknya saling mempercayai satu sama lain. Jaringan sosial menjadi transaktif: saya percaya engkau sebab saya percaya dengannya.

Ketiga, sumber daya vital dalam jaringan adalah modal manusia. Dengan meminjam hasil pengamatan dari Burt di sejumlah perusahaan Amerika, ia sampai pada kesimpulan bahwa jaringan "pada dasarnya dibentuk dengan manusia sebagai porosnya". Keempat, pada tingkat makro, bentuk jaringan disebut sebagai faktor kritis yang menumbuhkan perbedaan tipe dari bentuk jaringan. Putnam (dalam Dasgupta, 2002: 24) melacak dua bentuk jaringan yakni horizontal dan vertikal. Pada jaringan vertikal, tidak ada arti bagaimana pemilikan dan tidak ada arti bagaimana pentingnya partisipasi, sementara jaringan yang sifatnya horisontal akan menghargai kepemilikan dan partisipasi.

Sekarang kita harus bertanya apa hasil dari sekian banyak penjelasan tentang jaringan, dan bagaimana analisis jaringan itu yang dipaparkan sebagian besar di tulisan di atas dipakai dalam penelitian ini. Penggunaan analisis

jaringan yang terbentuk di antara elite dipergunakan untuk memahami jaringan sebagai salah satu pendekatan, yang membahas bentuk dan fungsi hubungan-hubungan dalam masyarakat yang kompleks (Barnes, 1954: 39--58). Secara spesifik, Boissevain (1979: 392--394) menerapkan analisis jaringan untuk melihat siapa yang diplot menjadi pemimpin, menganalisis membangkitkan dari para *power brokers*, koalisi yang terjadi dan aspirasi-aspirasi di antara mereka. Analisis jaringan bertanya tentang cara apa yang menghubungkan dengan seseorang, isi hubungan, dan hubungan antara bentuk dan perilaku.

Ditinjau dari tujuan hubungan sosialnya, suatu jaringan dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Pertama, jaringan kepentingan (*interest*), hubungan-hubungan sosial yang membentuknya adalah hubungan-hubungan yang bermuatan kepentingan. Kedua, jaringan kekuasaan (*power*) berupa hubungan-hubungan yang bermuatan kekuasaan, distrukturkan secara sengaja oleh kekuasaan. Ketiga, jaringan perasaan (*sentiment*), terbentuk atas dasar hubungan-hubungan yang bermuatan.

Studi-studi tentang jaringan tersebut memberikan pemahaman dan menunjukkan penggunaan jaringan yang beragam dalam ruang lingkup yang luas. Artinya, jaringan digunakan atau dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu. Di sini hubungan-hubungan sosial yang terbentuk tidak semata-mata hubungan antarindividu, tetapi melampaui batas-batas geografis dan garis keturunan. Dalam suatu organisasi, jalinan hubungan antara sesama elite lebih menonjolkan usaha-usaha koordinasi, konsultasi, pemberian dukungan, pertemuan, konsultasi, pembicaraan, dan sebagainya. Secara internal, terbentuknya suatu hubungan berawal dari

keinginan segenap elite dalam mengakomodasikan permasalahan yang muncul dan merespons perkembangan yang ada.

Pertanyaan penting yang sering mengusik ilmuwan sosial adalah bagaimana strategi elite dalam menentukan berbagai bentuk jaringan yang ada. Hasil penelitian Runturambi (2001) menunjukkan bahwa strategi pekerja dalam mengajukan tuntutan sangat ditentukan oleh jalinan hubungan sosial yang terbentuk. Jalinan hubungan sosial ini dalam kenyataannya bisa digunakan, diarahkan, dimanfaatkan, bahkan dibangkitkan untuk kepentingan para pekerja, menggunakan jaringan sebagai bagian dari strategi pekerja dalam mendukung berbagai aksi terhadap otoritas, khususnya dalam penggunaan aksi pemogokan.

Bila teori tersebut diterapkan pada perilaku elite politik PDI-P Kendari, tampaknya jaringan antara sesama elite terjadi pada bentuk-bentuk hubungan irreguler, merekrut pengurus dan membuat program yang dilindungi oleh elite politik (karena menjadi *patron*-nya), lalu mendesak kelompok-kelompok "luar" untuk mendukungnya. Setelah semua itu berhasil, pola jaringan dilakukan oleh elite politik dalam mengarahkan perhatian kepada elite parpol lain, khususnya melakukan koalisi dengan fraksi lain di DPRD. Hasil pemilu 1999 yang lalu di Kendari menunjukkan bahwa jumlah kursi di DPRD masih dikuasai oleh Partai Golkar. Untuk mengimbangi kondisi ini elite PDI-P melakukan koalisi dengan fraksi lain, yakni fraksi reformasi di DPRD Kendari. Pembentukan koalisi ini mudah dilakukan, para elite memanfaatkan etnisitas untuk membangun solidaritas ke dalam.

Koalisi seperti ini, terjadi karena faktor persaingan atau pertikaian. Konsep pertikaian juga menyertakan kesadaran dan harapan (Boulding,

1963: 6). Elite etnik tertentu seringkali melakukan tindakan-tindakan diskriminatif agar kelompok etnik lain terkalahkan, sehingga terjadi reposisi hubungan sosial. Interaksi itu bisa menjadi fungsional bila berlangsung pola kerjasama dan koalisi. Kendati banyak kepentingan-kepentingan lain ikut menjadi penyumbang berlangsungnya jaringan sesama elite, dapat diduga kepentingan yang paling menonjol adalah keinginan untuk tetap berkuasa.

Dengan demikian, koalisi, persaingan, dan pertikaian akan terjadi silih berganti untuk menumbuhkan kesadaran tentang kepentingan objektif guna meningkatkan kinerja partai. Ini berarti bahwa teori-teori elite klasik menganggap selama ini pengikut itu bersifat apatis. Dalam konteks ini, penulis meragukan kebenaran asumsi-asumsi itu, khususnya pendekatan Mosca tentang *political formula* yang mengasumsikan bahwa pengikut itu "ditekuk" oleh elite. Berbagai jenis perilaku elite yang selama ini hanya membodohi anggota massa pengikut saja, hanya memperkuat paternalisme, ketergantungan dan "pembodohan". Sebagai antitesis itu, di sini penulis lebih mendukung pendekatan *promotionalisme* seperti yang dikemukakan oleh Freire (1984) atau gagasan *reflexivity*<sup>17</sup> dari Giddens.

Suatu jaringan, sebenarnya merupakan salah satu modal sosial. Perhatian serius pada modal sosial tampaknya paralel dengan perhatian pada *good governance*, desentralisasi, demokrasi lokal, dan *civil society*. Sejauh literatur yang bisa dilacak penulis, pengertian modal sosial sudah dibahas oleh Loury (1977), Bourdieu (1986), Coleman (1988), dan Putnam (2000).

---

<sup>17</sup> Konsep *reflexivity* adalah "gagasan perlawanan" terhadap setiap klaim bahwa aktor tidak berdaya di hadapan struktur. Mungkin satu kalimat pemadatan gagasan ini adalah "tempatkan dirimu di tengah, lalu cobalah melakukan hal-hal radikal".

Loury (dalam Coleman, 1990: 300) mengemukakan konsep modal sosial untuk menggambarkan konsekuensi kedudukan sosial dalam memfasilitasi karakteristik modal manusia. Sementara Bourdieu (dalam Fine, 2001: 55) mendefinisikan modal sosial sebagai keseluruhan sumber daya baik yang aktual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan kelembagaan yang tetap dengan didasarkan saling kenal dan saling mengakui. Dengan kata lain, dengan menjadi anggota dari suatu kelompok orang akan memperoleh dukungan dari modal yang dimiliki secara kolektif. Selanjutnya ia mengemukakan bahwa besarnya modal sosial yang dimiliki seseorang anggota dari suatu kelompok tergantung pada seberapa jauh kuantitas maupun kualitas jaringan hubungan yang diciptakannya, serta seberapa besar volume modal ekonomi, budaya, dan sosial yang dimiliki oleh setiap orang yang ada dalam jaringan hubungannya.

Berbeda dengan Bourdieu yang menuangkan gagasan modal sosial lebih menekankan pemahaman teoretik, Coleman (1986) memperkenalkan modal sosial sebagai sarana konseptual untuk memahami orientasi teoretis tindakan sosial dengan mengaitkan komponen-komponen dari perspektif sosiologi dan ekonomi. Dengan cara demikian Coleman menggunakan prinsip-prinsip ilmu ekonomi untuk menganalisis proses sosial. Coleman kemudian memberi pengertian modal sosial ditentukan oleh fungsinya dan memberi penekanan terhadap dua aspek dari struktur sosial yang sangat penting dalam memudahkan tercipta dan berkembangnya modal sosial dalam berbagai bentuk. Pertama, aspek dari struktur sosial yang menciptakan jaringan sosial sehingga membuat setiap orang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga kewajiban-kewajiban maupun sanksi-sanksi dapat dikenakan kepada setiap

orang yang menjadi anggota jaringan itu. Kedua, adanya organisasi sosial yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan bersama.

Meskipun Coleman membawa modal sosial ke dalam ilmu-ilmu sosial, puncak pembahasan tentang modal sosial dilakukan oleh Robert Putnam. Jika Loury (1977), Bourdieu (1985), dan Coleman (1988) menjelaskan bahwa modal sosial tidak diwujudkan dalam orang tertentu, tetapi agaknya melekat dalam hubungan sosial orang. Pada saat yang sama, mereka juga menyatakan bahwa modal sosial didapat oleh individu. Putnam, sebaliknya, menjelaskan bahwa modal sosial adalah sebuah sumber daya yang individu atau kelompok orang memiliki atau gagal untuk memiliki. Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai *"features of social organization such as networks, norms, and trust, that facilitate coordination and cooperation for mutual benefit"*. Apa yang penting untuk dicatat dari pemahaman Putnam tersebut, modal sosial terdiri atas jaringan keterikatan sosial yang diatur oleh norma-norma yang menentukan produktivitas suatu kelompok masyarakat atau komunitas (Syahra, Volume V No. 1 Tahun 2003: 6). Agar tercipta modal sosial, Putnam mensyaratkan adanya hubungan di antara individu sehingga terbentuk jaringan kerja sosial dan norma yang saling membutuhkan dan layak dipercaya yang timbul dari mereka

Dari uraian di atas, secara singkat dapat ditegaskan bahwa modal sosial terkait dengan jaringan sosial, ikatan atau hubungan sosial, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan bersama. Jaringan sosial sebagai "arena" bagi masyarakat untuk membangun solidaritas, toleransi, kepercayaan, dan kerjasama. Terbentuknya suatu jaringan sosial merupakan sebuah upaya untuk memecahkan salah satu persoalan dalam

ilmu sosial yakni bagaimana dan mengapa masyarakat. memelihara tingkat kesatuan dan stabilitas politik ketika konflik sosial dan ketidakpuasan politik yang serius mungkin akan mengancam mereka.

### 1.4.3 Konstruksi Sosial dalam Menjelaskan Fenomena

Teori konstruksi sosial dipakai dalam penelitian ini. Apa yang dilakukan oleh elite dengan memanfaatkan etnisitas di masa lalu merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembentukan konstruksi sosial masa kini. Interpretasi terhadap masa lalu merupakan satu hal yang penting. Konstruksi sosial, baik masa lalu maupun masa kini sangatlah lentur, fleksibel, namun harus dapat dipertanggungjawabkan atas interpretasi dan kepentingan-kepentingan yang berbeda.

Alasan yang mendasari perilaku elite dalam membangkitkan etnisitas dapat ditelusuri lewat konstruksi pemikiran. Melalui konstruksi pemikiran, dapat dipahami bagaimana kehidupan masyarakat itu terbentuk dalam proses yang terus menerus (Berger dan Luckmann, 1990).

Teori konstruksi sosial (*the theory of social construction*) yang dipopulerkan oleh Berger dan Luckmann, pada dasarnya berada dalam sosiologi pengetahuan. Dalam kerangka mengembangkan teori sosiologi, lewat teori ini setidaknya ada tiga usaha yang dilakukan Berger dan Luckmann untuk mengembalikan hakikat dan peranan sosiologi pengetahuan

Pertama, Berger dan Luckmann mendefinisikan kembali pengertian "kenyataan" dan "pengetahuan" dalam konteks sosial. Dalam hal ini, teori sosiologi harus mampu memberikan pemahaman bahwa kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus-menerus. Gejala-gejala sosial sehari-hari

masyarakat selalu berproses, yang ditemukan dalam pengalaman bermasyarakat. Atas dasar itulah, pusat perhatian seyogyanya tercurah pada bentuk-bentuk penghayatan (*experiences*) kehidupan masyarakat secara menyeluruh dengan segala aspek (kognitif, psikomotoris, emosional, dan intuitif). Kenyataan sosial itu ditemukan dalam pergaulan sosial dan termanifestasikan dalam tindakan (entah dalam berkomunikasi, berorganisasi, karya sastra, dan sebagainya). Kenyataan sosial itu ditemukan dalam pengalaman intersubjektif, dan melalui pengalaman itu pula masyarakat terbentuk secara terus-menerus (Parera, 1990: xvi).

Kedua, Berger dan Luckmann menemukan "metodologi" atau cara meneliti pengalaman intersubjektif dalam rangka mengkonstruksi realitas, guna menemukan "esensi masyarakat" yang implisit dalam gejala-gejala sosial itu. Dalam hal ini, perlu ada kesadaran bahwa apa yang dinamakan masyarakat pasti terbangun dari dimensi objektif dan sekaligus dimensi subjektif, sebab masyarakat itu sendiri sesungguhnya merupakan buatan kultural masyarakat (yang di dalamnya terdapat hubungan intersubjektif: manusia adalah sekaligus pencipta dunianya sendiri (Poloma, 1984: 308). Prestasi seorang sosiolog tampak pada kemampuannya membangun interpretasi objektif atas kejadian-kejadian yang dialami di masyarakat.

Ketiga, Berger dan Luckmann memilih "logika" yang tepat dan cocok. Maksudnya, logika macam apakah yang dipakai mengingat kenyataan sosial itu memiliki ciri-ciri khas seperti pluralis, dinamis, dan memiliki proses perubahan terus-menerus. Penguasaan logika yang representatif penting artinya agar interpretasi sosiologis relevan dengan struktur kesadaran umum dan

struktur kesadaran individual yang mengacu ke struktur kesadaran umum semacam itu.

Berger dan Luckmann (1990: 1) berpandangan bahwa manusia mengkonstruksikan realitas sosial yang padanya proses subjektif dapat diobjektifkan. Proses ini dimulai dengan pembiasaan suatu tindakan yang memungkinkan aktor dan pihak lainnya untuk memperhatikan bahwa tindakan tersebut memiliki ciri beraturan dan berulang. Aktor akan mampu menentukan tipe tindakan tersebut serta motif yang ia anggap menyertai tindakan tersebut. Sejak awal, aktor berasumsi bahwa akan ada suatu resiprositas penentuan tipe yang akan memodelkan perilaku mereka sendiri terhadap sesamanya. Oleh karena itu, individu-individu dalam masyarakat itulah yang membangun masyarakat, sehingga pengalaman individu tidak terpisahkan dengan masyarakatnya. Dalam kaitan ini Waters (1994: 36) juga menyatakan: "*They start from the premise that human beings construct social reality in which subjective process can become objective*".

Menurut Berger dan Luckmann, manusia adalah pencipta kenyataan sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi, seperti halnya kenyataan objektif mempengaruhi kembali manusia melalui proses internalisasi. Dialektika antara diri (*the self*) dan dunia sosio-kultural berlangsung dalam suatu proses dengan tiga momen simultan, yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi (Berger & Luckmann, 1990: xx). Maket yang digambar oleh seorang arsitek misalnya adalah eksternalisasi idenya tentang sebuah bangunan (gedung). Jika gedung itu telah dibangun maka yang terjadi adalah objektivasi. Sebuah ide menjadi objektif dalam sebuah benda (karya), lembaga, atau tingkah laku yang menjadi pengejawantahannya. Apabila kemudian arsitek itu

masih melihat gedung itu sebagai buah dari gagasan dan imajinasinya terjadilah internalisasi. Demikian juga, jika mahasiswa arsitektur kemudian mempelajari kembali ide yang ada di balik bangunan itu maka yang terjadi adalah internalisasi.

Masyarakat pun terbentuk melalui proses yang demikian. Berbagai nilai dieksternalisasi dalam tingkah laku tertentu. Misalnya, hormat kepada orang lain dinyatakan (dieksternalisasi) dalam tingkah laku berbangsa dan bersikap. Dalam perkembangan lebih lanjut, tingkah laku tersebut dibakukan (diobjektivasi) sebagai pranata sosial, yang kemudian menjadi objektif. Dalam tahapan eksternalisasi, sebuah tingkah laku masih disesuaikan dengan kemauan aktornya. Dalam tahapan objektivasi, sebuah tingkah laku sudah disesuaikan dengan tuntutan pranata, sekalipun mungkin bertentangan dengan keinginan pelakunya. Kemudian, kalau pranata itu disadari lagi sebagai buatan saja, terjadilah tahapan internalisasi. Dalam tahapan ini, orang menyadari bahwa nilai budaya bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, melainkan hasil buatan kelompok orang dalam sejarah mereka.

Berger dan Luckmann menyebut dua tahap pertama, yakni internalisasi dan objektivasi, sebagai sosialisasi primer, yaitu saat seseorang berusaha mendapatkan dan membangun tempatnya dalam masyarakat. Kedua tahap ini membuat orang memandang masyarakat sebagai realitas objektif (Berger dan Luckmann, 1990: 150-151). Berger dan Luckmann (1990: 81) sendiri melukiskan tahap objektivasi sebagai *man in society*.

Adapun tahap ketiga yakni internalisasi, yang disebutnya sebagai sosialisasi sekunder. Dalam hal ini, pranata yang telah dibangun dan dibakukan tersebut, kembali dilihat sebagai bagian diri seseorang. Seorang anak

perempuan, misalnya, mulai meniru tingkah laku ibunya ketika menerima tamu di rumah sebagai tingkah lakunya sendiri. Pranata rumah tangga mulai diinternalisasikan oleh anak perempuan tersebut, dan dengan cara seperti itu terjadilah identifikasi. Dengan demikian, setiap identifikasi selalu merupakan hasil interaksi antara apa yang secara objektif diberikan oleh lingkungan atau orang lain, dan apa yang diappropriasi sendiri secara subjektif oleh seseorang. Berger dan Luckmann (1990: 110) kemudian menyebut tahap internalisasi ini sebagai *society in man*.

Dengan demikian, teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann menunjukkan bahwa masyarakat (dan juga kebudayaan) adalah buatan manusia sendiri, yang menciptakan berbagai tipe-tipe pengertian dan tingkah laku yang kemudian dibakukan dalam berbagai pranata sosial. Pada tahap selanjutnya, agar pranata ini dapat dipertahankan dan diteruskan, haruslah ada pembenaran (*justification*) terhadap pranata tersebut. Akan tetapi, pembenaran itu pun dibuat juga oleh manusia sendiri melalui proses legitimasi, yang oleh Berger dinamakan objektivasi sekunder. Tujuan legitimasi ini adalah mengintegrasikan berbagai nilai dan bentuk tingkah laku yang ada, agar dengan cara itu membuat objektivasi primer secara objektif benar-benar hadir (Berger dan Luckmann, 1990: 11).

Pandangan bahwa masyarakat dan kebudayaan itu dikonstruksikan, berarti bahwa di satu sisi masyarakat dan kebudayaan itu bukanlah sesuatu yang hadir secara alamiah dan tumbuh dari suatu esensinya yang ontologis, melainkan buatan, konstruksi, atau produksi manusia sendiri. Namun, di sisi lain, konstruksi sosial pada tahapan objektivasinya akan menghasilkan

berbagai konstruk yang objektif secara independen, yang eksistensinya tidak bisa dinafikan.

Teori konstruksi sosial ini tampak pula secara konsisten mengadakan sintesis antarfenomena sosial yang tersirat dalam tiga momen dialektis tersebut, dan memunculkan suatu konstruksi kenyataan sosial, yang diakui asal-mulanya sebagai hasil ciptaan manusia melalui proses interaksi intersubjektif. Beranjak dari tradisi Durkheimian dan Parsonian, di satu sisi Berger dan Luckmann menerima asumsi adanya eksistensi kenyataan sosial objektif yang dapat dilihat dalam hubungan individu dengan lembaga-lembaga sosial (lembaga sosial yang besar adalah “negara”). Akan tetapi, di sisi lain, mereka juga memandang bahwa eksistensi kenyataan sosial objektif itu tidaklah stabil, selalu ada kemungkinan untuk mengalami perubahan ketika hubungan intersubjektif mengalami perubahan (Parera, 1990: xx—xxi; Waters, 1994: 35).

Etnisitas dan identitas etnik, merupakan sesuatu yang bukan “di sana”, tetapi “di sini”. Pertarungan yang “di sana” dan “di sini” tersebut ada dalam diri, tepatnya *mind* seseorang. Realitas etnisitas merupakan produk interaksi individu dengan dunianya. Oleh karena itu, etnisitas sebenarnya terpisah jauh di luar individu dan karena itu ada potensi yang luar biasa untuk dapat diatasi, dijinakkan, dan dikontrol oleh potensi subjektif manusia. Dengan demikian, etnisitas dapat dimanfaatkan untuk membangun tatanan dunia yang bermakna.

Pemikiran tersebut tidak lepas dari asumsi dasarnya, yaitu konstruksi sosial atas realitas yang diawali aliran fenomenologi Husserl dan Schutz. Dunia dibangun oleh manusia, menurut Schutz, melalui proses pemaknaan. Prosesnya dari arus pengalaman yang berkesinambungan yang diterima

pancaindera. Arus utama dari pengalaman inderawi ini sebenarnya tidak punya arti – mereka hanya ada begitu saja; objek-objeklah yang bermakna. Mereka memiliki kegunaan-kegunaan, nama-nama, bagian-bagian yang berbeda, dan mereka memberi tanda tertentu. Pengidentifikasian ini terjadi di dalam kesadaran individu secara terpisah dan kemudian secara kolektif, di dalam interaksi antara kesadaran-kesadaran. Proses itu adalah tipikasi di mana individu membentuk penggolongan atau klasifikasi dari pengalaman dengan melihat keserupaannya (Craib, 1992: 126--128).

Dengan memperhatikan model pemahaman seperti tersebut, sesungguhnya Berger berhutang budi kepada Schutz. Dalam seluruh karyanya, Schutz memusatkan perhatian kepada struktur dunia akal sehat dari kehidupan sehari-hari. Secara garis besar, pemikiran Schutz tersebut berada di sekitar tiga tema utama. Tema pertama, adalah dunia sehari-hari, sebagai dunia yang paling fundamental dan dunia terpenting bagi manusia. Dunia sehari-hari ini menjadi orde tingkat satu (*first-order understanding*) yang sekaligus menjadi sumber dan dasar bagi pembentukan orde-orde lainnya. Dalam dunia ini terbentuk misalnya bahasa dan makna, serta terjadi juga interaksi sosial antaranggota masyarakat yang membentuk berbagai tipe harapan dan tingkah laku yang kemudian diterima bersama. Tersebut dunia ini, kemudian dibangun orde tingkat kedua (*second-order understanding*) seperti halnya ilmu pengetahuan, filsafat, teknologi, dan juga sastra. Dunia sehari-hari (*the world of everyday life*) bukanlah sekedar suatu realitas, tetapi merupakan realitas terpenting dalam kehidupan manusia dan menjadi *the paramount reality* (Schutz, 1962: 361)

Tema kedua adalah sosialitas yang dikembangkan berdasarkan teori Max Weber tentang tindakan sosial (*sozial action*). Tindakan sosial yang terjadi setiap hari merupakan proses terjadinya pembentukan berbagai makna. Dalam proses ini, terjadi berbagai tahap analisis yang menghasilkan berbagai tahap makna sosial, dari tingkat tindakan sosial yang paling rendah sampai yang paling tinggi.

Sumbangan penting Schutz dalam konteks ini adalah dimensi waktu dari pemberian makna itu, yang tampaknya tidak banyak diperhatikan Weber. Schutz berpandangan bahwa sikap seseorang terhadap orang lain sangat banyak bergantung pada apa yang sudah dialaminya pada waktu lampau dalam menghadapi keadaan yang sama. Gagasan tersebut kemudian dirumuskannya dalam sebuah dalil yang kini telah menjadi dalil dalam sosiologi: "Bukanlah hal yang mengalami itu sendiri yang bermakna, melainkan apa yang telah dialami" (*Nur das Erlebte ist sinnvoll, nicht aber das Erleben*). Dengan perkataan lain, bukanlah rangkaian tindakan itu yang memberikan makna, melainkan refleksi berdasarkan apa yang telah terjadi di masa lampau. Oleh karena itulah, setiap makna selalu mempunyai sifat reproduktif dan reflektif. Makna yang tersedia dan masa lampau ini menjadi semacam *stock of knowledge at hand*, yang kemudian membuat tindakan sosial sehari-hari seakan-akan berlangsung secara otomatis karena orang tinggal merujuk kepada tipe-tipe pengalaman dan tindakan yang tersedia dari masa lampau (Cox, 1978: 7).

Tema yang ketiga adalah tentang makna dan pembentukan makna yang merupakan sumbangan Schutz yang penting dan orisinal kepada gagasan fenomenologi tentang makna dan bagaimana makna membentuk struktur

sosial. Kalau orde dasar dari masyarakat adalah dunia sehari-hari, maka makna bagi pengertian manusia adalah *common sense*, yang terbentuk dalam bahasa percakapan sehari-hari. *Common sense* merupakan pengetahuan yang ada pada setiap orang dewasa yang sadar. Pengertian ini sebagian besar tidak berasal dari penemuan diri sendiri, tetapi diturunkan secara sosial dari orang-orang sebelumnya. Bahasa ibu, misalnya, adalah sebuah khasanah pengetahuan pertama bagi setiap orang yang telah dipelajari dan diterimanya begitu saja, tanpa berusaha mengetes kebenarannya secara sadar.

Dengan menyetujui pendapat Schutz, Berger melihat bahwa fenomenologi merupakan alat yang perlu untuk memasuki dunia sehari-hari. Dalam pandangan fenomenologis Schutz (dalam Waters, 1994: 38; Mulyana, 2001: 81), makna yang ditafsirkan oleh aktor adalah berdasarkan 'motif untuk' (*in order-to motives*) dan 'motif karena' (*because motives*). Motif jenis pertama merupakan tujuan yang digambarkan sebagai maksud, rencana, harapan, minat dan sebagainya, yang diinginkan aktor, dan karena berorientasi masa depan. Dalam konteks penelitian ini, misalnya, akan dilihat bahwa elite memanfaatkan etnisitas untuk membentuk identitas. Motif jenis kedua merujuk kepada pengalaman masa lalu aktor dan tertanam dalam pengetahuan yang terendapkan, dan karena itu berorientasikan masa lalu (misalnya elite memanfaatkan etnisitas karena kalah kompetisi dengan elite lain). Motif jenis kedua ini lazimnya disebut alasan atau sebab.

Dengan uraian tersebut, bagi penulis sendiri akan membantu guna melihat bagaimana konstruksi sosial dari para elite politik pada etnisitas, adalah tidak lepas dari pengalaman mereka. Konstruksi sosial dapat mencerminkan interelasi sekaligus interpretasi terhadap struktur batin para

manusia yang sedang berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi, perilaku elite seperti itu mencerminkan suatu cara di mana elite dapat dipahami dan saling berinteraksi satu dengan yang lain. Di sisi lain, dalam kaitannya dengan etnisitas juga mencerminkan bagaimana mereka dapat memberi makna terhadap wacana tersebut.

Dalam kaitannya dengan konstruksi sosial seperti yang digunakan dalam penelitian ini, penulis berasumsi bahwa motivasi seseorang terbentuk melalui konstruksi yang cukup panjang. Tidak hanya eksternalisasi, namun juga objektivasi dan internalisasi. Dalam hal ini penulis percaya bahwa etnisitas selain berfungsi sebagai “pembatas” budaya dengan kelompok etnik lain, juga dapat “dimanfaatkan” sebagai sumber jaringan dan sumber dukungan emosional orang lain. Itu berarti bahwa etnisitas dapat menjadi efektif karena menghubungkan konstruksi-konstruksi realitas rawan dari masyarakat-masyarakat empiris dengan realitas purna.

Dengan penggunaan teori konstruksi sosial mempunyai kekuatan dalam menjelaskan fenomena etnisitas dan elite. Konstruksi sosial telah menghubungkan antara struktur dan aktor (individu), meski melihat struktur dan aktor sebagai yang terpisah. Meskipun demikian, berbeda dengan pemikiran-pemikiran dari paradigma fakta sosial, menurutnya struktur masih bisa “ditekuk” oleh aktor. Manusia turut membangunnya, tetapi bila sudah “jadi” akan terpisah dan menentukan manusia melalui internalisasi. Makna sosial, termasuk simbol-simbolnya, selama berada pada struktur, sebagai hasil eksternalisasi, berada dalam diri individu dan selalu menjadi bagian perhatiannya ketika berhubungan dengan objek.

Sehubungan dengan itu, konstruksi sosial elite tentang etnisitas akan ditelusuri lewat penuturan lisan *key informants*. Ada tiga hal yang cukup penting dalam penuturan lisan, yaitu masa lampau seperti yang dilihat informan, masa lampau seperti yang didengar dan diinterpretasi oleh informan, dan masa lampau seperti yang dipahami oleh peneliti.

Kaitan antara elite politik lokal dengan etnisitas, dengan mengikuti pandangan Schutz, bahwa hal itu dapat dilihat dari motivasi elite dalam “memanfaatkan” etnisitas, yang terbagi atas alasan *in order motives* dan *because to motives*. Yang menjadi persoalan di sini ialah motivasi elite politik lokal bukan hanya karena *in order to motives* dan *because motives*, tetapi mungkin motivasi itu hendak menjelaskan batas yang memisahkan keduanya. Dengan demikian, maka pemanfaatan etnisitas tidak bisa lagi hanya secara sederhana dengan melihatnya hanya karena kompetisi “dari luar”, tetapi bisa diduga bahwa motivasi itu dilakukan karena adanya “dari dalam” yakni keinginan “suci” untuk membentuk identitas etnik.

## **1.5 Metodologi Penelitian**

### **1.5.1 Rancangan Penelitian**

Penelitian ini pada dasarnya merupakan suatu studi yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman elite politik lokal mengenai etnisitas, pengetahuan pemahaman tentang cara elite politik lokal membangkitkan etnisitas dalam membentuk jaringan antarsesama elite politik lokal lain. Oleh sebab itu, dari segi metode, peneliti harus memilih sehingga sesuai dengan tujuan dalam memilih informan yang mampu menyediakan data dan informasi yang diperlukan.

Untuk memperoleh penjelasan secara komprehensif terhadap hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode etnografi. Spradley (1997: 14-15) mengemukakan bahwa penelitian yang menggunakan metode etnografi dapat menemukan teori berdasarkan lapangan. Etnografi tidak hanya dipahami sebagai model lama atau baru, melainkan etnografi yang lazim dipakai dalam penelitian antropologi sosial kontemporer yang mengkombinasikan etnografi sebagai praktik dan etnografi sebagai produk (Atkinson, dkk., 2001)

Adapun hal yang ingin dicari adalah pemahaman dan interpretasi atas kegiatan-kegiatan individu yang dengan sendirinya tersituasikan dalam sistem-sistem eksternal dari organisasi-organisasi sosial, politik, dan ekonomi dengan nilai-nilainya sendiri yang dianggap mapan atau mantap. Menurut Dilthey, upaya yang dilakukan untuk memahami adalah dengan membuat deskripsi kemudian mengadakan interpretasi. Konsep-konsep penting seperti "pengalaman hidup" dan "prasyarat kedekatan psikis" perlu diperhatikan oleh peneliti (Sumaryono, 1993: 46).

Dalam studi ini, unit analisisnya adalah individu yang terlibat dalam berbagai arena-arena politik lokal. Karena itu, dari awal peneliti akan mengumpulkan definisi dan konstruksi individu tentang etnisitas. Dalam praktiknya, individu yang dimaksud adalah elite parpol yang secara kebetulan berasal dari etnis Muna di parpol. Dengan demikian diasumsikan bahwa pemaknaan individu etnis terhadap etnisnya, bisa jadi merupakan pandangan pribadi atau konstruksi sosial yang berlaku dalam kelompoknya.

### 1.5.2 Informan Penelitian

Teknik pemilihan informan dalam disertasi ini adalah mengikuti saran dari Spradley (1997: 46) yang mengemukakan ada 4 persyaratan yang perlu diperhatikan untuk menentukan informan yakni (1) enkulturasi penuh; (2) keterlibatan langsung; (3) waktu yang cukup; (4) non analitis. Informan yang dipilih dalam penelitian ini dilakukan secara *snowballing* yang prosedurnya dapat dilihat dari uraian dibawah ini.

Pada awalnya yang menjadi informan yakni elite parpol dari PDI-P (baik pengurus Kota Kendari dan DPD PDI Wilayah Sulawesi Tenggara). Karena itu informan mula-mula adalah Munajab, S.E., (Ketua DPC PDI-P Kota Kendari). Alasan ia dipilih sebagai informan karena perilakunya sebagai ketua PDI-P Kota Kendari banyak merekrut pengurus dengan latar belakang sosial etnis sama yakni Muna. Selain Munajab, ada pula fungsionaris lain yang juga kerap mengambil simbol etnisitas seperti La Ode Munadora, Munadi dan La Ode Munasir, S.Sos.

Namun, setelah penelitian lapangan berlangsung kurang lebih dua bulan, pemilihan informan tersebut terasa kurang lengkap sehingga kalau dipaksakan untuk diteruskan menjadi kurang kaya informasi. Artinya, ada informan lain yang lebih menarik dan dapat memperkaya temuan penelitian ini. Oleh karena itulah, kemudian informan bertambah yang semula hanya elite parpol, tetapi juga mengidentifikasi sejumlah informan-informan diluar elite parpol. Dapat disebutkan informan itu adalah Drs. Tumbo Saranani<sup>18</sup> dan Endang S A.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Latar belakang etnis figur ini adalah Tolaki, mempunyai profesi sebagai dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unhalu yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU Kota Kendari. Pada momen-momen penting di Kendari, seperti pemilihan gubernur, walikota, dan

informan dengan kategori elite parpol memanfaatkan etnisitas dalam membangun basis massa sehingga menjadi lebih komunikatif. Hubungan efektif dengan basis massa atas dasar kesamaan etnis ternyata sangat mendukung dalam upayanya dalam menduduki kursi Ketua PDI-P. Salah satu poster pendukung dari La Ode Mandora yang dipasang di tempat arena Konferda berbunyi, 'yang layak memimpin PDI-P Sultra La Ode Mandora', 'La Ode Mandora, betul-betul tokoh, bukan kios'. Dukungan seperti itu, setidaknya memberi sumbangan dalam mengantarkannya menduduki jabatan Ketua DPD PDI Wilayah Sulawesi Tenggara. Sebaliknya, La Ode Mandora sangat "iba" melihat orang Muna yang ada di Kendari. Katanya sebagian besar dari orang Muna hanya bekerja sebagai tukang pikul, penarik becak, penjual ikan sampai pembantu rumah tangga dan segelintir saja yang menjadi pengusaha sukses.

Sama halnya La Ode Munadora, Munajab, S.E., dengan memanfaatkan etnisitas, yang secara dramatis mengalahkan saingannya Andika (etnis Bugis) dalam memperebutkan tahta ketua PDI-P Kota Kendari Periode 2000--2004. Padahal dari segi modal untuk kampanye, Andika jauh lebih "tebal" dibanding Burhanuddin. Akan tetapi berkat dukungan "orang Muna" yang ada di PDI-P, Munajab dapat mengalahkan Andika. Setelah Munajab terpilih menjadi Ketua DPC PDI-P ia banyak mendatangi kantong-kantong orang Muna di Kendari seperti di Gunung Jati, dan kantong-kantong lain. Hasilnya, pada Pemilu 1999,

---

rektor, figur ini sering mengumandangkan agar putera daerah diberi prioritas utama untuk menduduki jabatan-jabatan penting

<sup>10</sup> Latar belakang etnis figur juga Tolaki, saat ini menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan, sempat kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unhalu, tetapi tidak selesai. Sama halnya dengan Tumbo Saranani, figur ini juga mengumandangkan wacana putera daerah untuk diberi prioritas utama untuk menduduki jabatan-jabatan penting. Dalam pemilihan gubernur, ia sempat membentuk organisasi LSM yang bernama FORBESS dan sempat beberapa kali melakukan audience dengan panitia pemilihan gubernur dan merumuskan beberapa kriteria putera daerah

PDI-P dapat mengantarkan tiga orang untuk duduk sebagai anggota DPRD Kota Kendari, yang sebelumnya hanya satu kursi. Sementara itu, aktor-aktor diluar elite parpol, yakni Timbo Suranani dan Endang SA secara intens mengumandangkan agar putera daerah diberi kesempatan untuk tampil sebagai gubernur dan walikota. Guna menjamin keterandalan (*validitas*) data, maka informan dalam penelitian ini juga memilih orang-orang yang anti etnisitas. Di lingkungan parpol misalnya, ada nama Munabim dan Andika.

### 1.5.3 Pengumpulan Data

#### 1.5.3.1 Wawancara Mendalam

Data yang hendak dicari dalam penelitian ini adalah realitas subjektif berupa pemahaman untuk menelaah esensi dan makna etnisitas. Etnisitas, di samping agama dan gender adalah salah satu simbol yang bertindak sebagai perantara dari subjek-subjek berinteraksi (Singer, 1984: 6--7).

Kegiatan pengumpulan bahan dimulai sejak Nopember 2002 hingga Maret 2004. Pada dua bulan pertama, peneliti lebih banyak mengakrabkan diri dengan informan penelitian, khususnya guna saling kenal dengan informan. Pada tahapan ini, peneliti mengutarakan tujuan kehadiran dan penjelasan ringkas tentang penelitian. Walaupun peneliti sudah kenal dengan informan sebelumnya, namun kegiatan sosialisasi awal amatlah penting artinya bagi peneliti. Kegiatan orientasi awal relatif tidak mengalami hambatan apa pun, khususnya dalam penciptaan hubungan antarpersonal yang harmonis (penciptaan *rappori*). Sebelum melakukan tahapan eksplorasi data, peneliti mempersiapkan secara teknis hal-hal yang akan memperlancar dalam penelitian misalnya pengadaan *tape recorder* dan penyusunan *interview guide*.

Pada awal-awal penelitian, peneliti menjelaskan bahwa peneliti sebenarnya ingin mengetahui lebih banyak tahu tentang politik lokal dan hal yang berkaitan tentang PDI-P Kota Kendari. Respons informan semua yang didatangi menunjukkan sikap yang terbuka bahkan ada yang berpesan kepada peneliti kalau hasil penelitian dapat bermanfaat guna memperbaiki citra partai. Namun jika pertanyaan tersebut kemudian mulai bergeser ke wacana putera daerah atau etnisitas, pembicaraan seringkali agar tersendat. Hal itu disebabkan karena ada perbedaan identitas etnis peneliti dengan informan. Menghadapi situasi tersebut peneliti menghadapi sikap pasif sambil sesekali memancing pertanyaan yang tidak langsung.

Karena informasi yang akan dihimpun termasuk hal peka, peneliti mengidentifikasi semua pernyataan informan yang pernah dimuat di koran lokal (*Kendari Pos* dan *Kendari Ekspres*) terutama yang berkenaan dengan "isu putera daerah" dan penelusuran bahan tertulis aspirasi yang pernah dilakukan oleh informan. Untuk maksud yang terakhir itu, peneliti menemui panitia pemilihan gubernur dan panitia pemilihan walikota. Peneliti menghadapi kesulitan karena gubernur dan walikota yang terpilih "ditimpa musibah". Gubernur diisukan melakukan praktik politik uang dalam memenangkan pertarungan yang sampai sekarang masih menjadi perbincangan di kalangan aktivis. Sementara walikota sempat tertunda pelantikannya selama satu tahun karena persetujuan antara DPRD dengan Drs. La Ode Kaimuddin (gubernur saat itu). Masalah tersebut menyebabkan panitia pemilihan agak keberatan memberi dokumen-dokumen kepada peneliti. Mengatasi kesulitan ini, peneliti memperlihatkan izin penelitian yang diterbitkan oleh Pascasarjana Unair. Izin ini ternyata belum cukup ampuh untuk mengeluarkan dokumen

sebagaimana layaknya pengurus partai. Berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh informan dapat disaksikan peneliti.

Wawancara mendalam dilakukan dengan terlebih dahulu membuat perjanjian. Dalam pelaksanaannya, wawancara dilakukan sedemikian rupa sehingga berlangsung tidak formal, bahkan cenderung seperti sedang bercerita pengalamannya masing-masing. Tempat untuk wawancara berubah-ubah, kadang-kadang di sekretariat atau kantor, di rumah, bahkan di tempat karaoke sesuai dengan keinginan informan.

Proses wawancara mendalam dihentikan setelah peneliti menganggap jenuh yaitu setelah tidak ada jawaban baru dari informan (Strauss, 1990: 21). Situasi ini ditandai dengan data yang terkumpul selalu menunjukkan hal yang sama dari berbagai situasi dan sumber yang berbeda.

### 1.5.3.2 Observasi Partisipan

Sebagian dari kegiatan dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang situasi setempat atau *social setting* yang menjadi konteks penelitian ini. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, hubungan yang telah dirintis sehingga menjadi harmonis memungkinkan peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan-kegiatan di tingkat partai, misalnya menjadi penceramah dalam partai<sup>26</sup>, mengikuti kegiatan rapat di partai, menghadiri acara sosialisasi, dan kampanye. Aktivitas tersebut sangat membantu peneliti dalam melakukan observasi ketika penelitian ini dilakukan. Peneliti mendapat kemudahan untuk mengobservasi

<sup>26</sup> Jika mendapatkan bahan dan informasi penelitian yang dapat diandalkan, peneliti menghindari topik tentang *transaksi*.

kegiatan elite parpol. Bagi peneliti, komunikasi dengan informan tidak terlalu sulit karena peneliti sudah dikenal oleh informan.

Dalam observasi partisipan, peneliti juga mengamati berbagai ragam perilaku informan yang terkait dengan pandangan, menyimak kata-kata, ungkapan-ungkapan yang relevan dengan etnisitas. Selama melakukan penelitian di lokasi, peneliti berusaha mencatat dalam bentuk *field notes*. Dalam penulisan laporan ada kutipan langsung yang dipaparkan apa adanya, tetapi sebagian besar kutipan-kutipan langsung dengan bahasa Indonesia tanpa menyimpang dari substansi yang disampaikan informan.

Etnografi diciptakan melalui apa yang oleh Atkinson (1992: 5) disebut sebagai "proses ganda dari suatu produksi dan reproduksi tekstual". Dengan demikian *field notes* menjadi sangat penting dalam etnografi. Catatan lapangan adalah suatu bentuk yang mewakili fakta sosial budaya, karena itu juga merupakan cara mereduksi dan merekonstruksi hasil pengamatan tentang berbagai peristiwa, orang-orang, dan tempat untuk ditulis sebagai cerita yang representatif. Menurut Atkinson, sebagai bentuk representasi, teks-teks catatan lapangan harus selektif. Tulisan seorang etnograf tentang berbagai hal tertentu yang terasa tidak signifikan harus ditanggalkan. Dalam pada itu, catatan lapangan tidak dikembangkan melalui rekaman yang lengkap, cukup dengan catatan yang penting-penting, tetapi tentang banyak hal.

Lebih lanjut, catatan lapangan diharapkan dapat mengembangkan catatan-catatan deskriptif tentang orang, pandangan-pandangan, dan dialog, serta pengalaman pribadi, yaitu suatu catatan yang mengandung teorisasi dan interpretasi yang jelas. Akan tetapi, deskripsi tidak sesederhana sekedar fakta-fakta, tetapi merupakan penulisan deskriptif yang mengukir dan reflektif yang

bertujuan dan memiliki komitmen khusus, dan juga terlibat dalam interpretasi serta *sense making* (Emerson, Fretz, dan Shaw, 2001: 353) Olehkarena itu, pembuatan catatan etnografis merupakan jembatan yang menghubungkan antara "temuan" dengan "deskripsi" yang memudahkan etnografer menuliskan deskripsi akhir (Spradley, 1997: 89).

Bahan yang terkumpul baik dari wawancara mendalam dan observasi partisipan, sesampainya di rumah selanjutnya peneliti tuangkan dalam bentuk transkrip wawancara. Hasilnya, dalam kesempatan tertentu peneliti mengirimkan *e-mail* dan menelpon kepada ko-promotor untuk mendapatkan tanggapannya. Peneliti biasanya mendiskusikan ketepatan prosedur yang digunakan untuk memperoleh data lapang, proses analisis data sampai pada keakurasian data. Informasi dan bahan yang telah diperoleh tersebut, penulis lalu kaji dengan teori-teori yang relevan. Guna mempertajam analisis, penulis melakukan diskusi dengan teman sejawat.

Terkait itu pula, beruntung penulis bisa diberikan kesempatan oleh ko-promotor 1 untuk mengikuti kegiatan Seminar Internasional yang dilaksanakan oleh Percik di Salatiga 14--18 Juli 2003. Pada saat itu, peneliti dapat memanfaatkan sebaik-baiknya momen tersebut guna mendialogkan hasil-hasil temuan di lapangan dengan berdialog dengan Hans Atlov, Ph.D, Anton Lucas, Ph.D, Jan Bremen, Ph.D, Kutut Suwondo, Ph.D, Endang Turmudi, Ph.D dan peneliti-peneliti muda lainnya. Atas rekomendasi ko promotor 2, peneliti sempat berdiskusi dengan Prof. Dr. Lopian (Guru Besar Sejarah UI) khususnya untuk melihat bagaimana sejarah lokal digunakan untuk memahami kejadian di daerah penelitian Kendari

Verifikasi abstraksi melalui diskusi dengan banyak orang penulis sengaja tempuh agar diperoleh 2 manfaat yakni (1) dapat menguji secara empiris data yang diperoleh, (2) dapat melakukan *re-check* dan *cross check* informasi yang diperoleh dalam memahami kompleksitas fenomena. Cara di atas dalam penelitian kualitatif lazimnya disebut triangulasi data.

### 1.5.3.3 Kendari sebagai Setting Penelitian

Kota Kendari dipilih sebagai *setting* penelitian karena kota ini merupakan pusat perdagangan, pemerintahan, dan pendidikan bagi daerah-daerah yang ada di Sulawesi Tenggara. Dengan lokasi kota yang termasuk di Kawasan Timur Indonesia memungkinkan gelanggang bertemunya “tradisional dan modern”, “lokal dan nasional”. Saat ini, seiring dengan perkembangan kota ini, sedang terjadi perubahan dalam segala bidang seperti ruang fisik, birokrasi, pendidikan sampai pada semangat warga masyarakat dalam membangun identitas dirinya.

Berbagai perubahan kini tengah muncul sebagai konsekuensi dari perkembangan kota. Pada tahap ini peneliti akan menyusun suatu analisis perkembangan kota dengan fokus lokasi dan lingkungan, sejarah kota, segregasi etnis, dan potret politik lokal, serta potret interaksi antaretnis. Bahan-bahan tersebut diperoleh berdasarkan hasil-hasil penelitian, dokumen dan memori serah terima jabatan gubernur. Guna memperoleh data tentang komposisi etnis di Kota Kendari peneliti peroleh data dari *Volkstelling* 1930 yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dan Sensus Penduduk 2000 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Semua bahan yang diperoleh

tersebut bermanfaat bagi peneliti untuk dijadikan konteks dalam analisis penelitian.

Ada fenomena-fenomena empirik yang mendukung pemilihan Kendari sebagai *setting* penelitian ini Kendari, berdasarkan sejarah kotanya berasal dari Raja Sao-Sao dan Tekaka. Dengan demikian, pada tahap-tahap pembentukan daerah, banyak aparat birokrat dan politisi merupakan limpahan dari swapraja Laiwoi yang berasal dari etnis Tolaki, Muna, dan Buton dan sebagian kecil Bugis. Akan tetapi, di sektor "ekonomi pasar", etnis Bugis yang lebih menguasai bahkan dalam interaksi antaretnis, bahasa Bugis menjadi *lingua franca* dalam kehidupan mereka. Seiring dengan hal itu, terakhir muncul fenomena perilaku yang mencoba melakukan *indigenou*-sasi yang kemudian mengarah menjadi sentimen keaslian etnisitas atas modal kepemimpinannya melalui lontaran putera daerah. Sebagai contoh, pada setiap pemilihan walikota, gubernur, bupati atau jabatan-jabatan strategis lainnya, para aktor lokal mengumandangkan perlunya putera daerah diberikan kesempatan untuk tampil sebagai pimpinan.

Di konteks parpol, *indigenou*-sasi dilakukan oleh Munajab dengan merekrut sebagian besar orang Muna menjadi pengurus, mendukung dan mengusulkan La Ode Khalifa sebagai wakil walikota. Sementara itu, La Ode Munadora juga memunculkan cara tersendiri dalam melakukan *indigenou*-sasi. Ia mengangkat La Ode Aca, orang Muna, sebagai "orang kepercayaan", yang berfungsi mengatur segala jadwal organisasi sebagaimana layaknya seorang sekretaris. Padahal, dalam struktur pengurus, Hermanto, S.H.,M.Hum. (etnis Buton) yang diberi kepercayaan sebagai sekretaris partai. Berbagai langkah-langkah tersebut dalam pengelolaan

etnisitas, dapat dijadikan simbol kekuasaan yang secara efektif dapat menghubungkan elite dengan massa pendukung PDI-P.

#### 1.5.3.4 Penelusuran Riwayat Hidup dan Dokumen-Dokumen Tertulis

Pada tahap ini, peneliti berusaha untuk mengumpulkan riwayat hidup (*life history*) informan, untuk mengungkap motivasi, aspirasi, ambisi kehidupannya. Sementara penelusuran teks dan dokumen-dokumen organisasi seperti risalah rapat, berita acara organisasi, AD/ART yang semuanya dilakukan secara cermat sehingga diperoleh gambaran masa lampau yang kemudian dicatat, disederhanakan, dan diklasifikasikan. Penelusuran dokumen akan ditelusuri juga dari berita-berita koran lokal khususnya menyangkut data tentang pernyataan sikap dan perilaku, sikap, dan respon informan dalam momen-momen politik penting di tingkat lokal.

#### 1.5.4 Pengolahan dan Analisis Data

Usaha untuk mengungkap makna etnisitas meliputi dua proses, yaitu (1) memahami sudut pandang pelaku asli, tahapan ini disebut pula dengan *first order understanding*; dan (2) menilai peristiwa-peristiwa tersebut, tahapan ini adalah *second order understanding*. Cara pertama yakni analisis yang digunakan untuk memperoleh *first understanding* adalah meminta kepada pihak yang diteliti guna mendapatkan penjelasan yang benar. Peneliti berupaya menggali apa yang mendorong pelaku melakukan tindakan tersebut. Informasi-informasi yang diperoleh dalam tahapan ini disebut eksternalisasi menurut pemahaman Bergerian.

Di sisi lain, peneliti belum cukup memahami persoalan dengan berdasar pada informasi-informasi dari informan tersebut. Peneliti berkewajiban untuk melakukan rekonstruksi agar informasi yang satu dapat dijelaskan dalam pertahannya dengan informasi yang lain. Pada tahapan ini, peneliti memberikan penjelasan atau pemahaman sehingga akan diperoleh suatu makna yang baru. Makna baru ini disebut objektivasi menurut pemahaman Bergerian.

Usaha untuk mengungkapkan makna dengan analisis empiris sudah dikerjakan sejak di lapangan, dengan mengolah bahan empiris menjadi pola-pola dan berbagai kategori secara tepat. Data dan informasi yang berasal dari wawancara mendalam, observasi partisipan dan transkrip lapangan, terlebih dahulu dipilah berdasarkan kategori-kategori tertentu. Kategori tersebut, di antaranya konteks yang melatari aktor, dan interaksi sosial informan.

Pada tahap akhir kegiatan kerja etnografi, sejak Juli 2003 adalah pembuatan laporan dengan menggunakan analisis deskriptif-eksplanatif yang merupakan perkembangan penting dalam studi etnografi. Melalui analisis ini, peneliti memulai merumuskan terlebih dahulu sejumlah persoalan ke dalam pedoman pertanyaan. Isu-isu spesifik itu diperoleh melalui teknik-teknik pengumpulan bahan yang telah diuraikan sebelumnya. Dari data yang sudah terkumpul tersebut, peneliti membuat deskripsi secara terpola guna membantu peneliti dalam menemukan suatu konseptualisasi sehingga diperoleh apa yang dikatakan oleh Patton (1990:390) konsep-konsep *indigenious*, yaitu idiom atau *phrasa* kunci yang dimunculkan oleh subjek penelitian sendiri dalam mengkonstruksi realitas yang mereka hadapi. Dengan demikian, konsep *indigenious* yang dibangun berdasarkan data etnografik, tidak membatasi diri

untuk menguraikan bagaimana orang-orang berperilaku di suatu lingkungan tertentu, melainkan berusaha untuk menghasilkan proposisi-proposisi interaktif universal (Silverman dalam Mulyana, 2001: 174). Pada tahap ini dilakukan usaha penamaan (*naming*) atau penjurukan (*labeling*) sehingga hal-hal yang sebelumnya kabur bisa menjadi jelas. Proses ini bisa berjalan lancar jika sebelumnya berkembang suasana *familiaritas* dan intim dengan informan yang diteliti. Dari petunjuk seperti ini, peneliti akan "membenamkan diri" dalam data kualitatif yang ada lalu kemudian disortir, diklasifikasikan, disortir lagi, dan diklasifikasikan lagi, suatu analisis yang saksama (*faithful*) dan detail tercapai.



## BAB II

### PROFIL KOTA KENDARI: KOTA MULTI ETNIS DALAM TRANSISI

Konstruksi sosial tentang alasan yang mendasari tindakan para elite yang membangkitkan etnisitas, tidak terbentuk begitu saja, tetapi, memiliki keterkaitan dengan konteks tempat berlangsungnya jaringan tersebut. Ada beberapa faktor yang menjadi konteks konstruksi sosial para elite meliputi kondisi fisik, sejarah kota, segregasi etnis, sosok birokrasi, pola relasi antaretnis dan kondisi intern etnis itu sendiri.

Kota Kendari terletak pada 4 ° LS dan 122 ° BT di Teluk Kendari. Pada masa lalu, Kota Kendari belum banyak diperhitungkan. Dengan posisinya yang tidak “terlalu strategis” tersebut, tidak mengherankan pada zaman Belanda, kota ini diabaikan secara politik karena masih kurang penghuninya (Harvey, 1984: 39). Pada permulaan revolusi, Sulawesi hanya dijadikan salah satu dari delapan provinsi Republik Indonesia dengan Makassar menjadi ibu kota, dan Sam Ratulangi, diangkat menjadi gubernur. Sampai akhir abad ke-18, Kota Kendari dan sebagian besar wilayah masih berupa hutan. Perkembangan yang pesat baru terjadi ketika Belanda pada tahun 1917--1918 membuat jalan poros dari Wawotobi ke Unaaha dalam usaha untuk membuka Kendari dari keterisolasiannya. Setelah kemerdekaan, poros jalan tersebut dilanjutkan sampai Kolaka seiring dengan program Repelita yang dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru.

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang perkembangan Kota Kendari sebagai *setting* penelitian. Dalam perjalanan waktu, Kota Kendari berkembang dengan sejarahnya sendiri. Di kota ini, misalnya, walaupun telah berlangsung proses modernisasi dengan proses keterbukaan satu sama lain, akan tetapi

kadang-kadang etnisitas tampak memainkan peran penting sebagai salah satu identitas lokal.

## 2.1. Latar Sejarah Sosial

### 2.1.1 Sejarah Kota

Kota Kendari yang ditemukan pertama kali J.N. Vosmaer tanggal 9 Mei 1831. Atas penemuannya itu, pemerintah kolonial Belanda memberi nama Teluk Kendari dengan *Vosmaer Baai* (Teluk Vosmaer). Pada saat Vosmaer menemukan Kendari, kota ini awalnya merupakan tempat penimbunan barang. Penimbunan ini banyak dilakukan oleh etnis Bajo dan Bugis yang mengangkut dan menampung hasil-hasil panen petani. Pada saat-saat tertentu, barang-barang yang ditampung tersebut diangkut ke Makassar dan Jawa. Perkembangan seperti di atas, mendorong pemerintah kolonial Belanda ingin menjadikan kota ini sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan.<sup>1</sup>

Setelah membangun pelabuhan, pemerintah kolonial juga membangun berbagai fasilitas fisik baik di bidang militer, pendidikan, maupun transportasi. Di bidang militer dan pertahanan, Belanda mendirikan asrama militer di Kendari Caddi (sekitar 1 km sebelah barat Kendari). Tempat ini berupa lembah yang diapit oleh daerah perbukitan dan berada di tepi pantai, yang merupakan benteng pertahanan yang tertata secara alami dan kukuh. Dalam bidang pendidikan, Belanda mendirikan sekolah-sekolah tingkat dasar dan menengah seperti dibangun *Vervolg School* yang lama belajar selama dua tahun, serta

---

<sup>1</sup> Hal itu dapat dilihat dari *The Journal of Indian Archipelago and Eastern Asia*, Vol V hal 182 : "Mr. Vosmaer ... Discovered and made known the bay of Kendari, since called in his honor, Vosmaer bay .... Bay his effect 'tis the elements of permanent factory were established in this bay, and way for commercial relations was opened by him in this little known positions of the island of Celebes"

sekolah sambungan *Folk School* dan *Holland Inlandshe School* (HIS). Pada sekolah HIS Bahasa Belanda dijadikan sebagai bahasa pengantar dan belajar tujuh tahun (Dekdikbud, 1983:46). Akan tetapi, ada tindakan diskriminatif di sekolah tersebut. HIS hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan dan atau kelompok elite masyarakat di Sulawesi Tenggara yang mempunyai biaya

Dengan berbagai fasilitas di atas, Kendari berubah menjadi pusat kegiatan pemerintahan sebagai ibukota Kerajaan Laiwoi. Sebagai pusat kerajaan Laiwoi, Kota Kendari dibangun berdasarkan konsep perwilayahan yakni *onderafdeeling* dan distrik. Pada awal pemerintahan kolonial, Kendari terdiri atas 16 distrik<sup>2</sup> yang masing-masing dikepalai oleh kepala distrik. Konsep perwilayahan yang diterapkan tersebut kemudian menjadi landasan struktur dan fungsi birokrasi di kerajaan Laiwoi.<sup>3</sup>

Karena penetrasi yang dilakukan oleh Belanda tersebut, wilayah Kendari semakin sempit, menjadi 14 distrik.<sup>4</sup> Perkembangan yang cukup berarti, Kendari telah menjadi distrik tersendiri yang wilayahnya meliputi bagian utara dan bagian barat Teluk Kendari. Kendari saat itu terdiri atas 4 sub distrik yakni Ranomeeto, Konawe, Andolo, dan Landoole. Perkembangan seperti di atas sangat berarti bagi karakteristik kota, karena walau bersifat homogen, dalam pertumbuhan dan perkembangannya Kendari kemudian

---

<sup>2</sup> Keenam belas distrik tersebut adalah Sampara, Abeti, Kolono, Konda, Palangga, Andolo, Lambuya, Wawotobi, Pongidaba, Tongauna, Abuki, Latoma, Lasolo, Asera, Wawonii, dan Zuidelijk Boegineese. Lihat Quarles de Quarles, *Memorie van overgave Gouverneur van Celebes*, dalam Harvey, 1984: 8.

<sup>3</sup> Hal itu dapat dilihat dari gelar-gelar tradisional yang pada kepala-kepala distrik. Kepala distrik diberi gelar *anabua*, sementara jabatan kepala negara yakni diberi gelar *makole*, pembantu raja yakni *sipatu* dan *kapita*.

<sup>4</sup> Pengurangan dari 16 menjadi 14 disebabkan karena distrik Sampara dipecah menjadi dua dan beberapa distrik digabungkan, sementara distrik khusus yakni *Zuidelijk Boegineese* ditiadakan. Pada masa kekuasaan Belanda, Indonesia dibagi ke dalam keresidenan-keresidenan, setiap keresidenan dibagi lagi menjadi distrik, dan distrik dibagi ke dalam subdistrik.

menjadi kota pluralis yang penuh dikotomi dan mempunyai potensi konflik yang tinggi.

Setelah Belanda pergi akibat dari kekalahan perang melawan Jepang di Indonesia, Jepang kemudian mengambil alih kekuasaan. Konsekuensinya, Jepang berhak untuk membangun wilayah yang ditinggalkan oleh Belanda. Pada zaman Jepang, Kendari dijadikan sebagai basis untuk mengatur serangan ke daerah lain di Nusantara dan membendung bala bantuan tentara sekutu yang datang dari Timur yaitu Australia. Oleh karena itu, terjadi pemusatan kekuatan tentara Jepang di Kendari. Pemusatan kekuatan tersebut membawa konsekuensi bagi pembangunan fisik dan pembangunan sosial.

Di Kendari kemudian dibangun kubu-kubu pertahanan Jepang, seperti pangkalan udara Kendari. Pada saat itu, hampir sebagian besar penduduk Kendari dan sekitarnya dikerahkan untuk membangun pelabuhan udara tersebut. Adapun latar belakang Jepang membangun bandar pelabuhan Teluk Kendari adalah untuk mengatur serangan udara tentara Jepang dalam melakukan pemboman terhadap basis tentara KNIL. Di dalam kota dibangun barak militer. Jepang menghadapi masalah pangan dalam perang Asia Pasifik sehingga Jepang membentuk *romusha* sebagai tenaga kerja sukarela. Mereka dipekerjakan pada proyek pembuatan jalan, fasilitas militer, tambang, perkebunan, dan industri. Mereka tidak digaji dan kesehatan menjadi tanggung jawab setiap orang. Pembangunan pada zaman Jepang tidak berkembang ke arah suatu perencanaan kota modern.

Kini, perkembangan kota dirancang sesuai dengan perkembangan modernisasi. Akan tetapi, uniknya modernisasi perkembangan kota hanya menjadi imaji dari elite-elite yang berkuasa saja, bukan imaji dari segenap

publik. Hal itu terlihat dari corak perkembangan kota yang tidak menimbulkan ciri khas tersendiri. Sebagaimana dijumpai di Jawa, pusat kota ditandai oleh adanya alun-alun yang melukiskan adanya pusat kota pada zaman lampau. Satu-satunya peninggalan kerajaan yang dapat dilihat pada saat ini yakni masih adanya kuburan Raja Sao-Sao yang terletak di daerah Lepo-Lepo. Akan tetapi, pusat pemerintahan, yang dalam perkembangan kota di Jawa, yakni di alun-alun sudah dua kali dipindahkan setelah sebelumnya berada di kota lama, Mandonga dan kini ke Poasia.

Oleh karena itu, sulit untuk memberi tanda Kota Kendari yang mencerminkan realitas kebesaran masa lalu. Tidak ada peninggalan masa lalu yang mencerminkan sebagai suatu simbol-simbol daerah yang disentuh oleh nilai-nilai pribumi. Sejumlah arsitektur kini hanya dirancang dengan mengikuti pola yang modern. Demikian pula bila ada penduduk pribumi yang berhasil di daerah rantau atau daerah sendiri kemudian membangun rumah-rumah dengan corak arsitektur modern.

Dengan memperhatikan perkembangan seperti itu, Kendari merupakan bagian dari apa yang disebut oleh Hildred Geertz (dalam Murray, 1995: 20) sebagai "superbudaya metropolitan". Dalam konteks yang seperti itulah, kota Kendari menjadi menarik untuk menelaah relasi antaretnisnya. Jika melihat penampilan fisiknya, Kendari hampir mirip "desa", akan tetapi dalam penelitian ini Kendari akan diperlakukan sebagai "kota". Alasan yang terpenting, relasi dan identitas sosial pada derajat tertentu tidak hanya terbatas pada lingkungan tetangga, akan tetapi dapat menembus ruang sosial karena adanya persamaan pendidikan, penghasilan, kekayaan, pekerjaan, etnis dan agama. Orang kaya, berpendidikan, Islam, Kristen, Budha, "gado-gado" dari

segi etnis dapat dijumpai di kota ini. Hal itu berbeda dengan pola “desa”, yang pola relasi hanya berorientasi pada hubungan-hubungan tetangga dan nilai-nilai kultur tertentu (Sullivan, 1986: 47).

Arus urbanisasi, sudah terjadi sejak tahun 60-an. Pada saat itu banyak etnis Bugis dan Makassar yang berdatangan ke Kendari dengan alasan keamanan. Sementara itu, etnis Jawa, Bali, Madura, Lombok dan etnis-etnis lain juga berdatangan ke Kendari, sebagai akibat program transmigrasi yang menjadikan Propinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu daerah tujuan dalam program tersebut.

Dengan konfigurasi seperti itu maka dalam banyak hal Kendari dilihat dapat mewakili sebagai suatu wilayah yang terdapat interdependensi campuran populasi antaretnis yang ada, dibandingkan dengan populasi di desa yang hanya mewakili satu populasi etnis tertentu saja. Oleh karena itu, dapat dikatakan Kota Kendari adalah kota yang paling “gado-gado” dari sudut pandang etnis dibanding dengan kota lain di Sulawesi Tenggara sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat Kendari merupakan masyarakat majemuk.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Masyarakat majemuk disini diartikan sebagai suatu masyarakat yang didalamnya bermukim lebih dari satu kelompok sosial yang berbeda latar belakang etnisnya. Secara teoritis, Furnivall (1948) menunjukkan bahwa suatu masyarakat majemuk ditandai oleh penduduknya yang secara etnis saling berbeda yang hidup dalam satuan-satuan kelompoknya masing-masing. Ciri-ciri ini ada pada masyarakat jajahan yang merupakan produk dari politik ekonomi penjajah untuk menguasai sumber-sumber daya yang ada setempat. Produk dan politik ekonomi ini adalah adanya golongan penjajah yang mempersatukan secara paksa masyarakat-masyarakat pribumi kedalam sebuah masyarakat jajahan untuk diatur dan diperintah guna kepentingan ekonomi penjajah.

### 2.1.2 Awal Kedatangan Masing-Masing Etnis ke Kendari

Menurut Traffiers penduduk awal *onderafdeeling* Kendari (Kerajaan Laiwoi) adalah orang<sup>6</sup> Bugis dan Makassar, Bajo, Tolaki, Buton dan Moena, To Rete, To Kapontori, dan To Wawonii. Dari kelima penduduk tersebut, ada tiga etnis utama yang merupakan penduduk utama yakni orang-orang Bugis, orang Bajo dan orang Tolaki. Orang Bugis Makassar biasa disebut orang Bugis saja, atau orang dari *selatan*.

Kedatangan orang Bugis ke Sulawesi Tenggara disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, karena kemelut dan kekalahan kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar melawan Belanda. Mengenai hal ini Mattulada (1985: 464) menerangkan secara lebih rinci sebagai berikut:

Sejak peperangan yang terakhir melawan Belanda, yakni tahun 1906, dua buah kerajaan Bugis-Makassar yakni Bone dan Gowa tidak mempunyai raja lagi. La Pawawoi Karaeng Segeri, Arompene (raja Bone) terakhir ditawan dan diasingkan di Jawa Barat, dan mengakhiri hayatnya di sana. Raja Gowa terakhir, Karaeng Lembang Parang gugur dalam salah satu medan pertempuran. Akibatnya, semua alat-alat kebesaran kerajaan-kerajaan dirampas oleh Belanda dan banyak kalangan bangsawan memilih keluar daerah Sulawesi Selatan.

Motivasi untuk merantau, sudah menjadi *trade mark* bagi orang Bugis Makassar karena jauh sebelum peperangan itu, sesungguhnya pada abad XVII orang Bugis Makassar sudah menguasai perairan Nusantara bagian Timur. Karena itu, Ternate, Maluku Barat, Sumbawa, dan Flores Barat banyak dihuni yakni orang Bugis Makassar. Sejak dahulu orang Bugis ada di Jawa (Harvey,

<sup>6</sup> Dalam pergantian semi-hari istilah etnis tidak atau jarang sekali digunakan kecuali istilah "orang" untuk menyebut etnis tertentu, misalnya orang Muna sebagai pengganti etnis Muna, orang Tolaki sebagai pengganti etnis Tolaki, dan seterusnya. Oleh karena itu, di dalam disertasi ini istilah orang Muna digunakan untuk menyebut etnis Muna. Demikian halnya pada etnis etnis lain.

1989: 14) bahkan ada yang berperang melawan Belanda di Jawa<sup>7</sup> Selain daerah-daerah tersebut, orang Bugis Makassar ada di daerah pantai Timur dan Utara Sumatera, pantai Barat Malaya, pantai Barat dan Selatan Kalimantan, nelayan dan petani di Jambi dan Irian Jaya (Mattulada, 1985 : 474)

*Kedua*, orang Bugis-Makassar ingin mengembangkan jaringan perdagangan. Sebagaimana diulas oleh Mattulada (1985: 500) pada tahun 50-an niagawan Bugis Makassar yang bergerak di lapangan hasil bumi, masih dianggap menguasai *networking* perdagangan dan dapat mengakumulasi modal yang memadai untuk menghadapi saingan-saingan niaga dari kalangan orang Cina. Ketika organisasi perdagangan sudah mulai memasuki tingkatan organisasi yang lebih modern, perkembangan usaha di kalangan para pengusaha Bugis Makassar mulai terancam, tak mampu menghadapi saingan para pengusaha Cina dalam hampir segenap lapangan kegiatan perekonomian dan keuangan. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, pedagang-pedagang membuat *networking-networking* yang lebih luas lagi. Sensus 1930 melaporkan bahwa 10% dari orang Bugis dan 2% orang Makassar di Hindia Belanda tinggal di luar Sulawesi Selatan (Harvey, 1989: 15).

Mengenai kedatangan orang Bugis yang pertama kali datang ke Kendari, peneliti tidak menemukan data tertulis tentang hal tersebut. Walau demikian, hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Kendari dapat dijadikan pegangan. Berikut ini penuturan H. Surabaya :

“Orang Bugis datang ke Kendari dalam dua gelombang pertama diperkirakan pada abad ke 15. Rombongan ini yang termasuk membentuk pemerintahan Kota Kendari lama atas persetujuan Raja

---

<sup>7</sup> Dalam kitab *Nagarakertagama* memasukkan dalam daftarnya nama-nama “terangga Jawa” yakni kerajaan-kerajaan : Bantayan (sekarang dikenal Bantaeng), Luwuk (Luwu atau Luwuk), Lida (Pulau Lida), Makassar, Butun (Buton), Banggawi (Banggai), Kunir (sebelah Selatan Pulau Kalimantan), Salaya ( dikenal juga Selayar), Galisao (Kangean, sebelah utara Bali)

Ranomeeto, Akan tetapi yang memerintah adalah turunan Bugis yang disebut dengan sebutan Kapala Bugis. Gelombang kedua yakni diperkirakan pada abad ke 17. Karena penduduk awal Kota Kendari suku Bugis, maka dalam komposisi etnis penduduk Kendari adanya kecenderungan "pembugisan". Perkembangannya kemudian banyak suku Muna dan hampir semua orang To Rete dan To Kapontori menjadi Bugis, baik melalui hubungan hubungan kekerabatan (kawin mawin) maupun melalui bahasa. Orang Bajopun tidak terlepas dari kecenderungan seperti itu walaupun sebagian masih tetap mempertahankan identitas kabajoannya. Karena orang Bugis yang sudah lama masuk ke Kendari, maka bagi orang Tolaki menganggap bahwa Bugis itu adalah sahabat intim yang kental, tidak berpisah" (wawancara, 12 Maret 2003).

Apa yang dikemukakan oleh H. Surabaya tersebut menunjukkan bahwa orang Bugis yang sudah datang sejak beberapa abad lalu telah bercampur baur dan saling kawin mawin dengan orang asli. Diduga sebab utamanya adalah karena di masa jayanya Kerajaan Konawe ada keturunan Bugis yang menjadi elite di pemerintahan tradisional. Kalau pada masa lampau orang Bugis yang datang ke Kendari terdiri dari para petani, nelayan, pedagang, para pendatang Bugis yang datang akhir-akhir ini sudah beragam mulai dari petani, ingin melanjutkan pendidikan S1, menjadi petambak, pedagang eceran, dan mengembangkan karier di aparat (sipil, ABRI) dan polisi)

Orang Bajo sendiri sejak lama mendiami Kendari, yang dapat dibuktikan dengan nama Kampung Bajo. Pada umumnya pekerjaan orang Bajo sebagai nelayan. Awalnya, orang Bajo membangun rumah-rumah panggung air di kawasan pantai. Rumah panggung yang dibangun sangat sederhana dan tidak permanen. Tiangnya hanya 4 sampai 6 buah dari kayu gelondongan dengan tinggi lantai sebatas jangkauan air saat pasang.

Orang Buton meninggalkan Kapontori karena tekanan pejabat-pejabatnya di sana (Truffers, dalam Depdikbud, 1983: 43). Dari sejarah Buton

diketahui bahwa setiap wilayah kerajaan harus membayar pajak hasil bumi tertentu yang dipikul secara merata oleh penduduk setempat. Segala kebutuhan pokok dari kerajaan ditanggung oleh rakyat, terutama yang tinggal di pusat-pusat kerajaan. Jika hal tersebut tidak dapat ditunaikan maka rakyat setempat secara massal akan dijadikan budak kerajaan. Keadaan ini banyak terjadi pada masa pemerintahan Sultan La'aluwu (A. Mulku Zahari, 2001). Salah satu daerah tujuan orang Buton adalah Kendari. Hanya saja, penulis tidak memperoleh catatan kapan pertama kali orang Buton datang ke Kendari.

Sementara itu, orang Jawa, Bali, dan Madura diperkirakan sudah datang ke Kendari pada tahun 50-an. Di daerah Sulawesi Tenggara, pada zaman kolonial ada program kolonisasi yang pada tahun 30-an *Bawwezen* (Dinas Kehutanan waktu itu) mendatangkan 100 KK dari Jawa dan Madura untuk bekerja sebagai penarik balok-balok kayu jati dari hutan ke tempat-tempat penampungan (*staple-plaats*). Tahun 50-an, sebagian dari orang Jawa dan Madura yang diperkejakan di Muna pindah ke Kendari dan menempati pada salah satu tempat pada poros jalan Lepo-Lepo Kendari dekat Ranomeeto yang kemudian orang Jawa Madura menamakannya dengan Bangunrejo. Pada tahun-tahun 70-an, jumlah orang Jawa, Madura dan Bali semakin banyak seiring dengan program transmigrasi tempat daerah Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai salah satu daerah penerima transmigrasi ke lima di Indonesia (Whittan dkk. 1987: 695).<sup>6</sup> Di Kabupaten Kendari sendiri, lokasi transmigrasi terdapat di Amoitto (Sindangkasih dan Jatibali) yang tidak jauh dari lapangan udara Woltermonginsidi.

---

<sup>6</sup> Pada awal-awal program ini dilaksanakan oleh orde baru, Sulawesi Tenggara merupakan daerah yang paling banyak tempat pemukiman transmigrasi dan jumlah transmigran. Pada tahun 1975, jumlah unit pemukiman transmigrasi yakni 51, jumlah KK 21.826, jumlah transmigran 89.139 jiwa.

Orang-orang Flores, Sumbawa, dan Sumba sudah datang dan menetap di Kendari dalam jumlah yang kecil awal-awal tahun enam puluhan. Di Kendari mereka hidup dalam kelompok seasal, atau secara bersama-sama mendiami kawasan yang jarang penduduknya. Sebagian dari orang Nusa Tenggara terkenal sebagai penjaga keamanan di kantor-kantor pemerintah atau swasta. Tidak banyak terjadi saling hubungan antara orang Tolaki dan orang asal Nusa Tenggara ini, kecuali dalam masalah-masalah pekerjaan.

Orang Cina dan Arab telah lama menetap di Kendari. Keturunan-keturunan Cina, dan walaupun tidak mencolok, cukup banyak dibandingkan dengan orang Arab. Orang Arab di Kendari menikmati status sosial yang cukup tinggi karena kedudukan sosial dikaitkan dengan kedudukan mereka sebagai pemeluk agama Islam. Karena agama yang dipeluk sama dengan etnis asli, orang Arab tidak sulit untuk diterima dalam kehidupan. Berbeda dengan orang Arab, karena agama yang dipeluk tidak sama yang dipeluk etnis asli beragama Islam, orang Cina dalam beberapa hal terpisah dari etnis asli. Orang Cina di Kendari harus mencapai kedudukan sosial yang tinggi dengan usaha kerja keras. Dari hasil kerja keras mereka berhasil memperoleh uang dan dapat menikmati kelebihan status yang memadai.

Sementara itu, kedatangan orang Muna di Kendari diawali dengan larinya La Ode Ngkada.<sup>9</sup> Ia menuju ke Kendari karena pertentangan dengan raja Muna saat itu yakni La Ode Bulai (Ligvoet, dalam Depdikbud, 1983: 102). Kedatangannya ke Kendari disertai dengan 300 orang pengikutnya. Di Kendari, ia kawin dengan I Pasiya Daeng Matene, bibi isteri Daeng Pawata.

---

<sup>9</sup> Figur ini merupakan komandan perang pada waktu perang melawan Belanda. Ia diberi gelar yakni *Kapudatun Lohya*.

Setelah La Ode Ngkada datang, mulailah orang Muna datang ke Kendari dengan berbagai macam alasan

Ada tiga alasan mengapa orang Muna bermigrasi ke Kendari. Pertama, Pulau Muna merupakan daerah yang minus dengan tanah yang berbatu-batu dan kering yang tidak dapat dikembangkan menjadi lahan produktif pertanian dan walaupun ada hanya cukup untuk kebutuhan subsisten saja. Pemecahan yang ditemukan adalah meninggalkan Muna dan mencari tempat baru untuk memulai kehidupan baru. Kedua, motif ekonomi untuk mencari kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Alasan ini terutama didorong oleh adanya perantau yang sukses pulang kampung yang kemudian mereka memperlihatkan kesuksesannya. Ketiga, mencari pendidikan yang lebih tinggi dan lebih baik. Memang ada sekolah rakyat yang didirikan di Muna,<sup>10</sup> tetapi tidak ada sekolah lanjutan. Di Kendari oleh pemerintah kolonial didirikan sekolah lanjutan IHS. Selanjutnya banyak juga orang Muna yang ke Makassar karena di kota tersebut didirikan sekolah dasar lanjutan tiga tahun, yakni MULO. Tidak ada sekolah menengah yang didirikan di Sulawesi waktu itu sehingga murid yang ingin dan mampu melanjutkan pendidikannya melebihi tingkat dasar harus pergi ke Jawa.

Dari ketiga alasan tersebut, menurut hemat saya, faktor alam di Muna sebagai alasan yang paling kuat mendorong orang Muna ke Kendari. Hal itu dapat diperiksa dari laporan pastor M. Arts April 1975 (dalam de Jong,

---

<sup>10</sup> Di Muna tidak ada pendidikan yang setingkat dengan Sekolah Lanjutan. Yang ada hanya tingkat sekolah dasar yakni *volkschool* (tiga tahun) dan *vervolg-school* (dua tahun). *Volkschool* dibiayai oleh pemerintah swapraja, sedang *vervolg-school* oleh pemerintah Hindia Belanda Baru pada tahun 1951. didirikan SMP Sawerigading yang merupakan cabang dari Makassar Pada tahun yang sama juga dibuka Kursus Pengantar Untuk Kewajiban Belajar (KPKB) dimaksudkan untuk memenuhi kekurangan guru. Perkembangan pendidikan di Muna mulai berkembang setelah pelaksanaan Pelita. Baca *Memori serah Tertama Jabatan Gubernur Sultra Idris Sabara*, 1972: 12-14

2000: 65) yang menyimpulkan orang Muna sangat miskin. Makanan utama mereka adalah ubi, jagung, dan sayur mayur. Orang Muna hanya sekali-kali makan ikan laut dan daging ayam. Kondisi tersebut mengakibatkan kesehatannya menjadi lemah, anak-anak tidak mempunyai energi dan semangat untuk bersekolah. Oleh karena itu, mereka tidak berkembang, tetap miskin dan terbelakang. Akibatnya, banyak orang Muna, terutama kaum muda, tidak melihat kemungkinan untuk hidup dengan baik di Pulau Muna. Karena itu, mereka meninggalkan Muna.

Ketika tiba di Kendari, etnis Muna, banyak bekerja menjadi buruh di pelabuhan Kendari. Orang Muna banyak yang memanfaatkan jasanya di pelabuhan. Jika ada kapal bersandar ke pelabuhan, kadang-kadang ia harus mengangkut barang sampai malam hari. Karena masih belum banyak sarana angkutan saat itu, terpaksa para buruh harus mendirikan tenda-tenda darurat di sekitar pelabuhan. Kadang-kadang mereka juga harus mencari lokasi tempat tinggal di kampung-kampung dekat tempatnya bekerja. Di tempat baru ini mereka mendirikan rumah-rumah sementara dengan dinding bambu yang diharapkan dapat menyediakan akomodasi temporer bagi para pendatang baru dari Muna.

Meningkatnya jumlah pendatang dari Muna mengharuskan mereka menciptakan pekerjaan bagi mereka sendiri. Saat ini generasi terakhir para pendatang dari etnis Muna yang menetap di kampung-kampung sekitar pelabuhan menjalankan berbagai pekerjaan di samping bergerak di bidang pertanian. Ada yang menjadi tukang ojek yang menyediakan angkutan transportasi sampai masuk ke kampung-kampung, pedagang kaki lima, buruh, pegawai, dan sebagainya.

Dari uraian di atas terlihat bahwa kedatangan masing-masing etnis tersebut, sudah berlangsung sejak lama di Kendari. Ketika tiba di Kendari, masing-masing etnis ada yang hidup mengelompok sesama etnisnya, dan ada pula yang hidup tinggal berdasarkan mata pencaharian. Kedua aspek itu, amat mewarnai dalam sejarah pembentukan kampung dan pemukiman di Kendari.

### 2.1.3 Sejarah Kampung dan Pemukiman di Kendari

Dalam paparan sebelumnya telah dijelaskan sejarah orang-orang yang datang ke Kendari. Ketika tiba di Kendari, kecenderungan umum orang untuk mengelompok dalam satu kampung<sup>11</sup> Berikut ini peneliti mencoba untuk menceritakan proses tinggalnya dari salah seorang penduduk yang sudah lama bermukim di Kampung Butung.<sup>12</sup> Tidak semua kampung dapat diungkap karena tidak banyaknya data tersedia dan belum banyak kesempatan yang ada untuk menggali sejarah masing-masing kampung.

Tidak diketahui secara pasti, kapan asal mula kampung Butung berdiri. Oleh salah seorang penghuni lama di kampung tersebut diceritakan bahwa kampung Butung sudah mulai dihuni sekitar tahun 40'an. Penghuni pertama di kampung Butung adalah orang To Rete, yakni salah satu etnis yang berasal dari Bungku Sulawesi Tengah.

Kampung Butung saat itu dikenal bukan karena daerah tersebut adalah desa adat<sup>13</sup> yang mempunyai prestasi, tetapi lebih disebabkan karena

---

<sup>11</sup> Pengertian kampung penulis artikan sebagai tempat kumpul misalnya kampung Bajo adalah tempat berkumpulnya orang Bajo

<sup>12</sup> Deskripsi tentang pembentukan Kampung Butung berasal dari salah seorang warga, La Ahi. Ia dilahirkan di Kampung Butung tahun 1953. Ia merupakan generasi kedua yang tinggal di daerah tersebut. Ayahnya yang sudah meninggal, sudah mendiami kampung Butung sejak tahun 40'an.

<sup>13</sup> Yang dimaksud dengan desa adat yakni sejajar dengan desa adat di daerah lain yang tumbuh dan berkembang atas dasar sistem sosial masyarakat setempat, untuk menyebut beberapa diantaranya, *Huta* pada etnis Batak, *Tiuh* pada etnis Lampung, *Wama* pada etnis Minahasa,

sebagian dari orang yang takut dengan perang. Kampung ini dijadikan tempat persembunyian. Sebagian juga orang bersembunyi di Kampung Salo yang letaknya berdekatan dengan Kampung Butung. Memang kedua kampung tersebut dijadikan tempat persembunyian karena kondisi alam yang berbukit dan masih banyak ditumbuhi oleh pepohonan. Para penghuni pertama di kampung tersebut pada umumnya bermata pencaharian dengan berkebun. Hal itu ditunjang oleh masih luasnya tanah<sup>14</sup> yang dapat dijadikan lahan.

Orang Muna datang ke kampung Butung, sekitar tahun 50'an. Kedatangannya berlangsung secara berangsur-angsur. La Ahi mengungkapkan

"ada 2 tahap kedatangan orang Muna khususnya di Kampung Butung, Kendari Caddi, dan Gunung Jati. Gelombang pertama, akibat dari kekalahan perang di Muna dan didatangkan dengan menggunakan perahu. Karena kalah perang, maka mereka dapat dibawa kemana saja. Tahap kedua, yakni orang-orang Muna yang datang dengan sendirinya, bukan secara berkelompok yang ingin mendapatkan mata pencaharian di kampung ini". (wawancara, 3 Agustus 2003).

Para penghuni pertama tersebut, telah merintis adanya jalan di kampung, walau itu jalan setapak. Peran paling penting mereka adalah memanfaatkan tanah yang ada di kampung tersebut. Sebagian tanah, yang sebelumnya tidak terpakai dan tidak digarap kini dimanfaatkan oleh penghuni tersebut, baik untuk pe-mukiman maupun untuk perkebunan. Para penghuni tersebut membuka peluang bagi perbaikan infrastuktur kampung dan membuka keterisolasian dengan dunia luar.

---

*Gunkang* pada etnis Makassar, *Matawa* pada etnis Bugis, *Hanjar* pada etnis Bali, dan *Kaharingan* pada etnis Dayak

<sup>14</sup> Status tanahnya adalah tanah negara, artinya Negara menggunakan tanah tersebut secara bebas sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang tanah. Salah satu peraturan tersebut adalah UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, misalnya Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa Negara hanya berhak dan berwenang untuk menyediakan dan mengatur penggunaan serta menentukan hubungan hukum atas tanah. Kemudian, dalam ayat 3 disebutkan bahwa Negara diwajibkan untuk menggunakan hanya bagi kemakmuran rakyat sebagai bangsa

Keadaan semakin maju ketika ada intervensi dari pemerintah. Diperkirakan tahun 70'an, pembangunan infrastruktur di kampung, diawali dengan pengerasan jalan dan pembangunan pasar. Dengan adanya fasilitas tersebut dimungkinkan kontak dengan dunia luar semakin intens. Seiring dengan itu, karena penduduk semakin bertambah maka status kampung berubah menjadi Rukun Kampung (RK) yang merupakan bagian dari Desa Kandai. Tahun 1978, RK Butung berubah menjadi desa. Akhirnya, karena perubahan status Kotif Kendari menjadi Kotamadia Kendari, sejak tahun 1994 status desa berubah menjadi kelurahan.

Dijelaskan lebih lanjut oleh La Ahi bahwa penghuni saat ini di Kampung Butung terdiri atas etnis Muna, Buton, Tolaki, dan Bugis. Orang To Rete sudah tidak ditemukan lagi. Etnis Buton, Tolaki dan Bugis masuk ke kampung tersebut karena terjadi proses kawin mawin. Etnis Cina dahulu pernah ada, akan tetapi tidak betah karena di kampung tersebut tidak bisa mengembangkan mata pencaharian perdagangan. Dari gambaran di atas, penulis melihat bahwa kecenderungan umum dari pembentukan suatu kampung di Kendari didahului oleh suatu keinginan dari seorang individu untuk mengelompok dalam suatu wilayah tertentu. Ada dua macam latar belakang mengapa orang bisa mengelompok dalam satu kelompok, yakni karena mata pencaharian dan kesamaan etnis.

Dapat disimpulkan, pengelompokan di satu kampung pada tahun-tahun 50-an dapat terjadi karena kesamaan etnis atau karena kesamaan mata pencaharian. Berdasarkan hasil penelitian Depdikbud (1983: 15) persebaran etnis di masing-masing kampung dapat dilihat dibawah ini :

Kendari Kota	: - Bugis - Muna - Tolaki - Cina - Eropa (Zaman Belanda)
Kampung Butung	- Muna - Buton - Bugis
Kendari Caddi	- Bugis - Muna
Kampung Salo	- Bugis - Muna
Gunung Jati	- Bugis - Muna
Kampung Baru	: Bugis
Kampung Bajo	- Bugis - Bajo
Sodohoa	- Bugis - Muna

Dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa etnis Bugis (tahun 50-an) menempati kampung-kampung seperti di Kampung Kendari Kota, Kampung Butung, Kendari Caddi, Kampung Salo, Gunung Jati, Kampung Baru, Kampung Bajo, dan Sodohoa. Etnis Muna menempati Kampung Kendari Kota, Kampung Butung, Kendari Caddi, Kampung Salo, Gunung Jati, dan Sodohoa. Jika melihat persebaran etnis di tiap-tiap kampung pada tahun 50-an itu, tampak bahwa etnis Bugis dan Muna ada di setiap kampung. Hal itu bisa terjadi karena dua etnis ini memiliki tradisi merantau amat kuat dibanding dengan etnis-etnis lainnya yang ada di Kendari. Yang unik adalah adalah keberadaan orang Tolaki sebagai penduduk asli Kendari hanya terdapat di Kampung Kendari Kota

Dalam perkembangannya perluasan kota selanjutnya mengarah ke arah barat Teluk Kendari yang memunculkan kampung Benu-Benua, Tipulu, Kemaraya, Mandonga, dan Punggolaka. Dari simpangan Mandonga ke arah selatan menuju Lepo-Lepo terdapat kampung-kampung Kadia, Wua-Wua, dan Lepo-Lepo. Selanjutnya jika menuju ke Timur sepanjang Pantai Selatan Teluk Kendari terdapat kampung Kambu, Anduonohu, Anggoeya, Abeli sampai pulau Pandan yang bersebelahan dengan kota Kendari. Di tepi utara di mulut teluk ini terletak juga kampung Kasilampe dan Mata.

Di kampung-kampung yang baru terbentuk tersebut, selain penghuni-penghuni lama yang berasal dari kampung tua seperti telah disebutkan di atas, juga ada penghuni baru. Contohnya, di kampung Benu-Benua yang merupakan kampung mengarah ke sebelah Barat lebih banyak dihuni oleh etnis Selayar. Sampai saat ini, Benu-Benua diidentikkan dengan kampung Selayar. Sebagai tanda dari hal tersebut ada masjid yang didirikan di tengah kampung dan diberi nama Masjid Selayar.

Sementara itu, orang Cina awalnya berada di Kendari Kota. Terdapat khusus perkampungan bagi orang Cina, yang sudah dipersiapkan sejak masa kolonial. Sebagaimana juga terjadi di kota-kota lainnya, pada zaman kolonial Belanda, pemerintah Hindia Belanda melarang orang Cina untuk bermukim di sembarang tempat. Aturan itu disebut dengan *wy Kentensel* (Adicondro, 1978: 21) yang membatasi ruang gerak orang Cina di sejumlah kota besar Hindia Belanda. Target pemerintah Hindia Belanda adalah mencegah relasi pribumi dengan etnis Cina melalui aturan *wy Kentensel* tersebut. Kebijakan tersebut berlanjut pada rezim demokrasi terpimpin dengan PP No. 10/1959. Seperti diketahui, semangat dari PP tersebut yakni tidak memperkenankan warga

negara asing bertempat tinggal di ibu kota-ibu kota kewedanan. Dampak dari kebijakan tersebut yakni menciptakan konsentrasi kegiatan ekonomi orang Cina di perkotaan

Kemunculan berbagai perkampungan tersebut dengan basis etnis selain karena kebijakan pemerintah kolonial (agar mudah mengatur dan menghindari konflik) juga karena kecenderungan warga kota untuk tinggal dengan komunitas etnisnya sendiri. Orientasi untuk tinggal dengan kesamaan etnis merupakan salah satu pilihan bagi para urban yang datang ke kota. Pada awal kedatangannya, masih banyak yang belum bekerja. Sektor industri belum berkembang dengan baik sehingga kesempatan bagi orang untuk mencari nafkah masih amat terbatas. Dengan demikian, untuk mencari sokongan, orang akan mengelompok menurut pola perkampungan atas dasar kesamaan etnis.

Dengan pengelompokan tersebut, di lokasi tempat tinggal memainkan peranan penting karena pengetahuan tentang situasi kota dapat diperoleh dari orang-orang sekitarnya. Begitu juga pengetahuan tentang siapa yang harus dihubungi untuk masuk kawasan itu dan saling tolong-menolong memecahkan masalah hidup sehari-hari memainkan peran yang tidak kecil. Pada tahun pertama hanya kelompok dalam kampung itu yang membantu dan menyediakan jaring pengaman sosial. Kesadaran etnisitas di Kota Kendari terlihat pada cepatnya seseorang pendatang baru diterima di lingkungan masyarakat yang berasal dari daerah yang sama. Ada suatu rentang mengenai peristiwa yang menunjukkan bahwa kesamaan identitas etnis dapat mempermudah proses relasi.

Oleh karena etnis sebagai salah satu dasar dari pembentukan kampung, maka suasana pertemanan dan ketetanggaan merupakan ciri utamanya. Di

kampung itu terbentuk jaringan kerja yang sifatnya ke dalam saja. Untuk pembentukan jaringan kerja, misalnya, dapat terlihat pada aktivitas ekonomi di rumah tertentu ada warung kecil yang menjajakan aneka barang. Dalam hubungan ekonomi mereka menggunakan *pola sawah*. Penjual es membeli makanan dari penjual kue, dan anak penjual kue membeli es dari penjaja pertama. Penjual kue membeli nasi ke bakul nasi, dan bakul nasi membeli beras kepada pemilik kelontong yang sebenarnya masih bersaudara. Walaupun tidak sempurna betul, sirkulasi uang hanya melingkar di sekitar mereka. Kecenderungan seperti itu menjadikan anggota dari kampung itu melakukan relasi ke dalam saja. Sudah barang tentu ada perkocualiannya, misalnya pada hari-hari tertentu ada urusan kesehatan, administrasi kependudukan, pendidikan, berbelanja dan urusan lain yang membutuhkan pelayanan publik dari petugas dari etnis lain di kantor-kantor atau di pasar.

Selain pembentukan kampung dan pe-mukiman atas dasar etnis, kecenderungan umum juga terjadi karena kesamaan mata pencaharian. Misalnya, pedagang, cenderung memilih bermukim secara berkelompok di pasar atau sekitar pasar. Orang-orang yang satu kantor menempati rumah dinas yang sudah disediakan oleh pemerintah atau instansi tempatnya bekerja. Ada beberapa perumahan dinas yang ada di Kendari, seperti perumahan kantor perdagangan, kehakiman dan jaksa, dokter dan paramedis, perumahan pemda kantor gubernur, perkebunan dan kehutanan. Demikian halnya, orang yang berprofesi sama seperti dosen cenderung untuk mengelompok di perumahan dosen. Ada juga penduduk yang mengelompok sesama pedagang. Mereka pada umumnya adalah pedagang yang menempati kios-kios atau rumah took (*ruko*) tersendiri. Lokasi kios melingkari pasar dan di sekitar pasar. Sementara

bangunan ruko, selain ada di sekitar pasar, ada juga yang jauh dari pasar dan terletak di pinggir jalan yang strategis.

Dengan adanya *melting pot*,<sup>15</sup> para urban diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Proses penyesuaian membutuhkan waktu. Akibatnya segregasi etnis berlangsung cukup lama, terutama selama masa kolonial hingga awal konsolidasi pascakemerdekaan Indonesia. Namun, dalam perkembangannya kini, seperti yang dikemukakan Evers, di Kendari ada pergeseran. Pola pengelompokan masyarakat tidak lagi atas dasar etnis, melainkan atas dasar kemampuan ekonomi. Saat ini terdapat lokasi perumahan yang dibangun oleh pengembang. Bagi kalangan menengah kelas bawah tersedia perumnas yang terletak di Kelurahan Baruga dan Kelurahan Kambu. Di lokasi tersebut, pada umumnya 'bangunan asli' hanya terdiri atas 1 kamar mandi, 2 kamar tidur, dan 1 buah kamar tamu. Lalu, pada saat Akbar Tanjung dan Siswono Yudohusodo menjadi Menteri Perumahan Rakyat pada zaman orde baru dibangun sejumlah rumah dengan tipe rumah sangat sederhana (RSS).<sup>16</sup> Biasanya tipe yang ditawarkan adalah tipe 27, dan tipe 36 yang terdiri dari 1 buah kamar tidur, 1 buah kamar mandi dan 1 buah kamar tamu. Selain itu, juga dikenal rumah sederhana dengan tipe tipe 45 dan tipe 70. Di Kendari, tipe rumah yang paling banyak adalah tipe rumah RSS dan RS. Bagi warga

<sup>15</sup> *Melting pot* (panci lebur) merupakan konsep yang muncul dan berkembang di Amerika sejak abad 19 berkenaan dengan kehadiran orang beragam latar belakang etnis, seperti etnis Irlandia, Jerman, Yahudi, Italia, Cina, Jepang, Afrika, Puerto Rico. Konsep ini menjelaskan bagaimana etnis tersebut seharusnya melebur menjadi satu bangsa baru, yaitu Amerika (Glazer dan Moynihan, 1974). Namun, dalam perkembangan waktu konsep ini kurang diminati karena memperlihatkan keadaan sebaliknya. Etnis tersebut tidak dapat menghilangkan kebudayaannya begitu saja, justru yang terjadi sebaliknya yaitu konsep pluralisme budaya. Konsep ini menjelaskan bagaimana suatu etnis berupaya tetap teguh pada kebudayaan asalnya meski ia berada di negara lain. Di Indonesia, konsep ini apa yang disebut sebagai *Bhineka Tunggal Ika*.

<sup>16</sup> Di kalangan masyarakat banyak plesetan yang muncul berkaitan dengan tipe rumah ini. Ada orang yang menyebutnya dengan sebutan RSSS (rumah sudah sangat sederhana) Campurannya dari tipe rumah yakni bukan 1 : 4 tetapi 1 : 1. Jika 1 berbanding 4 artinya 1 zak semen, 4 bak pasir. Sementara 1 1 diartikan yakni 1 zak semen dan 1 truk pasir

masyarakat yang mempunyai pendapatan lebih besar, dapat membeli rumah yakni di perumahan Graha Asri. Di lokasi ini, dibangun rumah yang agak mewah dibandingkan dengan kawasan-kawasan perumahan lain

## 2.2 Relasi Antaretnis di Kendari

Dari uraian sebelumnya terlihat ada dua macam etnis yang menetap di Kendari, yakni etnis asli dan etnis pendatang. Etnis asli adalah Tolaki, Muna, dan Buton. Ketiganya mempunyai sejarah dan bahasa yang berbeda. Sementara etnis pendatang adalah Bugis-Makassar, Jawa, Madura, Flores, dll. Masing-masing etnis mempunyai ciri sendiri yang dimanifestasikan melalui adat istiadat, seperti perkawinan, pergaulan, kematian, pemilikan tanah, pembagian harta warisan dan sebagainya.

Ditinjau dari letak geografis, Kendari merupakan wilayah leluhur orang Tolaki. Namun demikian, adat istiadat orang Tolaki tidak mendominasi berlakunya adat istiadat etnis lain pada kehidupan sehari-hari. Bahkan, terdapat kecenderungan, adat-adat yang berbeda bukan menjadi halangan untuk membina kehidupan bersama. Misalnya, dalam hal kawin mawin yang terjadi antargolongan etnis. Bilamana terjadi perkawinan warga dari dua etnis berbeda, biasanya adat istiadat yang diberlakukan yakni adat dari golongan etnis perempuan. Hal tersebut ditetapkan atas pertimbangan bahwa pada umumnya penduduk melakukan tradisi "naik kawin ke rumah pihak mempelai perempuan" (Muslimin Su'ud, wawancara 11 Agustus 2003). Berdasar atas informasi Su'ud tersebut, orang Tolaki bukanlah kelompok dominan, karena itu kebudayaannya tidak merupakan model kebudayaan dominan bagi

kelompok etnis lainnya. Tiap-tiap etnis mempertahankan kebudayaan dan ciri etnisnya.

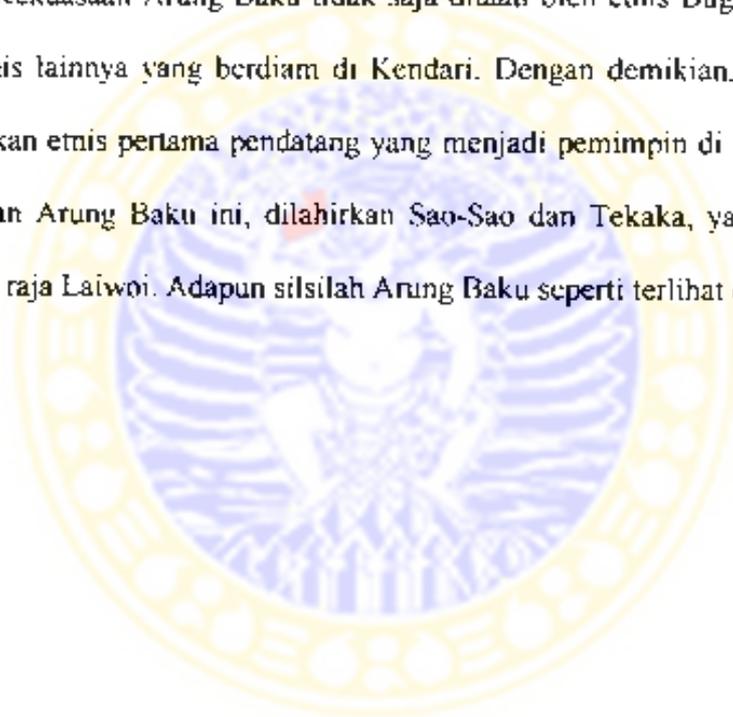
Relasi dan kontak antar etnis sudah lama terjadi di Kendari. Selama ini, kontak antarsesama etnis asli terjadi, yakni antara Tolaki-Muna, Tolaki-Buton, Buton-Muna, maupun kontak antaretnik pendatang, khususnya Bugis, juga kerap terjadi. Uraian di bawah ini mencoba untuk memaparkan selintas hal tersebut.

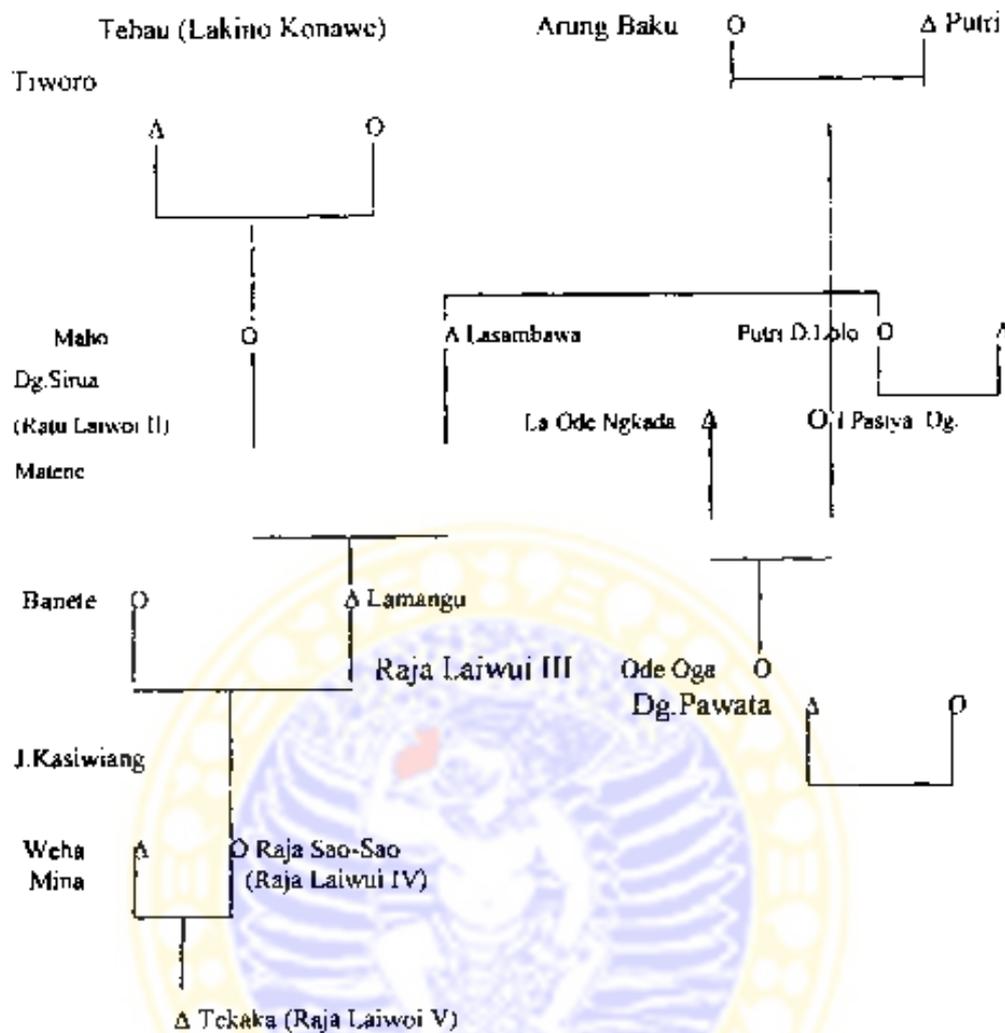
Relasi antara etnis Bugis dengan Tolaki sudah berlangsung sejak lama. Sebagai *after rationalization* dapat dikemukakan bahwa pada abad XV--XVI masih ada daerah di Tanah Bugis yang masih merupakan wilayah kerajaan Luwu' yaitu Cenraha di Bone, Tempe, Tampangeng, Sengkang, dan Wage di Wajo', seluruh daerah Sidenreng dan Rappang. Andi Zainal Abidin mengemukakan ada kaitan erat antara orang Bugis, khususnya Luwu' dengan orang Tolaki. Adapun yang memberikan petunjuk kuat ke arah itu adalah adanya raja-raja Luwu pada masa Galigo yang bersanak saudara dengan para Mokole Konawe, yakni kisah perpindahan suku Tolaki dari Luwu' ke Kolaka dan Kendari. Menurut dokumen historis DPRD Sulawesi Tenggara, sesuai dengan penuturan lisan suku Tolaki yang sudah menjadi tradisi, leluhur mereka pada mulanya berdiam di sekitar danau Matana, bagian utara Kabupaten Luwu' sekarang, yaitu yang terletak tidak jauh dari pusat kedatuan Luwu' di Ussuk (termasuk Kecamatan Malili sekarang).

Selanjutnya, dalam dokumen historis DPRD Sulawesi Tenggara juga disebutkan bahwa Mekongga diperintah oleh raja pertama bernama Larumbangi, yang bergelar *Tomamuru* (dalam bahasa Bugis *Tomamuring* orang turun dari langit). Kedatangannya untuk menyelamatkan rakyat

Mekongga dari gangguan seekor burung raksasa *konggoaha* (Abidin, 1999: 83). Arung Baku itu sendiri merupakan orang Bugis pertama di Kendari, seorang bangsawan Bone yang karena kemelut politik di daerahnya meninggalkan Bone dan untuk beberapa saat tinggal di wilayah Kerajaan Laiwoi (muara Sampara) Ia bermukim dalam waktu yang relatif lama di Kendari, dan atas restu Raja Laiwoi ia berhasil mengamankan Teluk Kendari (Konggoasa, tanpa tahun: 19)

Kekuasaan Arung Baku tidak saja ditaati oleh etnis Bugis, tetapi juga oleh etnis lainnya yang berdiam di Kendari. Dengan demikian, Arung Baku merupakan etnis pertama pendatang yang menjadi pemimpin di Kendari. Dari keturunan Arung Baku ini, dilahirkan Sao-Sao dan Tekaka, yang kemudian menjadi raja Laiwoi. Adapun silsilah Arung Baku seperti terlihat di bawah ini :





Selanjutnya ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Mekongga atau Kolaka mempunyai hubungan erat dengan Bugis. Beberapa bukti yang berupa fakta itu seperti berikut

1. Daerah Kolaka dulu merupakan daerah bagian Kerajaan Luwu'. Datu Luwu selalu menempatkan wakilnya untuk memerintah dengan memakai gelar *Sullewatang Patampunua*, sampai dibubarkannya Pemerintah Swapraja Luwu' tahun 1959. Akan tetapi, kemudian posisinya digantikan oleh Kabupaten Luwu'.
2. Baik pada masa penjajahan maupun setelah Indonesia merdeka, daerah Mekongga termasuk daerah Luwu', bahkan daerah Sulawesi Tenggara dan

Sulawesi Selatan dipersatukan menjadi satu karesidenan di bawah Propinsi Celebes, kemudian Grote Oost, dan menyusul Propinsi Sulawesi (PP RIS No. 21 Tahun 1950 sebagai penjabaran Keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menetapkan Dr.G.S.J Ratulangi sebagai gubernur propinsi yang pertama pada tahun 1945).

3. PP Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1964 tanggal 13 Februari 1964, yang disahkan menjadi Undang-Undang dengan UU No. 13 tahun 1964 tanggal 23 September 1964 (LN No. 94 Tahun 1964) menetapkan Kolaka Daerah bagian Luwu', Swaparja Laiwui, Muna, dan Buton menjadi Propinsi Sulawesi Tenggara.

Daerah Mekongga merupakan tempat pertahanan Datu Luwu' yang terakhir pada tahun 1946, yang pada saat itu banyak putera-putrera Mekongga ikut serta berjuang melawan KNIL. Selain bukti-bukti tersebut, relasi antara etnis Bugis dengan Tolaki didukung oleh kondisi Kendari saat itu, yang sebagian besar hidup dalam dunia agraris yang menggantungkan hidupnya dari pertanian. Keadaan geografis telah menyediakan potensi alam yang dapat diolah untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, potensi alam yang tersedia, sebagian besar belum dimanfaatkan.

Faktor utama sebagai penyebabnya adalah keterbatasan kemampuan untuk menggarap, yakni terbatasnya tenaga terampil yang mampu mengubah dan mengolah potensi alam yang tersedia dan terbatasnya dana untuk membiayai pengelolaan potensi yang dimaksud. Dengan sendirinya, keterbatasan ini menjadi penghambat utama bagi petani etnik Tolaki untuk maju dan berkembang. Keadaan yang demikian menyebabkan potensi-potensi alam yang tersedia hanya mampu dikelola secara terbatas pada bidang-bidang

tertentu saja seperti pertanian, perladangan, perikanan (baik laut maupun darat), dan lain-lain. Adapun bidang lain, seperti pertambangan, belum tergarap sama sekali.

Meskipun mereka mengolah tanah pertanian namun mayoritas kaum petani pada etnis Tolaki masih minim pengetahuannya dalam hal cara bercocok tanam. Mereka hanya bisa bertanam jagung, singkong dan sagu, yang hasilnya sebagai bahan makanan sehari-hari. Padahal, banyak petani yang memiliki tanah luas, akan tetapi belum terkelola dengan baik. Penggunaan alat-alat baru yang modern seperti traktor amat langka, untuk tidak mengatakan belum digunakan sama sekali. Pupuk oleh beberapa petani, memang telah digunakan namun dalam kenyataannya masih disertai hambatan. Hal itu disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan petani sehingga tidak mudah untuk menerima sesuatu yang baru. Meskipun keadaan tersebut telah berjalan bertahun-tahun, namun belum ada inovasi yang cukup berarti.

Melihat situasi seperti itu, kehadiran etnis Bugis di tengah-tengah kehidupan mereka tidak menjadi masalah. Masyarakat mau menjual tanahnya kepada orang Bugis karena menyadari manfaat yang didapatkan. Kalaupun tanah tersebut tidak dijual, petani Bugis menyewa dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan harga sewa yang disepakati. Pola kerjasama yang terjalin antara etnis Bugis dengan etnis Tolaki berjalan dengan baik.

Dalam proses relasi dengan orang Bugis, dan etnis lain, orang Tolaki cenderung terbuka. Hal itu setidaknya terlihat dari tradisi orang Tolaki yang khas, yang diselenggarakan dalam setiap acara pesta, perayaan, dan peringatan acara tertentu. Tradisi tersebut yakni tarian khas yang dinamakan tarian *lulu*. Awalnya, tarian ini merupakan tarian pemujaan pada dewa-dewa agar para

pemujanya dapat diberikan kemakmuran, dijauhkan dari bala bencana penyakit, dan sebagainya (Tarimana, 1990:87, Konggoasa, tanpa tahun. 54). *Lulo* dilakukan oleh pria dan wanita dalam suatu bentuk lingkaran. Wanita saling berpegangan tangan dengan pria. Pada awalnya, tarian *lulo* diadakan pemujaan dengan menyalakan lampu lilin yang dibuat dari lilin lebah *hulo taru* oleh seorang dukun, dengan meminta restu arwah nenek moyang agar selalu melindungi keturunannya yang masih hidup. Dahulu *lulo* senantiasa diiringi dengan bunyi gong dan gendang (biasanya 3 gong, gendang tidak mutlak).

Sekarang tarian *lulo* sudah merupakan tarian pergaulan, sudah mempunyai variasi yang tidak ada lagi dilakukan dengan upacara penyalaan lilin sebelumnya. Peserta tarian *lulo* (orang dewasa, muda-mudi) senantiasa memperhatikan faktor kesusilaan, adat, dan sopan santun. Siapa saja yang ikut *melulo* senantiasa mengingat syarat tersebut. Pada tarian ini, tiap-tiap orang menggandeng tangan di sampingnya dan menggerakkan kakinya secara serentak dengan mengikuti irama tertentu. Acara ini merupakan manifestasi dari kebersamaan dan keterbukaan orang Tolaki terhadap orang luar.

Seperti halnya relasi Bugis-Tolaki, relasi Bugis-Muna-Buton juga sudah berlangsung lama. Terbentuknya kerajaan Muna didahului oleh kedatangan Sawerigading, putera Raja Luwu' (Batoa, 1991:3; de Joong, 2002:61). Diceritakan bahwa perahunya kandas di bagian utara di suatu pulau yang tanpa nama dan belum berpenghuni. Orang-orang Luwu' menemukan batu berbunga di pulau itu, lalu Sawerigading memberikan nama Wunga, yang berarti bunga.

Pada waktu Sawerigading hendak meninggalkan Pulau Wunga, disuruhnya 40 orang kurang lebih pengikutnya tinggal di pulau itu. Orang-

orang Luwu' tersebut membentuk dua perkampungan yaitu Melai dan Wa Melai, yang dipimpin oleh seorang *komokula*, kepala persekutuan hukum adat masing-masing (Abidin, 1993:85).

Menurut legenda, Sawerigading disertai awak perahunya yang berjumlah 40 orang. Perahu Sawerigading yang kandas tersebut lama kelamaan diliputi karang, badan perahu berubah menjadi bukit dan ruangan dalam perahu menjadi liang. Liang tersebut disebut *Liano Bahutara* yang saat sekarang ini dianggap tempat keramat (Batoa, 1991: 3). Awak perahu sebagian ada yang pulang ke Luwu, ada pula yang ke Sulawesi Tengah, dan ada yang menuju ke negeri Mekongga, serta sebagian besar menuju ke arah barat Pulau Muna. Di setiap tempat tiba, mereka membentuk kampung dan selalu menyebut kampungnya dengan Saweri Gadi. Di Muna Barat mereka membentuk kampung yang disebut Gadi. Orang menyebutnya Lagadi yang lama-kelamaan orang terbiasa dengan sebutan Lagadi.

Rupanya di Lagadi mereka tidak terlalu lama tinggal dan kemudian mereka kembali membentuk kampung di sekitar Butu. Menurut cerita keturunan mereka inilah yang membentuk Kerajaan Muna. Pada suatu saat mereka membentuk suatu kampung besar yang mereka beri nama *wamelai* yang dikepalai oleh *mieno wamelai*.

Keterkaitan antara Bugis dengan Muna juga dapat ditelusuri pada rute perjalanan Arung Baku. Seperti sudah dijelaskan di depan bahwa Arung Baku merupakan orang Bugis pertama yang ada di Teluk Kendari. Setelah dari Laiwoi ia berangkat ke Muna lalu kawin dengan seorang putri Tiworo dan ia berhasil menjadi kepala pemerintahan di sana. Tindakan selanjutnya adalah berusaha memerdekakan Tiworo dan Muna dari kekuasaan Buton. Akan

tetapi, ternyata usahanya ini gagal. Dapat diinterpretasikan bahwa Arung Baku ingin melepas batas-batas etnis dan bekerja sama dengan penduduk saat itu demi kepentingan bersama.

Penjelasan tersebut mencoba menguraikan pola relasi antara etnis asli dengan etnis pendatang (dalam hal ini Bugis). Berikut ini penjelasan tentang relasi antara masing-masing etnis asli yang ada di Sulawesi Tenggara. Keterkaitan antara Tolaki dengan Muna dapat dilihat pula pada Raja Konawe adalah La Kilo Ponto pada tahun 1527. Ia pernah membantu Konawe dalam suatu peperangan karena serangan dari luar Konawe. Peristiwa itu terjadi sebelum diangkat menjadi Raja Muna tahun 1535. Kemudian, Sida Mangura (Raja Tiworo) mempunyai permaisuri yang berasal dari Konawe, yaitu Wasitau (Monografi Sultra, 1976: 26). Selain itu, bapak La Kilo Ponto yakni Sugi Manuru kawin dengan Wa Alanda turunan dari Raja Konawe.

Sementara itu, relasi antara Buton dengan Muna sebetulnya sangat erat. Hal itu disebabkan karena masa lalu daerah Muna merupakan salah satu wilayah dari Kesultanan Buton. Raja Muna VI La Manuru kawin dengan putri turunan Raja Buton. Sementara itu, La Kilo Ponto pernah menjadi raja Konawe tahun 1527, menjadi Raja Buton V dan menjadi Raja Muna VII. La Kilo Ponto di Muna diberi gelar *Mepokanduaghoono Ghoera*. Ia masih menjadi Raja Muna ketika diangkat menjadi Raja Buton.

Setelah La Kila Ponto dinobatkan menjadi Raja Buton, Raja Muna diserahkan kepada La Posasu. Pada saat La posasu memerintah Muna, ada permintaan La Kila Ponto kepada La Posasu agar dua kampung di Muna Selatan yaitu Lakudo dan Bombana diambil untuk Buton. Kedua kampung itu adalah kampung kesayangan La Kila Ponto. Atas permintaan itu, La Posasu

tidak keberatan asalkan diganti dengan dua kampung pula di daerah Buton Utara, yaitu Kampung Kulisusu dan Kampung Wakurumba. Di situlah asal mula dua buah pulau. Daerah Muna Utara dan Buton Utara menjadi daerah Muna sedangkan Buton Selatan dan Muna Selatan kemudian menjadi wilayah daerah Buton.

Dapat ditarik simpulan bahwa masuknya daerah Muna Selatan ke daerah Buton, dan daerah Buton utara ke daerah Muna, hanya didasarkan atas tendensi kekeluargaan, tampak dari dua raja dari dua kerajaan bersaudara yakni La Kilo Ponto dan La Posasu, dua putera dari Sugi Manuru. Setelah La Kila Ponto dinobatkan menjadi raja Buton, ia diberi gelar Murhum. Ia diangkat menjadi Raja di Wolio karena atas jasanya ia menjadi kepala pasukan kerajaan dapat mengalahkan serangan musuh yang berasal dari La Bolontio (dari kerajaan Banggai) dan sempat menewaskannya.

Buah dari peperangan itu, ia berhasil mengawini anak dari Raja Buton V. Pada saat itu ada perkataan dari Raja Mulae (Raja Wolio V) yang berjanji bahwa barang siapa yang membuktikan keberaniannya dapat menghancurkan musuh dan menewaskan pimpinan penyerang akan dikawinkan dengan puterinya yang bernama Watumpaidongi. Setelah La Kila Ponto berhasil membunuh pimpinan penyerang, Raja Mulae membuktikan ucapannya tersebut. Tidak lama kemudian La Kila Ponto diangkat menjadi Raja Wolio VI oleh mertuanya sendiri, yakni Raja Mulae.

Dalam proses relasi antaretnis sejauh yang dapat dipastikan, permusuhan dan konflik etnis yang berlatar kesukuan tidak terdapat di Kendari pada masa kolonial. Pada saat itu, penduduk kota masih jarang, komunikasi masih terbatas, loyalitas terutama terpusat pada satuan desa, atau pada

beberapa kerajaan tradisional kecil. Barulah setelah kemerdekaan, ketika orang-orang dari berbagai latar belakang etnis mengadakan kontak mucullah persaingan, terutama di kota. Dalam upaya memenangkan persaingan, faktor etnis sering dijadikan kriteria untuk menentukan siapa 'kita', siapa 'mereka'.

Sementara itu, relasi antara orang Cina dengan kelompok etnis lain di Kendari mengalami fase pasang surut. Kehadiran etnis Cina di tengah-tengah etnis lain menimbulkan berbagai prasangka, baik yang negatif maupun positif. Sikap negatif muncul karena etnis Cina dianggap mendominasi peran ekonomi. Kompetisi antara etnis Cina dengan pribumi kerap kali menjadi pemicu permusuhan terhadap etnis Cina. Dalam persaingan itu, ketika pribumi dikesampingkan, atau terpaksa keluar dari peran ekonomi yang diinginkan, ada manipulasi kebencian terhadap etnis Cina dalam bentuk tindak kekerasan.

Tindak kekerasan di Kendari terhadap etnis Cina juga pernah terjadi. Akan tetapi, intensitasnya tidak dalam skala besar dan keras. Berdasarkan hasil wawancara penulis<sup>17</sup> seperti disampaikan oleh Syafruddin Tompo peristiwa paling besar dari anti Cina di Kendari terjadi pada tahun 1987. Adapun pemicunya diceritakan oleh Syafruddin Tompo :

"saat itu pemicunya yakni saudara dari pemilik toko (yakni Icong) dituduh memperkosa penjaga toko (karyawan) yang bekerja di toko

<sup>17</sup> Sementara itu, hasil penelusuran dokumen tertulis, peneliti menemukan bahwa sikap anti Cina ditunjukkan sekitar tahun 60-an yakni berupa pengrusakan dan pembakaran toko-toko milik Cina. Kerusuhan serupa juga terjadi di banyak tempat di Sulawesi, utamanya pada saat pemberontakan Kahar Muzakkar. Dalam laporan tidak diperinci berapa jumlah kerugian. Untuk informasi lebih lengkap dapat diperiksa pada Memori Gubernur Edi Sabara, 1972, 24-27 peristiwa paling akhir yakni terjadi pada tahun 2000. Sikap anti Cina terakhir terjadi pada tahun 2001. Awal kejadiannya karena pembantu rumah tangga yang berasal dari Muna dianiaya oleh majikannya di toko Sinar Matahari mandonga. Berdasarkan laporan polisi nomor LP 555/K.VIII.2001 Pamapta tertanggal 4 Agustus 2001, pelapor atas nama Siti dengan kasus penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga dengan tersangka Yuliana. Dalam laporan itu, pembantunya itu disiksa terus, disirami dengan air panas. Lalu, ada sesama pembantunya yang melapor kepada keluarga Siti. Berdasarkan informasi dari Kasit reskrim Polres Kendari yang menangani kasus tersebut saat itu, jumlah massa yang sudah berkumpul di depan toko berkisar 200-300 orang. Kerusuhan dapat dicegah menjadi lebih luas karena pihak kepolisian terus menjaga toko tersebut, dan melakukan penahanan terhadap tersangka

elektronik 'AG' Mandonga. Lantas, penjaga toko tersebut yang berasal dari Muna melaporkan kejadian menimpa dirinya ke kantor polres Kendari. Akibat dari peristiwa itu, toko AG dilempari batu oleh massa. Tapi untunglah kejadiannya tidak lama hanya 1 malam dan besoknya sudah bias diatasi. Orang sudah tidak lagi bertindak lagi karena ada pernyataan dari Icong untuk mengawini orang Muna itu. Jika tidak, mungkin toko orang Cina yang lain juga akan dilempari massa. Yah, akhirnya Icong itu menikahi orang tersebut. Orang Cina waktu itu mendesak Icong karena takut dengan keadaan. Jika pak Eka mau lihat rumahnya Icong, itu ada di depan hotel Purnama. Ia membuka usaha servis elektronik, tapi kasihan, pintu rumahnya itu jarang dibuka lebar-lebar, hanya sedikit saja. Mungkin karena ia dikucilkan sama-samanya orang Cina. Jika saya kerumahnya, orangnya lebih banyak diam, padahal dari dulu saya akrab dengan mereka, dengan saudara-saudaranya juga seperti Jhon, Frans. Selain kejadian tersebut, selebihnya hanya kecil-kecil saja, misalnya tahun 2000 ketika ada kenaikan barang-barang. Tapi, itu bukan hanya milik orang Cina yang dilempari, Akan tetapi juga toko-toko yang lain, seperti toko Ricar Jaya" (wawancara, 17 Mei 2004).

Dari sudut pandang lain, etnis asli ada juga yang akomodatif terhadap keberadaan etnis Cina. Hal itu dapat dilihat dari kawin mawin antara orang Cina dengan etnis asli. Berikut ini salah satu contoh dari fenomena itu. Di Kendari ada orang yang bernama Citoi.<sup>18</sup> Mama dari Citoi yakni dari Cina sementara bapaknya adalah orang Tolaki. Guna beradaptasi dengan masyarakat di Kota Kendari, nama toko dari Citoi dinamakan Toko Laiwoi Jaya. Ada juga orang pribumi yang kawin dengan orang Cina. Mantan Wakapolwil Kendari Halid Kawa (Takalar) kawin dengan orang Cina yakni pemilik rumah makan Ujung Pandang di Kendari. Ada pula Toko Lestari yang pemiliknya adalah orang Cina yang beristrikan orang Tolaki.

Sementara etnis Arab di Kendari juga cukup memegang peranan, terutama dalam perekonomian. Di Kendari dikenal istilah keturunan Arab Bugis. Hal itu diawali dengan Hj. Kubra Bafadal (Arab) yang kawin dengan

<sup>18</sup> Citoi merupakan nama orang yang merupakan kependekan dari Cina Tolaki Indonesia. Ia berjenis kelamin laki-laki, tinggal di Benu-Benu dan merintis usaha toko barang campuran. Ia sudah tinggal di Kendari sejak tahun 70'an.

dengan Hj. Mustafa (Bugis). Lalu Ahmad Aljufri (Arab) kawin dengan orang Bugis. Etnis Arab di Kendari aktif di bidang syiar Islam, seperti aktif di kegiatan organisasi keislaman. Ahmad Aljufri, misalnya sudah empat periode menjadi Ketua Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara. Lalu saudaranya yakni Hafsa Al Jufri menjadi Wakil Ketua Majelis Ta'lim Masjid Agung Al Kautsar Kendari. Pada umumnya etnis Arab dapat menikmati posisi yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan etnis Cina. Hal itu disebabkan karena adanya kesamaan agama yang dipeluk etnis Arab dan penduduk asli yakni Islam.

Di antara 'etnis pendatang' yang paling menonjol di Kendari adalah Bugis-Makassar. Hal itu disebabkan karena mereka mempunyai tradisi agama dan budaya, bentuk-bentuk organisasi sosial, dan sistem kekerabatan. Dalam perilaku keberagamaan misalnya, orang Bugis-Makassar lebih menonjol dibandingkan dengan etnis lainnya. Banyak di antara mereka yang menjadi *tuangguru*<sup>19</sup> dan dikenal sebagai penganjur agama Islam seperti Patta Daeng Siatta dan Guru Malla. Organisasi Muhammadiyah, awalnya dirintis oleh seorang guru dari Makassar yang bernama Ahmad Makkaranse Daeng Ngilau dan M. Idris Daeng Mancigi. Di dalam relasi antara etnis asli dengan etnis pendatang, masing-masing etnis mengembangkan bahasa, adat dan ciri khasnya sendiri yang saling berbeda. Etnis adalah golongan sosial askriptif, atau golongan sosial yang didapat begitu saja oleh seseorang bersama dengan

---

<sup>19</sup> *Tuangguru* adalah sosok yang aktif untuk mentransformasikan ajaran agama Islam dalam etnis Bugis Makassar. Yang termasuk tuangguru adalah para muballig, para pemimpin, dan para guru yang mengajar di lembaga pendidikan yang dibina organisasi Islam modernis. Batasan tersebut dikutip dari Mustari Bosra, *Tuangguru, Aurangguru, dan Tuangguru: Gerakan Islam di Sulawesi Selatan 1914-1942, Ringkasan Disertasi*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2003

kelahirannya atau asal muasalnya (Barth, 1969). Sebagai golongan sosial askriptif etnis mewujudkan dirinya dalam satu kelompok etnis.

Relasi antaretnik banyak terjadi di ruang-ruang publik. Relasi antaretnik di ruang publik menjadi penting karena anggota suatu etnis yang berbeda biasanya selalu bertemu. Di ruang tersebut warga suatu etnis yang berbeda bertemu untuk bekerja, berbelanja atau berjualan, melakukan kegiatan hiburan, kegiatan-kegiatan sosial dan rekreasi atau kegiatan politik. Terdapat beberapa ruang publik, antara lain (1) lokasi pariwisata, (2) tempat pelayanan umum, (3) pasar, toko, swalayan (4) tempat ibadah, dan (5) sekolah. Beberapa lokasi pariwisata adalah pantai Kasilampe yang terletak di wilayah Kasilampe, permandian batu gong yang terletak di Kecamatan Soropia, permandian Abeli di Abeli. Di lokasi ini biasanya dikunjungi penduduk warga kota Kendari dari berbagai latar belakang etnis. Beberapa tempat pelayanan umum dapat dikemukakan misalnya di Kantor walikota untuk tempat mengurus administrasi kependudukan, izin dsb, puskesmas dan rumah sakit untuk berobat, kantor polisi untuk tempat mengurus keamanan, bank untuk menabung dan menarik uang, samsat untuk mengurus surat-surat kendaraan. Pasar, toko dan swalayan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tempat ibadah, misalnya masjid, gereja dan vihara untuk melaksanakan ibadah. Sekolah, universitas dan tempat kursus sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan. Di tempat-tempat yang disebutkan tersebut, batas-batas etnis dapat dipertajam atau dipelonggar sesuai dengan tujuan kegiatan dan kepentingan. Melalui hubungan di ruang publik, warga dari etnis mengembangkan stereotip satu dengan lainnya.



Stereotip muncul karena adanya sistem-sistem penggolongan dalam kebudayaan suatu etnis. Dalam relasi antaretnis ada upaya untuk saling memahami 'apa', 'siapa', dan 'mengapa' pelaku yang mereka hadapi dalam relasi, yang dapat dicocokkan dengan penggolongan yang ada dalam kebudayaan etnis, dan dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam relasi antaretnis. Ciri-ciri atau sifat masing-masing para aktor yang melakukan relasi dipahami sebagai kebudayaan etnis aktor tersebut.

Ada beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya relasi dan kontak antar etnis. Salah satunya adalah berkembangnya berbagai sarana telekomunikasi seperti internet, telepon, *handphone*, *facsimile*, dan *e-mail* yang memungkinkan orang dapat berkomunikasi dengan orang lain. Di Kendari, jaringan telepon sudah dapat dimanfaatkan oleh warga untuk melakukan kontak-kontak komunikasi baik dengan sesama etnis maupun orang yang berbeda etnis. Jika orang tersebut tidak mempunyai pesawat telepon di rumah, ia dapat memanfaatkan jasa yantel, kiosphone dan wartel atau bahkan melalui *handphone*. Konsekuensinya, relasi antarorang bisa sesegera mungkin dilaksanakan.

Pada umumnya agama memperbesar keekklusifan etnis. Orang Tana Toraja terpisah dari kelompok-kelompok lain karena sebagian besar mereka beragama Kristen. Sementara bagi etnis-etnis lain yang sebagian besar beragama Islam, mereka mempunyai perbedaan dalam hal ketaatan dan amalan. Sebagian besar, etnis Tolaki dan Muna berkepercayaan abangan, sebagaimana terlihat dalam tipologi Geertz yakni variasi Islam yang lebih bersifat sinkretis dan animistis. Sementara orang Buton, Kolaka, dan Bugis

tergolong santri yang taat beragama Islam. Pada umumnya kelompok yang disebut terakhir yang banyak ikut dalam kegiatan keagamaan.

Demikianlah pola relasi antaretnis yang terjadi selama ini menampakkan bukan hanya persaingan, tetapi ada nuansa kerja sama. Masa relasi yang sudah berlangsung lama, jauh sebelumnya, dengan ditandai oleh etnis yang ada dalam segenap sistem ekonomi, sistem budaya, dan sistem pemerintahan menyebabakan format kehidupan antaretnis berkembang demikian kompleksnya. Akibatnya diantara masing-masing pihak saling berkembang berbagai konstruksi antara satu terhadap lainnya, demikian juga sebaliknya. Ada konstruksi yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat negatif.

### 2.3. Etnis Muna di Kendari

Jumlah dan persentase etnis Muna yang berdiam di Kendari berdasarkan Sensus Penduduk 2000 adalah 40.107. Persentase etnis Muna dari keseluruhan penduduk Kendari adalah 20 %. Jumlah itu lebih sedikit dibanding dengan etnik Bugis dan Tolaki, tetapi lebih banyak dari etnik Buton, Jawa, Bali, Bajo, Madura, dan lainnya.

Kehadiran etnis Muna di suatu tempat pada umumnya ditandai dari nama, tubuh, dan bahasa yang digunakan. Untuk nama, misalnya, pada umumnya di Kendari menyandang kata La atau La Ode untuk pria, Wa atau Wa Ode<sup>20</sup> untuk perempuan di depan nama mereka. Identifikasi nama untuk

---

<sup>20</sup> Tambahan kata La dan Wa menunjukkan orang tersebut berasal dari lapisan *walaka*, sementara La Ode dan Wa Ode adalah berasal dari golongan *karamu*. Penggunaan kata La Ode mulai digunakan di istana kesultanan pada masa Sultan Tzaiquddin terutama menantunya, Saudi Raba yang menyebut setiap anak di istana dengan sebutan La Ode. Di Buton, penggunaan La Ode dimulai sejak terbentuknya kerajaan Buton dengan ratunya yang pertama

Muna sama dengan Buton. Tetapi dengan menggeneralisasi hanya dari segi nama saja tidak memadai, karena banyak juga orang Muna yang tidak memakai La, La Ode. Wa, Wa Ode. Karena itu, satu-satunya jalan untuk menentukan apakah seseorang "benar-benar asli" Muna adalah dengan mencari tahu apakah ia mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai Muna, atau diidentifikasi sebagai Muna oleh orang lain.

Di Kendari, dalam pola hubungan sosial orang Muna sering dikaitkan dengan kekerabatan. Orang Muna biasanya suka menyebutkan salah satu bentuk hubungan kekerabatan yang mereka miliki untuk mendekatkan dirinya. Di Kendari, tampaknya tidak hanya hubungan darah untuk memasukkan seseorang ke dalam kelompok kekerabatan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tetapi juga melibatkan kerabat masing-masing pihak menjadi satu kelompok kekerabatan. Dari strukturnya, garis keturunan masyarakat bersifat lateral: artinya kerabat ayah dan ibu diambil secara bersama sebagai kerabat anak, dan sebaliknya si anak juga diambil sebagai anak bersama. Sebagai akibat perhitungan kerabat di atas, hubungan kekerabatan itu semakin lama semakin meluas dan jalin berjalin.

Kelompok kekerabatan dalam masyarakat Muna, dikenal garis keturunan ayah-ibu yang mempunyai identitas, antara lain berupa nama dan lambang. Garis keturunan demikian merupakan kerangka patokan bagi aturan hubungan dalam masyarakat dan juga menjadi patokan dalam tata cara perkawinan (Koentjaraningrat, 1981: 122).

---

Wa Kaka. Hal itu dibuktikan dengan ucapan saat sultan dimandikan oleh Patalimbona yaitu *Rango, La Ode, todokumono, welamumo tenkamo La Ode*

Lambang dan identitas pada kelompok kekerabatan dapat dilihat dari kesatuan keluarga yang berupa *lambu* (keluarga inti), *tombu* (keluarga luas), dan *bhasite* (famili). Dalam konteks untuk memperluas jaringan, biasanya kesatuan atas dasar *bhasite* yang kerap dipergunakan. Hal ini disebabkan karena dalam *bhasite* ada beberapa tingkatan, ada famili dekat dan famili jauh. Bagi etnis Muna, famili dekat mencakup vertikal dan horizontal. Dua tingkat vertikal ke atas mencakup bapak atau ibu dan saudara-saudaranya. Dua tingkat vertikal ke bawah mencakup pula famili anak-anak dan cucu-cucu. Dua tingkat horizontal mencakup hingga sepupu dua kali. Ke dalam famili dekat ini mencakup pula famili dekat dari suami atau istri. Di luar itu, disebut famili jauh. Namun, pola jauh pun kalau berdekatan tempat tinggal dan frekuensi hubungan cukup tinggi, apalagi kalau selalu membantu dan menolong, termasuk famili dekat. Sebaliknya, walaupun masih dalam kategori famili dekat, tetapi tempat tinggalnya jauh dan frekuensi hubungan jarang sekali, bahkan kadang-kadang tidak pernah saling mengirim berita, sudah dikategorikan famili jauh. Munculnya sejumlah famili dekat dan jauh dengan kompleks permasalahan yang berbeda-beda menjadi faktor yang berperan dalam memperluas jaringan sosial, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas hubungan-hubungan yang mengikutinya.

Solidaritas kekerabatan orang Muna diperkokoh oleh suatu ketentuan bahwa sejauh mungkin perkawinan hendaknya terjadi di dalam lingkungan kerabat dan keluarga sendiri (Rauf, 1999: 74). Perkawinan semacam itu sangat diharapkan tetapi tidak diwajibkan. Akan tetapi, dalam praktiknya pendirian semacam itu tidak selamanya dipegang teguh. Sikap keberagaman etnis Muna di Kendari, tidaklah terlalu fanatik. Sebagian besar etnis Muna masih

melaksanakan tradisi abangan seperti yang dimaksudkan Geertz. Kepercayaan terhadap roh sampai saat ini juga masih amat kuat pada etnis Muna. Hal itu dapat dilihat dari upacara-upacara selamatan yang diselenggarakan pada momen-momen tertentu. Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari La Kimi Batoa, di Kendari sebagian etnis Muna masih sering menyelenggarakan ritus-ritus adat tertentu. Yang paling banyak adalah berkenaan dengan kelahiran dan kematian. Dalam kelahiran ada ritus *findahi wite*, sementara dalam kematian ada *ghoti katumpu*. Ada juga ritus yang ingin membangun rumah yakni upacara *kabhelaino sau*. Mereka beranggapan bahwa di balik dunia luar tersimpan roh dan makhluk gaib, roh yang menangis, roh yang hidup. Karena itu perlu dilaksanakan upacara atau selamatan agar ada pembersihan sehingga semua berjalan lancar.

Sumber solidaritas orang Muna di Kendari pada umumnya adalah tradisi yang tetap terawat rapi dari generasi ke generasi. Dalam suatu kesempatan, Batoa mengemukakan bahwa menjadi tugas dari semua orang Muna yang ada di Kendari untuk tetap menjaga tradisi tersebut. Dengan demikian, betapapun orang Muna ber relasi dengan etnis lain, ia takkan terlepas dari ikatan sosialnya sebagai orang Muna.

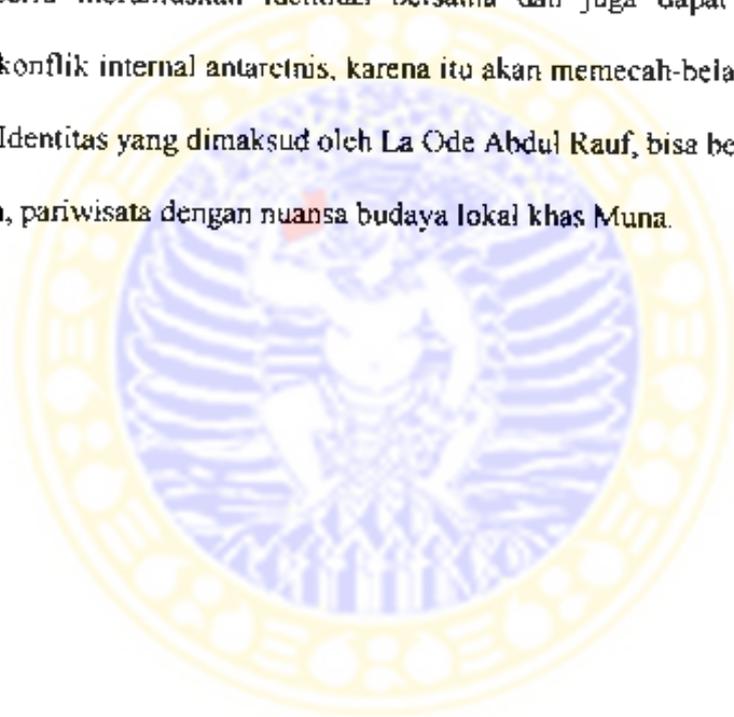
Di samping tradisi yang sudah berurat berakar dalam diri masyarakat di etnis Muna, faktor integrasi sangat mempengaruhi mereka untuk tidak melupakan kampung halamannya. Dari keterangan Batoa dapat diketahui bahwa sampai saat ini, ada orang Muna yang ada di Kendari tetap kerap kembali ke kampung halamannya di Muna setiap bulan untuk menjenguk keluarga dengan alasan rindu dan khawatir akan terjadi apa-apa dengan keluarga yang ditinggalkan. Menurut Batoa, orang Muna begitu terikat dengan

keluarga atau kerabatnya. Mereka rela menerima hidup apa adanya asalkan dapat selalu bersama keluarga dan famili.

Hanya saja, sebagai seorang tokoh yang tetap ingin menjaga "ketinggian derajat orang Muna", Batoa mempunyai kekhawatiran merosotnya kewibawaan orang Muna di mata orang lain. Memang sudah banyak orang Muna menjadi sarjana lulusan berbagai universitas. Dengan semakin banyaknya kaum terdidik di kalangan etnis Muna akan menumbuhkan kesadaran untuk tidak lagi menjadi "rakyat jelata" dalam pergaulan yang melibatkan berbagai macam etnis. Kiprah orang Muna dapat dilihat di berbagai kehidupan, antara lain di politik dan pendidikan. Di mata orang Muna, salah satu peristiwa yang dianggap fenomenal adalah tampilnya Drs. La Ode Kaimuddin sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara. Ia berhasil meruntuhkan singgasana putera mahkota dari Alala - yakni Sholeh Solahuddin-- dengan suasana politik 'panas' dalam ukuran politik saat itu. Di bidang pendidikan, tidak terbilang orang Muna di dalamnya. Ada yang menjadi guru, dosen, dan bahkan menjadi guru besar seperti Prof. Dr. La Ode Abdul Rauf, M.S., dan Prof. Ir. Mahmud Hamundu, M.Sc. Nama yang disebut terakhir saat ini menjadi Rektor Unhalu menggantikan Prof. Dr. Abdurrauf Tarimana. Demikian pula, LSM-LSM lokal banyak dikuasai oleh orang Muna. La Ode Ida, yang kini memimpin Kepala Pusat Kawasan di Jakarta, awalnya merintis karier di LSM lokal yakni Lepsek (Lembaga Pengembangan Sosial Ekonomi). Dalam peredaran politik nasional, kita juga menjumpai etnis Muna. Salah satu diantaranya yakni Habil Maratu, yang sekarang ini menjadi bendahara PPP.

Dalam situasi kehidupan perkotaan, suasana kompetisi amat tinggi, termasuk di dalamnya kompetisi antaretnis. Masing-masing etnis berusaha

untuk saling berebut pengaruh. Bila ada diantara salah satu kelompok etnisnya yang menganggap layak pantas untuk menjadi elite, dengan berbagai cara etnis tersebut berusaha untuk meraihnya. Apabila etnis tersebut tidak berhasil, sebagai kompensasinya etnis yang kalah akan menjadi perongrong baik secara halus maupun terang-terangan. Olehkarena itu, ada upaya untuk memunculkan solidaritas kultural bagi etnik untuk mencapai kesejahteraan pada umumnya bagi etnis Muna. La Ode Abdul Rauf mengatakan kepada penulis bahwa etnis Muna perlu merumuskan identitas bersama dan juga dapat menghindari konflik-konflik internal antaretnis, karena itu akan memecah-belah etnik Muna sendiri. Identitas yang dimaksud oleh La Ode Abdul Rauf, bisa berupa seni dan kesenian, pariwisata dengan nuansa budaya lokal khas Muna.



### **BAB III**

#### **KEBANGKITAN ETNISITAS ETNIS MUNA**

Pada bagian ini dibahas kebangkitan etnisitas bagi etnis Muna yang ada di Kendari. Sebagaimana diuraikan pada perspektif teori di depan, bahwa kebangkitan etnisitas dapat disebabkan oleh dua faktor adalah perspektif etnis reaktif dan kedua perspektif etnis kompetitif. Perspektif reaktif disebabkan karena kolonialisme internal (Hechter, dalam <http://www.eh.net/xiiicongres/cd/papers/27lordchi201.pdf>) yang berkembang di suatu etnis tertentu. Perspektif ini menerangkan bahwa perasaan etnisitas bangkit karena latar belakang sejarah yang panjang. Sementara perspektif kompetitif menerangkan bahwa kebangkitan etnis muncul karena adanya persaingan di antara kelompok-kelompok etnis yang menimbulkan implikasi yang berbeda-beda.

Kebangkitan etnisitas tidaklah muncul seketika. Hal ini mengikuti pandangan Cornor (1972: 12) yang mengungkapkan bahwa kemunculan etnisitas adalah suatu fungsi dari perubahan ciri struktural pada komunitas dan persaingan serta lingkungan sosial politik dalam suatu negara. Proses modernisasi khusus menciptakan lingkungan yang mendukung keaktifan dan pelestarian identitas etnis serta meningkatkan solidaritas etnis melalui asosiasi etnis dan saluran politik resmi seperti parpol.

#### **3.1 Perspektif Reaktif : Sumber Kolonialisme Internal**

Faktor sejarah dapat menjadi salah satu faktor yang membangkitkan etnisitas. Menurut teori ini, etnisitas bisa bangkit didorong oleh keinginan suatu kelompok etnis untuk melepaskan diri dari posisi yang tidak menguntungkan

akibat perjalanan sejarah suatu etnis. Kelompok etnis memandang posisi inferior membuat mereka merasa terjajah karena dengan posisi tersebut mereka mengalami penindasan dan eksploitasi baik karena kolonial atau kelompok etnis lainnya. Inilah yang dinamakan dengan kolonialisme internal.<sup>1</sup> Ciri terjadinya kolonialisme internal adalah adanya *administrative distinctiveness, cultural superiority, and uneven regional economic development*. Teori ini pertama kali digunakan dalam menganalisis keteringgalan ekonomi Skotlandia dan Wales dari wilayah utama Inggris sehingga ini menimbulkan disparitas antara pusat dan periferi. Dengan bantuan teori tersebut, penulis akan mencoba menganalisis fenomena serupa pada etnis Muna.

Etnis Muna telah mengalami kerugian sejak zaman kolonial. Situasi itu dapat dipahami dengan mengacu pada sejarah daerah itu. Akibat kolonialisme Belanda, otonomi raja-raja Muna dibatasi bahkan ada kecenderungan dihilangkan. Hal itu dapat dilihat dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang tidak memberikan peran penting etnis Muna dalam pengambilan keputusan politik. Hal itu sejalan dengan pendapat Harvey (1984: 39) yang menyatakan bahwa Muna diabaikan secara politik hingga pertengahan abad ke-18. Baru pada pertengahan abad 19, Belanda melirikinya karena Muna banyak menyimpan potensi kayu jati. Batoa (1991: 18) menulis bahwa Belanda yang ingin berusaha menguasai Muna sepenuhnya, tetapi awalnya tidak berhasil sepenuhnya karena raja-raja di Muna melakukan perlawanan.<sup>2</sup> Lambat laun, Belanda mampu menaklukkannya karena berhasil memecah belah dengan Buton.

---

<sup>1</sup> Teori ini terkenal lewat karya Michael Hechter, "Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development" Ulasan tentang teori ini dapat dibaca dalam <http://www.eh.net/xiucongres/cd/papers/27fordchi201.pdf>

<sup>2</sup> Berdasarkan catatan yang ada, perlawanan raja Muna terhadap Belanda mulai ditakukan oleh La Ode Ngkadiri

Bukan hanya Belanda yang pernah menguasai Muna, tetapi juga dari etnis Buton. Penyebabnya karena Raja Buton melakukan konspirasi dengan Belanda dengan maksud memperluas wilayah Kesultanan Buton. Buton menganggap etnis Muna termasuk dalam daerah kekuasaannya apalagi sesudah terbentuknya *afdeeling* Buton yang meliputi wilayah Buton, Muna, dan daerah-daerah sekitarnya. Ibukota *afdeeling* Buton adalah Bau-Bau, tempat kedudukan Sultan Buton.

Hegemoni etnis Buton terhadap etnis Muna terus berlanjut sampai saat perang antara raja Muna, La Ode Samaili yang berselisih paham dengan sepupunya Wa Ode Kadingke.<sup>3</sup> Dalam perang saudara tersebut, Wa Ode Kadingke mendapat bantuan dari Buton. Akhirnya La Ode Sumaili kalah dan kemudian dihukum mati. Hukuman mati itu dilakukan dengan cara memukul seluruh badan terhukum hingga mati (Dokumentasi DPRD, 1974: 173). Usai peristiwa itu, La Ode SaEte diangkat menjadi raja Muna. Pengangkatan itu tidak disenangi oleh raja Buton, karena Raja Muna menduduki tahta Kerajaan tidak melalui persetujuannya. Dari informasi yang penulis peroleh dari La Kimi Batoa, orang Buton saat itu kurang sensitif terhadap perasaan etnis Muna.

Peristiwa di atas semakin memperburuk hubungan kedua etnis, yang memang sudah ada benih pertentangan kedua etnis itu<sup>4</sup> sehingga menimbulkan ketegangan antara dua Kerajaan. Akibatnya, perang antara kedua Kerajaan itu tak dapat dielakkan. Dalam peperangan itu, Muna kalah. Kekalahan itu

<sup>3</sup> Dalam dokumen tersebut tidak disebutkan penyebab peperangan tersebut. Perang saudara tersebut terjadi pada tahun 1799.

<sup>4</sup> Awal mula dari pertentangan antara etnis Buton dan etnis Muna yakni pertama, ketika Pieter Both yang ingin mengunjungi Muna, tetapi ditentang oleh raja Muna saat itu. Sikap sebaliknya, Buton mengizinkan Pieter Both memasuki Muna dengan alasan untuk membela diri dalam menghadapi kerajaan Gowa; Kedua, raja Muna tidak senang Muna ditempatkan dibawah Buton. Karena itu ketika La Ode Sumaili menjadi raja, ia tidak memberi penghormatan berupa menyembah kepada Belanda dan Sultan Buton, tetapi cara biasa dengan mengangkat telunjuk sambil mengucapkan syahadat. Uraian lebih dalam dapat dibaca pada Batoa (1991: 38).

membawa konsekuensi politik yang penting di kemudian hari. Raja Buton selalu memasukkan etnis-etnisnya dalam struktur Kerajaan Muna. Hegemoni etnis Buton mencapai puncaknya pada saat penandatanganan perjanjian *verklaring* yang menyebutkan Muna juga termasuk kekuasaan Buton.<sup>5</sup> Implikasi dari perjanjian tersebut menyebabkan Muna bergantung pada Buton, dan harus menerima kedudukan *batara*<sup>6</sup> (Schoorl, 2003:99; Batoa,1991: 52).

Dalam sistem tersebut, Belanda mula-mula membentuk *afdeeling* Sulawesi Timur yang terdiri atas lima *onderafdeeling*, yaitu Buton, Muna, Kendari, Bungku, dan Luwuk Banggai dengan ibukotanya Bau-Bau. Dalam sistem itu, Muna dikepalai oleh seorang *controleur* Belanda di samping Dewan Kerajaan yang memerintah atas nama Sultan Buton.

Dacrah-daerah bawahan yang terdiri atas Tongkuno, Kabhawo, Lawa, dan Katobu yang masih dikepalai oleh pejabat adat yang disebut *kogherano*, dijadikan distrik yang dikepalai oleh kepala distrik disamping *kogherano*. Bekas Kerajaan Tiworo dijadikan distrik Tiworo, lalu dimasukkan dalam wilayah kekuasaan *onderafdeeling* Muna. Bekas Kerajaan Kalisusu dijadikan dua distrik, yaitu Kulisusu dan Wakorumba, sehingga wilayah *onderafdeeling* Muna mencakup tujuh distrik.

Berdasarkan fakta sejarah di atas, ada kecenderungan etnis Muna adalah sebuah etnis yang subordinasi dari Belanda dan Buton. Pemerintahan Kerajaan Muna dikontrol oleh Belanda dan Buton. Jika ingin mengangkat raja, mereka

<sup>5</sup> Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 2 Agustus 1918 tersebut hanya ditandatangani oleh pemerintah Belanda dan Sultan Buton. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa Belanda hanya mengakui Kesultanan Buton dan Kerajaan Konawe, sedangkan kerajaan-kerajaan lainnya dihapuskan dan dijadikan persekutuan bawahan Kesultanan Buton. Etnis Muna sebetulnya tidak menerima hasil perjanjian sepihak ini. Uraian lebih jelas tentang hal ini dapat dilihat dalam La Ode Abdul Rauf, *Peranan Elite dalam Proses Modernisasi (Suatu Studi Kasus di Muna)*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999: 137-138

<sup>6</sup> Dalam stratifikasi masyarakat saat itu, golongan *batara* termasuk golongan menengah. Golongan atas ditempati golongan *kaomu*, dan golongan rendah adalah *ata*

terlebih dahulu minta izin dan harus melalui persetujuan Belanda dan Buton. Kecenderungan etnis Muna yang dikuasai oleh etnis Buton juga disinyalir oleh Tanmana (dalam Zuhdi, 2001). Perasaan ingin mewujudkan *imagine community*<sup>7</sup> orang Muna muncul ketika berakhirnya zaman penjajahan.

Memasuki kemerdekaan, etnis Muna belum mampu mendobrak dominasi politik etnis Bugis-Makassar. Awal-awal kemerdekaan, yang menguasai etnis Muna adalah etnis Bugis-Makassar. Dominasi etnis Bugis saat itu tidak lepas dari status pemerintahan yang masih bersatu dibawah propinsi Sulawesi Selatan Tenggara. Sekitar tahun 1955--1956 residen koordinator untuk Sulawesi Selatan/Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara masing-masing mempunyai kantor sendiri. Dalam pemilihan umum 1955, Sulawesi Utara dan Tengah menjadi satu distrik pemilihan, sedangkan Sulawesi Selatan Tenggara satu daerah pemilihan tersendiri.

Menyatunya daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara dalam lingkungan satu wilayah tunggal, menyebabkan masing-masing daerah tidak mampu menuntaskan masalah yang dihadapi. Ada tuntutan dan prioritas masing-masing daerah. Sulawesi Selatan, misalnya, memberi prioritas untuk mengakhiri pemberontakan. Sulawesi Utara lebih memberi prioritas pada pengaturan masalah kopra. Adapun daerah Sulawesi Tenggara lebih memberi perhatian pada upaya untuk mengangkat masyarakat dari keterbelakangan.<sup>8</sup> Tetapi,

<sup>7</sup> Gagasan tentang *imagine community* dikemukakan oleh Anderson (1991) yang menjelaskan *sense of nationality*. Kemunculan rasa kebangsaan dalam suatu masyarakat tidak perlu melalui hubungan tatap muka antaranggota, tetapi lahir melalui proses imajinasi.

<sup>8</sup> Masalah yang dihadapi oleh daerah Sulawesi Tenggara adalah keterbelakangan keadaan sosial ekonomi. Rakyat di daerah pedalaman membawa hasil buminya berpuluh-puluh kilometer berjalan kaki ke kota yang hasilnya kadang-kadang hanya sepuluh atau dua puluh rupiah dan hal itu tidak seimbang dengan kecapekannya. Di sudut pendidikan dan pengajaran juga masih terbelakang, karena sekolah menengah tingkat pertama baru dapat dihidup dengan jalan D. daerah Kendari pada waktu itu baru ada sebuah sekolah rakyat yang didirikan atas bantuan

perhatian dari pemerintah pusat untuk menuntaskan masalah tersebut tidak pernah memuaskan daerah.

Akibatnya ada tuntutan dari daerah untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas. Alasan utama sehingga lahir tuntutan tersebut adalah masalah otonomi propinsi agar daerah dapat menanggulangi masalah-masalah yang paling mendesak secara lebih baik.<sup>9</sup> Motivasi untuk mendirikan provinsi baru timbul dari perasaan terabaikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara yang pusatnya ada di Makassar.

Persoalan nasional juga turut menjadi salah satu faktor perlawanan daerah terhadap sentralisasi pemerintahan pusat Rakyat di daerah Sulawesi Tenggara merasa kecewa karena pemilihan umum 1955 tidak membawa zaman baru untuk membentuk pemerintahan yang konstruktif. Banyaknya partai hampir sama seperti sebelumnya, dan pertengkaran di antara partai-partai itu rupanya menggagalkan setiap kemajuan, hanya demi kepentingan partai yang sempit. Kabinet baru terbentuk, dan setiap menteri mengganti para pejabat provinsi dalam departemennya dengan anggota-anggota partainya sendiri. Selanjutnya, hasil pemilihan umum telah menunjukkan kelemahan besar dari partai-partai yang berdasarkan kedaerahan<sup>10</sup> mendapat kurang dari dua persen

---

pemerintah Sulawesi. Lihat Dokumentasi DPRD, Tana Tahun, *Perkembangan Sulawesi Tenggara, dari Fase Kabupaten ke Propinsi*.

<sup>9</sup> Bukan hanya daerah Sulawesi Tenggara yang sudah meningkat perasaan kedaerahan, tetapi ungkapan ketidakpuasan serupa juga hampir terjadi di seluruh negeri. Ronald A. Witton, *Regionalism and Development in Indonesia, 1971*: 91 dengan mempergunakan analisa kuantitatif mengenai regionalisme di Indonesia mengemukakan, ada masalah-masalah dalam menyusun skala ketidakpuasan daerah yang didasarkan pada laporan-laporan yang dimuat dalam kantor berita nasional. Peningkatan dalam pelaporan tuntutan-tuntutan daerah, karena dibukanya kantor berita di daerah-daerah, atau akibat kurangnya berita yang mempunyai makna nasional.

<sup>10</sup> Pada saat pemilihan umum 1955, daerah pemilihan Sulawesi Selatan partai yang berdasarkan kedaerahan seperti Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) suara 21.512 (Parlemen) dan 22.597 (suara Konstituante), La Ode Hadi 33.269 (Parlemen) dan 5.263 (Suara Konstituante), dan PPP La Ode Idrus Efendi 46.835 (Parlemen) dan 31.915 (Suara Konstituante).

suara di Sulawesi Selatan dalam pemilihan umum dan tidak memperoleh kursi baik di DPR maupun Dewan Konstituante (Feith, 1990: 102).

Upaya-upaya untuk memisahkan diri dari Makassar memperlihatkan kemauan kemandirian dengan cara memanfaatkan potensi wilayah yang dianggap belum terwujud. Guna memutuskan pembentukan propinsi baru, dibentuk panitia yang bernama Panitia Pembentukan Propinsi Sulawesi Tenggara (Biro Hukum Sultra, tanpa tahun: 137). Keanggotaan dari panitia tersebut ada yang berkedudukan di Kendari dan ada pula di Makassar. Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) saat itu belum memadai, para pendukung pembentukan propinsi mengajukan argumentasi pemanfaatan sumber daya alam yang belum dimanfaatkan.

Yang menarik pada saat awal-awal tersebut, elite dari masing-masing etnis bersatu padu mendukung gagasan pemisahan diri dari Makassar. Hal itu terlihat dari bersatunya para elite etnis asli<sup>11</sup> merealisasikan gagasan yang diimpikan bersama. Pada masa ini, kerjasama etnis pada tingkat elite dilakukan dengan melakukan koalisi etnis asli.<sup>12</sup> Etnis asli tidak bersaing satu sama lain, karena mereka bersama-sama berkompetisi dalam upaya keluar dari dominasi Sulawesi Selatan. Pemerintahan di daerah kemudian mendorong kerjasama antar etnis asli.

Ketika “otonomi provinsi” terwujud pada tahun 1964, mulai terjadi pergeseran. Koalisi antar etnis asli menjadi terancam. Pada awal pembentukan

<sup>11</sup> Dapat disebutkan disini tokoh-tokoh yang amat getol untuk memperjuangkan terwujudnya pembentukan Sulawesi Tenggara yakni dari tokoh dari etnis Tolaki yakni Bunggasi, Djuhaepa Balaka, Abd. Rahman; etnis Mekongga, CH Pingak, Muhidin; etnis Buton Sultan Buton, Drs. La Ode Manarfa, dan La Ode Kamil. Etnis Muna yakni Raja Muna, La Ode Rianse, La Ode Ado, dan La Tobulu (Biro Hukum Sultra, tanpa tahun: 138).

<sup>12</sup> Istilah “asli” secara khusus penulis gunakan untuk menunjuk warga masyarakat lokal di Kendari. Asli mengacu pada masyarakat dari etnis Tolaki, Buton, Muna, dan Kolaka dan juga kepada orang-orang yang hidup di kepulauan tersebut. Kata tersebut dalam bahasa Inggris yakni *indigenes*.

propinsi, disepakati hanya ada dua kabupaten adalah Kabupaten Sulawesi Timur dan Kabupaten Sulawesi Tenggara. Kabupaten Sulawesi Timur dengan ibukota di Kendari meliputi Kewedanan Kolaka dan Kendari, sementara itu Kabupaten Sulawesi Tenggara dengan ibukota Bau-Bau meliputi Kawedanan Buton dan Muna. Akan tetapi dalam perjalanan selanjutnya, Kolaka menuntut lepas dari Kabupaten Sulawesi Timur. Hal itu dipicu oleh panitia persiapan Kabupaten Sulawesi Timur yang saat rapat pada tanggal 15 dan 16 Mei 1957 tidak mengundang wakil dari Kolaka.

Rupanya gerakan yang ada di Kolaka, juga terjadi di Muna. Elite dari etnis Muna yang sebelumnya bergabung bersama-sama dalam koalisi pembentukan Kabupaten Sulawesi Tenggara, kemudian balik ke Muna untuk merealisasikan pembentukan Kabupaten Muna. Berdasarkan dokumen yang diperoleh penulis, di Muna dibentuk panitia persiapan Kabupaten Muna dengan Ketua La Ode Ado, Wakil Ketua La Ode Hibi, dan La Ode Tuga. Panitia ini berusaha untuk merealisasikan ide perwujudan Kabupaten Muna (Dokumentasi DPRD, 1977: 177). Salah satu gerakan yang dibuat adalah dengan membentangkan sejumlah spanduk dan poster<sup>13</sup> ketika ada kunjungan salah seorang pejabat propinsi ke Sulawesi Tenggara. Latar belakang dari etnis Muna yang tidak ingin bergabung dengan Kabupaten Sulawesi Tenggara karena Muna tidak ingin menjadi Swapraja Buton (Dokumentasi DPRD, 1977: 178).

<sup>13</sup>Bunyi dari slogan-slogan tersebut : 1.Kami bosan janji-janji. Kami mau bukti; 2. Singkirkan Janji-Janji; Politis Hilangkan rotine berpura-pura, Muna Kabupaten, 3. Rakyat to Muna bukan 120.000, Tapi 300.0004. Bukankah ini paradox : Daerah Dayak 80.000 Satu Propinsi Daerah Muna 120.000 satu kewedanan; 5. Datanglah dan berilah dengan jujur Muna sudah Kabupaten; 6. Jangan terus-terusan adu domba Berikanlah Muna Kabupaten; 7. 40 tahun tertinggal dengan pembangunan olehkarenanya Muna Kabupaten; 8. Pembukaan S G Negeri di Raha telah memenuhi syarat-syarat. buka dan resmikanlah Muna Kabupaten; 9. Segala perlengkapan SMP Negeri telah tersedia. Hanya tinggal pengesahan! Buktikanlah ! 10. Ini Hari Kabupaten ! Ini hari juga Kompetensi !

Dengan fakta-fakta di atas dapat dibuat generalisasi bahwa otonomi diberikan kepada daerah sendiri berupa pembentukan propinsi, tetapi koalisi antar etnis terpecah. Meskipun hanya etnis asli yang bermain dan berbagi peran, diantara etnis asli pun mempertengkarakan "siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana". Jadi, politik pada masa awal terbentuknya daerah bergeser dari perjuangan melawan Bugis Makassar menjadi pertengkaran antar sesama. Situasi tersebut, dengan meminjam istilah Rabushka dan Shepsle, situasi politik yang semula merupakan *persoalan ekstraksi*, yaitu bagaimana mendapatkan keuntungan dari satu kelompok dominan, berubah menjadi persoalan pembagian antara anggota koalisi yang menang tadi.

Pembentukan kabupaten yang ternyata tidak sesuai dengan komitmen awal. Istilah atau kata-kata yang bias dimunculkan sering kita dengar seperti "keinginan untuk mandiri" dan "untuk kesejahteraan rakyat". Namun, dibalik itu sebetulnya ada alasan etnis. Masing-masing etnis tidak ingin dibawah bayang-bayang kebesaran etnis lainnya. Etnis Tolaki tidak ingin menjadi bayang-bayang kebesaran etnis Muna. Demikian halnya etnis Muna tidak ingin di bawah bayang-bayang kebesaran etnis Bugis-Makassar, dan etnis Buton. Selama ini, etnis Muna tertimbun dibawah budaya tersebut, sehingga sejarah, kebudayaan, serta sifat Muna sudah memudar.

Masalah yang sebenarnya lebih menyangkut kesenjangan antara Muna dengan daerah-daerah tersebut. Ini merupakan konsekuensi dari proses sentralisasi yang ketat dari sebuah rejim. Sejak dihapuskannya ADO (Alokasi Devisa Otomatis), maka daerah-daerah "pinggiran" kurang mendapat porsi yang layak dari APBN. Pada waktu itu belum ada UU yang mengatur tentang pertimbangan pusat dan daerah.

Karena itu untuk memunculkan budaya Muna, nama Kabupaten Muna sengaja dipilih karena dianggap layak mewakili budaya dan identitas tersebut. Hal itu ditopang dengan upaya negara dalam hal ini pemerintah orde baru mendomestikasi identitas-identitas etnis demi mengakomodasikannya ke dalam kerangka proses-proses pembangunan bangsa (Maunati, 2004: 197). Untuk mencapai hal ini, orde baru mempromosikan sebuah identitas etnis melalui acuan geografis dan administratif.

### 3.2. Perspektif Kompetitif

#### 3.2.1 Sumber Politik

Secara internal, bangkitnya etnisitas Muna adalah akibat dari kesuksesan dan kegagalan politik orde baru. Tuntutan-tuntutan etnis Muna untuk berkuasa saat ini mengekspresikan perluasan kesempatan etnis Muna, setelah sekian lama tertindas oleh rezim orde baru yang menerapkan sistem pemerintahan sentralistis. Jadi, saat ini merupakan reaksi yang wajar dari etnis Muna yang dinamis dan terbuka akibat reformasi politik yang telah bergulir.

Pada masa-masa awal pembentukan birokrasi di Kendari, etnis Muna di Kendari tidak banyak memperoleh kesempatan untuk menjadi *the ruling elite*. Pada awal-awal birokrasi di Kendari dibentuk, etnis Tolaki banyak menempati posisi-posisi penting melalui struktur Raja Sao-Sao (1871--1928) dan Raja Tekaka (1928--1955). Karena itu, dapat dikatakan bahwa etnis Tolaki telah menegakkan suatu dinasti dalam birokrasi selama periode kolonial. Bagaimana itu bisa terjadi penjelasan dibawah ini akan menjawab pertanyaan tersebut

Melalui kekuasaan kolonial Belanda, kekuasaan kedua raja tersebut tetap dikontrol dan secara bertahap dijadikan sebagai "boneka buatan", sehingga

seluruh wilayah Kerajaan Laiwui yang tadinya diperintah oleh Kerajaan Konawe masih diperintah oleh raja-raja dari Kerajaan Konawe dengan struktur pemerintahan *Siwole Mbatuhua Opitu Dida Batu* (Muslimin Su'ud, wawancara 12 Maret 2003).

Alasan Belanda untuk mengatur Kerajaan Laiwui adalah kontrak antara Raja Sao-Sao dengan Asisten Resident Bensbach yang mewakili Pemerintah Hindia Belanda. Isi dari perjanjian tersebut bahwa Laiwui mengakui Raja Belanda sebagai penguasa tertinggi yang sah, dan selanjutnya kepada Gubernur Hindia Belanda dan yang mewakilinya Laiwui senantiasa akan takluk, setia dan mengaturnya. Kontrak yang terdiri dari delapan belas pasal itu mengatur hubungan antara *Hadat Laiwui* dengan Gubernur Hindia Belanda, kewajiban dan hak dari kedua belah pihak dan apa-apa yang tidak boleh diperlakukan lagi oleh *Hadat Laiwui*.

Dengan dasar seperti itu, struktur birokrasi dirancang sebagai medium yang efektif antara rakyat pada umumnya dengan pemerintah Belanda. Kedudukan mereka sebagai kelas penguasa pada saat itu amat ditakuti oleh rakyat. Dapat dikatakan bahwa kehidupan mereka sangat bergantung pada gaji yang diperoleh setiap bulan. Kebudayaan mereka pada umumnya berkait dengan birokrasi-birokrasi bentukan Belanda adalah perilaku yang terkendali, halus, dan sopan.

Kekuasaan pemerintah kolonial Belanda terhadap sistem birokrasi Kerajaan sangat besar sehingga dapat mengubah struktur pemerintahan yang telah dibentuk sebelumnya. Sebagaimana diketahui, pada masa pemerintahan Sao-Sao dibentuk lembaga adat dan perangkatnya sebagai berikut :

1. *Tono motuo* sebagai etnis tua yang dituakan dalam masyarakat;

2. *Sudo* wakil dari *tono motuo*;
3. *Todu*, etnis tua yang menguasai selukbeluk berbagai pertanda yang tidak baik.
4. *Tolea*, juru bicara yang berfungsi sebagai pengantar sesuatu dalam pertemuan;
5. *Sando* (dukun) menguasai berbagai jenis penyakit dan penyembuhannya.

Akan tetapi, setelah Belanda masuk, segala apa yang menjadi tradisi sedikit demi sedikit digantikan dengan *stelsel* organisasi yang sesuai dengan tujuan penjajah. Hal itu terlihat pada perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 2 Agustus 1918 sehingga terbentuk struktur Dewan Kerajaan Laiwui sebagai berikut :

1. *Mokole* (Raja + Sangia) sebagai kepala negara;
2. Pembantu raja adalah *sapatu* dan *kaputa*, kedua pejabat ini adalah sebagai pembantu utama raja dalam melaksanakan kepemimpinannya, sedangkan jabatan dalam bidang Angkatan Bersenjata ditiadakan, mengingat daerah *Zelfhestuur* tidak diperkenankan memiliki angkatan bersenjata; dan
3. Pemerintahan di daerah sesuai dengan pembagian wilayah yang telah ditetapkan oleh kolonial Belanda, penguasa-penguasa daerah ini dipercayakan kepada *anakia-anakia* sebagai Kepala-Kepala Distrik dengan membawahi daerah yang lingkungannya lebih kecil, yaitu *Onder District*.

Dengan memperhatikan struktur pemerintahan pada masa kekuasaan Raja Sao-Sao, terlihat Belanda mempunyai tujuan menghancurkan sistem pemerintahan tradisional Kerajaan Konawe yang telah dilaksanakan selama kekuasaan Konawe masih berjaya. Masalah ini terkait dengan masalah keamanan yang harus diciptakan dalam rangka melegalkan kekuasaan imperialis

Setelah Kabupaten Kendari berubah status menjadi Kota Administratif (Kotif), praktik diskriminatif atas dasar etnis sudah mengendur, walaupun tidak hilang sama sekali. Di tengah dominasi etnis Tolaki, setelah berubah status menjadi Kotif sudah ada berbagai etnis yang pernah menjadi walikotif seperti yang terlihat pada tabel 3.2. Etnis Muna yang pernah menjadi Plt. Walikotif adalah Drs. La Ode Lasjkar Koedoes. Keberhasilan etnis Muna untuk mengirimkan "orangnya" menjadi walikotif adalah hasil intervensi<sup>21</sup> Gubernur Sultra saat itu, Drs. La Ode Kaimuddin.

Kesanggupan gubernur untuk melakukan intervensi karena dalam dirinya merangkap dua jabatan sekaligus. Pertama, gubernur adalah pejabat pusat. Kedua, gubernur adalah pejabat daerah. Pengaruh Gubernur dan Mendagri dalam pemilihan Bupati/Walikota lebih besar dari DPRD. Akibatnya, kewenangan gubernur sangat luas, apalagi status pemerintah Kota Kendari masih menjadi Pemerintah Kotif Kendari. Dengan statusnya tersebut, belum ada institusi DPRD yang dianggap sebagai lembaga perwakilan daerah. Pada masa itu, etnisitas tidak dianggap penting karena konteks politik yang menyebabkan harus tunduk pada hegemoni gubernur.

Keadaan berubah sejak ada perubahan status dari Kota Administratif Kendari berubah menjadi kotamadya tahun 1994. Mulai saat itu, intervensi gubernur sudah berkurang dan penentuan siapa yang akan menduduki walikota lebih banyak ditentukan dari dinamika yang terjadi di DPRD Kota Kendari. Salah satu dampak yang bisa dilihat dari perubahan status itu, etnis Tolaki

---

<sup>21</sup> Besarnya pengaruh itu karena dalam penjelasan UU No 5 tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah mengatur bahwa Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini bertindak atas nama Presiden dalam mengangkat Kepala Daerah Tingkat II tidak terikat pada jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon. Penjelasan pasal tersebut memperlihatkan kekuasaan yang besar bagi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah

kembali sanggup tampil merebut jabatan Walikota Kendari periode 1995-- s d sekarang.

Tabel 3.2

## Etnisitas Walikotif Kendari

No	Nama Bupati	Periode	Etnis
1	Drs.H. M. Mansur Pamadeng	1978—1980	Bugis
2	Drs. H. M. Antero Hamra	1980—1985	Tolaki
3	Drs. H. Anas Bunggasi	1985-- 1988	Tolaki
4	Kol. (Purn) H. Ady Mangilep	1988—1991	Gorontalo
5	Drs.H. Andi Kaharuddin	1991 - 1992	Bugis
6	Drs. Usman Sabora	1993 –1995	Buton
7	Drs.H.L.M Salihin Sabora	1993 -- 1995	Buton
8	Letkol Rasyid Hamzah	25 Juli -- 27 Sep '95	Buton
9	Drs. La Ode Lasjkar Koedoes	1995-- 1996	Muna
10	Drs. H. Masyhur Masie Abunawas., M. Si.	1996 sampai sekarang	Tolaki

Tabel 3.1 dan 3.2 di atas menunjukkan bahwa etnis Muna yang dapat menjadi Walikota Kendari hanya Drs. La Ode Lasjkar Koedoes. Dari etnis Bugis ada dua orang yakni Drs. Mansur Pamadeng dan Drs. Andi Kaharuddin. Dari etnis Tolaki ada tiga orang yakni Drs. Antero Hamra, Drs. Anas Bunggasi, dan Drs. Masyhur Masie Abunawas., M.Si. Dari etnis Buton ada tiga orang yakni Drs. Usman Sabora, Drs. Salihin Sabora, dan Letkol Rasyid Hamzah. Ada juga yang berasal dari etnis Gorontalo yakni Kol (Purn.) Ady Mangilep. Dari data di atas terlihat bahwa etnis Muna yang ada di Kendari kesulitan bersaing dengan etnis lain dalam meraih posisi Walikota Kendari. Penyebab utamanya rendahnya kesempatan menduduki jabatan walikota karena lemahnya koalisi yang bisa dilakukan antarsesama etnis Muna. Dari komposisi anggota DPRD

Kota Kendari<sup>2</sup>, hanya tiga orang dari etnis Muna. Dengan jumlah anggota DPRD Kota Kendari sebanyak 25 orang, etnis Muna tidak mampu menghadapi koalisi yang dibentuk oleh elite etnis lain yang rata-rata mempunyai anggota lebih banyak.

Keterpurukan etnis Muna juga terlihat pada posisi eselon II dan eselon III di lingkungan Pemkot Kota Kendari. Sebagaimana yang terlihat pada tabel 3.3, di bawah etnis Muna yang menduduki eselon III/a dan III/b hanya 2 orang atau 6,25% dari total keseluruhan. Hal itu jauh lebih rendah dibanding dengan etnis Tolaki yang menempati eselon III/a dan III/b sebanyak 18 orang, etnis Bugis-Makassar 7 orang, etnis Buton 5 orang. Selanjutnya, perhatikan tabel 3.3 berikut.

**Tabel 3.3**  
**Etnisitas Pejabat Pemkot**

Eselon	Latar Belakang Etnis	Frekuensi	Prosentase
Eselon II/a dan Eselon II/b	Buton	1	33,33 %
	Tolaki	2	66,66 %
Eselon III/a dan Eselon III/b (Kabag, Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat)	Tolaki	18	56,25 %
	Bugis-Makassar	7	21,87 %
	Buton	5	15,62 %
	Muna	2	6,25 %
	Jawa	1	3,12 %
	Tator	1	3,12 %

Sumber: Bagian Kepegawaian Pemkot Kendari, Januari 2004, diolah

Perbedaan posisi dan ketidakseimbangan etnis di jajaran pemkot di atas, memunculkan kesan seolah-olah etnis Tolaki berada dalam posisi yang lebih tinggi dibandingkan etnis lain, seperti Buton, Muna, Bugis, dan Jawa. Bagi etnis non Tolaki, komposisi etnis yang tidak seimbang di atas, dapat ditafsirkan

<sup>2</sup> Hasil pemilu 1999 saja, dari 25 orang anggota DPRD Kota Kendari, orang Muna hanya 3 orang yang semuanya dipasok dari PDI-P Kota Kendari.

sebagai diskriminasi etnis yang dilakukan oleh Walikota Masyhur Massie Abunawas. Ia mengangkat etnis dari Tolaki untuk menduduki jabatan-jabatan penting seperti Asisten I (Drs. Yato Palari), dan Asisten II (Drs. M. Yamin Rachman). Demikian juga halnya jabatan “basah” diberikan kepada etnis Tolaki seperti Kepala Dinas Pendapatan (Drs. Baharumin Ak.), Kabag Keuangan (Muhammad Rizal.,S.E., M.Si.) dan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (Alamsyah Lotumani.,S.E.). Sementara etnis Muna hanya di diberi jabatan “kering” dan “tidak penting” seperti Kepala Kantor Kesatuan Bangsa (Nurdin Pamone, S.H.) dan Kabag Hukum (Drs. Arifin Baidi). Memang ada institusi Baperjakat (Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan), yang bertugas untuk memberi pertimbangan kepada walikota, tetapi keputusan terakhir tetap di tangan walikota.

Ada dua penyebab yang mengakibatkan etnis Muna “kalah” dalam pertarungan dengan etnis Tolaki. Pertama, etnis Muna tidak dianggap sebagai penduduk asli/putera daerah. Kedua, keberhasilan etnis Tolaki dalam konsolidasi internalnya. Faktor pertama, dapat dikatakan sebagai bias lokalitas di kalangan aktor-aktor politik lokal di Kendari. Istilah putera daerah di Kendari, pertama kali digulirkan tahun 50’an yang didorong citra politik “Jawanisasi”.<sup>22</sup> Ketika itu, daerah-daerah luar Jawa meminta bagian yang lebih banyak dalam

---

<sup>22</sup> Praktek Jawanisasi yang penulis maksudkan adalah praktek penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi di Jawa. Dalam konteks lokal, isu Jawanisasi lebih merupakan isu politik yang mengkhawatirkan adanya dominasi etnis Jawa di luar Pulau Jawa. Isu Jawanisasi pernah dipublikasikan di Harian Haagse Post Negeri Belanda, bahwa pemimpin redaksinya, Jansen van Galen, diiringi juru kamera dan Duden, dan wartawan Freelance Ruitter masuk di pedalaman Irian Jaya. Di Eropa, tahun 1986 beredar isu Jawanisasi karena pemerintah Indonesia mengambil paksa tanah orang Irian Jaya, yang biasa disebut dengan istilah Irian Jawa, bukan Irian Jaya. Di Australia, isu Jawanisasi terdengar dalam parlemen yang isinya bahwa di Irian Jaya ada invasi Semua data-data tersebut penulis kutip dari catatan kaki Ade Suptomo, “Janin . Konstruksi Sosial Tentang Proses Integrasi Suku Bangsa Jawa dengan Minangkabau di Sitiung Sumatera Barat”, *disertasi*, Jogjakarta, UGM : 2002:63

Anggaran Nasional untuk pembangunan dan kesempatan bagi bukan etnis Jawa untuk memegang jabatan kepemimpinan nasional.<sup>23</sup>

Dengan penafsiran putera daerah atas dasar lokalitas, maka etnis Tolaki dianggap sebagai putera daerah Kendari. Dengan kata lain, Kendari dianggap sebagai tanah leluhur bagi etnis Tolaki, bukan bagi etnis Muna. Situasi politis seperti itu merupakan dasar argumentasi yang kuat bagi etnis Tolaki untuk mempertahankan kedudukan sentral mereka di posisi-posisi tinggi dalam birokrasi di pemerintah Kota Kendari.

Sementara itu, faktor kedua merupakan bias dari kemelut politik pasca pemilihan Walikota Drs. Masyhur Massie Abunawas/Ir. Muzakkir Mustapa. Kemelut tersebut berawal ketika Gubernur La Ode Kaimuddin saat itu tidak mau melantik pasangan di atas menjadi Walikota/Wakil Walikota, walau sudah memenangkan pertarungan di DPRD Kota Kendari. Alasannya adalah tidak ada surat izin dari atasan di berkas yang dikirim.<sup>24</sup> Yang menarik dari perseteruan tersebut adalah faktor etnisitas dari tindakan yang pro dan kontra tindakan La Ode Kaimuddin. Yang mendukungnya seperti Gerakan Advokasi Masyarakat<sup>25</sup>, Prankat<sup>26</sup>, Pelopor Penerus Kemerdekaan<sup>27</sup>, Yappsemmi<sup>28</sup>, Forum Sosial

<sup>23</sup> Puncak dari tuntutan tersebut yakni dapat dilihat dari pemberontakan yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Menurut analisis Harvey (1974:430-435), pemberontakan itu muncul karena ada persaingan dalam struktur staf komando TT-VII antara tiga kelompok etnis yakni Bugis/Makassar, Minahasa, dan Jawa. Kahar menginginkan komando di TT-VII dipimpin oleh anak-anak daerah sendiri.

<sup>24</sup> Penolakan Gubernur dapat dilihat dari Surat Nomor 17/575 perihal: Penangguhan Penetapan bakal calon walikota Kendari atas nama Mashur Masie Abunawas/Musakkir Mustafa. Ada 2 alasan penangguhannya 1) bahwa yang bersangkutan sebagai PNS belum memperoleh ijin tertulis dari atasan yang berwenang mengeluarkan ijin sesuai Pasal 4 PP 151 Tahun 2000 Jo pasal 4 Tatib DPRD Kota Kendari, 2) Surat ijin yang dikantongi oleh Masyhur Masie Abunawas yang didapatkan dari Dirjen Otoda tidak dapat dipergunakan dalam pemilihan walikota, Surat di atas diperkuat lagi oleh surat yang dibuat oleh Sekretaris Propinsi Drs. Yokoyama Sinopay dengan nomor 131/5570 tentang Penelitian Dokumen Calon Walikota dan Wakil Walikota didapatkan ada keterlambatan pengiriman berkas kelengkapan seperti yang diatur dalam penjelasan pasal 20 PP No. 151 tahun 2000

<sup>25</sup> Ketua Presidumnya adalah Sawaluddin (etnis Muna).

<sup>26</sup> Ketuanya adalah Dahris (etnis Muna)

Demokratik<sup>29</sup>, dimana ketuanya banyak berasal dari etnis Muna. Dalam kaitan ini, kelompok-kelompok di atas mendukung penangguhan berkas walikota kepada Mendagri sampai ada penyelesaian tuntas mengenai surat izin yang diperoleh Masyhur Masie Abunawas.

Sebaliknya, ada juga yang menolak tindakan La Ode Kaimuddin, utamanya organisasi massa yang pimpinan/ketua pada umumnya dari etnis Tolaki.<sup>30</sup> Kelompok ini pada dasarnya bisa menerima hasil pemilihan walikota tersebut. Faktor perbedaan yang bermuara perbedaan etnis (Tolaki dan Muna) tampaknya bisa dijelaskan melalui pendekatan politik. Sikap tokoh dari etnis Muna untuk tetap menolak hasil pemilihan walikota dan mendukung tindakan gubernur tampaknya mempunyai korelasi positif dengan karakteristik masyarakat Muna, yaitu paternalistis. Perilaku berpolitik etnis Muna sangat ditentukan oleh latar belakang aktor dalam arena permainan tersebut. Karena La Ode Kaimuddin memiliki latar belakang etnis Muna, maka etnis Muna mendukung keputusan gubernur tersebut. Dengan prinsip tersebut, maka secara empiris masyarakat Muna relatif lebih sulit untuk realistis dibandingkan dengan etnis Tolaki.

Akhir dari pertarungan tersebut, La Ode Kaimuddin akhirnya harus merefakan Masyhur/Musakkir dilantik oleh Hari Sabarno pada tanggal 12 Agustus 2002 di Jakarta. Keberhasilannya dilantik merupakan awal dari terjadinya konsolidasi internal di kalangan etnis Tolaki. Setelah mengalami

---

<sup>27</sup> Ketuanya adalah La Uka (etnis Muna)

<sup>28</sup> Ketuanya adalah La Ndoada (etnis Muna)

<sup>29</sup> Ketuanya Muhammad Thokotua (etnis Bima)

<sup>30</sup> Dapat disebutkan antara lain Forum Komunikasi Pemuda Mahasiswa dan Pelajar Punggoloba (FKPMPP) dengan ketuanya Darmadi, S Sos, Ikatan Pemuda Pelajar Poasia (IPP) dengan Ketuanya Muh. Idham, S Pd, dan Forum Pelajar dan Mahasiswa Kontumolepe (FBMK) dengan ketuanya Syarifuddin. Dari perorangan yakni Drs. Tumbu Saranani

krisis yang tidak berujung akibat persetruannya dengan Gubernur La Ode Kaimuddin saat itu, maka setelah dilantik Masyhur Masie Abunawas memperkuat posisi etnis Tolaki di lingkungan Pemkot Kendari.

Banyak penempatan pejabat di lingkungan pemkot yang dilakukan oleh Masyhur sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan kekuatan etnis Tolaki. Karena walikota mempunyai arti yang menentukan, adalah sebagai pusat kekuasaan di tingkat lokal, maka perubahan politik di daerah banyak ditentukan dari kantor tersebut. Dalam konteks ini, Masyhur menjadi sumber patronase berharga dari kelompok etnis Tolaki, yang suatu saat bias ia gunakan untuk memobilisasi dukungan.

### 3.2.2 Sumber Ekonomi

Faktor ini bersifat mendesak dalam menganalisis kebangkitan etnisitas etnis Muna di Kendari. Banyak informasi yang diperoleh selama penelitian, bahwa betapa sulitnya etnis Muna tahun 70'an-s.d. awal 80'an untuk melanjutkan pendidikan yang pada gilirannya ikut menentukan kemudahan memperoleh pekerjaan. Misalnya, Darman, S.E., aktivis PDI-P, pada masa kuliahnya berjuang keras untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Ia tinggal tidak menentu di Kendari, yang digambarkan bagai 'burung terbang ke sana kemari'<sup>31</sup>, ketika awal ia baru tiba dari Muna untuk melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ekonomi Unhalu. Kesulitan lain yang dihadapinya adalah ketika ingin membayar uang pendaftaran berupa SPP. Ia harus mendatangi semua saudara-saudara ayah atau ibunya

<sup>31</sup> Maksud dari pernyataan tersebut, ia tidak punya tempat tinggal tetap, cenderung berpindah-pindah tempat

Darman mengatakan bahwa pada saat ia kuliah banyak teman-temannya dari etnis Muna yang meninggalkan kuliahnya karena mencari uang. Banyak pula yang pulang ke kampung untuk menebang pohon jati. Saat itu, ia sempat berpikir bahwa jika bergabung dengan teman-temannya ia bisa dapat uang, tetapi tidak yakin apakah situasi tersebut akan bertahan lama. Karenanya, ia memutuskan untuk tidak meninggalkan kuliah. Belakangan, ia pun sadar ternyata pulang kampung dan hanya menebang hutan tidak bisa menjadi kaya. Sementara sumberdaya lain, alam Muna tidak menjanjikan kehidupan yang lebih baik.<sup>32</sup> Darman menjelaskan sebagai berikut :

Bagi orang Muna, pada saat saya sekolah dan kuliah tidak mudah untuk terus bersekolah karena begitu banyak godaan. Dulu hutan di Muna cukup untuk membiayai sekolah kami. Tapi, kini keadaannya sudah berubah (wawancara, 12 Maret 2003).

Di mata Darman, semangat juang etnis Muna tinggi, tetapi sekaligus terbatas. Dengan meninggalkan kuliahnya, kawan-kawannya memburu uang dengan tidak memikirkan masa depan. Mereka tidak mau berjuang untuk kehidupan yang lebih baik dalam jangka panjang. Etnis Muna banyak mengejar kehidupan yang mudah dan watak dasar ini dimiliki oleh etnis Muna.

Ketertinggalan etnis Muna dalam bidang pendidikan mempunyai implikasi ikut menentukan kurangnya daya saing ketika berkompetisi dengan etnis-etnis lain dalam memperebutkan pekerjaan. Hal itu terlihat dalam persaingan untuk masuk menjadi pegawai pemerintah daerah Kota Kendari. Banyak etnis Muna yang tidak diterima karena tidak memenuhi persyaratan pendidikan yang dibutuhkan untuk mengisi formasi calon pegawai. Salah

---

<sup>32</sup> Kemiskinan orang Muna dapat diperiksa berdasarkan laporan yang disusun oleh pastor M Aarts tahun 1973 bahwa orang Muna sangat miskin tidak memiliki makanan utama selain ubi, jagung, dan sayur yang diambil disini-sana, kurang bergizi. Kira-kira 25 % dari penduduk yang makan nasi, mereka kadang-kadang makan ikan laut, jarang makan daging ayam

seorang tokoh Muna yang ada di Kendari, La Kimi Batoa mengatakan bahwa sekarang ini banyak orang tua di Muna mengirimkan anaknya bersekolah ke Kendari untuk menjadi perawat atau guru. Sebagian, tekanan-tekanan finansiallah yang membuat pelajar-pelajar SMU kesulitan untuk terus melanjutkan pendidikannya hingga ke universitas. Motivasi juga menjadi faktor penentu. Banyak etnis Muna lebih suka memilih sekolah yang dapat menjamin untuk mendapat pekerjaan setelah lulus. Itulah yang menjadi alasan banyak orang tua dari Muna yang lebih ingin mengharapkan anaknya untuk belajar di sekolah kejuruan. Harapannya, ketika lulus dapat langsung bisa memperoleh pekerjaan.

Di balik tersingkirnya etnis Muna untuk bersaing di pemda, La Kimi Batoa menduga karena banyak factor seperti (1) keengganan sendiri etnis Muna untuk menolong sesamanya dan (2) karena faktor *becking*. Etnis Muna dalam perebutan menjadi pegawai di lingkungan pemerintah kota, etnis Muna lebih banyak kalah. Memang ada orang Muna yang menjadi pejabat di pemkot Kendari, tetapi ia takut menolong karena akan membahayakan karir mereka. Sementara itu, orang Tolaki menemukan cara-cara untuk menolong sesamanya. Faktor lain, yang juga dominan adalah faktor walikota yang berlatang etnis Tolaki. Menurut La Kimi Batoa, banyak etnis Tolaki yang 'mengambil nota' walikota pada saat pendaftaran pegawai pemkot.

Ketersingkiran etnis Muna juga dapat dilihat pada sektor-sektor bisnis. Sudah lama, sektor ini didominasi oleh etnis Bugis, Arab, dan Cina. Sejak awal daerah ini terbentuk ada proses dominasi dari para pedagang etnis Bugis. Uraian berikut akan memaparkan bentuk dominasi etnis Bugis dan Cina-Arab

tersebut. Di sektor retail, khususnya para pedagang, utamanya pedagang kain, sepatu, pecah belah, dan sembako yang berada di pasar-pasar tradisional seperti di Pasar Kota, Pasar Mandonga, dan Pasar Wua-Wua banyak etnis Bugis. Pasokan barang seperti kain, sepatu, pecah belah dan sembako berasal dari Makassar melalui jalan darat ferry dengan pengangkutan mobil barang. Barang-barang tersebut dipasok oleh langganan mereka di Makassar masuk dalam jaringan pengadaan barang di pasar-pasar tradisional untuk terus-menerus berputar. Mereka dapat langsung menjual ke konsumen yang langsung akan memakainya sendiri.

Selain di sektor retail, pemilikan armada pengangkutan juga dikuasai oleh etnis Bugis. Armada taksi Dathraco pemiliknya adalah etnis Bugis (Andi Pamasona), demikian halnya armada taksi Ade Group pemiliknya Bugis Arab (H.Achmad Aljufri, BA). Jalur pengangkutan bus Makassar-Kendari seperti Cahaya Ujung, Setia Jaya, Anugerah, St. Haerani, Mattiro Bulu, Putra Bajo-E, dan lainnya pemiliknya adalah etnis Bugis. Selain nama-nama di atas, etnis Bugis juga berusaha dalam skala yang kecil, hal itu dapat dilihat tulisan di dinding mobil seperti "Untung Ana Ugi", "Beddu Solo", dan "Putra Bajo-E", "Sipatuo-Sipatokkong"

Tidak ketinggalan pula, bidang usaha jasa konstruksi, konsultan, dan berbagai usaha lain, etnis Bugis mendominasinya. Hal itu dapat dilihat dari etnisitas dari berbagai organisasi yang bergerak di bidang pengusaha, konsultan dan asosiasi-asosiasi, pimpinannya didominasi etnis Bugis seperti terlihat pada tabel 3.4.

**Tabel 3.4**  
**Etnisitas Organisasi Yang Bergerak Di Bidang Usaha/Bisnis**

No.	Latar Belakang Etnis Pimpinan Organisasi	Frekuensi	Prosentase
1	Bugis	4	36,36 %
2	Muna	1	9,09 %
3	Kolaka	1	9,09 %
4	Tolaki	1	9,09 %
5	Buton	1	9,09 %
6	Cina	1	9,09 %
7	Jawa	2	18,18 %
	Jumlah	12	100

Sumber : Sekretariat Kadin Kota Kendari, 2003

Dari 11 pimpinan asosiasi bisnis tersebut, hanya 1 orang dari etnis Muna yang menjadi yakni Gabungan Pengusaha Konstruksi (GAPENSI) Kendari, dipimpin orang Muna yakni Anas Ombi. Etnis Bugis yang memimpin asosiasi bisnis sebanyak empat orang, yakni Ir. Amran Yunus yang memimpin Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Sabri Manomang., yang memimpin Gabungan Pengusaha Kontraktor Indonesia (GAPEKSINDO), Ir. Baharuddin Waladika yang memimpin Ikatan Konsultan Indonesia (INKINDO), dan Muh. Saleh., S.H. yang memimpin Asosiasi Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia (ASPANJI). Ada keuntungan dengan menduduki pimpinan asosiasi bisnis tersebut adalah kemudahan dalam mengakses informasi tentang peluang bisnis dan tender di pemerintah daerah. Dengan demikian, pola relasi yang dibangun dapat menciptakan "simbiosis mutualisme" antara birokrat lokal dengan pengusaha lokal.

Ketidakmampuan etnis Muna bersaing dengan etnis lain juga tampak pada kepemilikan ruko (rumah toko), hotel/restoran, dan *showroom*. Guna menelusuri kecenderungan pemilik ketiga usaha tersebut, peneliti mencoba

mengecek pemohon yang meminta IMB di Kantor Walikota Kendari c.q. Dinas Tata Ruang Kota seperti yang tertera pada tabel 3.5. berikut ini.

Tabel 3.5

**Etnisitas Pemohon Izin IMB Khusus Ruko, Hotel dan Restoran, Lokasi Bangunan**

No	Jenis Usaha	Latar Belakang Etnis	Frekuensi	Persentase
1	Ruko	Cina	11	33,33 %
		Bugis	9	27,27 %
		Arab	6	18,18 %
		Tolaki	2	6,06 %
		Buton	2	6,06 %
		Lain-Lain	3	9,09 %
2	Showroom	Bugis	2	50 %
		Arab	1	25 %
		Cina	1	25 %
3	Hotel/Restoran	Cina	1	50 %
		Bugis	1	50 %

Sumber : Dinas Tata Kota dan Bangunan, 2004. Peneliti mengolah berdasar permohonan IMB sepanjang tahun 2002--2003.

Berdasar atas tabel tersebut, ada 3 tiga etnis penting yang mendominasi usaha ini adalah Cina, Arab, dan Bugis. Etnis Cina, seperti pada bisnis-bisnis lainnya di Kendari, telah membuktikan kemampuan mereka yang besar untuk mendominasi sektor ini. Etnis Cina yang sukses sebagai pengembang adalah Bert Berly, King Stone Berly, dan Herc Sumitro.<sup>33</sup> Etnis Arab yang banyak membangun ruko adalah Umar Awak dan Husen Awak dengan lokasi tempat mendirikan ruko adalah di depan STM, depan SMFA, Pasar Baru, Jl.MT.Haryono. Penduduk asli yang terjun di bisnis adalah etnis Tolaki, Buton dan Muna. Jumlahnya tidak besar dibanding dengan etnis yang peneliti sebutkan

<sup>33</sup> Dia merupakan istri dari King Bert Berly

sebelumnya. Mungkin ada pengembang dari etnis lain luput dari perhatian peneliti. Hal itu disebabkan karena pengembang tersebut memohon izin untuk mendirikan ruko di bawah tahun 2002. Dapat ditambahkan bahwa kecenderungan umum jika etnis Arab dan Bugis yang bermohon hanya menjadi pengembang saja karena setelah itu akan menjual kembali bangunan ruko yang sudah dibangunnya tersebut. Lain halnya jika etnis asli, kecenderungan umum adalah pemohon sekaligus pemilik ruko/jenis usaha lain

Kecenderungan di atas mencerminkan dua hal *Pertama*, tidak tersedia modal yang cukup di kalangan etnis Muna untuk bersaing dengan pengembang dari etnis Cina, Arab, dan Bugis di samping sejarah dominasi etnis tersebut yang sudah lama; *Kedua*, para pengembang dari etnis Muna sering berada pada kedudukan yang tidak menguntungkan karena mereka tidak memperoleh perlindungan dari "orang kuat" Muna. Di samping itu, para pengembang dari Muna tidak dapat mengatasi hambatan struktural yang melekat pada pengembang tersebut yang menganggap pekerjaan sebagai pengembang sebagai sumber nafkah dan bukan untuk menghimpun modal.<sup>34</sup>

Sering, ada etnis Muna yang ingin memasuki dunia bisnis. Mereka harus membuka dan memulai dengan toko mereka sendiri, dan dengan demikian mereka dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi etnis Muna sendiri. Sayangnya, memulai berbisnis, bagaimanapun juga tidak mudah. Karena posisi ketersingkiran etnis Muna dalam perdagangan, maka taruhan dalam bidang ini penuh dengan ketidakpastian. Memang tidak bisa dipungkiri ada juga etnis Muna yang sukses sebagai usahawan, seperti Anas Ombi, atau Ridwan BAE

---

<sup>34</sup> Bandingkan uraian di atas dengan studi Lance Castells di Kudus dan Clifford Geertz di Mojokerto

dengan bendera PT Rapesa yang kini menjadi Bupati Muna. Tetapi, dimata sebagian etnis Muna, keduanya belum banyak memberi arti bagi etnis Muna. Di mata La Ode Rifai Pedansa, Ridwan BAE kini malah menyebabkan banyak etnis Muna sengsara karena penebangan hutan yang dilakukannya sebagai bentuk eksploitasi kekayaan Muna yang mengandatkan dari kayu jati.

Yang menarik adalah persepsi orang Muna dalam memandang etnis lain dalam berbisnis. Etnis Muna menganggap semua etnis adalah saingan utama dalam memperoleh kontrak-kontrak proyek. Walau demikian, ada penilaian-penilaian subjektif. Kadang etnis Muna menganggap semua etnis adalah sebagai “sahabat”, tetapi pada kesempatan lain sebagai “lawan”. Etnis yang tidak pernah terlibat sengit dalam kompetisi etnis dan dianggap netral adalah Jawa. Kadang-kadang untuk memenangkan suatu tender atau proyek dan guna memperoleh dukungan dari kelompok etnis lain, etnis Muna memberi tawaran khusus.

Jika pada faktor politik sumber ketersingkiran etnis Muna karena dianggap bukan penduduk asli Kendari, di sektor ekonomi ketersingkiran etnis Muna lebih kompleks lagi. Mungkin tidak ada stereotip yang tajam antara siapa Muna dan siapa yang bukan, tetapi memang secara alamiah etnis Bugis, Cina, dan Arab memang lebih ulet dan tahan banting sehingga lebih berjaya di sektor perdagangan.

Sepanjang pengetahuan penulis atas dasar wawancara dan penelusuran dokumen, penulis tidak memperoleh teks tertulis tentang etos bisnis etnis Muna. Berbeda halnya dengan etnis Bugis, tradisi bisnis yang kuat ditopang oleh sumber tekstual. Dalam naskah lontarak, ada landasan filosofi berbisnis etnis Bugis. Di naskah itu tergambar mencela orang yang yang tidak punya usaha,

yang bermalas-malasan menghabiskan waktunya. Teksnya (dikutip dari Rahim, 1985: 165) adalah

*I: kalaki 'De' gare pallaumu muonro risere lalang? lanaratu riseng kedo matana, gati' temmakketupu, De'kua de'gaya pallaumu, laoko ri bagruage mengkinga bicara ude', tare'ga laoko ri pasa'e meogkalinga ada pabbalu'. Mapatoko siakalaki ' nasaba' resopa natimulu' temmaunginggi' malamo naletai pammaseu dewata.* (Hai kalian anakku ' Apakah sudah ada pekerjaanmu, lalu kamu main-main saja. Itulah yang dinamakan perbuatan hina dan perbuatan yang tak ada gunannya. Jikalau tidak ada pekerjaanmu, pergilah ke balairung mendengar soal adat, ataukah engkau ke pasar mendengar warkah penjual. Rajinlah berusaha, hai anak-anakku. sebab hanya dengan jerih payah dan ketekunan serta ketakbosanan yang dilimpahi rahmat Dewata.

Sementara etnis Cina-Arab, sejak zaman kolonial memonopoli perdagangan karena mereka diharapkan bisa menjadi perantara antara penduduk berkebangsaan Eropa dengan penduduk asli (Skinner, 1973: 404). Seperti yang diungkapkan Mackie (1976: 4), : "Kebijakan Belanda terhadap orang-orang Cina berkembang sedemikian sehingga mereka kemudian menguasai posisi perantara yang penting antara massa rakyat pribumi dengan bangsa Eropa yang berjumlah kecil yang menduduki posisi puncak."

Dengan memanfaatkan kebijakan Belanda, etnis Cina berhasil menekan etnis asli pada perdagangan kecil. Setelah kemerdekaan, ketika terpaksa Belanda meninggalkan Indonesia, orang-orang Cina bergerak memasuki sektor-sektor perekonomian yang tadinya didominasi Belanda, kecuali perkebunan yang diambil oleh menjadi perusahaan-perusahaan negara.

Dalam perspektif studi etnisitas, perebutan sumber daya (ekonomi dan politik) biasanya terjadi antara etnis pendatang dan etnis asli. Hal itu diawali ketika jumlah etnis pendatang yang semakin bertambah dan bertempat tinggal di wilayah-wilayah etnis asli. Jumlah populasi di tempat tersebut akan jauh

melampaui sumber daya ekonomi dan politik yang tersedia. Struktur dan hubungan kekuatan pun berubah, karena pada etnis pendatang juga sudah memasuki sektor-sektor ekonomi yang sebelumnya merupakan lahan eksklusif bagi etnis asli. Struktur hubungan antara etnis pendatang dan etnis asli pun berubah. Etnis asli jadi menderita, karena kehilangan hak-hak istimewa di ekonomi dan politik. Akhirnya, hubungan simbiotik antara kedua kelompok tersebut berubah menjadi perebutan sumber daya, termasuk di pasar dan kekuasaan. Pada saat itu, etnisitas kembali dipertegas untuk tujuan dan memelihara dan memperkuat batasan-batasan etnis untuk semakin membedakan "kami" melawan "mereka". Etnisitas dibangkitkan untuk menegakkan solidaritas di arena tersebut (pasar dan kekuasaan). Karena perebutan di arena tersebut tidak memiliki aturan-aturan tertentu yang menjamin keadilan bagi kelompok-kelompok etnis yang bersaing, akhirnya semua cara dilakukan, seperti upaya untuk saling melumpuhkan akses kepada sumber daya dan kedudukan.

### 3.2.3 Sumber *Political Entrepreneur*

Tuntutan dan munculnya etnisitas bagi etnis Muna sangat kuat karena didukung oleh para aktor politik yang senantiasa memproduksi tentang ide 'putera daerah' dalam arena-arena politik lokal di Kendari. Aktor yang senantiasa memobilisasi, melakukan perlawanan, dan yang mengkonsolidasikan kekuatan guna mengimbangi dominasi etnis tertentu disebut dengan *political entrepreneur*.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Political entrepreneur* diberikan oleh Ronnie D. Lipschutz, diartikan sebagai "well-placed individuals who are able to develop or carry plausible stories of how and why particular social conditions have come to pass." Untuk lebih jelasnya lihat Ronnie D. Lipschutz, 1998. "Seeking a State of One's Own: An Analytical Framework for Assessing Ethnic and Sectarian Conflicts." Dalam Beverly Crawford dan Ronnie D. Lipschutz (eds.) *The Myth of "Ethnic Conflict"*.

Bagi etnis Muna sendiri, *political entrepreneur* berasal dari fungsionaris dan politisi PDI-P. Pola gerakannya adalah dengan *high politics* adalah mendorong dan memperjuangkan etnis Muna menjadi wakil walikota saat suksesi walikota tahun 2000 silam. Etnis Muna yang diperjuangkan menjadi bakal calon (balon) wakil walikota saat itu adalah Drs. La Ode Khalifa Bur dan Erwin Genda sebagai elite parol di PDI-P rajin menghadiri setiap pertemuan terbatas atau *lobby* untuk mensosialisasikan calon dari PDI-P.

Elite PDI-P punya alasan sehingga berusaha keras memperjuangkan Drs. La Ode Khalifa sebagai balon wakil walikota. Berikut ini penuturan Erwin Genda :

“ La Ode Khalifa itu adalah dalam pandangan kami, ia salah satu figur dari etnis Muna yang sangat berjasa dalam menaikkan La Ode Kaimuddin sebagai Gubernur. Pada masa awal La Ode Kaimuddin itu ingin diorbitkan jadi gubernur, kami (khususnya dari Muna) banyak berkumpul di rumah La Ode Khalifa. Pernah suatu saat, pak Salihi (saat itu menjabat sebagai aparat birokrasi) kami jemput paksa untuk menghadiri rapat di rumah La Ode Khalifa. Pada saat mau dijemput, ia katakan untuk apa, dan dijawab oleh Erwin bahwa ini perintah La Ode Rivai. Lalu, ia menelpon La Ode Rivai, dan dijawab bahwa memang itu betul. Jadi bagi kami, sosok La Ode Khalifa adalah figur dari Muna yang dapat mempersatukan kami”. (wawancara, 13 Agustus 2003).

Balon wakil walikota itu sudah disetujui oleh partai, kemudian oleh Fraksi PDI-P DPRD Kota Kendari juga diputuskan nama Drs. La Ode Khalifa menjadi wakil walikota sebagai calon dari fraksi. Dalam perkembangan selanjutnya, masing-masing fraksi hanya mencalonkan satu paket pasangan. Bur lalu mendatangi semua bakal calon walikota. Ia mendatangi Masyhur Massie Abunawas, Umar Saranani, dan Buhari Matta yang membujuk agar mau berpasangan dengan La Ode Khalifa. Dalam pertemuan dengan para balon

walikota ia yakinkan bahwa La Ode Khalifa merupakan birokrat senior dan sudah mempunyai pengalaman. Akan tetapi tampaknya, para calon tidak serius menerima figur tersebut. Berkali-kali Bur bertemu untuk membicarakan hal tersebut, tetapi semua calon walikota sudah mempunyai paket pasangan calon wakil walikota.

Akibat penolakan dari semua calon walikota untuk berpasangan dengan calon yang diajukan oleh PDI-P, maka pada putaran I, hanya Fraksi PDI-P yang mempunyai calon wakil walikota dengan latar belakang etnis Muna. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah.

**Tabel 3.6**  
**Bakal Calon dari Masing-Masing Fraksi**

<b>Fraksi Partai Golkar</b>	<b>Fraksi PDI Perjuangan</b>	<b>Fraksi Reformasi</b>	<b>Fraksi TNI/POLRI</b>
Pasangan 1 : Drs.Masyhur Masie Abunawas (Walikota/Tolaki) Ir.Andi Musakkir Mustafa,MBA (Wakil Walikota/Bugis)	Pasangan 1 : Drs.H.Kaimuddin Haris (Walikota/Tolaki) Drs.La Ode Khalifa (Wakil Walikota/Muna)	Pasangan 1 : Drs. Buhari Matta,M.Si (Walikota/Tolak i-Bugis) Drs.Anwar Bey ,M.S (Wakil Walikota/Tolaki )	Pasangan 1 : H.Umar Saranani,MBA (Walikota/Tolaki) Drs.Baharumin,A K (Wakil Walikota/Tolaki)
Pasangan 2 : Haeruddin Pondiu (Walikota/Tolaki) Drs.H.Muchtar Silondae,SH.,M.S i (Wakil Walikota/Tolaki)	Pasangan 2 : Drs.Masyhur Masie Abunawas (Walikota/Tolaki) Drs.La Ode Khalifa (Wakil Walikota/Muna)	Pasangan 2 : Drs. H.masyhur Masie Abunawas (Walikota/Tolak i) Ir.Dinamis Yunus Makkajareng (Wakil Walikota/Bugis)	Pasangan 2 : Drs.H.Masyhur Masie Abunawas (Walikota/Tolaki) Ir.Andi Musakkir Mustafa,MBA (Wakil Walikota/Bugis)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa masing-masing fraksi memiliki calon walikota dengan aneka ragam etnis yang berbeda-beda. Fraksi partai Golkar mengusung calon walikota dan wakil walikota dengan latar belakang etnis Tolaki dan Bugis, Fraksi PDI-P mengusung calon walikota dan wakil walikota dengan latar belakang etnis Tolaki dan Muna, Fraksi Reformasi dengan latar belakang Tolaki dan Bugis, dan Fraksi TNI/POLRI dengan latar belakang Tolaki dan Bugis.

Walau akhirnya calon dari Fraksi PDI-P kalah dalam pertarungan di momen suksesi tersebut, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa para aktivis dan politisi dari PDI-P mempunyai peran dalam menghidupkan semangat 'ke-Muna'-an di Kendari. Mereka berhasil menunjukkan bahwa para politisi yang memiliki latar belakang etnis Muna sudah memperjuangkan etnis Muna untuk sejajar dengan elite dengan latar belakang etnis lain, seperti Tolaki dan Bugis dalam kancah politik lokal di Kendari. Dalam persoalan ini, isu etnis dibangkitkan (*reinvented*) dalam kaitannya dengan persoalan keterwakilan. Etnisitas bertindak sebagai sumber bagi politik yang mendorong kekompakan kelompok dan karena itu memfasilitasi artikulasi politik, baik berbentuk kepentingan kelompok maupun individu (Brown, 1994:xvii).

Masih dari arena pemilihan walikota, dengan atas dasar pertimbangan etnis pula yang dijadikan dasar bagi para elite parpol dalam melakukan koalisi dengan calon lain. Dasar pertimbangan bagi elite PDI-P mencalonkan Buhari Matta sebagai calon walikota, karena dianggap dapat menguntungkan etnis Muna. Bur mengatakan : "*Buhari Matta itu ada darah Bugisnya dan dalam pengamatan kami bahwa selama ini yang bisa untuk diajak kerja sama dari*

Ode Kaimuddin (Muna), Andri Jufri (Tolaki), Maola Daud (Muna), dan Said Pidani (Kolaka). Setelah 5 nama, kemudian tersisa 3 nama untuk dipilih adalah La Ode Kaimuddin, Andri Jufri dan Said Pidani. Pemerintah pusat akhirnya merestui La Ode Kaimuddin menjadi Gubernur Sultra 1992--1997. Ia menjabat dua periode, sampai 1997--2002.

Yang menarik justru gerakan dari Kelompok Aspirasi Masyarakat yang mampu untuk menghadang ambisi Alala yang berusaha keras memperjuangkan etnis pendatang sebagai pengganti dirinya. La Ode Rasyid, etnis Muna yang tergabung dalam kelompok itu, memiliki argumentasi yang kuat mengapa ia menjatuhkan pilihan politiknya di kelompok tersebut. Berikut ini jawaban La Ode Rasyid :

“ Alala itu sangat otoriter dan terlalu memaksakan kehendak. Bukan hanya itu, rakyat Muna juga dibuat siksa Alala karena ia memaksakan Maola menjadi Bupati Muna, padahal ia orang Buton. Selama menjadi Bupati, ia tidak disukai sama orang Muna. Akibatnya saat mau mengakhiri masa jabatannya sebagai bupati, kantor, sekolah, dan bangunan yang dikerjakan selama menjadi bupati dibakar”. (Wawancara, 10 Maret 2003).

Selanjutnya ia menambahkan :

“ Saya inginkan putera daerah sebagai gubernur agar memudahkan orang tersebut dalam bekerja. Alasan ini logis sebab bagaimana orang bisa bekerja dengan baik kalau yang bersangkutan tidak dikenal. Kriteria mengenal juga diberi penekanan dengan alasan bahwa situasi daerah yang sudah sangat kompleks, jika orang tersebut dapat memahami kultur daerah maka akan memudahkan ia dalam bekerja. Di dalam pemahaman seperti itu, maka orang yang lahir di daerah sendiri lebih besar peluangnya untuk dikatakan sebagai putera daerah. Jika orang tersebut lahir di daerah, maka orang tersebut mempunyai ikatan moral, historis dan emosional sehingga mampu menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan. Dalam proses selanjutnya, adalah selama 38 tahun usia Sultra, telah banyak melahirkan putera-putera terbaik yang sudah teruji kapasitas dan kredibilitasnya masing-masing, tetapi tidak diberikan peluang untuk memimpin rumah tangganya sendiri Taruhlah contoh, pengusaha taksi itukan orang Bugis. Kita lihat itu bagus karena mereka bisa memajukan daerah ini. Tetapi ada juga yang punya perilaku lain karena dia pandang lain karena ia melihat bahwa kota Kendari ini

sempit, lalu ia beralasan bahwa sumber daya tidak mencukupi. Ini bisa dimaklumi karena kita di Unhalu saja masih berapa fakultasnya. Apa yang terjadi. Orang Jawa dan Selatan kembali menyekolahkan anaknya di Jawa sana. Akibatnya, uang tetap lari kesana. Saya mengamati di Kendari sini ada orang-orang yang hanya datang berusaha tetapi hanya mengeruk keuntungan saja tetapi tidak memperlihatkan partisipasinya di daerah ini dalam artian untuk memajukan daerah. Jika ia berhasil, ia membawa pulang uangnya dengan cara membangun rumah yang bagus-bagus di Jawa, Selatan. Ada pula orang-orang yang sudah membeli mobil tetapi mereka tidak mengganti nomor plat Kendari (DT) sehingga banyak kendaraan yang berkeliraran di jalan menggunakan plat DD (Sulawesi Selatan), L (Surabaya), dan B (Jakarta). Lihat pula banyak orang yang dari luar mempunyai rumah bagus di luar Kendari seperti Makassar dan Jakarta. Yang diharapkan adalah para pemilik kendaraan mempergunakan plat nomor DT sehingga ia dapat membayar pajak kendaraan bermotor di daerah ini. Kita mengharapkan orang yang berhasil dapat membangun rumah yang bagus di Kendari, orang yang datang akan melihat sudah banyak rumah-rumah bagus daerah ini. Nah, putera daerah juga kita gunakan sebagai salah satu pertimbangan karena tidak mungkin orang Muna atau Tolaki yang dapat menjadi Bupati di Jawa atau Makassar". (wawancara, 10 Maret 2003).

Pada arena pemilihan Gubernur Sultra periode 2003-2008, ruang gerak etnis Muna untuk mempromosikan dirinya menjadi bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur semakin terbuka lebar. Berdasarkan pemeriksaan dokumen yang dilakukan peneliti, ada beberapa nama dari etnis Muna yang dicalonkan menjadi bakal calon Gubernur. Dapat disebutkan antara lain Ali Kudus<sup>38</sup>, Prof. Dr. La Ode Abdul Raut<sup>39</sup>, Habil Marati<sup>40</sup>, Prof. Ir. Mahmud Hamundu, M.Sc<sup>41</sup>, Ridwan, BA<sup>42</sup>, La Ode Ida<sup>43</sup>, Drs. La Ode Nsaba<sup>44</sup>, Drs. La Ode Khalifa<sup>45</sup>, dan Drs. La Ode Lasjkar Kudus<sup>46</sup>. Dari seluruh calon etnis Muna

<sup>38</sup> Ia dicalonkan oleh Badan Perwakilan Desa Kec. Katobu Desa Napabalano Muna, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) PAC Kec. Napabalano, PPP PAC Kec. Maginti, PPP PAC Kec. Parigi, PPP PAC Kec. Kahangka, PPP PAC Lohia, PPP PAC Tikop, BPD Kec. Kusambi dan tokoh masyarakat Muna a.n. La Baya dan La Mpou.

<sup>39</sup> Dicalonkan oleh Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Asal Sulawesi Tenggara Bandung.

<sup>40</sup> Dicalonkan oleh Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Asal Sulawesi Tenggara Bandung.

<sup>41</sup> Dicalonkan oleh Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Asal Sulawesi Tenggara Bandung.

<sup>42</sup> Dicalonkan oleh Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Asal Sulawesi Tenggara Bandung.

<sup>43</sup> Dicalonkan oleh Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Asal Sulawesi Tenggara Bandung.

<sup>44</sup> Dicalonkan oleh PDI-P PAC Kec. Ranometo.

<sup>45</sup> Dicalonkan oleh PDI-P PAC Kec. Ranometo.

yang tampil tersebut, tidak ada satu calon yang lolos untuk diikuti dalam tahapan penjurangan tahap I dan II yang dilakukan oleh masing-masing Fraksi di DPRD Sulawesi Tenggara.

Sementara itu, etnis Muna yang mencalonkan menjadi wakil gubernur dapat disebutkan antara lain Dra. Wa Ode Mustari Rauf<sup>47</sup>, Dra. Saleh Lasata<sup>48</sup>, dan Drs. Ahmad Dakari<sup>49</sup>. Dari ketiga calon tersebut yang tampil, hanya Drs. Saleh Lasata yang lolos hingga masuk pada tahap I penjurangan di Fraksi Partai Golkar (F-PG). Ia berpasangan dengan Drs. Adel Berty (Kolaka). Pada tahap I ini, ada 5 paket pasangan yang dicalonkan oleh F-PG adalah Hino Biohanis/La Ode Jeni Hasmar, Adel Berty/Saleh Lasata, Ali Mazi/Yusran Silondae, Anwar Adnan Saleh/Ichlas Mappilawa, dan Hosein Effendy/La Atjeh Amin. Melalui rapat internal partai di tubuh F-PG<sup>50</sup>, maka paket nama yang diusulkan adalah pasangan Ali Mazi/Yusran Silondae.

Di Kendari, bukan hanya etnis Muna yang memiliki *political entrepreneur*. Di Etnis Buton, fenomena serupa dijumpai juga pada figur yang bernama Saidi, BSAP, dan etnis Tolaki ada figur seperti H. Surabaja, Endang, S.A., dan Tumbo Saranani. Uraian berikut akan mengungkapkan kemampuan figur tersebut dalam mewacanakan isu etnis asli yang diterminologikan dengan putera daerah.

Saidi, BSAP, memunculkan kriteria bahwa putera daerah hendaknya diberi makna dengan konotasi keaslian. Penggunaan kata asli yang dimaksudkan adalah etnis besar yang ada di Sulawesi Tenggara. Guna memperkuat

<sup>46</sup> Dicalonkan oleh PDI-P PAC Kec. Ranomeeto

<sup>47</sup> Dicalonkan oleh Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Asal Sulawesi Tenggara Bandung

<sup>48</sup> Dicalonkan oleh Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Asal Sulawesi Tenggara Bandung

<sup>49</sup> Dicalonkan oleh tokoh perorangan Embu Samsul.

<sup>50</sup> Hal itu dapat dilihat dari surat Keputusan F-PG No. Kep-03/FPG-DPRD/X/2002

argumentasinya, ia menyitir Sumpah Sultan Buton adalah: "jangan engkau perdagangkan negerimu, jangan bersekongkol dengan orang luar untuk mengatur negerimu, jika itu terjadi maka runtuh berantakanlah negerimu." (*Kendari Ekspres*, 13 September 2002).

Di kalangan etnis Tolaki, terdapat beberapa figur yang dapat dikategorikan sebagai *political entrepreneur*. H. Surabaja, mantan pamong praja di era Bupati Kendari Konggoasa, mengharapkan bahwa yang menjadi gubernur adalah putera daerah. Yang dimaksudkan dengan putera daerah adalah memiliki genetika etnis Sulawesi Tenggara. Dasar argumentasinya, jika orang lahir dari rahim Sulawesi Tenggara akan tumbuh ikatan historis dan kultural. Kesamaan latar belakang ini pada akhirnya akan menumbuhkan komitmen moral dan emosional dalam membangun daerah sehingga sudah teruji kapasitas dan kredibilitas (*Kendari Ekspres*, 12 September 2002).

Endang, S.A dalam upaya memompakan semangat etnis selain dengan pembentukan wacana juga dengan mobilisasi massa. Sebagai Ketua Forum Bersama Sultra Bersatu (FORBESS), Endang mengeluarkan kriteria bahwa yang layak untuk menjadi gubernur adalah putera daerah. Adapun kriterianya adalah : (1) berasal dari salah satu etnis asli di Sulawesi Tenggara; (2) salah satu dari orang tua kandung (ayah/ibu) berasal dari etnis asli di Sulawesi Tenggara; (3) bagi calon yang tidak berasal dari salah satu etnis asli Sulawesi Tenggara dan atau salah seorang dari orang tua kandungnya baik laki-laki maupun perempuan bukan berasal dari etnis Sulawesi Tenggara, maka calon yang bersangkutan harus merupakan kelahiran Sulawesi Tenggara dan tinggal menetap sekurang-kurangnya 20 tahun di Sulawesi Tenggara; dan 4) menguasai salah satu bahasa daerah Sulawesi Tenggara.

Endang melakukan mobilisasi massa pada saat penjaringan tahap II dalam momen pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara. Ia datang dengan membawa massa sekitar 150-200 orang. Tujuannya mengajukan tuntutan ke Fraksi TNI/POLRI di DPRD agar mencalonkan bakal calon (balon) dari etnis Tolaki adalah Adel Berty dan Hosein Efendy. Alasan yang dikemukakan adalah karena dari semua fraksi<sup>51</sup> yang ada di DPRD Sulawesi Tenggara, tidak ada yang mengakomodasi balon dari etnis Tolaki untuk menjadi calon gubernur. Semua hanya mengakomodasi bakal calon dari etnis Buton. Akan tetapi tuntutan Endang tidak dapat dipenuhi oleh Fraksi TNI/POLRI dengan alasan ingin netral pada semua calon.

Drs. Tumbo Saranani juga menjadi aktor penting di etnis Tolaki yang kerap memompakan putera daerah untuk diberi prioritas penting dalam menduduki jabatan-jabatan strategis di Kendari. Ia kerap menuduh etnis pendatang hanya ingin mengambil keuntungan ekonomis di Kendari. Terkadang dalam gerakannya disertai dengan ancaman pengerahan massa untuk menekan pihak-pihak yang merugikan kepentingan etnis Tolaki. Ali Mazi selaku Gubernur Sulawesi Tenggara tidak terlalu risau dengan tindak tanduk tokoh ini. Malah, ada kesan kalau ia akomodatif dan “mau mendengar” suaranya.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Fraksi FPDI-P mencalonkan Drs. Ismail Tangka (Buton)/Drs. Yusran Silondae, M Si (Tolaki). Fraksi Reformasi mencalonkan Prof. Dr. Djaali (Buton)/Drs. Ibrahim Pallatje (Tolaki). F-PG mencalonkan Ali Mazi, S.H. (Buton)/ Drs. Yusran Silondae, M Si (Tolaki). Dari semua calon yang ada tidak ada satu pun calon gubernur dari etnis Tolaki dan etnis Tolaki hanya dijagokan untuk menjadi calon wakil gubernur. Yang menarik dari figur-figur balon tersebut keseimbangan antar etnis dipertahankan, jika balon gubernurnya dari etnis A, maka balon gubernurnya dari etnis B.

<sup>52</sup> Contoh dari hal tersebut yakni pada saat Ali Mazi (Gubernur Sulawesi Tenggara) yang akan melakukan mutasi pejabat di lingkungan Pemprov. Tumbo Saranani bersama beberapa tokoh masyarakat pernah menemui Ali Mazi membicarakan representasi etnis Tolaki yang akan didudukkan dalam kabinatnya. Akhirnya beberapa etnis Tolaki menempati pos jabatan penting di lingkungan Pemprov pasca Mutasi, seperti Muchtar Silondae, Kimsan Taohae (*Kendari Post*, 1 April 2004).

Dengan demikian, *political entrepreneur* didapati pada masing-masing etnis asli di Sulawesi Tenggara. Persamaan dari aksinya adalah hanya tampil pada momen-momen politik penting saja, seperti pemilihan walikota dan pemilihan gubernur. Perbedaannya, ada yang lunak, dan ada yang militan. *Political entrepreneur* etnis Muna rupanya masuk dalam kategori yang lunak dalam memperjuangkan kepentingan etnisnya di Kendari.

### 3.3 Perwujudan Etnisitas Etnis Muna

Perjuangan dan strategi etnis Muna untuk membangkitkan etnisitas Muna yang sudah dikemukakan adalah melalui individu-individu. Pada pembahasan berikut ini akan diuraikan terlembaganya aspirasi dan kepentingan etnis Muna sehingga berbagai tuntutan etnis Muna dapat menyalurkannya secara sehat. Asosiasi etnis dan parpol dapat menjadi wadah artikulasi kepentingan etnis Muna. Kedua institusi ini dapat mengambil inisiatif untuk mencari tahu apa sesungguhnya aspirasi orang Muna tersebut.

#### 3.3.1 Asosiasi Etnis Muna

Sebagaimana diuraikan di muka, perkembangan politik dan ekonomi di Kendari, hanya menguntungkan etnis Tolaki, Bugis-Makassar, dan Cina-Arab. Artinya, sistem yang bekerja hanya menguntungkan dan sumber daya terdistribusi lebih banyak ke kelompok etnis tersebut. Dalam keadaan seperti ini, maka asosiasi etnis bisa muncul sebagai suatu alat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik etnis tertentu (Dulyakasem, 1988: 241). Asosiasi etnis merupakan strategi yang menguntungkan, karena sifatnya

yang informal sehingga kontak dan komunikasi dapat dengan mudah terjadi di antara para anggota sesama etnis.

Pada awalnya, gagasan untuk membentuk asosiasi kedaerahan orang Muna di Kendari didorong oleh motivasi untuk mempererat silaturahmi orang Muna. Tujuan utamanya adalah membantu orang Muna yang berada di perantauan agar mampu sejajar dengan etnis lain. Kegiatan utama yang dilaksanakan adalah menggalang kekerabatan melalui berbagai kegiatan.

Asosiasi etnis Muna yang paling tua di Kendari bernama KKM (Kerukunan Keluarga Muna). Pendiriannya adalah Prof.Dr.La Ode Abdul Rauf (mantan Ketua Bappeda). Tidak ada kepastian waktu berdirinya, hanya diperkirakan KKM sudah berdiri sejak tahun 80'an. Para anggota KKM waktu itu pada umumnya berasal dari kalangan elite, adalah orang Muna yang sudah berhasil di Kendari yang umurnya sudah di atas 40 tahun.

Seiring dengan semakin banyaknya populasi etnis Muna yang ada di Kendari, maka sejak tahun 2000'an marak berdiri asosiasi etnis Muna. Dapat disebutkan antara lain ; Kerukunan Keluarga Wakorumba Selatan (KKWS) dengan ketua Ld.Ngkono, Komunitas Pemuda Korumba dengan ketua Amsir Abdullah, Ikatan Pemuda Pelajar Tongkuno (IPERMATO) dengan ketua Manar, Kerukunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Labora Muna (KPPMLM) dengan Ketua Muh. Saleh, Forum Komunikasi Mahasiswa Muna (FKMM) dengan Ketua Ld. Muhammad Badri, Kerukunan Keluarga Laonti (KKL) ketua Muhammad Adam Sakoya,S.Sos., Kerukunan Masyarakat Indonesia Muna (KMIM) dengan ketua Dini Djifto, Kesatuan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Muna (KEPMI) dengan ketua Kudus Muharam, Kerukunan Keluarga Lahontiha (KKL) dengan

ketua La Dambo. Dapat dikatakan yang menjadi penggagas dari asosiasi etnis ditunjuk menjadi ketua.

Sumber pendanaan asosiasi etnis Muna berasal dari sumbangan individu. Ini berbeda dengan asosiasi etnis Tolaki, adalah Lembaga Adat Sarano Tolaki (LAST). Dari informasi yang penulis peroleh dari Muslimin Said<sup>53</sup>, sekretaris LAST bahwa setiap tahun pemerintah daerah memberikan bantuan dana. Sepanjang yang peneliti ketahui berdasarkan wawancara-wawancara dengan pengurus asosiasi etnis lain selama penelitian berlangsung, tampaknya hanya LAST yang memperoleh bantuan melalui APBD.

Basis utama anggota asosiasi ini adalah etnis. Keanggotaan dalam asosiasi memperlihatkan sesuatu yang terkait dari komunitas kampung yang sama. Sebagaimana dituturkan oleh Ketua KKM (Kerukunan Keluarga Muna) Kota Kendari, Prof. Dr. La Ode Abdul Rauf, M.S., keanggotaan dalam KKM adalah orang yang lahir dari Muna, entah itu dari suami, istri, bapak, dan ibu akan otomatis menjadi anggota. Keanggotaan dalam KKM dapat melampaui batas-batas keagamaan karena yang bisa jadi anggotanya dapat Islam atau Kristen. Keanggotaan pada asosiasi juga melewati struktur ekonomi bisa orang miskin dan kaya, dan juga latar belakang pendidikan karena yang buta huruf sampai jenjang pendidikan sarjana dapat menjadi anggota.

Sebagian besar kegiatan asosiasi adalah arisan yang diselenggarakan setiap bulan secara bergiliran. Sebagaimana dikemukakan oleh Jay (1969: 416-417) arisan adalah suatu tipe kelompok kerja sama yang dapat bertahan lama

---

<sup>53</sup> Dari keterangan yang penulis peroleh bahwa tanggung jawab Pemda untuk menggairahkan asosiasi etnis adalah didukung oleh Permendagri No. 3/1997 tentang pengembangan pelestarian adat istiadat, kegiatan-kegiatan adat, dan lembaga adat di seluruh Indonesia sehingga diharapkan gubernur sampai bupati diharapkan dapat membantu lembaga adat yang sudah ada maupun yang akan dibentuk

dalam suatu komunitas. Kegiatannya berlangsung seperti lotere adalah sejumlah kecil orang akan memberikan jumlah uang yang sama untuk dikumpulkan, yang kemudian akan dialokasikan untuk seorang anggota melalui undian. Bagi anggota yang tidak sempat menghadiri acara arisan, ia dapat mengirimkan uang mereka melalui anak-anak atau keluarga yang dipercaya. Biasanya rumah yang dipakai adalah anggota yang mendapat arisan bulan sebelumnya. Demikian seterusnya, sehingga setiap bulan para anggota dapat bertemu. Di arisan itu mereka dapat mendengar kabar dari kampung halaman, keluarga, dan orang dari kampungnya. Percakapan bersifat santai dengan obrolan mereka tentang kehidupan sehari-hari. Orang bertanya satu sama lain mengenai sekolah anak, cucu dan kemajuannya.

Selain kegiatan sosial, ada juga asosiasi etnis Muna yang merambah pada kegiatan-kegiatan politik, khususnya pada momen-momen pergantian walikota dan gubernur. Dari hasil wawancara dengan pengurus asosiasi, contoh paling nyata dari pembentukan asosiasi untuk kepentingan politik adalah pada saat pembentukan Kerukunan Masyarakat Indonesia Muna (KMIM) dengan ketua Dini Djifto. KMIM didirikan pada saat-saat penjarangan nama-nama menjelang suksesi walikota Kendari. Berdasarkan informasi Dini Djifto, motivasi berdirinya adalah didorong oleh keinginan agar dapat menyatukan visi orang Muna yang ada di Kendari dan berharap agar siapa pun orang Muna yang terakhir lolos masuk sampai tahap pemilihan,<sup>54</sup> itulah yang didukung.

---

<sup>54</sup> Mungkin yang dimaksudkan oleh Dini yakni calon walikota/wakil walikota yang lolos sampai pada tahap penjarangan I dan II. Dalam PP 151 tahun 2000 menyebutkan bahwa pada tahap penjarangan tahap I merupakan kegiatan fraksi untuk meneliti pasangan bakal calon. Sementara penjarangan tahap II merupakan kegiatan masing-masing fraksi untuk melakukan proses seleksi baik kelengkapan dan keabsahan administrasi maupun tentang kemampuan dan kepribadian bakal calon.

Dalam perkembangannya, ketika tiba saat penentuan calon walikota yang akan dipilih, ternyata tidak ada dari etnis Muna. Yang ada hanya calon Wakil Walikota adalah La Ode Khalifa. “KMIM hanya memfokuskan ke La Ode Khalifa walaupun ia kalah tetapi kami sudah menunjukkan solidaritas kepadanya”, ungkap Dini Djifto kepada penulis.

Apa yang diungkapkan oleh Dini di atas dapat dibuat generalisasi bahwa melalui asosiasi etnis Muna ini mencoba memperkuat posisi tawar menawar etnis Muna. Salah satu momen yang dipilih adalah dengan menampilkan figur dari etnis Muna sebagai calon wakil walikota. Tentu saja, strategi ini dipilih dengan harapan dapat mewujudkan ambisi etnis Muna untuk mendapat hak yang lebih besar dan didengar secara politik di dalam pertarungan antaretnis.

Banyak orang Muna yang terlibat dalam asosiasi-asosiasi etnis tersebut. Para pendirinya memandang bahwa wadah ini dapat menjadi salah satu kendaraan untuk mewakili dan melobi kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan etnis Muna pada umumnya. Elite Muna melakukan mobilisasi etnis melalui wadah ini. Pemompaan semangat ke-Muna-an disebarkan kepada orang Muna. Fenomena pentingnya asosiasi etnis secara mendadak menjadi alternatif terhadap partai politik (Klinken, 2003: 39). Ia tidak hanya berfungsi sebagai *platform* ideologis, namun sebagai cara untuk mengikat elite dengan para pengikutnya. Secara ekonomis, lanjut Klinken peran asosiasi etnis adalah menyediakan lapangan pekerjaan.<sup>55</sup>

<sup>55</sup> Penemuan fungsi “penyediaan lapangan pekerjaan” dari asosiasi etnis seperti yang diamati oleh Klinken berdasarkan penelitian di Kalimantan Tengah. Di daerah tersebut, asosiasi etnis, yakni LMDO-KT bergerak di berbagai bidang usaha dari proyek lahan gambut, agribisnis, kewisataan, penambangan emas dan perkayuuan. Tetapi, fungsi asosiasi etnis di Kendari tidak dijumpai. Fenomena serupa karena umumnya kegiatannya lebih banyak di bidang sosial dan politik.

Pada masa orde baru, jumlah dan kegiatan asosiasi etnis tidak semarak seperti saat ini.<sup>56</sup> Karena itu elite politik belum banyak yang “melirik” sebagai kendaraan politik bagi elite. Kegiatan asosiasi masih sebatas kegiatan sosial saja yang tidak punya resonansi politik. Tidak berkembangnya kegiatan dan minimnya asosiasi-asosiasi etnis pada masa Orde Baru secara struktural dapat ditelusuri dari konstruksi kekuasaan yang memarginalkan peran etnis. Praktik politik Orde Baru memproduksi negara yang kokoh, kuat, dan relatif otonom, serta berjarak jauh dari nilai-nilai kepentingan etnis. Akibatnya, masyarakat etnis berada dalam keadaan terasingkan secara ekonomi dan politik. Dalam keadaan tersebut, negara hanya merestui pendirian organisasi-organisasi korporatis.<sup>57</sup>

Hal yang menyebabkan orde baru melakukan itu didasari oleh keinginan kuat untuk mengendalikan etnis dan memperoleh dukungan politik dari etnis demi memperkuat negara. Langkah ini terkait dengan pembentukan imaji nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia dibangun dan diharapkan dapat mengatasi segala rintangan termasuk etnis. Oleh sebab itu, etnis harus ditekan sehingga tidak mengalahkannya imaji nasionalisme. Jika etnis yang menonjol maka

---

<sup>56</sup> Di Kendari, bukan hanya etnis Muna yang membentuk asosiasi etnik. Dari penelusuran yang peneliti lakukan, etnis-etnis lain juga membentuk asosiasi etnik. Di etnik Tolaki ada terdapat 5 t asosiasi, etnis Buton ada 4, etnis Bugis-Makassar 20, etnis Jawa 2, etnis Cina 4, etnis Flores 1, etnik Minahasa 1. Mungkin masih ada asosiasi etnik yang lain, tetapi peneliti belum bisa melakukan penelitian mendalam karena keterbatasan waktu.

<sup>57</sup> Sejak akhir tahun 60'an sampai awal tahun 70'an, orde baru melakukan restrukturisasi politik yang mengarah kepada eliminasi partisipasi kelompok etnis dalam proses politik, kecuali melalui organisasi-organisasi kepentingan korporatis bentukan dan kepanjangan tangan Negara. Pembentukan dan dorongan bagi pembentukan wadah atau organisasi tunggal di berbagai kehidupan seperti KADIN bagi pengusaha, KNPI bagi pemuda, HKIC bagi kaum tani, HNSI untuk nelayan, KORPRI bagi pegawai negeri, dan seterusnya, merupakan indikasi paling jelas mengenai organisasi korporatis tersebut. Untuk diskusi teoritik mengenai kecenderungan tersebut, lihat misalnya Mohtar Mas'ud, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, Jakarta: LP3ES, 1989.

akan tumbuh sikap kepedulian dan obsesif terhadap etnis sendiri, daerah, dan sekte apa pun serta mengabaikan perasaan nasionalisme.

Keberadaan asosiasi etnis ini, bagi warga Muna di Kendari tetap dibutuhkan, sebab betapa pun seseorang mengidentikkan dirinya sebagai orang modern di kota, bila berhadapan dengan sesama etnisnya, maka ia akan kembali kepada nilai-nilai tradisional lama, sehingga ia memiliki dua ciri sekaligus, yaitu superkultur dan bikulturalism (Geertz, 1963: 35, dalam Ithromi, 1994: 532). Dari perspektif politik lokal, kemunculan asosiasi etnis menurut penulis pada dasarnya lebih bernuansa politis dan bertujuan untuk mengklaim etnisnya sebagai terunggul dibandingkan dengan kelompok etnis lain. Itu semua tidak lepas dalam upaya dari kelompok etnis untuk memenangkan pertarungan sumber daya dan dominasi.

### 3.3.2 Wadah Parpol PDI-P

Salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan etnis Muna untuk meningkatkan peran dalam arena politik lokal adalah melalui PDI-P. Melalui wadah ini, para *political entrepreneur* yang tidak lain adalah elite parpol PDI-P dapat mempromosikan etnis Muna menjadi "orang penting", sebagai saluran politik etnis Muna. Orang-orang Muna yang terlibat di PDI-P berupaya untuk mewujudkan ambisi mereka mendapatkan hak yang lebih besar untuk didengar secara politik di dalam arena politik lokal.

Elite parpol yang ada di PDI-P, banyak membangkitkan simbol etnis untuk mendekatkan dirinya dengan anggota pengikutnya. Dalam hal penggunaan properti etnis, tampaknya elite parpol lebih mengacu pada pemahaman praktis tentang etnisitas. Kesadaran mereka akan suatu etnis masih

tertanam kuat, sehingga ia tetap memelihara untuk tidak tercabut dari akar budaya etnisnya. Mereka yang mengingkari akan budaya etnisnya akan diperlakukan sebagai orang lain, "orang mereka". Seperti ditulis oleh La Kimi Batoa, jati diri orang Muna tidak lain adalah perpaduan antara Buton dengan Muna yang didalamnya ada peninggalan budaya kolonial Belanda. Pertemuan itu maka memaksa maka orang Muna banyak merenungkan sebuah jati diri Muna.

Dalam upaya pencarian jati diri itu, kemudian bertemu dengan sosok elite dari etnis Muna yang kebetulan menduduki sebagai ketua Parpol. Tak pelak maka elite parpol tersebut mencari dukungan dan sumber legitimasi melalui pembentukan klientelisme. Dalam pola relasi patron-klien akan dipenuhi dengan semangat membangun loyalitas prosedural dari anggota kepada elitnya. Oleh karena itulah elite parpol tertarik untuk menumbuhkan budaya klientelisme dan patronase. Dalam hal ini sebagai elite parpol melakukan homogenisasi orang partai, terutama yang akan menduduki posisi strategis, seperti menjadi anggota DPRD.

Melalui wewenang yang dimilikinya, Munajab menyeleksi orang-orang kepercayaannya di partai untuk mendampinginya dalam menjalankan sebagai ketua parpol. Orang yang dipercaya adalah yang mempunyai kesamaan sosial etnis, dan pada saat yang sama memerginakan orang yang mempunyai perbedaan etnis dengan dirinya. Karena Munajab menempatkan orang-orang satu etnis dirinya untuk menempati posisi-posisi kunci di partai, kesan rasial tidak terelakkan. Kendati demikian, Bur tetap gigih melanjutkan langkah dan malah memberikan perlindungan terhadap orang yang ditunjuk tersebut. Ia berdalih bahwa, partai membutuhkan orang yang loyal dan punya integritas dan

berlindung di balik AD/ART partai bahwa tindakannya tidak melanggar konstitusi partai. Alur tindakan yang sama juga terjadi pada pola kerja La Ode Munadora, Ketua PDI-P Wilayah Sulawesi Tenggara. Disadari atau tidak, ia mengisi jabatan-jabatan strategis di partai dari orang yang memiliki preferensi sosial etnis yang sama, adalah Muna.

Bagi elite parpol yang saat ini masih memegang tampuk kekuasaan di parpol, tampak bahwa pemaknaannya terhadap etnis cenderung bersifat praktis. Sikap tersebut ditempuh adalah dalam rangka mencari legitimasi dan mempertahankan posisinya sebagai elite. Olehkarena itu, para elite parpol mengambil simbol etnis yang memang memiliki pengaruh efektif dalam mendekatkan dirinya dengan anggota pengikut yang ada di parpol.

## BAB IV

### ELITE MUNA-ELITE BUKAN MUNA DI DI PDI-P

Pada Bab III sudah diuraikan tentang kehadiran etnisitas dalam arena-arena politik lokal. Dari uraian tersebut terlihat bahwa masing-masing etnis, apakah dari Muna, Tolaki, Buton, dan Bugis kerap memainkan kartu etnisitas. Orang Muna merupakan salah satu dari sekian banyak aktor yang kerap memainkan kartu tersebut. Dalam studi konstruksi sosial seperti yang dikemukakan oleh Berger dan Luckmann (1990), diperlukan penjelasan tentang alasan mengapa orang Muna menggunakannya. Alasan yang mendasari perilaku orang Muna dalam memanfaatkan etnisitas dapat ditelusuri lewat konstruksi pemikiran. Melalui konstruksi pemikiran, dapat dipahami bagaimana kehidupan masyarakat itu terbentuk dalam proses yang terus menerus.

Salah satu upaya untuk memahami tindakan orang Muna dalam memainkan etnisitas itu adalah dengan menelusuri sistem pengetahuan informan sebagai hasil penelusuran *life story* elite parpol yang mempunyai posisi penting di PDI-P. Perilaku elite parpol yang banyak dari Muna sebagaimana telah ditampilkan, dilandasi oleh posisinya dalam organisasi, kebudayaan Muna secara umum dan falsafah orang Muna. Dengan faktor tersebut, terjadi saling silang dan membentuk formasi perilaku khas orang Muna ketika berinteraksi yang menghubungkan mereka satu sama lain. Uraian pada bagian ini juga akan menampilkan tentang elite PDI-P yang bukan dari Muna. Dari perbedaan latar belakang etnis ini akan tergambar bagaimana "orang daerah" mendefinisikan "pendatang", dan demikian pula sebaliknya.

Dengan latar belakang etnis dari Muna, walau pada umumnya hanya bersifat sementara saja, mereka mengalami keberhasilan, sementara elite bukan Muna mengalami kekecewaan.

#### 4.1 Perilaku Elite Muna

Elite parpol yang berkuasa saat ini di PDI-P Kota Kendari adalah elite yang melakukan tindakan *local subjects* adalah suatu tindakan yang mengidentifikasi seseorang atas persamaan sejarah, nenek moyang, tempat tinggal, dan kebudayaan yang sama (Appdurai dalam Baso, 2003:41). Sosok yang paling berperan dalam melakukan tindakan *local subjects* adalah Munajab, S.E., Ketua PDI-P Kota Kendari dan La Ode Munadora, Ketua PDI-P Propinsi Sulawesi Tenggara.

Tindakan di atas diawali dengan mengidentifikasi latar belakang etnis "siapa kami-siapa mereka", lalu berkembang menjadi sentimen keaslian atas dasar etnisitas. Hal itu terjadi karena selain orang asli daerah tidak dapat menghindari interaksi dengan para pendatang juga mereka harus menghadapi semangat para pendatang untuk bersama-sama mencari peruntungan di daerahnya. Bagi elite parpol, etnis dapat "dimanfaatkan" sebagai sarana perekat dengan pengikutnya dengan "siasat-siasat halus". Adapun 'indikator' dari tindakan produksi *local subjects* adalah seperti dibawah ini :

##### 4.1.1 Perekrutan Pengurus Atas Dasar Etnisitas

Realitas kehidupan parpol pada tingkat lokal dijumpai adanya fenomena elite parpol bukan saja pengikut dari pemegang kekuasaan pusat secara pribadi, mereka juga memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka.

Ini meliputi bukan hanya karena persamaan etnis, juga karena pertemanan. Struktur yang seperti itu adalah instrumental bagi elitnya karena kepatuhan pengikut dan anggota tetap terjamin.

Perhatian Munajab dalam parpol mula-mula tercurah pada upaya memulihkan pengaruhnya di kalangan pengurus. Dengan wewenang yang dimiliki oleh Munajab sebagai ketua parpol hasil dari konferensi PDI-P tahun 2000, ia ingin menjadikan orsospol sebagai "perpanjangan" pribadinya. Bagaimana gambaran seleksi pengurus yang dilakukan oleh Munajab? Berdasarkan hasil wawancara dengan Erwin Genda mengungkapkan bahwa Munajab merupakan figur sentral untuk memutuskan siapa yang akan direkrut sebagai pengurus DPC PDI-P Kota Kendari. Keputusan yang diambil oleh Munajab banyak tidak sepengetahuan pengurus lain. Beberapa pengurus yang direkrut baru mengetahui bahwa ia direkrut setelah ada SK dari DPP.

Dalam menyeleksi pengurus partai, awalnya Munajab menyusun sejumlah kriteria yang digunakan untuk melakukan rekrutmen. Di antaranya adalah loyalitas, pendidikan, dan kekaderan. Akan tetapi, ketatnya persyaratan yang ia susun mengakibatkan sulitnya mencari kader partai untuk direkrut menjadi pengurus. Akibatnya, ia hanya mencari kader partai yang memiliki loyal terhadap organisasi. Penafsiran loyal saat itu, adalah kader partai yang tidak pernah menyebrang dan mendukung PDI Pro Soerjadi.

Apa yang disusun oleh Munajab di atas, dalam kenyataannya, pengurus yang direkrut mempunyai relasi baik dengan dirinya. Dengan demikian tidak terjadi rekrutmen berdasarkan kinerja (*performance*). Para kader yang direkrut merupakan orang dekat Munajab, dan pada umumnya mempunyai latar belakang etnis Muna.

Formasi resmi dalam suatu struktur terdiri dari 11 orang pengurus. Dari jumlah itu, 8 orang pengurus dengan latar belakang etnis Muna, 1 orang etnis Tolaki, 1 etnis Buton dan 1 orang etnis Toraja. Satu orang Buton itu punya hubungan keluarga dengan Munajab, sedangkan 1 orang dari etnis Tolaki sama-sama alumni FI Unhalu. Dengan format seperti itu, adalah pengurusnya didominasi oleh etnis tertentu lalu pengurus lain masih punya jaringan pribadi, tentu saja menjadi unik dengan *platform* partai yang nasionalis. Hal ini menunjukkan bahwa seorang elite parpol perlu jaringan yang kuat antarelite itu sendiri. Dengan latar belakang keluarga Munajab, adalah ayahnya seorang polisi dan ibunya seorang ibu rumah tangga, tidak dapat diharapkan sebagai sumber jaringan yang kuat sebagai seorang elite parpol. Akibatnya, Munajab sendiri yang perlu untuk merekrut "orangnya" guna diajak masuk sebagai anggota jaringan.

Tanpa disadari, Munajab dalam aktivitasnya sebagai ketua memfungsikan pengurus yang dianggap loyal, dan pada saat yang sama meminggirkan pengurus yang dianggap tidak loyal. Hal itu dapat dilihat dari pemberian kesempatan yang lebih luas kepada Erwin Genda, yang latar belakang etnis Muna guna menjalankan tugas sebagai sekretaris,<sup>1</sup> yang sebetulnya dalam struktur pengurus jabatan itu dipegang oleh Andika. Munajab juga mengangkat 'orang dekatnya' yang tidak masuk dalam struktur organisasi, yakni Munadi,<sup>2</sup> dengan tugas-tugas khusus orang yang latar

---

<sup>1</sup> Terlepas dari kesamaan latar belakang etnis, pengangkatan Erwin sebagai sekretaris karena Rur menganggap Erwin sebagai orang yang dapat mentaati asas-asas administrasi dan dapat melaksanakan tugasnya dengan efisiensi yang tidak dimiliki Andika. Walau demikian, di mata pengurus lain, Erwin tidak memiliki kharisma dan uang yang banyak seperti yang dimiliki Arifin Hasau.

<sup>2</sup> Data informasi yang penulis peroleh. Mundari merupakan adik kandung Munajab. Figur ini walau tidak duduk dalam struktur resmi pengurus, tetapi perannya dapat melampaui peran

belakang etnisnya dari Muna. Kriteria rekrutmen pengurus yang dilakukan oleh Munajab, tampaknya memenuhi syarat model rekrutmen apa yang dikatakan oleh Norris (1997: 1) sebagai *ascriptive style*<sup>3</sup>, adalah individu dipilih untuk menduduki suatu jabatan tertentu karena keturunan dan status sosial

Dengan mengucilkan orang yang tidak memiliki hubungan pribadi dengannya membuat Munajab menjadi orang kuat di partai. Ia tidak memiliki saingan sehingga memiliki kekuasaan yang besar dalam pembuatan kebijakan partai. Orang-orang dekat dengan Munajab dipastikan akan mendapatkan posisi yang penting di partai. Selama orang Muna masih menjadi elite di PDI-P, etnis non Muna akan tampil sebagai pelengkap saja. Dengan memiliki kesamaan latar belakang etnis, Munajab lebih mudah membangun hubungan politik maupun pribadi.

Karena Munajab menempatkan orang-orang dekatnya dalam menduduki posisi-posisi penting di organisasi, kesan perilaku yang memprioritaskan orang Muna menjadi tak terelakkan. Perilaku pilih kasih dalam pelaksanaan *recruitment* menjadi sumber ketidakpuasan di kalangan pengurus partai yang merasa dirinya memiliki loyalitas tinggi. Salah satu contohnya Andika. Ketidaksukaan Andika tercetus karena dianggap bukan "orang Muna" dan dengan demikian ia dianggap "bukan putera daerah". Mendengar hal tersebut, ia pun berujar .

---

orang yang duduk dalam struktur. Salah satu peran penting yang perulis carat ia menjadi koordinator lapangan untuk mobilisasi lapangan di daerah kawasan Sodohoa pada saat kampanye pemilu 2004

<sup>3</sup> Model ini bertentangan dengan *achievement oriented recruitment* yang lebih menekankan kepada keahlian teknis dan kepemimpinan sebagai sesuatu yang diperlukan dalam pekerjaannya dan menghindari hal-hal subjektif

“di Kendari saya sudah punya rumah, usaha saya di Kendari, anak-anak semua saya sekolahkan di Kendari. Ada orang yang termasuk sebagai putera daerah, karena lahir di Kendari atau mempunyai orang tua di Kendari tetapi bisa saja membangun rumah atau menyekolahkan anaknya ke Jawa atau Makassar. Apakah hal ini dapat dikatakan saya bukan putera daerah?”

Walau mendapat protes, Munajab tidak bergeming. Ia berpendapat bahwa yang protes hanya satu orang, selebihnya tidak ada gejala penantangan dari fungsionaris lain. Hal itu dibuktikan dengan tidak cukup kuatnya Andika dalam mendapat dukungan dari pengurus lain. Realitasnya memang tidak memungkinkan, karena orang yang direkrut oleh Munajab adalah orang yang memiliki kedekatan emosional amat dekat. Mekanisme perekrutan pengurus hampir sepenuhnya berada ditangan Munajab.

#### **4.1.2 Perekrutan Calon Legislatif Atas Dasar Etnisitas**

Bagi elite parpol yang mempunyai kewenangan akan ‘tergoda’ untuk mempromosikan orang-orangnya guna menduduki suatu posisi strategis dalam momen-momen politik tertentu. Munajab dan La Ode Munadora adalah orang yang ingin memanfaatkan peluang tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari ajang pemilu 2004, kedua orang tersebut mempromosikan etnis Muna untuk menjadi calon jadi di dalam proses penentuan calon anggota legislatif DPRD Kota Kendari.

Dominasi orang Muna juga terlihat pada saat proses tawar-menawar dalam rekrutmen calon legislatif 2004-2009 PDI-P. Panduan DPP tentang penjarangan dan penyaringan caleg antara lain didasarkan pada nilai dan bobot yang diperoleh setiap caleg, selain faktor lain seperti pengalaman, loyalitas, pendidikan, dan jabatan di dalam dan di luar partai (lihat tabel 4.1)

**Tabel 4.1**  
**Pola Pembobotan PDI-P dalam Pencalonan Anggota Legislatif**

No	Jabatan Dalam Struktur Partai	Nilai	Bobot	Keterangan
1	Pengurus DPC	60	3	Selain atas dasar jabatan dalam partai, pembobotan juga dilakukan berdasarkan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lama keanggotaan</li> <li>▪ Keterlibatan diin partai (ikut kongres, dsb)</li> <li>▪ Loyalitas thd partai</li> <li>▪ Tingkat pendidikan</li> <li>▪ Pengalaman di luar partai</li> </ul>
2	Pimpinan DPRD Kab/Kota	40	2	
3	Pengurus PAC	40	3	
4	Badan Diklat Cabang	25	2	
5	Pemenangan Pemilu Cabang	25	2	
6	Badan Litbang Cabang	25	2	
7	Departemen	25	2	
8	Dewan Pertimbangan Cabang	25	2	
9	Anggota DPRD Kab/Kota	25	2	
10	Pengurus Ranting	20	3	
11	Sekretariat DPC	12,5	2	
12	Pengurus Anak Ranting	10	3	

Sumber : Diolah dari lampiran SK DPP PDI-P No. 267 Tahun 2003

Bobot menjadi faktor penting dalam seleksi caleg di PDI-P, kendati bukan satu-satunya. Menurut Munajab, juga ada pertimbangan komposisi agama, terutama agama mayoritas, begitu pula aspek keseimbangan etnis turut dipertimbangkan. Walaupun demikian diakui bahwa aspek bobot dan nilai skoring menjadi pertimbangan yang penting. Gabungan faktor bobot dan skoring, dan faktor etnis dan agama yang kemudian mengisi konfigurasi daftar caleg pada urutan "nomor-nomor utama". "Jadi kalau kuota dalam daerah pemiluhan itu 5 maka nomor urut 1-2 orang teratas kita sebut sebagai nomor-nomor utama (Munajab, wawancara, 15 Juli 2003). Caleg-caleg pada nomor-nomor utama ini dianggap lebih memiliki peluang untuk menang dalam Pemilu 2004 kalau perkiraan didasarkan pada perolehan 3 kursi PDI-P pada Pemilu 1999 di DPRD Kota Kendari.

Proses paling menentukan dalam penyusunan caleg partai untuk Pemilu 2004 adalah finalisasi daftar berikut nomor urut setiap caleg pada masing-

masing daerah pemilihan. Dalam kaitan ini pengurus PDI-P tingkat kabupaten merasa diuntungkan dengan adanya prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh DPP PDI-P di Jakarta.<sup>4</sup> Sebagai partai pemenang ke-2 pada Pemilu 1999, PDI-P Kota Kendari mengajukan caleg ke KPUD Kendari, adalah 28 orang atau 100 persen dari kuota kursi DPRD Kendari untuk Pemilu 2004. Setelah melalui proses verifikasi administratif oleh KPUD Kendari hanya 25 orang caleg lolos dalam seleksi tersebut.

Data yang cukup menarik dari daftar caleg PDI-P sebagaimana terlihat pada tabel 4.2 adalah dominannya etnis Muna yang menempati nomor urut utama. Dari 8 orang caleg yang menempati di 4 daerah pemilihan, 7 orang dari etnis Muna. Hanya 1 orang yang bukan etnis Muna yang menempati nomor urut utama. Dari pencalonan tersebut, tampak bahwa partai ini berusaha merebut simpati etnis Muna yang sebetulnya tidak terlalu dominan di kota ini.

Upaya pengurus PDI-P untuk mengorbitkan etnis Muna guna menempati nomor urut utama, tampaknya berhubungan dengan masa lalu partai yang banyak didominasi etnik Muna. Ada tiga alasan yang menjadi dasar sehingga etnik Muna menempati nomor urut utama. *Pertama*, pedoman pencalonan berupa SK DPP PDI-P No. 267 dan 304 memberi prioritas bagi pengurus partai untuk masuk sebagai caleg di tingkatannya masing-masing. *Kedua*, pola pembobotan dan skoring yang dibuat DPP PDI-P memberi bobot

<sup>4</sup> Dalam SK tersebut menjelaskan tentang siapa saja yang berhak berada dalam posisi nomor-nomor urut utama dalam konteks pencalonan DPRD Kabupaten/kota adalah pada Pasal 9,10, dan pasal 11 SK No. 304. Pasal 9 Penetapan nomor urut dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 1) Jabatan calon di struktur partai; 2) Nilai bobot calon; 3) Dukungan yang diperoleh melalui Musancabsus, Rakercabsus atau Rakerdasus; 4) Penugasan calon oleh struktur partai; 5) Hasil persentase perolehan suara PDI-P pada Pemilu 1999; 6) Jumlah pemilih dari daerah yang diwakilinya. Pasal 10 ayat 3 Ketua dan Sekretaris DPC Partai memiliki prioritas untuk ditetapkan menjadi calon dengan nomor urut utama di DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 11 ayat 3 Fungsionaris DPC Partai menempati nomor urut utama di daerah pemilihan DPRD Kab/Kota, kecuali apabila Ketua PAC Partai dicalonkan di daerah pemilihan yang sama, maka nomor urut fungsionaris DPC tersebut berada di bawah Ketua PAC.

nilai besar pada mereka yang duduk sebagai pengurus partai, terutama ketua dan sekretaris. *Ketiga*, UU Pemilu sendiri menentukan bahwa salah satu syarat persyaratan untuk menjadi caleg adalah keharusan menjadi anggota partai peserta pemilu.

**Tabel 4.2**  
**Daftar Caleg PDI-P yang Menempati Nomor Urut Utama di Masing-Masing Daerah Pemilihan**

Daerah Pemilihan	Nama Caleg Nomor Urut 1	Nama Caleg Nomor Urut 2
Kec. Kendari (Dapil 1)	Munabil (Muna)	La Manuru (Muna)
Kec. Mandonga (Dapil 2)	Munajab, S.H. (Muna)	La Ode Munasir (Muna)
Kec. Baruga (Dapil 3)	Yani Ballo (Tolaki)	Dra. Sitti Wuna (Muna)
Kec. Abeli/Poasia (Dapil 3)	La Ode Pili, S.H. (Muna)	Sitti Munadarma, S.P. (Muna)

Akibat dominasi etnik Muna yang menempati nomor urut utama, tidak mengherankan jika ada nada skeptis muncul tentang daftar caleg yang diajukan PDI-P. Andika, sekretaris partai mengakui adanya "Munaisasi" di tubuh partai. Hal yang sama diamati pula oleh Munabim yang mengakui pengurus PDI-P telah berkhianat terhadap cita-cita partai. Seorang pengurus anak cabang bahkan mengakui kepada penulis bahwa tidak ada calon yang masuk ke dalam daftar caleg, kecuali benar-benar dekat dengan Munajab, Munabil, dan La Ode Munadora.

Meskipun secara umum proses pencalonan sudah mengarah ke chauvisme etnik, ternyata reaksi dan respon publik atas realitas tersebut juga relatif minim. Hal itu tampak pada pemberitaan media, terutama media cetak,

setelah caleg diumumkan oleh KPU secara luas kepada tanggal 28-30 Januari 2004, baik melalui *Kendari Ekspres* dan *Kendari Pos* yang terbit di Kendari. Kalaupun ada perdebatan publik berkaitan dengan caleg, sebagian besar hanya menyangkut isu munculnya kasus ijazah palsu.

Praktek rekrutmen politik yang dilakukan oleh elite parpol PDI-P, tampaknya menggunakan kriteria keterwakilan sebagai pertimbangan utama. Dalam masyarakat tradisional pengelompokan itu bisa atas dasar etnis, agama, dan faktor askriptif lainnya. Dalam kasus di atas, *real politics* nya, adalah elite parpol mengambil simbol etnis agar dapat membawa "orang-orangnya" ke dalam arena politik. Pola pengembangan kekuasaan yang dilakukan oleh elite bukannya didasarkan pada faktor ekonomi, melainkan pada faktor tradisional mereka mengarahkan kesetiannya pada ikatan personal elite adalah atas dasar persamaan etnis. Kesetiaan yang seperti itu kerap muncul di dalam pola relasi elite-pengikut di tingkat parpol. Seringkali ikatan antarpribadi, termasuk etnis lebih disukai dari ikatan-ikatan lain seperti atas dasar kesamaan profesi. Rata-rata orang hidup dalam jaringan hubungan perorangan dengan sumber daya pribadi yang berbeda-beda.

#### 4.1.3 Mobilisasi Orang Muna

Di samping berbagai program yang dilaksanakan oleh partai, para elite parpol berusaha menjangkau anggota massa pengikutnya dengan cara-cara yang langsung. Elite parpol banyak menemui mereka agar dianggap "bermanfaat" dan bisa dipercaya. Dalam hal ini hubungan personal, termasuk di antaranya karena adanya kesamaan basis etnis, menjadi penting karena orang dapat memberi dukungan jika sudah saling kenal secara pribadi

La Ode Munasir, selama dalam pengamatan paling banyak memobilisasi orang Muna<sup>5</sup> dalam upayanya untuk mewujudkan ambisinya duduk sebagai anggota DPRD pemilu 2004. Walau partai mempunyai tugas utama untuk mobilisasi massa dalam pemilu, tetapi masing-masing caleg memiliki "tim kecil". Keanggotaan tim kecil direkrut dari mereka yang sudah menjadi kader parpol. Tim kecil La Ode Munasir dikoordinir oleh La Ode Ando, sekretarisnya di PAC Mandonga. Keduanya sama-sama berbasis etnis Muna.

Setelah tim kecil dibentuk, tugasnya adalah memikirkan secara teknis langkah-langkah "politik" yang akan ditempuh untuk mendulang suara. Kalkulasi biaya dihitung, identifikasi orang yang berpengaruh, identifikasi kelompok potensial, dan pemetaan kantong suara potensial. Semua berlangsung secara tradisional, tidak ada metode ilmiah yang serius untuk menggarap strategi kemenangan pemilu. Hal yang menarik dari temuan lapangan, dapat diungkapkan bahwa ikatan primordial atas dasar etnis digunakan sebagai point utama dari elite untuk mengikat anggota pemilihnya. La Ode Munasir mengemukakan strategi atas dasar 'etnis' seperti terlihat dari pernyataannya dibawah ini :

"Orang Muna banyak terdapat di kelurahan Tobuha, Alolama, Wambalata, Anggiloumu. Sementara kelurahan Mandonga dan Korumba adalah Bugis Buton. Sementara Watulada, Labibia dan Puwatu adalah etnis Tolaki. Nah, dengan latar belakang kantong seperti itu kami dari PAC Mandonga akan mencoba menampilkan banyak orang Muna dengan mengingat PAC-PAC lain seperti PAC Baruga tidak ada orang Muna, Poasia Cuma 1 orang Muna, Kendari tidak ada orang Muna, dan Kendari Barat hanya 1 orang Muna". (wawancara, 16 maret 2003).

---

<sup>5</sup> Mobilisasi etnis dimaksudkan disini adalah reaffirmasi diri dengan menggunakan faktor etnis yang dilatari oleh keperluan elite parpol akan dukungan etnis tertentu

Ndoria memobilisasi orang Muna biasanya dengan langsung turun bersilaturahmi ke bawah. Di lingkungan tempat tinggalnya, ia mengidentifikasi tokoh-tokoh dari Muna. Bersama tim kecil yang sudah ia bentuk, mereka kerap kali mendatangi tokoh-tokoh tersebut. Strategi yang dipakai, berdasarkan pengamatan penulis lebih menekankan kepada provokasi, atau mengutamakan jargon-jargon. Semua kegiatan yang dilakukan ditujukan untuk memobilisasi orang Muna untuk mendukung program partai atau figur elite parpol yang menjadi caleg. Dengan cara ini calon pemilih akan datang untuk menghadiri kampanye atau memilih caleg dari PDI-P pada saat pencoblosan pemilu legislatif.

Dari pernyataan dan tindakan La Ode Munasir di atas, dapat ditafsir ia mengandalkan etnis Muna sebagai suara potensial untuk dirinya. Perkiraan itu sangat rasional dengan mengingat latar belakang keluarganya semua dari Muna Istri, ayah, ibu, dan mertuanya semua dari Muna. Dari pengaruh ayahnya, ia mendekati kalangan "orang tua Muna" di Mandonga untuk menjelaskan posisi dirinya. Dari hasil pengaruh mertua, ia mendapat bantuan baju kaos dan sumbangan material lain berupa uang transport dan uang rokok.

Dengan homogenitas etnis di kalangan keluarganya, dengan sendirinya La Ode Munasir sering mengidentikkan dirinya sebagai orang yang "mau mendengar" keluhan orang Muna. Cara itu dilakukan agar ia mendapatkan pengakuan dan dukungan suara dari kelompok etniknya sendiri. Kalkulasinya adalah dengan kesamaan etnis akan mudah menyampaikan gagasan-gagasan politik dan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya dalam sosialisasi dan kampanye. Pengelompokan dukungan politik berbasis solidaritas etnis adalah hal yang lumrah sebagai upaya untuk mewujudkan ambisi elite parpol untuk

maju sebagai caleg. Kelompok etnis akan melekat kepada identitas etnis. Hal ini merupakan rujukan bagi mobilisasi etnis. Setiap orang mengembangkan rasa memiliki terhadap etnis tertentu.

Pengandalan orang Muna sebagai lahan potensial yang dapat dimobilisasi disebabkan keterbatasan modal sosial lain yang dimiliki La Ode Munasir. Pemilu 2004 ini adalah pengalamannya yang pertama maju sebagai caleg. Ia tidak pernah menjadi "orang penting", seperti pejabat yang memungkinkan untuk dikenal masyarakat luas. Keterbatasan "dana politik" juga berpengaruh pada aktivitasnya sebagai caleg. Dengan semua keterbatasan tersebut, ia berusaha menutupinya dengan mempropagandakan sentimen etnis guna memenuhi ambisinya. Jaringan inilah yang berfungsi sebagai motor dan dari orang-orang yang sudah masuk dalam jaringannya itu juga punya jaringan-jaringan sendiri. Mungkin mirip seperti *Multi Level Marketing* (MLM).

Strategi yang ditempuh seperti di atas memang unik dalam sebuah perubahan sistem politik yang terjadi. Setelah Indonesia memasuki masa transisi, sistem politik yang dikembangkan adalah sistem multipartai yang berimplikasi kepada semakin ketatnya persaingan dalam memperoleh basis dukungan. Melihat hal tersebut, elite melakukan suatu proses invensi (*invented*) etnisitas ke dalam arena-arena parpol. Praktik seperti ini pernah terjadi pada ONP (*One Nation Party*) pimpinan Pauline Hanson. Walau ia banyak dikritik, ia tetap menjalankan strategi seperti itu. Masalahnya, para pendukung partai pun membenarkan kebijakan partai yang berorientasi etnis. Ia mengungkapkannya sebagai berikut : "*so you can make up your own minds on whether I am simplistic or not in what my views are. But I believe that*

*things need to be changed. They say, 'oh, she wants to go back th the 50s and 60s. Well what the hell's wrong with that ?'* (Kingstone, dalam Manne, 1998: 104). Di Indonesia sendiri, penggunaan patronase untuk memobilisasi pengikut menurut garis etnik atau agama terjadi pada kawasan yang dilanda konflik etnik seperti di Kalimantan Barat, Maluku, Poso, dan Kalimantan Tengah. Fenomena tersebut dapat lebih dipertajam dengan model yang disebutkan Ted Gurr (dalam Klinken, 2003: 42) sebagai "model perseteruan komunal" di mana elite-elite lokal memobilisasi pengikut berdasarkan garis etnik untuk melindungi atau meningkatkan andil mereka dalam kekuasaan negara.<sup>6</sup>

#### 4.2 Perilaku Elite Bukan Muna

Dibandingkan dengan elite dengan latar belakang sosial etnis Muna, elite dengan latar belakang sosial non-Muna termarginalkan. Sebut saja, Munabim,<sup>7</sup> yang pernah menjadi Ketua DPC Kotif Kendari periode 1996-2000. Hasil pemilu 1997 dan pemilu 1999 mengantarkannya duduk di DPRD mewakili PDI-P. Di lembaga eksekutif tersebut, ia duduk menjadi wakil ketua DPRD Kota Kendari Periode 1999-2004.

Putera asal Bima ini, ketika menjadi wakil ketua DPRD, menjadi figur kunci dalam penyelesaian pergolakan politik lokal di Kendari. Walau Masyhur Massic Abunawas telah memenangkan suara paling banyak di DPRD Kendari,

<sup>6</sup> Kategorisasi lainnya adalah ethnonasionalis, masyarakat adat, kelas etnik, dan sekte religius militan.

<sup>7</sup> Munabim dilahirkan di Bima, NTB, 16 Juni 1950. Pendidikannya dari SD hingga SMP ditempuh di Bima. Setelah itu ia ke Makassar melanjutkan pendidikan di STM Pembangunan Gunung Sari dan berteman dengan Jr. Yusuf Hamidu, Kepala Dinas PU Provinsi Sulawesi Tenggara di kabinet Gubernur Ali Mazi, S.H. Ia sempat kuliah di IKIP Makassar pada jurusan Teknik Industri tetapi tidak selesai karena harus mencari "hidup". Ia mengaku "dibina" oleh Landui, orang Muna, seorang pengusaha yang bergerak di bidang kontraktor. Landuilah yang kemudian mengajak Ahmad Hasan untuk menginjakkan kakinya di tanah Muna.

tetapi ia diganjal oleh La Ode Kaimuddin, Gubernur Sultra saat itu. Akibatnya sempat terjadi tarik ulur, antara DPRD dengan Gubernur Sultra. Masing-masing bertahan dengan argumentasi berbeda. Selama kurang waktu satu tahun walikota tak kunjung dilantik. Akhirnya pada bulan November 2000 walikota dilantik melalui proses yang cukup dramatik. Di mata sebagian orang, terutama tokoh dari etnis Tolaki seperti Tumbo Saranani tidak tanggung-tanggung menyebut bahwa penyelesaian kasus Walikota Kendari merupakan prestasi dari Munabim (*Kendari Ekspres*, 21 November 2000).

Loyalitas Munabim terhadap partai juga tidak diragukan. Hal itu dapat dilihat dari honornya sebagai wakil ketua DPRD sebagian disisihkan untuk partai, menyumbang dana untuk kontrak kantor/sekretariat partai, menyumbang kursi yang akan digunakan di kantor/sekretariat partai.

Akan tetapi, prestasi dan loyalitasnya terhadap partai tidak mendapat penghargaan dari elite parpol yang lain, terutama dari La Ode Munadora, Ketua PDI-P Propinsi. Ia dilihat sebagai orang yang dapat mengganggu dominasi orang Muna di partai. Hal itu tampak dalam proses penentuan calon pada pemilu 2004. Diluar perkiraan Munabim, nomor urut yang diberikan partai nomor urut 8 untuk duduk di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara mewakili daerah pemilihan I adalah Kota Kendari dan Kabupaten Konsele. Mengenai nomor tersebut, Munabim merasa disingkirkan dan ada kesan keberadaannya tidak diperlukan lagi duduk di kursi DPRD. Hal yang lebih menyakitkan hati Munabim adalah adanya nama-nama yang berada di atasnya seperti La Ode Hasid Pedansa, Amran Yunus, Syarif Awaluddin Silondae, Andika, Decky Teitemena, Nurjannah Hamid, dan Made Sroniati Prayoga pada daerah pemilihan Kota Kendari dan Konsele. Melihat kenyataan tersebut,

Munabim sempat melontarkan pernyataan sebagai berikut, “Mereka bukanlah tandingan saya dari segi apa saja, baik dari segi pengalaman di organisasi, senioritas, bahkan mungkin kualitas sumber daya manusia. Tetapi kenyataannya, mereka jauh lebih dihormati dibanding saya”.

Selama ini, hanya Munabim yang berani bersikap kritis terhadap sepak terjang dan perilaku La Ode Munadora. Akibat dari sikapnya tersebut, risiko yang harus ia terima adalah nomor urutnya sebagai caleg berada pada nomor bawah, bukan nomor urut utama yang berarti ia tidak mungkin terpilih. Walau ia sudah protes, bahkan ia pernah berkinim surat ke La Ode Munadora dan Hermanto selaku ketua dan sekretaris partai, hal itu tidak dapat menolong posisinya. Kejadian itu menciptakan konflik pribadi antara Munabim dengan La Ode Munadora. Untuk lebih jelasnya penjelasan Munabim, dipaparkan sebagai berikut :

“ Saya melihat bahwa nomor urut saya yang berada pada posisi seperti itu karena dua faktor adalah sikap membangkang saya dan latar belakang saya yang bukan putera daerah. Saya pernah membangkang pada ketua DPD PDI-P Sultra, La Ode Munadora. Ada dua pembangkangan yang pernah saya lakukan adalah pada momen konferda PDI-P Sulawesi Tenggara tahun 2000 dan momen pemilihan walikota Kendari tahun 2002. Momen pertama, saya dianggap melawan karena dalam pelaksanaan konferda PDI-P mencalonkan diri sebagai calon ketua DPD Sulawesi Tenggara. Waktu itu, pak Eka saya sebetulnya tidak ingin untuk mencalonkan diri. Hanya saja setelah menyaksikan tindak tanduk para pendukung La Ode Munadora yang cenderung otoriter, jiwa saya menjadi memberontak. Bulu saya sempat merinding saat itu karena ada spanduk yang terpampang pada arena konferda yang berbunyi *Diharamkan calon lain selain La Ode Munadora.* Ini kan tidak mencerminkan partai yang demokratis’. Tekad saya semakin bertambah, karena beberapa delegasi dari DPC mendatangi dan menyatakan dukungan atas pencalonan ku sebagai salah seorang Ketua DPD PDI-P. Seingat saya waktu itu beberapa ketua DPC se Sultra seperti Kolaka, Kendari, Buton sudah memberikan dukungan kepada dirinya. Dukungan untuk La Ode Munadora hanya datang dari DPC Muna. Tetapi apa lacur, semua ketua DPC yang memberikan dukungan kepadanya, 2 hari menjelang konferda dipecat. Perseteruan dan konflik internal tidak dapat dihindari. Singkat cerita,

konferda tetap dilaksanakan. Saya, walau dengan pemeriksaan yang sangat ketat tetap bersikukuh untuk ikut sebagai peserta. Delegasi yang ditunjuk yang mewakili DPP PDI-P adalah Jacobus dan Gunawan juga sudah tiba di tempat. Jadwal pertama pembukaan acara konferda adalah pukul 08.00, tetapi rupanya pengurus DPP agak ragu untuk memulai acara, karena posisi La Ode Munadora yang belum 'aman', padahal di mata DPP La Ode Munadora masih disukai. Akhirnya, salah seorang delegasi dari DPP menelepon Theo Sjafei, salah seorang pengurus DPP PDI-P, yang saat itu berada di Bali diharapkan untuk ke Kendari mengamankan pelaksanaan konferda. Akhirnya Pak Theo datang, dan pembukaan baru dilaksanakan pada pukul 16.00. Sepanjang pelaksanaan konferda, saya intrupsi terus atas jalannya persidangan yang saya anggap tidak sesuai dengan aturan partai. Misalnya, pada saat Theo Sjafei memimpin sidang pertama, saya langsung mengintrupsi. 'Saya ingin belajar bapak-bapak yang dari DPP terhadap kita-kita yang ada di desa ini. Sepanjang pengalaman yang saya ikuti baik di kongres Semarang, agenda pertama bukan membahas tata tertib dahulu, tetapi hendaknya memeriksa dahulu keabsahan peserta'. Lalu, Theo menjawab, 'yah itu betul, tapi boleh juga tata tertib ini yang dibahas sambil kita juga membahas peserta nantinya'. Mendengar jawaban itu, saya pun protes, walau akhirnya ia mengikuti keinginan pimpinan sidang sebab dalam voting yang dilaksanakan ia kalah. Pada agenda pemilihan ketua, saya tetap mencalonkan diri, tetapi ia hanya memperoleh 2 suara dari 25 suara. Ia kalah, tetapi tetap puas karena keinginannya yang ingin menegakkan demokrasi di tubuh partai. Momen kedua saya membangkang pada La Ode Munadora adalah pada saat pemilihan walikota tahun 2002. Saat itu, La Ode Munadora memerintahkan kepada kader PDI-P yang duduk di DPRD untuk mendukung Buhari Matta. Pada pemilihan walikota yang lalu, keinginan dari partai sudah dilaksanakan. Sikapnya mulai berubah, ketika dalam pasca pemilihan, La Ode Munadora<sup>8</sup> memaksakan kehendak untuk membatalkan hasil pemilihan yang telah memenangkan Masyhur Masie Abunawas. Pemaksaan La Ode Munadora, tetapi saya ikuti dengan pertimbangan bahwa dari segi proses pemilihan tidak ada yang salah. Bahkan sikap saya bertindak sebagai wakil ketua DPRD saat itu lebih banyak membela Masyhur Masie Abunawas. Saya pula yang memimpin anggota DPRD Kota Kendari yang lain untuk menghadap Mendagri. Pada saat menghadap ke Mendagri, saya tunjuk 'batang hidungnya' anggota DPRD yang lain karena menganggap banyak yang telah menjilat kembali lidahnya. Alasan saya karena saat pengajuan bakal calon, semua fraksi mencalonkan pak Masyhur. Tetapi mengapa baru sekarang diingkari. Hal lain yang diutarakan dalam pertemuannya dengan Mendagri adalah tentang surat izin dari atasan. Saat itu, saya mempertanyakan apakah benar surat izin yang dikeluarkan oleh Mendagri palsu atau asli. Spontan dijawab bahwa itu asli, maka saya lanjutkan, kalau itu tidak

<sup>8</sup> Sikap La Ode Munadora ini adalah dipecut oleh sikap Gubernur La Ode Kaimuddin yang saat itu tidak mengakui hasil pemilihan yang telah dilaksanakan oleh DPRD dan memerintahkan untuk membatalkan hasil pemilihan

ada yang salah maka kapan dilantik. Mendengar hal tersebut, maka Mendagri menjawab bahwa kita segera lantik Masyhur. Ibarat sebuah perkawinan, kita nikahkan saja dulu pasangan yang mau kawin, adapun pestanya yah terserah saja. Artinya, Masyhur dilantik saja. Saya sengaja berbuat demikian, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Alasan kedua, saya terlempar karena saya bukan putera daerah. Coba lihatlah sendirilah, dari segi loyalitas, mungkin saya termasuk orang yang tidak menolak semua permintaan partai. Lalu, lihat caleg itu, kan banyak dari kalangan putera daerah, khususnya orang Muna". (wawancara, 9 Maret 2004).

Meskipun ada perlakuan diskriminatif yang diterima oleh Munabim, ia tidak menganggapnya secara negatif. Tampaknya ia sangat berhati-hati. Kehati-hatiannya didasari oleh sikap nasionalisme yang cukup tinggi. Nasionalisme itu menyebabkan ia selalu berpikiran positif terhadap perlakuan elite parpol dari Muna. Ada dua pertimbangan penting sehingga Munabim tidak melakukan perlawanan terhadap La Ode Munadora.

*Pertama*, ia menyadari bahwa orang Muna di tubuh partai amat dominan sehingga jika melawan akan sia-sia. Apalagi ia mengetahui La Ode Munadora termasuk aristokrat dari Muna yang disegani dan dihormati sehingga dapat memobilisasi massa orang Muna untuk melakukan apa yang diperintakkannya. Ia tidak ingin berkonfrontasi secara terbuka karena akan mengancam keselamatan dirinya dan merusak sendi organisasi yang lain. *Kedua*, cara yang akan ditempuh adalah melalui jalur konstitusional partai. Informasi yang sempat dirkam penulis bahwa untuk pemilihan Ketua DPD PDI-P Sultra Periode 2005-2010 ia akan mencalonkan diri. Tujuannya adalah ingin melucuti pengaruh La Ode Munadora di partai.

#### 4.3 Interaksi Sosial antara Elite Muna-Elite Bukan Muna

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa di PDI-P, elitnya banyak dikuasai oleh orang Muna, dan sebagian kecil juga ada elite bukan Muna. Interaksi diantara mereka ada nuansa kerjasama dan persaingan yang kerap kali menyertanya. Berkaitan dengan dominannya orang Muna yang menduduki posisi-posisi penting di organisasi, munculnya definisi dari "etnis lain" lebih banyak disebabkan karena faktor politik, seperti masalah yang berkaitan langsung dengan posisi, nomor urut di caleg, dan lain-lain.

Berger dan Luckmann menyebut identitas sebagai hasil dialektik antara identifikasi oleh orang lain dan identifikasi oleh diri sendiri, antara identitas yang diberikan secara objektif dengan identitas yang diberikan secara subjektif. Dialektika ini, bagi Berger dan Luckmann, hanya menegaskan kembali dialektika antara objektivasi dan subjektivasi.

Dalam konteks elite etnis Muna dan elite bukan Muna di PDI-P, pendefinisian dapat diaktualisasikan ke dalam serangkaian interaksi sosial kooperatif dan opositif (kompetisi). Kooperatif adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Oposisi adalah gejala persaingan karena adanya kepentingan yang berlainan, perebutan atau perlombaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan memperoleh sumber daya terbatas.

Pada kasus yang telah disebutkan sebelumnya, perilaku elite Muna yang melakukan tindakan *local subjects* (rekrutmen pengurus, perekrutan caleg pada nomor urut utama, mobilisasi) atas dasar etnis dapat dipandang memperlihatkan peran yang dimainkan etnis Muna lebih menonjol dibanding etnis lain. Artinya, perilaku yang ditampilkan elite Muna dapat ditafsir sebagai

upaya elite Muna untuk menempatkan etnis lain pada posisi ter subordinasi, meskipun praktik tersebut tidak diungkapkan secara terbuka.

Tindakan seperti dalam kasus di atas sebenarnya merupakan tabiat umum dalam politik yang tidak mengenal identitas etnis. Dapat terjadi dimana pun orang berada terutama dalam upaya memenangkan pertarungan. Namun, dalam konteks etnis Muna, tindakan *local subjects* diartikan sebagai “penipuan” lawan politiknya. Apabila seorang elite parpol berhasil “menipu” berarti dirinya lebih pandai, lebih unggul dibanding elite parpol lainnya.

Dalam pandangan etnis Muna, tindakan “menipu” orang lain tidak selalu dianggap sebagai tindakan aib. Ini dapat dilihat pada salah satu karya sastra di Muna yang bersifat “siasat” (Thamrin, tanpa tahun: 4). Adapun isinya adalah :

*Lahaemo nopintura piso lumelaho  
Nodtu kantuMunujabino ne bhudi songono ghole  
Solalano natumono, tamaka puna tumonu  
Tumona nadahamidi, kahulino tumi tau efano ghudi melaa*  
Artinya :  
Lantaran pintar pisau yang terkenal  
Ia bersikap menghina badak yang asli matanya  
Disangkanya dapat melakukan, tetapi tidak melakukan  
Bagaimana bisa melakukan, bajanya hanya melekat intinya besi biasa

Apa yang dilakukan oleh elite dari Muna dapat ditafsir sebagai upaya etnis Muna untuk tetap memperhatikan dan bertanggung jawab kepada etnis Muna. Artinya, ia mampu memainkan perannya sebagai elite dengan latar belakang etnis Muna terhadap sesamanya. Dengan kata lain, dalam organisasi PDI-P muncul siasat-siasat tertentu yang dapat dipandang sementara waktu mampu untuk bertahan dalam kompetisi dengan etnis lain.

Dengan ungkapan di atas etnis Muna biasa diberi kiasan orang yang suka "menipu", "munafik", "tidak jujur". Ungkapan di atas sudah dikenal luas di kalangan etnis lain. Namun demikian, dalam etnis Muna, tampaknya tabiat "menipu" dianggap sebagai tabiat manusia biasa, juga merupakan kewajaran karena keterpaksaan untuk mengatasi hidup. Ini dapat dipandang sebagai alternatif dari salah satu pandangan hidup Muna yang tidak suka dan berpantang meminta belas kasihan atau meminta orang yang bukan kerabatnya.

Fenomena "menyasati", "menipu" dalam sebuah organisasi memperlihatkan bagaimana perilaku elite yang secara terus-menerus dikonstruksi sehingga ia selalu berada dalam keadaan berubah. Praktik pemanipulasian etnis demikian memunculkan pandangan berikutnya dari elite etnis lain. Sebenarnya elite etnis lain mengetahui sepak terjang dari elite Muna tersebut. Karena itu, ia tidak bereaksi negatif. Munabim adalah salah satu elite bukan Muna yang melakukan hal tersebut. "Perlawanan" yang dilakukannya adalah melalui jalur-jalur konstitusional, yakni akan mengganti La Ode Munadora dalam acara musyawarah daerah.

Ini berarti bahwa tindakan antisipatif Munabim tersebut merupakan tindakan yang telah didasarkan atas makna yang diperoleh lewat interaksi antara dirinya dan etnis Muna sebelumnya. Diantaranya adalah jangan "melawan" orang Muna secara kasar dan hendaknya melakukan dengan siasat-siasat halus pula. Ini berarti bahwa Munabim mengetahui bahwa etnis Muna juga telah menyerap cara-cara berpolitik dari etnis lain.

Kasus interaksi seperti di atas memperlihatkan apa yang disebut Blumer (1969) sebagai "tindakan manusia terdiri atas pertimbangan makna yang diketahuinya dan dalam kesempatan interaksi berikutnya lahir

serangkaian tindakan atas dasar makna yang ditafsir dari apa yang dilakukan sebelumnya, demikian seterusnya.” Dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh Munahim sebagai etnis non-Muna merupakan tindakan saling menafsirkan sebagian tindakan etnis Muna. Dalam konteks hubungan sosial antara elite dari Muna-bukan Muna di atas dapat ditafsir lebih lanjut sebagai upaya bagaimana elite non-Muna memahami budaya Muna lewat tindakan apa yang seharusnya dilakukan.

Akan tetapi, tidak jarang dalam penafsiran itu bisa mendatangkan kecemburuan. Ada elite parpol dari Muna, adalah La Ode Mino<sup>9</sup>, yang mendefinisikan etnis lain khususnya pendatang lebih berkonotasi kecemburuan sosial. Munculnya penilaian negatif terhadap para pendatang, karena ia memandang sisi keberhasilan orang pendatang. Meskipun keberadaan elite non-Muna sudah lama di partai, namun mereka dianggap sebagai pesaing dalam upaya meraih posisi strategis dalam organisasi. Ia tidak rela apabila ada kemungkinan elite dari etnis pendatang berkuasa. Karena itu, jika ada “sistem kuota” tiap-tiap golongan etnis, maka ia akan mengontrol pengalokasian untuk dibagikan kepada anggota yang berpengaruh. Dalam pengertian itu, etnis dapat berfungsi sebagai *authoritative allocation resources*.

Yang pasti, dalam organisasi PDI-P, elite dengan latar belakang Muna memiliki batas yang jelas dengan elite non-Muna, antara lain dalam nama, tubuh, bahasa, dan falsafah hidup. Orang Muna dikatakan Muna jika ia mengaku dari Muna atau orang lain mengatakan bahwa ia dari Muna. Perbedaan antara Muna dengan pendatang dapat dilihat dari kepemilikan tanah

---

<sup>9</sup> Figur ini merupakan abk kandung La Ode Munadara. Dalam struktur pengurus yang ada di PDI-P, ia bukan pengurus organisasi, tetapi peranannya dalam pengambilan keputusan organisasi juga vital.

di Muna. Para pendatang yang ada di Muna yang tidak menetap tidak berhak mendapatkan tanah garapan. Kalau menetap, mereka berhak mendapatkan tanah dengan status hak pakai oleh *sarano liwu*<sup>11</sup> atas persetujuan *sarano wite*.<sup>12</sup>

Bahasan yang telah dikemukakan di atas memperlihatkan bahwa munculnya identitas etnis disebabkan adanya sejumlah *other*, dimana konsep seperti ini pernah dilakukan oleh Belanda untuk menggambarkan posisi sosial orang Eropa berbeda dengan non-Eropa (Said, dalam Maunati, 2004: 34). Inilah yang dimaksudkan oleh Barth bahwa dalam satu kelompok etnis ada yang disebut perilaku "mempertahankan perbatasan". Perilaku perbatasan (*border line*) dari Barth dapat dianggap sebagai usaha paling berarti guna memberikan definisi yang tegas mengenai identitas etnis.

Perbedaan pola relasi antara etnis asli dengan etnis pendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.3**  
**Perbedaan Pola Relasi Elite Etnis Asli dan**  
**Elite Etnis Pendatang**

Latar Belakang Sosial Elite	Kecanggotaan	Pola Relasi	Sifat Hubungan
Etnis Asli/Putera Daerah	Tunggal, eksklusif	Emosional	Pertemanan, klientel
Etnis Pendatang	Menyebar, inklusif	Rasional	Expert

Perbedaan pola relasi antara etnis asli dan etnis pendatang sebagaimana terungkap pada tabel di atas bisa jadi cukup menggelisahkan pada struktur

<sup>11</sup> Institusi ini adalah organ pemerintah pada tingkat kampung

<sup>12</sup> Institusi ini adalah organ pemerintah di atas *sarano liwu* adalah pemerintah pusat

masyarakat yang ternyata sangat heterogen secara kultural.<sup>12</sup> Pengalaman empiris yang memilahkan etnis “asli/putera daerah” dan “pendatang” secara kolektif praktis cukup mudah dijumpai. Elite dengan latar belakang sosial pendatang di mata etnis asli dilihat sebagai simbolisasi “menguasai”. Perilaku itu tidak berubah meski sudah memasuki perubahan besar di negeri ini adalah reformasi politik. Dari sini dapat dipahami bahwa elite parpol membangun suatu wacana etnis yang eksklusif. Perilaku yang dilakukan tersebut tepat seperti yang digambarkan oleh Snyder (2000). Ia mengatakan bahwa ruang demokratis yang mulai terbuka ternyata diisi bukan oleh demokrat tulus, tetapi oleh elite anti-demokratis yang mer McKayasa sentimen etnis untuk membelokkan tuntutan rakyat akan demokrasi. Gejala seperti di atas sebetulnya rentan jika lembaga demokrasi masih lemah dan bila elite parpol tidak dapat menyesuaikan diri dengan alam demokrasi.

---

<sup>12</sup> Sebagai perbandingan dengan penelitian ini, di Samarinda dan Balikpapan, masyarakat etnis Dayak dan Melayu Dayak baik secara ekonomi dan politik. Elite pemerintah, eksekutif maupun legislatif relatif didominasi oleh etnis pendatang dari Jawa, Banjar (Kalimantan Selatan), dan Bugis-Makassar (Sulawesi Selatan).

## **BAB V**

### **PENKATEGORIAN ELITE PARPOL TENTANG ETNIS MUNA**

Dalam studi konstruksi sosial, sebagaimana diuraikan pada Bab I, Berger dan Luckmann berpendapat bahwa realitas sosial secara objektif memang ada, tetapi maknanya berasal dari dan oleh hubungan subjektif (informan) dengan dunia objektif. Dengan demikian, informan bebas menafsirkan dunia sosial sesuai dengan prioritas nilainya sendiri atau memahami dunia sesuai dengan keinginan sendiri (Poloma, 1984: 305-306). Penafsiran realitas berganda tersebut akan didialogkan di tingkat wacana sehingga diperoleh pemahaman intersubjektif. Di sisi lain, informasi-informasi tentang kehidupan sehari-hari informan yang selama ini sering diabaikan ternyata merupakan realitas yang lebih penting, teratur dan terpola. Uraian-uraian tentang kehidupan sehari-hari sebagaimana didengar, dilihat, atau dipahami informan disebut dengan eksternalisasi atau *first order understanding*.

Guna memahami *first order understanding*, peneliti menggunakan beberapa cara yakni (1) imajinasi aktor dalam kaitannya dengan berbagai peristiwa yang terjadi dan terkait dengannya, misalnya pernyataan-pernyataan aktor dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa dimaksud, (2) sistem, artinya makna itu terdapat di dalam sistem atau keterkaitan antara berbagai peristiwa yang bersifat sistemik, (3) konteks yang meliputi peristiwa tersebut terjadi, misalnya peristiwa dalam pemilihan walikota. Dalam konteks ini, makna yang dipahami oleh aktor perlu dipahami oleh peneliti dalam kaitannya dengan perspektif teoritik Berger agar diperoleh suatu makna yang baru.

Uraian-uraian yang merupakan pemahaman peneliti disebut objektivasi atau *second order understanding*.

Pada uraian berikut disajikan sebagian besar dari hasil wawancara penulis dengan elite parpol. Secara teoretis, ada keterkaitan antara persepsi dari elite dengan hasil akhir proses politik. Almond (1974:43), misalnya, menulis bahwa *individual political belief* merupakan salah satu faktor determinan bagi *individual political conduct*. Apa yang diungkapkan oleh Almond di atas, kemudian bagi penulis ingin mendudukan “pemahaman elite parpol” sebagai salah satu faktor penting sehingga etnis hadir di arena politik lokal. Apa yang diungkapkan oleh elite parpol di bawah ini merupakan suatu pengalaman tunggal yang kemudian sudah tertanam di dalam pikiran dan perasaannya. Penggambaran persepsi tentang etnis Muna adalah sebatas apa yang diketahui kemudian menyederhanakannya dalam suatu generalisasi sempit atau kesimpulan dari sedikit kasus.

### **5.1 Pengkategorian Etnis Muna menurut Munabim**

Etnis Muna dalam pandangan Munabim, memiliki kecenderungan sebagai etnis yang eksklusif dan militan. Elite Muna yang ada di PDI-P mengkategorikan seseorang satu etnis dengannya hanya atas dasar kelahiran.<sup>1</sup> Ia mencontohkan pada momen penjurangan calon walikota/wakil walikota Kendari, elite parpol PDI-P mengajukan La Ode Khalifa sebagai paket wakil

---

<sup>1</sup> Argumen seperti itu, penulis sendiri menganggap memiliki dasar teoretis dalam studi tentang etniks. Dalam pengkategorian suatu etnis seperti yang konstatir oleh Barth bahwa suatu etnis sebagai golongan askriptif, yaitu golongan yang dihasilkan dari ciri-cirinya berdasarkan kelahiran yang sama

walikota yang berpasangan dengan Mashur Masie Abunawas dan Buhari Mata.

Sebagai orang partai, ia tunduk dengan keputusan tersebut, sebab nama itu adalah aspirasi yang berkembang di kalangan PAC. Hanya saja, hal itu bertentangan dengan jalan pikirannya. Pengkategorian seseorang hanya atas kelahiran mengandung kelemahan.<sup>2</sup> Ia mencontohkan, ada orang yang lahir di Kendari, tetapi ia hanya sekolah SD, SMP, setelah itu pindah ke Jawa sehingga ia tidak banyak tahu lagi tentang kondisi daerah. Apakah orang tersebut dikatakan sebagai etnis Muna?, ujarnya sembari bertanya. Secara rinci Munabim mengatakan sebagai berikut:

Sebetulnya dalam UUU No. 22/1999 sangat fleksibel. Nah, misalnya orang yang lahir disini tetapi semua hidupnya ada di Jawa, Sumatera sana. Tetapi apa ia betul-betul komit dengan daerah. Nah, selain itu jangan hanya dilihat dari lamanya, perlu diuji seperti apa komitmennya, perannya seperti apa. Biar sudah berapa tahun, tetapi hanya mengganggu, yah hasilnya adalah nol besar. Saya disini sudah 38 tahun dan sangat komitemen dengan daerah. Saya sudah bisa dikatakan sebagai putera daerah, sudah cukup dikenal dan mengenal potensi daerah ini (wawancara, 16 Juli 2003)

Kecenderungan elite lain mempunyai pengkategorian seperti itu. Ia tidak mempunyai dukungan yang cukup kondusif untuk mengkritisi pemikiran dari elite parpol yang lain. Akibatnya, perilaku yang banyak tumbuh di kalangan elite parpol lain masih terus bersandar pada pemikiran yang dipahaminya selama ini, tanpa mengembangkan atau menyesuaikannya dengan tuntutan perubahan. Ia menyatakan bahwa pemahaman dasar yang dikembangkan oleh teman-temannya yang lain di PDI-P sudah ketinggalan

---

<sup>2</sup> Secara tidak langsung, Munabim tidak setuju pengidentifikasian etnis asli tidak harus berasal dari indikator kelahiran, tetapi juga hendaknya didasarkan pada komitmen dan kepedulian seseorang terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat

zaman, padahal di pihak lain ada kebutuhan pemahaman yang menyangkut hubungan antaretnis sudah harus lebih nasionalistis. Dalam pandangan penulis, kecenderungan eksklusifnya etnik Muna dengan lebih mengutamakan kepada kepentingan etnisnya, bisa jadi dipengaruhi oleh proses awal datangnya etnis Muna ke Kendari. Dalam bab II sudah dijelaskan bahwa orang Muna yang pertama datang ke Kendari adalah orang-orang yang kalah perang di daerah asalnya. Dengan demikian proses kedatangannya adalah berkelompok sehingga kebanyakan anggota yakni hanya berasal dari kelompok etnisnya saja. Tiadanya percampuran dengan etnik yang lain membuat kesan etnis Muna eksklusif tidak terhindarkan.

Makanya, lanjut Munabim, kalau pengkategorian elite parpol tetap eksklusif, PDI-P akan sulit untuk berkempetisi dengan parpol lain. Tidak terlalu tepat lagi untuk menggunakan symbol etnis dalam persoalan politik lokal sekarang ini. Artinya, kekuasaan politik yang memiliki legitimasi adalah tidak monolitik, tidak eksklusif, tetapi plural, dalam pengertian bahwa tanggung jawab mengurus daerah adalah bukan tanggung jawab dari satu kelompok etnis saja. Dalam penilaian Munabim, meningkatnya etnisitas etnis Muna dipicu oleh perpisahan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara. Sejak saat itu sudah muncul semangat dan ambisi kedaerahan. Jabatan Bupati Muna sudah diduduki oleh etnis Muna sendiri. Memasuki otonomi daerah, kecenderungan tersebut semakin menguat. Lebih lanjut Munabim mengatakan sebagai berikut

'pada awal-awal saya meniti karir sebagai politisi, sudah ada isu putera daerah tetapi porsinya kecil sekali dan tidak terlalu banyak mempengaruhi kondisi di daerah. Tetapi ketika era otonomi daerah muncul pengaruhnya sangat kuat terutama dalam pembagian jabatan-

jabatan penting di daerah yang ingin diberikan kepada putera daerah' (wawancara, 16 Juli 2003).

Tidak bisa dipungkiri, tekanan rezim orde baru sehingga melumpuhkan etnisitas etnis Muna. Walaupun orde baru menggunakan keanekaragaman etnis sebagai lambang persatuan bangsa, tetapi orde baru mempromosikan apa yang dikatakan oleh Pemberton sebagai "kebudayaan Jawa" dan etnis lain harus memenuhi standar tersebut meskipun dengan rasa enggan. Diskusi agar masing-masing etnis setara dianggap tabu karena hal tersebut dianggap suatu potensi yang dapat menciptakan berbagai konflik sosial. Posisi marginal etnis di daerah dalam sistem di atas sangat dirasakan, Kelompok etnis tidak hanya diharuskan memilih dan memenangkan Golkar, dan bahkan stigma seperti tindakan "melawan pemerintah", anggota "GPK" (Gerakan Pengacau Keamanan)-, atau anggota "PKI", bagi kelompok atau rakyat yang berani memilih partai lain di luar Golkar harus diterima.<sup>3</sup>

Arena politik lokal, tidak berkembang dengan baik, bahkan cenderung stagnan. Calon pimpinan daerah seperti gubernur, bupati/walikota lebih banyak ditentukan oleh restu dari Jakarta. Etnis asli yang ada di daerah jika ingin tampil sebagai pimpinan perlu koneksi kuat dan mengetahui liku-liku permainan di Jakarta. Hal itu diperMunajabuk oleh cara kerja Golongan Karya (Golkar) pada masa lalu yang juga turut melumpuhkan dinamika politik lokal seperti itu. Pada saat Golkar menjadi *the ruling party*, seringkali mempraktikkan orang-orang Jakarta mewakili aspirasi daerah yang akan duduk di DPR/MPR sebagai *vote getter*. Mengenai hal ini Munabim berkomentar :

---

<sup>3</sup> Tidak mengherankan jika hasil Pemilu di Sulawesi Tenggara perolehan suara untuk Golkar pada pemilu orde baru di atas 80 %.

Nah, sistem yang disusun dan mekanisme yang dibangun oleh Golkar bukan keputusan untuk membangun masyarakat sama sekali. Sebenarnya Golkar salah membangun kondisi di daerah sehingga kita tidak membangun, tidak melakukan pendidikan politik. Yah, singkatnya Golkar terlalu banyak membodohi rakyat. Dalam hal ini saya melihat bahwa orang-orang di daerah juga sudah cukup baik. Nah, dengan sistem pemilu yang sekarang telah memberikan peluang yang besar untuk tampil. Tinggal pertanyaannya sekarang maukah dan siapkah sekarang putera daerah itu menjemput peluang itu semua (wawancara, 16 Juli 2003).

Selain eksklusif, etnis Muna juga militan. Dengan pengamatan terbatas pada dinamika yang ada di PDI-P, Munabim memberi label etnis Muna termasuk *kuder 24 karat*. Penilaian tersebut dilakukan setelah ia bersama fungsionaris dengan latar belakang etnis Muna tidak menjadi kutu loncat menyebrang ke kubu Soerjadi. Sementara fungsionaris dengan latar belakang etnis lain yang ada di partai, seperti Tolaki dan Manado tidak menunjukkan loyalitas yang tinggi, malah sebaliknya memanfaatkan kekisruhan di internal partai.

Awal konflik akibat kekisruhan partai secara nasional yang terdapat dualisme kepemimpinan antara kubu Soerjadi dan kubu Megawati membawa implikasi di daerah. Menjelang Kongres di Medan tahun 1996, fungsionaris partai bingung karena pemerintah Suharto memberikan dukungan kepada Soerjadi, sementara Megawati didukung oleh Kongres Luar Biasa Surabaya. Soerjadi mendapat legalitas dari penguasa tetapi tidak *legitimate* di tingkat bawah, sementara Megawati mendapat *legitimate* dari arus bawah tetapi tidak mendapat legalitas dari penguasa. Karena itulah, meskipun Soerjadi memegang kepemimpinan formal di PDI- setelah mendapat legalitas dari pemerintah- namun ia tidak bisa diterima oleh kalangan pendukung PDI di tingkat akar

rumpit (*grassroots*). Guna melucuti kekuasaan Megawati di partai, penguasa menggelar Kongres di Medan. DPC PDI Kota Kendari juga mendapat surat untuk menghadiri Kongres Medan.

Menghadapi situasi dilematis di atas, para elite parpol intens mengadakan pertemuan dan diskusi. Tempatnya berpindah-pindah, tetapi lebih banyak di Muna. Dari pertemuan yang dilaksanakan, mereka secara bersama membahas cara terbaik untuk mensiasati tekanan pemerintah. Sikap yang berkembang saat itu adalah jika ikut kongres berarti mendukung penguasa, tetapi kalau tidak ikut, mereka mereka-reka resikonya.

Dari serangkaian pertemuan yang digelar menyimpulkan bahwa tetap ada delegasi yang mengikuti Kongres Medan. Langkah itu diambil guna mengetahui apa yang akan dilakukan oleh kader PDI Soerjadi. Di Medan, delegasi tidak akan memberikan suara. Pertemuan yang mereka laksanakan, pemerintah daerah mengetahuinya. Dari informasi yang penulis peroleh, fungsionaris partai sendiri (yakni Jakop Papilaya) yang sengaja memberi bocoran dan *gossip liar* pada pemerintah melalui Kadit Sospol<sup>4</sup> yang saat itu dijabat oleh Hasan Bakedek. Dalam konteks Indonesia orde baru yang sangat menekankan konsensus, tindakan Munabim dan kawan-kawan adalah bentuk protes yang sangat radikal, yang sama artinya dengan melakukan delegitimasi pemerintah.

Semua ini tentu mempengaruhi sikap pemerintah waktu itu, yang secara ekstrem sangat peka terhadap perlawanan dan pembangkangan. Reaksi

---

<sup>4</sup> Fungsi Kadit Sospol di daerah saat rezim orde baru yakni selaku "pembina politik" politik di daerah. Dalam pandangan penulis, fungsi "pembina politik" yakni sebagai suatu kontrol dari pemerintah, termasuk di dalamnya ideologi, sosial, politik, ekonomi, dan hankam.

pemerintah daerah adalah melakukan tindakan yang diatur rapi melalui manipulasi yang dijalankan oleh Hasan Bakedek. Caranya, Munabim di *ping pong*, bolak balik ke Korem, ke Gubernur, balik lagi ke Korem. Padahal waktu pelaksanaan kongres sudah semakin dekat. Pada momen genting itu, ada pengurus lain sesama pengurus PDI yang memanfaatkan situasi ini. Diam-diam ada pengurus partai yang pro Soerjadi yang menilep bantuan penguasa daerah. Munabim kemudian mengetahui bahwa sudah ada konspirasi antara penguasa daerah dan kader PDI pro-Soerjadi agar pengurus PDI pro-Mega tidak diberangkatkan ke Medan.

Konspirasi tersebut tampaknya menuai hasil. Yang berangkat ke Medan adalah kader-kader pro Soerjadi, antara lain Leonard Pingak (Kolaka), Yusuf Wartowo (Tolaki), Syahrul Tommy (Tolaki), dan Yakop Papilaya (Manado, alm). Dilihat dari latar belakang etnis, semua figur yang membelot adalah etnis non Muna. Sementara fungsionaris yang tetap setia dengan "ibu Mega" adalah Munabim (Muna), Munjabhanuddin (Muna), Munabil (Muna), La Ode Munadora (Muna) batal berangkat. Dari peristiwa di atas ia berkeyakinan bahwa kalau bukan sesama etnis bisa menjadi lawan pada saat-saat genting.

Hanya saja, ada kesulitan dihadapi oleh Munabim yang aktif di PDI-P. Dengan watak dan *platform* PDI-P sebagai organisasi nasionalis bisa dilihat betapa rumitnya hubungan saling mempengaruhi antara karakter etnis dan corak nasionalis tersebut. Dengan misi partai seperti itu, PDI-P tidak harus eksklusif dan hanya mengikatkan diri pada 'orang Muna' saja, tetapi juga merekrut orang-orang dari berbagai latar belakang etnis guna memperluas jaringan.

Di kemudian hari, Munabim merasa ada kesulitan dalam mengelola etnis di parpol. Pada satu sisi jalur etnis secara efektif dapat meningkatkan solidaritas anggota, tetapi di sisi lain etnis menjadi limbah partikular dalam wadah parpol yang berwatak nasionalis. Secara normatif, partai tidak harus eksklusif, dan bayang-bayang etnisitas dalam parpol dianggap sebagai kekuatan mundur (*declining force*).

Ia sudah menyadari itu, dan pernah menyarankan kepada Munajab hendaknya dapat memikat orang dari etnis lain. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi elite parpol PDI-P. Dengan menarik orang dari latar belakang etnis non-Muna, para elite parpol mengharapkan untuk meraih peluang yang lebih besar dan meluaskan pengaruh ke luar lingkungan etnis non Muna. Oleh karena itu di PDI-P kini sudah ada tokoh Buton yakni Anami Rahman. Lalu ada tokoh Tolaki yakni keluarga Jakob Silandae dan Umar Tongasa. Etnis Bugis belum ada tokohnya yang ingin bergabung. Andika yang sudah bergabung dalam pandangan Munabim belum masuk dalam kategori tokoh di kalangan etnis Bugis.

## **5.2 Pengkategorian Etnis Muna menurut Munajab, S.E.**

Berbeda dengan Munabim yang tidak menekankan kelahiran sebagai pengkategorian seseorang satu etnis, bagi Munajab seseorang termasuk kategorik etnis Muna apabila 'orang itu lahir dan dibesarkan di Muna'. Memaknai pernyataan tersebut cukup jelas bahwa identitas etnis yang dihubungkan dengan kelahiran, Ia mencontohkan dirinya :

‘Saya sendiri dapat dikatakan sebagai orang Muna karena dilahirkan di Muna, walaupun saya sekolah di Kendari mulai sejak SD sampai PT’ (wawancara, 9 Juli 2003).

Dari pernyataan Munajab di atas sebenarnya cukup tegas, bahwa walaupun seseorang itu yang telah dilahirkan di suatu daerah, lalu melanjutkan ke daerah lain untuk sekolah, atau alasan mencari pekerjaan lain, hal tersebut tidak akan mengubah identitas etnis seseorang. Identitas saat ini, tetap seperti identitas yang dulu juga, tidak berubah. Munajab mengakui tidak ada darah lain yang ada pada dirinya. Bila ada orang bertanya daerah asalnya, jawabannya adalah “dari Muna”.

Melalui identitas ke-Muna-annya, tampaknya Munajab meraih “keuntungan”. Ketika bersosialisasi guna meraih pendukung, prioritas utama orang yang direkrut menjadi pendukungnya adalah sesama etnisnya, entah itu keluarga dan kerabat. Tiap orang yang didatangi, biasanya ia menitipkan pesan agar dapat mempengaruhi orang lain. Untuk tetap merawat dukungan yang diperoleh dari etnis Muna, Munajab mengetahui “cara berpolitik orang Muna”. Hasil pengamatan yang diperoleh oleh Munajab ketika banyak berinteraksi dengan orang Muna, menyimpulkan bahwa orang Muna jika berpolitik mempertimbangkan dua faktor sebagai preferensi tindakannya. *Pertama*, melihat siapa figur yang tampil. *Kedua*, orientasi pragmatis seperti uang dan materi.

Aspek pertama yang diungkapkan oleh Munajab adalah menyangkut figur. Dalam momen-momen politik lokal di Kendari, orang Muna, membenarkan prioritas penting pada “tokoh dari Muna”. Ia mencontohkan dalam momen

pemilihan Walikota Kendari, banyak orang Muna yang datang ke PDI-P untuk memberi dukungan kepada La Ode Khalifa guna dipromosikan menjadi wakil walikota. Fraksi PDI-P yang ada di DPRD Kota akhirnya mengakomodasi tuntutan orang Muna tersebut, walau akhirnya tidak berhasil maju ke putaran kedua pemilihan walikota.

Aspek kedua yang diungkapkan Munajab adalah pragmatisme orang Muna dalam berpolitik. Tidak ada penjelasan apa yang dimaksudkan pragmatisme menurut Munajab, hanya ia mencontohkan ada kesan orang Muna “bermain-main dengan uang” dalam pemilu. Inilah pernyataannya :

Pada pemilu 99 yang lalu, di Gunung Jati (nama salah satu kampung di Kendari, peneliti) ada kader partai yang dianggap potensial untuk menambah perolehan suara. Tapi, apa yang terjadi perolehan suara di lokasi tersebut malah anjlok. Setelah saya dan teman-teman menyelidiki, faktor pemicunya karena ada serangan fajar yang dilakukan oleh partai tertentu. Jadi orientasi orang Muna sangat sesaat. Padahal, pada saat saya berkunjung ke rumahnya, ia meyakinkan saya untuk tidak usah ragu. Itulah komitmennya. Tetapi, dengan mudahnya dilanggar jika sudah ada yang menjanjikan sesuatu (wawancara, 9 Juli 2003)

Apa yang diungkapkan oleh Munajab menunjukkan bahwa kader partai etnis Muna yang didatangi oleh Munajab (yang juga dari etnis Muna), “saling menipu” satu sama lain. Fenomena itulah yang penulis yakini sebagai “pragmatisme politik” yang membalut perilaku elite parpol dari Muna. Implikasinya di partai, elite parpol terlatih untuk memperjuangkan agenda-agenda politik sempit dan primordial. Ada beberapa argumentasi yang dapat dikemukakan. *Pertama*, politik massa mengambang warisan masa lalu yang membatasi berkembangnya loyalitas individual terhadap parpol, termasuk elitnya. *Kedua*, anggapan umum yang berkembang pada etnis Muna adalah

mau berusaha harus mau berkorban. dan sekali-kali bagi-bagi rejeki bagi rakyat kecil. *Ketiga*, banyaknya etnis Muna yang miskin *absolute* di Kendari.

Dalam konteks politik lokal, pelaksanaan pemilu bagi etnis Muna hanya sebagai- apa yang dikatakan oleh Shalins sebuah "pesta resiprositas". Dalam analisisnya, Shalins (1976:190--196) memaknai resiprositas sebagai hubungan timbal balik yang iklas, sebanding, dan negatif. Resiprositas iklas berarti para elite menampilkan diri sebagai dermawan yang sebanding, yakni elite sebagai pihak luar wajib mengembalikan apa yang diberikan oleh massanya, negatif massa bebas mengeruk keuntungan

Tidak bisa dipungkiri, salah satu sumber basis dukungan Munajab adalah etnis Muna. Oleh karena itu, Munajab mengembangkan politik komunal dalam komunitasnya sendiri. Ia mencitrakan dirinya sebagai wakil dan mediator dari etnis Muna ketika duduk di DPRD Kota. Cara itu ditempuh untuk memobilisasi dukungan dan mendulang suara sebanyak-banyaknya dari etnis Muna. Munajab menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

suatu saat saya datang ke kantong-kantong utama orang Muna di Kendari yakni di kampung Manggadua dan Kampung Salo. Dalam dialog dengan orang Muna di tempat tersebut mereka mengeluhkan kondisi jalan yakni berlobang sehingga perlu untuk ditimbun. Saya pun meresponsnya dengan menimbun jalan tersebut dalam jangka waktu 2x24 jam setelah dialog diselenggarakan. Selain itu saya juga menempuh pendekatan informal. Kadangkala, jika saya datang ke kampung Manggadua dan Kampung Salo, sudah membeli rokok beberapa bungkus guna diisap bersama-sama dengan tuan rumah atau menyiapkan sejumlah uang pembeli rokok. Secara umum dapat dikatakan bahwa cara-cara seperti itu berguna untuk mengakrabkan hubungan satu sama lain. (wawancara, 24 Juli 2003)

Strategi yang ditempuh oleh Munajab di atas, yakni dengan menghadirkan dirinya, dan tentunya juga partainya di tengah komunitasnya

sendiri, etnis Muna, dapatlah dipandang sebagai salah satu upaya elite parpol dalam memanfaatkan etnis dalam panggung politik lokal. Dengan kata lain, etnisitas merupakan dasar utama “mengikat anggota-anggotanya”.

Kesamaan etnis dan homogenitas kultural antara keduanya mengakibatkan munculnya perilaku komunal agar tercipta daya kepengikatan yang kuat diantara mereka. Ini kemudian mengarah pada seruan sentimen komunitas yang membedakannya dari kelompok lain yang berkompetisi. Dalam konteks seperti itu, dengan kriteria etnis pula yang dijadikan sebagai indikator utama untuk menentukan siapa yang tersingkir dan siapa yang bertahan (Nasikun, dalam A.E. Priyono dkk, 2003:9).

### **5.3 Pengkategorian Etnis Muna menurut La Ode Munadora**

La Ode Munadora menekankan bahwa etnis Muna adalah orang yang “lahir dan dibesarkan” di Muna. Pemaknaan tersebut sama dengan yang dikemukakan oleh Munajab, hanya menambahkan unsur dibesarkan. Penambahan unsur “dibesarkan di Muna”, sudah semakin membatasi siapa yang termasuk orang Muna. Karena ada orang yang berasal dari keturunan dan lahir di wilayah tersebut, lalu pergi meninggalkan tempat dengan berbagai macam alasan. Oleh karena itu, orang yang dapat dikategorikan sebagai etnis Muna, dituntut bukan semata ia hanya lahir di Muna, tetapi lebih dari itu ia diharapkan untuk tetap tinggal di Muna.

Pengkategorian seperti ini, bisa diberi makna ganda karena jika penekanan ‘unsur dibesarkan’ maka orang-orang Cina, Arab, Bugis, Minahasa, Jawa dan lain-lain dapat dikategorikan sebagai putera daerah. Pengkategorian

etnis atas dasar kelahiran dan tempat tinggal tentu mendatangkan persoalan yang lebih rumit lagi. Aspek yang terakhir dapat dilihat misalnya dari kecenderungan umum yang ada. Orang yang berasal dari Jawa-Kendari yang dibesarkan di Kendari, orang lebih cenderung mengkategorikannya sebagai 'orang Kendari'. Orang yang dari Tolaki-Buton, melihat perilaku orang tuanya yang tinggal di bumi Kendari merasa sebagai 'lebih Tolaki'. Orang Bugis-Makassar yang dibesarkan di Kendari merumuskan dirinya sebagai 'orang Kendari' karena menganggap dirinya bisa menyesuaikan diri dengan kultur Kendari.

Apa yang diungkapkan oleh La Ode Munadora di atas dapat memberikan gambaran bahwa pemaknaan etnis yang bertempat tinggal di suatu wilayah diharapkan agar dapat lebih mengetahui permasalahan apa yang ada di daerah bersangkutan. La Ode Munadora mengatakan sebagai berikut:

Kita berharap bahwa jika seseorang itu sudah lama domisili di tempat tersebut, maka ia sudah mengerti denyut nadinya daerah bersangkutan. Jadi kalau ada orang yang lahir di Muna, tetapi ia tidak dibesarkan di Muna maka tentu perilakunya akan lain. Demikian juga dengan orang Buton, orang Jawa, orang Bugis yang sudah lama di Kendari, yah dengan sendirinya sudah dapat dikatakan putera daerah Kendari. Contoh praktis saja, seperti bapak (peneliti, maksudnya), yang sudah lama hidup di daerah, sebetulnya sudah dapat saya katakana orang putera daerah dan mewakili daerah Sulawesi Tenggara. Tetapi, jika ada adik bapak, atau saudara-saudara bapak yang tiba-tiba ingin ditampilkan sebagai wakil kami, maka tentunya itu lain, karena ia tidak tinggal di daerah ini (wawancara, 7 Agustus 2003).

Apa yang dikatakan La Ode Munadora di atas tidaklah berlebihan, karena siapapun juga-- entah itu etnis Jawa, Buton, Bugis dan sebagainya-- yang sudah lama menetap di Kendari dengan sendirinya orang tersebut sudah dapat mengetahui dinamika sosial di daerah tersebut. Definisi tersebut lebih

inklusif dibanding dengan pengkategorian etnis atas dasar kelahiran. Akan tetapi yang menjadi misteri bagi penulis adalah persepsi yang dipahami- yakni yang inklusif- tidak konsisten dengan perilaku La Ode Munadora yang eksklusif. Ada perilaku ambiguitas pada elite parpol.

Perilaku eksklusif dengan menonjolkan fanatisme ke-Muna-an La Ode Munadora tampak dari perilakunya sebagai ketua parpol yang lebih menonjolkan etnis dan kliknya. Para aktivis partai umumnya terdiri atas sesama etnis, kerabat, dan keluarga. Apabila kader partai ingin “jadi”, salah satu cara yang dipraktikkan adalah dekat dengan La Ode Munadora dan menunjukkan loyalitas kepadanya.

Bukti pentingnya loyalitas pengikut dapat dilihat pada sosok La Ode Raha. Ia orang kepercayaan La Ode Munadora yang melaksanakan fungsi sekretaris. Padahal, di struktur pengurus ada Hermanto, sebagai sekretaris tetapi fungsinya lebih bersifat simbolik, bukan riil. Sebagai penentu dan yang mengatur roda organisasi sesungguhnya adalah La Ode Raha.

‘saya berada di sekretariat partai sekitar pukul 10.15 pagi. Waktu itu La Ode Munadora baru bangun tidur, masih memakai sarung, pakaian kaos singlet sambil merokok. Di sudut ruangan, La Ode Raha melalui telepon di sekretariat menghubungi pengurus DPC PDI-P di Buton mengenai waktu pembukaan konferensi cabang. Dari percakapan La Ode Raha dikatakan bahwa untuk waktu yang lowong bagi informan (La Ode Munadora) yakni hari Senin-Jum’at (10-15 Agustus 2003, peneliti). Setelah La Ode Raha menelpon di Buton, kemudian memberitahukan La Ode Munadora perihal waktu pembukaan acara musyawarah di Bau-Bau. Selanjutnya, La Ode Munadora berkata, ‘Aca hubungi DPP’. Selang beberapa waktu La Ode Raha berhasil menghubungi hp seseorang yang bernama Jacobus. Lalu, La Ode Raha memanggil La Ode Munadora. ‘Dari Jacobus’, kata La Ode Raha La Ode Munadora berdiri untuk berbicara dengan Jacobus. Adapun inti dalam pembicaraan adalah : ‘merdeka. Pak Jacob saya sudah memasukkan di panitia anggaran dan juga Bappenas. Nah, kalau bisa diintiplah itu barang. Pak, Jacob. kalau ada waktu dilihat-lihatlah kami

karena akan menyelenggarakan Konferda Kabupaten Buton. Waktunya mungkin tanggal 15. La Ode Munadora dan pak Jacob tampaknya tawar menawar waktu. Pada akhir pembicaraan tampaknya kesepakatan waktu untuk pelaksanaan konferda di DPC PDI-P Bau-Bau adalah tanggal 12 s.d. 15 Agustus 2003. Selesai menerima telepon, La Ode Munadora lalu kembali ke tempat duduknya dan bercerita tentang berbagai hal. Usai menelepon ke Jakarta, La Ode Raha lalu menulis jadwal aktivitas La Ode Munadora di papan tulis yang letaknya tidak jauh dari meja telepon' (Pengamatan, 31 Juli 2003).

Sebetulnya, Hermanto sendiri kurang puas dengan cara yang dilakukan oleh La Ode Munadora. Salah satu hasil keputusan Muswil DPD Sulawesi Tenggara adalah untuk tugas-tugas intern diserahkan kepada sekretaris partai, sementara ketua partai yakni lebih banyak diharapkan bertugas untuk tugas ekstern yakni lobi ke berbagai pihak. Akan tetapi, dalam perjalanan kepengurusan, La Ode Munadoratidak pernah memberinya tugas. Akibatnya, ia malas datang ke sekretariat. Ia "diparkir" dan diputuskan untuk tidak diberi peran sebagai sekretaris. Tugasnya diambil alih oleh La Ode Raha. Uniknya, Hermanto yang kurang puas tidak pernah melakukan perlawanan kepada La Ode Munadora.

Perekrutan orang kepercayaan atas dasar kesamaan etnis tersebut dapat diberi makna sebagai salah satu cara elite untuk mendapatkan "orang kepercayaan" yang bisa loyal di tengah-tengah maraknya pengurus partai yang biasa menjual namanya untuk kepentingan/keuntungan pribadi (wawancara, 31 Juli 2003). "Penjualan nama" yang dilakukan oleh pengurus dalam pandangan La Ode Munadora cukup merugikan partai

Atas dasar kepercayaan ini pula, etnis Muna banyak mengandalkan hubungan-hubungan itu untuk memperoleh suatu order pekerjaan. Cara-cara

yang sangat pribadi digunakan, seperti misalnya meminta La Ode Munadora untuk memperkenalkan dirinya kepada orang penting di suatu instansi.

Jalur-jalur impersonal seperti iklan dan promosi jarang digunakan. Atas dasar kepercayaan sesama etnis pula yang digunakan La Ode Munadora dalam memperoleh legitimasi dari pendukungnya di parpol. Ia menjelaskan bahwa salah satu hambatan etnis Muna di Kendari adalah keberadaan para pendatang dari *kampoeng* Muna yang pada umumnya mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah sehingga kompetensinya tidak memadai dalam bersaing dengan etnis lain. Dengan alasan itu, etnis Muna terjun ke sektor yang membutuhkan "otot", seperti menjadi kuli buruh di pelabuhan, tukang pikul, dan sopir. Sebagian juga mereka masuk ke parpol, dan pilihannya salah satunya ke PDI-P. Di partai ini, La Ode Munadora banyak "menyalurkan" orang Muna untuk berakses pada pusat-pusat kekuasaan.

Akibat perilaku tersebut, ada tuduhan yang mengungkapkan bahwa PDI-P sebagai "Partainya Orang Muna". Tidak main-main, karena hal itu berasal dari sesama fungsionaris PDI-P sendiri, yakni Munabim. Terhadap tuduhan tersebut, La Ode Munadora tidak keberatan. Ia bahkan terang-terangan mengakui bahwa dirinya sudah lama berjuang dan prihatin kondisi orang Muna. Inilah pernyataannya:

'kalau bukan saya lagi yang pimpin PDI-P Sultra, kasihan orang-orang Muna yang ada di Kendari', tegasnya. Saya kasian orang-orang Muna di Kendari banyak yang menjadi buruh di pelabuhan, sopir pete-pete, tukang pikul di pasar, penjual ikan sampai pembantu rumah tangga. Para pengusaha yang sukses tidak banyak orang Muna, hanya segelintir saja. Lalu, di daerah Muna, setelah Ridwan BAE tampil sebagai Bupati banyak menebang hutan dengan alasan untuk meningkatkan PAD. Banyak kayu-kayu penduduk yang disita oleh aparat tanpa dokumen yang sah' (wawancara, 2 Agustus 2003).

Lebih lanjut dikatakan oleh La Ode Munadora:

'pada saat-saat orang di Muna banyak menanam jambu mente, suatu waktu ada upaya dari pengusaha tertentu masuk di Muna untuk membeli jambu dengan harga yang dipatok Rp. 900 per kg dan harus melalui koperasi. Pengusaha tersebut lalu tinggal membeli melalui koperasi. Padahal harga saat itu sudah mencapai Rp. 1500-Rp. 1600 . Nah, pada waktu itu Saya sendiri, bersama Ndui, La Kuli, Aripong mempengaruhi masyarakat agar jangan mau menjual ke pengusaha tersebut atau koperasi karena harganya dipasaran adalah Rp. 1500 – Rp. 1600. Kami berempat berkeliling di Muna sambil kontak ke Jawa untuk mendatangkan pembeli dengan harga Rp. 1.500-an. Saat itu ada pengusaha dari Semarang yang datang. Lalu, ketika mereka membeli, kami kawal. Suatu hari, tiba-tiba kami kami didatangi oleh orang Kodim. Mereka bermaksud menangkap kami berempat dan mengatakan bahwa tidak akan kembali kalau tidak membawa kami dengan alasan melawan pemerintah. Kami katakan, kami tidak melawan pemerintah, lalu kami jawab bahwa kita hanya membela kepentingan rakyat. Tapi karena dari Kodim sudah berkawan dan kenal dengan baik akhirnya diambil jalan kompromi, kami tetap kesana tetapi tidak menumpang mobil yang *bombe-bombe* (maksudnya mobil dengan bentuk saling membelakangi) itu. Sebab kalau kami menumpang mobil dari Kodim itu sama dengan mengumumkan kepada masyarakat bahwa kami menjadi pesakitan. Kami menggunakan mobil sendiri . Akhirnya kami datang sendiri dengan kerelaan. Waktu itu hari sodoh sore, sekitar pukul 17.00. Malamnya mereka sudah memeriksa kami. Pada pemeriksaan itu, kami pertanyakan apa kesalahan sehingga Kodim menahan kami. Mereka tidak mempunyai alasan dan kami pun berkeras. Akhirnya kami dilepas. Waktu itu sudah pukul 04.00 subuh. Lalu, kami pergi cari makan karena sudah lapar. Pukul 05.00 subuh kami kembali ke Wakuru (nama kampung informan, peneliti) dan menginformasikan bahwa kami tidak apa-apa. Padahal sebelumnya pada pukul 03.00 dinihari sudah banyak masyarakat yang datang. Orang kampung sudah berkumpul di rumah kami dan mempertanyakan bahwa apakah kami ditahan atau tidak. Dan percakapan kami malam itu dengan orang di kampung mereka mengatakan kalau ditahan, akan banyak orang yang berada di belakang pak La Ode. Perjuanganpun kami saat itu yakni agar masyarakat dapat menjual ke tempat lain, bukan ke koperasi. Mungkin itu yang menonjol sehingga masyarakat melihat kami tidak pamrih dalam memperjuangkan mereka. Untuk sekarang ini, pak saya sementara menanam jati di atas lahan rakyat yang kira-kira luasnya 150 hektar dengan sistem bagi hasil. Saya kira ini tidak gampang untuk membiayai. Hal itu disebabkan karena biaya yang dikeluarkan per hektar adalah antara Rp. 10-15 juta per hektar. Lalu jika sudah menghasilkan adalah dibagi dua yakni antara saya dengan para pemilik masing-masing. Padahal jika saya mau, toh dapat menanam sendiri di kebun sendiri' (wawancara, 5 Agustus 2003)

Pernyataan di atas memberi kesan kepada penulis bahwa etnis Muna adalah etnis yang tersisihkan dari sisi sosial, ekonomi, dan politik. Hutan di Muna yang selama ini menjadi andalan daerah, kini sudah gundul.<sup>5</sup> Hutan di Muna menjadi gundul karena banyak penebangan liar yang dilakukan secara terang-terangan tanpa rasa takut dan beban apa pun. Penebangan dilakukan dengan maksud untuk memperluas lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Namun, sesudah penebangan itu, bukanlah lahan-lahan pertanian dan perkebunan yang diperoleh, tetapi justru penggundulan hutan. Sebetulnya, pemerintah sudah memikirkan usaha reboisasi. Namun, karena reboisasi ternyata kurang sungguh-sungguh dilaksanakan, maka tak ada perubahan berarti yang dihasilkan.

Banyak penebangan yang dilakukan, tetapi ironisnya orang Muna menikmati keuntungan yang kecil dari hiruk pikuknya penebangan kayu. Keuntungan besar justru diperoleh oleh pengusaha hutan, sementara orang Muna hanya menikmati sebagian kecil saja. Aparat keamanan dan mereka yang ditugasi tidak mampu mencegah perusakan hutan yang parah. Barangkali, lantaran melihat akibat seperti itu, La Ode Munadora menuduh Bupati dan segenap jajaran pemerintah daerah yang lain di Muna ingin meraup dana yang besar dari penebangan dan pembabatan hutan. Rupanya, apa yang dikemukakan La Ode Munadora di atas senada dengan apa yang dituturkan

---

<sup>5</sup> Padahal, sebelum kedatangan Belanda, luas hutan jati diperkirakan 82 426 ha. Dalam kurun waktu 1911-1950, kayu jati mulai ditanam dengan luas tanaman 3 500 ha. Sebuah perusahaan asing bernama *verenigde Java Hout Maatschappij* mendapat konsesi untuk mengolah kayu jati di Muna. Pada saat ini, Jawatan Kehutanan Sultra yang berpusat di Raha telah memiliki penggergajian kayu. Produksinya mencapai 1 850 m<sup>3</sup> kayu jati gergajian (reng, kasan, papan) dan 700 000 lembar atap setiap tahun.

oleh sejumlah elemen organisasi pemerintah (omop). Jaringan Advokasi Jati Sultra (JAJS), untuk menyebut salah satu diantaranya, salah satu omop yang juga dikenal banyak orang mendesak untuk mengungkap bahwa kerusakan hutan di Muna akibat dari ulah pemda di Muna dengan penyalahgunaan wewenang. Tanpa menyebut kapan pastinya tahun penebangan hutan. JAJS menyatakan selama ini ada penyelewengan dana hasil lelang sekitar Rp. 3,524 miliar. Bahkan, aparat pemerintah lainnya juga menerima bagian dari dana hasil lelang.<sup>6</sup>

Kekecewaan orang Muna bertambah besar akibat pemerintah daerah tidak mampu untuk menindak para penebang hutan tersebut. Akhirnya orang Muna menebang pohon secara liar. Hal ini disebabkan karena lemahnya kontrol terhadap pelaku penebang hutan bercampur baur dengan kurangnya lapangan kerja dan lemahnya kondisi ekonomi masyarakat selama ini. Padahal, pada zaman Kerajaan Muna, tidak seenaknya orang dapat menebang hutan, harus ada izin dari *surano wite*. Jika tidak meminta izin, dapat dikenakan hukuman berat (La Ode Rauf, 1999:129)

Walau etnis Muna *powerless* dan *inferior*, tetapi etnis Muna mampu tahan menderita karena ada norma gotong royong yang tercermin pada prinsip *poma-masighoo* (saling mengasahi), *pomoo-moologhoo* (saling menjaga), *popta-ptara* (saling memelihara). Sikap tersebut akan lebih tampak di daerah perantauan, seperti Kendari. Daya tahan etnis Muna itu kuat karena secara fisik

---

<sup>6</sup> Pada saat penelitian, Kejaksaan Negeri Raha sudah menetapkan sejumlah terdakwa dalam kasus Korupsi Lelang Kayu Jati. Sudah ada tiga nama yang menjadi terdakwa yakni La Arief Aty Malefu, La Udi Kudu, dan Simon Mahuri

kondisi badan mereka "tahan cuaca". Etnis Muna kulitnya agak hitam, berotot, tulang pipi yang kelihatan menonjol keluar. Bentuk tubuhnya hampir sama dengan etnis Buton.

#### **5.4 Pengkategorian Etnis Muna menurut La Ode Munasir**

Pengkategorian etnis Muna dalam pandangannya didasarkan atas kelahiran, pengenalan, dan menghargai masyarakat. Dari unsur-unsur tersebut, tampaknya ide utama tentang etnis adalah atas dasar kelahiran. Ini berarti pengkategorian sama dengan kriteria Munajab.

Tampaknya perhatian utama La Ode Munasir, setidaknya pada saat penelitian berlangsung lebih memusatkan perhatian pada keterwakilan etnis Muna dalam politik lokal. Secara implisit, sebenarnya ia ingin agar etnis Muna menjadi *primus enterprises* dengan alasan bahwa etnis Muna termasuk kategori etnis asli di daerah Sulawesi Tenggara. Ia prihatin, karena dibanding etnis-etnis lain, etnis Muna masih tertinggal.

Selanjutnya ia menyebutkan, jika ingin memahami Muna hendaknya melihat salah satu yang khas di Muna yakni goa (*cave*). Apa yang dikemukakan La Ode Munasir tentang goa, berdasarkan catatan yang penulis peroleh dari Diknas, di Muna saat ini ada 114 goa. Dari jumlah itu, ada 10 goa yang memiliki lukisan. Lukisan utama di goa itu antara lain lukisan manusia dalam berbagai posisi seperti adegan berkelahi, menari, menunggang kuda, manusia terbang, dan berMunajabu. Ada pula lukisan binatang selain kuda yakni rusa, rusa dalam posisi tertombak, anjing, biawak, perahu, dan matahari.

Penelitian goa yang memiliki lukisan telah dilakukan Bidang Prasejarah Pusat Penelitian Arkeologi Nasional sejak tahun 1977. Penelitian itu dilanjutkan pada tahun 1984, 1986, dan 1994. EA Kosasih, peneliti senior dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yang memimpin survei, menyebutkan berbagai motif lukisan yang tertera pada dinding-dinding goa memiliki karakteristik yang khas Muna.

Dalam laporan hasil penelitian itu juga disebutkan, lukisan goa di Indonesia secara garis besar dibagi menjadi empat gaya lukisan yakni gaya lukisan Sulawesi Selatan (Maros dan Pangkep), gaya Sulawesi Tenggara (Muna), gaya Tomir Timur (Tutuala), dan gaya Maluku Irian (Pulau Seram, Kepulauan Kei, Pulau Waigeo, Teluk Bintuni, Teluk Saireri, dan Tanjung Bitsyari). Gaya Muna, memiliki ciri tersendiri yakni sederhana, naturalistik, dan dinamis.

Bentuk dan objek lukisan yang tertera di dinding Goa Metanduno sangat bervariasi. antara lain lukisan manusia dalam berbagai posisi dan gerak seperti adegan berkelahi, menari, menunggang kuda, manusia terbang, dan berMunajahu. Ada pula lukisan binatang selain kuda yaitu rusa, rusa dalam posisi tertombak, anjing, biawak, perahu, dan lukisan matahari.

Di Goa Metanduno ada lukisan kuda berukuran agak besar dengan dua orang penunggang. Lukisan ini menggambarkan adegan perkelahian. Penunggang yang duduk di depan sedang mengencangkan tali kekang agar kuda yang ditunggangi berlari lebih cepat ke arah sasaran. Di lukisan lain, masih di dinding sebelah kanan Goa Metandano, terlihat seorang penunggang kuda sedang mengangkat tombak untuk dilontarkan ke sasaran dari atas

kudanya. Lukisan lain yang juga cukup dinamis adalah gambar perahu layar lengkap dengan awaknya. Semua lukisan ini tersebar di dinding gua yang jumlahnya mendekati 100 lukisan. Gambar yang paling besar berupa kuda yang dikendarai oleh dua orang dengan panjang kira-kira 1,5 meter. Yang aneh adalah banyaknya lukisan yang terdapat di langit-langit gua yang tingginya 2,5-3 meter, sehingga sukar dijangkau.

Sementara itu, lukisan bernuansa romantis terlihat pada gambar manusia sedang berpelukan, mungkin sedang bermesraan. Di Goa Wa Bosc terdapat pula lukisan kelamin wanita. Wa Bosc mencerminkan nama wanita dalam masyarakat Muna dan Buton. Goa tersebut diberi nama yang berkonotasi wanita sesuai dengan objek lukisan yang ada di Muna.

Berdasarkan motif lukisan yang ada di dinding tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa etnis Muna sudah lama memiliki peradaban. Penggunaan tombak, misalnya, dengan asumsi bahwa tombak itu terbuat dari logam yang mencerminkan pendukung peradaban etnis Muna sudah selangkah lebih maju dari teknologi batu. Dengan kata lain, peradaban etnis Muna telah mengalami transformasi dari teknologi batu ke teknologi logam. Semua lukisan di gua tersebut menggunakan bahan yang sama, yakni dari tanah yang berwarna batu bata (Thamnn, 1978:2).

Atas dasar peninggalan sejarah itu, La Ode Munasir suka mengangungkan peradaban Muna. Hanya saja ia mengeluh, etnis Muna jika sudah merantau sulit untuk bersatu. Etnis Muna di kantor tidak ingin memakai saluran-saluran etnis untuk merekrut pegawai-pegawai baru dalam kantor-kantor mereka. apapun posisinya. Mereka berusaha adil terhadap semua

kelompok etnis lain. Contoh terbaik yang diajukan La Ode Munasir dalam hal ini ialah Alala. Selama masa jabatannya (1982–1992) sangat sedikit etnis Muna ikut di dalam pemerintahannya. Dia ingin menegakkan tradisi baru dalam perkrutan yang adil dan menghindarkan tuduhan-tuduhan “Munaisasi”.

Sikap Alala sendiri sebetulnya dipuji oleh banyak pihak, dan dianggap dijadikan contoh bagaimana seorang elite mengelola pemerintahan dengan prinsip keseimbangan antaretnis di jajaran pemerintahannya. Namun ia dikecam oleh kelompok etnisnya sendiri karena dianggap “buta akan aturan permainan”. Mereka menilai Alala ingin menghancurkan struktur kebangsawanan di Muna. Dalam kedudukannya sebagai gubernur, ia mengangkat Maola Daud sebagai Bupati Muna dan ketika menjalankan tugas sebagai Bupati, Maola Daud banyak mengecewakan bangsawan lokal etnik Muna.

“Daftar dosa” Alala yang tidak bisa dilupakan La Ode Munasir adalah tidak diberinya kesempatan etnik Muna menjadi *the ruling elite* dalam jajaran birokrasinya. Ia menyebut ketika itu yang menjadi Kepala Dispenda Hamsuddin (etnik Bugis), Wakil Gubernur Soejatmiko (etnis Jawa), Ketua Bappeda Ady Mangilep (etnik Minahasa), anggota-anggota DPR yang duduk mewakili Sulawesi Tenggara seperti Agung Laksono, Siswono Yudohusodo, semua bukan etnik Muna, bahkan mendatangkan etnis Jawa ke Sulawesi Tenggara.

Puncak kekesalan etnis Muna kepada Alala adalah di penghujung masa tugasnya sebagai gubernur. Alala masih ingin meminggirkan etnis Muna, termasuk etnis asli dari arena pencalonan Gubernur Sulawesi Tenggara dengan

memaksakan Sholeh Solahuddin. Rektor Unhalu saat itu, yang berlatar belakang etnis Sunda untuk menggantikannya. Saat ia dihujat dan dicaci maki oleh banyak orang, tokoh dari etnis Muna tidak membelanya.

Dari apa yang diungkapkan oleh La Ode Munasir di atas, dapat ditarik generalisasi bahwa etnis Muna selama beberapa waktu mengalami fenomena ketidakberdayaan (*powerlessness*) yang ditandai oleh ketidakmampuannya mengontrol kejadian di sekitarnya. Hal itu terjadi karena adanya hegemoni dan dominasi struktur yang amat kuat. Ada kesulitan etnis Muna untuk menghadapi tuntutan perubahan sosial. Terlebih lagi orang Muna yang menjadi "Suftra-1" justru mengecewakan etnisnya sehingga tidak merasa punya kekuatan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Kekuatan etnis Muna tertekan dan terjadi kesulitan untuk mengekspresikannya.

Di tengah kegalauan itu, tiba-tiba datang orde reformasi, memberi peluang bagi etnis Muna untuk mewujudkan *political representation*<sup>7</sup> di arena politik lokal. Institusi yang dipilih untuk mewujudkan hal tersebut adalah PDI-P. Mengapa ke PDI-P, bukan ke organisasi politik lain? Bukankah ada Partai Golkar yang bisa lebih menjanjikan untuk lebih menampung *political representation* orang Muna karena suaranya lebih besar? Di antara sekian banyak alasan, satu diantara yang paling penting karena di organisasi ini sudah lama dihuni oleh etnik Muna.

---

<sup>7</sup> Konsep ini didasarkan atas pandangan bahwa idealnya dalam sistem politik, di arena tersebut harus "memp" dan "mencerminkan" kelompok etnis yang ada. Jika sistem politik lokal tersebut berbeda dengan komposisi etnis yang ada, maka sistem tersebut tidak dapat dipandang sebagai perwakilan seluruh kelompok etnis. Penulis sendiri menginterpretasikan bahwa kata "political representation" dalam suatu etnis adalah salah satu elemen demokrasi dalam suatu masyarakat tertentu, karena suara etnis terdapat berbagai aspirasi.

Ia menceritakan bahwa masuknya ke partai karena diajak oleh iparnya sendiri, yakni La Ode Kapita. Ketertarikannya pun bukan karena platform partai, tetapi karena alasan emosional. Sebelum bergabung ke PDI-P secara resmi, ia bersama La Ode Kapita sering mengawal La Ode Munadora ketika ke Kolaka, Muna, Buton, dan Jakarta. Ketika mendampingi, walau tidak menjadi anggota partai, tetapi setiap kader partai yang ingin menemui La Ode Munadora, mesti atas "restu" La Ode Munasir. Fakta ini menunjukkan bahwa pertimbangan emosional lebih dominan dari pertimbangan rasional dalam preferensi tindakan seseorang dalam memilih suatu partai.

### **5.5 Pengkategorian Etnis Muna menurut Munabil**

Munabil dalam melakukan generalisasi tentang etnis Muna lebih banyak diwarnai oleh pemikiran politik. Tidak ada definisi dari Munabil dalam menjawab apa arti etnis Muna. Ia lebih menekankan pada *political representation* dengan mengilustrasikan pada pemilihan Walikota Kendari. Menurut Munabil, dalam pemilihan walikota yang lalu, ada kecemburuan etnis Tolaki terhadap etnis Muna. Hal itu disebabkan karena ketika La Ode Kaimuddin menjadi gubernur ia banyak menempatkan orang Muna di jabatan-jabatan strategis di kantor Walikota Kendari. Itu nampak sebelum Masyhur terpilih sebagai Walikota Kendari periode tahun 1995. Berdasarkan informasi yang diperoleh Munabil dari La Ode Khalifa, ada kesepakatan antara La Ode Kaimuddin dengan tokoh masyarakat Tolaki bahwa untuk jabatan wakil

gubernur dan sekretaris wilayah akan diserahkan kepada orang Tolaki.<sup>6</sup> Akan tetapi, untuk jabatan Walikota Kendari akan diserahkan kepada orang Muna.

Menurut Munabil, etnis Tolaki sebenarnya tidak senang dengan pembagian seperti ini. Mereka menginginkan bahwa jabatan walikota yah harusnya dari Tolaki. Akan tetapi Kaimuddin tetap memaksakan orang Muna, yakni La Ode Lasjkar Koedoes untuk menduduki Plt. Jabatan Walikota Kendari Periode 1995--1996

Sebetulnya pada pemilihan walikota yang lalu, dengan kedudukan Munabil sebagai wakil sekretaris partai, ia aktif membangun aliansi dan kesepakatan dengan elite dari parpol lain sebagai wujud dari keinginan untuk menampilkan putera daerah sebagai pemimpin di daerah. Ir. Yani Muluk, salah seorang wakil ketua di Partai Golkar Kota Kendari, merupakan salah satu contoh kasus yang pernah membuat kesepakatan dengan Munabil agar walikota *harus putera daerah*. Dalam perkembangannya kemudian, Munabil menyesali sikap Ir. Yani Muluk tidak meyakinkan elite parpol lain yang ada di Partai Golkar tentang kesepakatan yang pernah dibuatnya. Partai Golkar memilih untuk mencalonkan Musakkir Mustafa sebagai wakil walikota. Padahal, jika diperiksa dukungan untuk Musakkir pada saat penjaringan amat minim dibandingkan dengan nama-nama lain. Munabil menduga, faktor penyebabnya adalah Musakkir banyak menyumbang uang ke partai tersebut karena ia seorang pengusaha.

---

<sup>6</sup> Jabatan Wakil Gubernur saat itu yakni Husein Effendy, etnis Tolaki dan jabatan Sekwilda yakni Des. Yokoyama Sinopay, etnis Tolaki

Ketika peneliti bertanya mengapa harus putra daerah menjadi pertimbangan, Munabil menjawab sebagai berikut :

'hal itu dimaksudkan agar suku yang lebih awal hidup di sebuah daerah bisa menjadi tuan dan tidak menjadi asing di kampung halaman sendiri. Kami menolak jika orang daerah disingkirkan secara sistematis sehingga hanya menjadi penonton ketika alam dan halamannya dijarah. Jadi hendaknya kami dapat menjadi tuan di kampung sendiri' (wawancara, 1 April 2003).

Keinginan partai ingin memunculkan orang daerah sendiri juga tetap melalui mekanisme intern PDI-P sendiri. Nama-nama itu digodok dulu di tingkat partai, lalu nama-nama itu diserahkan ke fraksi. Setelah nama itu diserahkan ke fraksi, informan tidak mengikutinya lagi. Hanya saja, hasil kesepakatan di intern partai, ada beberapa nama yang diusulkan seperti Umar Saranani, Masyhur Masie Abunawas, Buhari Matta, Haeruddin Pondiu. Lalu, yang kita incar adalah posisi wakil walikota yakni dengan memperjuangkan figur La Ode Khalifa. Partai tidak akan ngotot untuk mengambil posisi walikota karena jumlahnya yang tidak memadai di DPRD. Guna merealisasikan misi partai tersebut, Munabil pernah bersama Munajab menghadap Masyhur untuk mensosialisasikan nama La Ode Khalifa. Mereka beralasan bahwa calon yang diperjuangkan mempunyai *track record* yang baik. Calon itu sudah berpengalaman di pemerintahan karena birokrat senior di Bappeda. Dalam kesempatan yang lain, Munajab ketemu ulang dengan kapasitas sebagai Ketua Fraksi. Akan tetapi, Masyhur tetap pada pendiriannya yang memilih figur lain sebagai wakil walikota.

Dalam pengamatan Munabil, wacana putera daerah cukup banyak diungkapkan oleh aktor-aktor di tingkat lokal, terutama orang Tolaki. 'Yah, mungkin karena merasa Kendari di sini adalah wilayahnya. Secara psikologis hal tersebut berpengaruh', ujarnya. Mengenai kriteria putera daerah, Munabil memberi ilustrasi sebagai berikut :

'pernah ada orang yang datang kepada saya dan mengungkapkan bahwa walikota kendari itu harus dipimpin oleh putera daerah. Lalu saya kembalikan apa arti dari putera daerah. Yah ia tidak biasa jawab. Lalu, saya tanya apa kalau bapaknya saja yang lahir disini bagaimana ? Jawabnya, boleh. Lantas, kalau ibunya, iya jawab boleh juga. Neneknya, juga boleh, kakeknya juga boleh. Dari jawaban orang tersebut saya berkesimpulan bahwa rumusan yang disampikannya sifatnya masih umum saja'. (wawancara, 7 April 2003).

Apa yang diungkapkan oleh Munabil di atas menunjukkan bahwa salah satu cara untuk membedakan apakah seseorang dikategorikan sebagai putera daerah atau bukan dapat dilihat dari latar belakang geneologis orang tersebut. Jika orang tersebut lahir di Jawa, tetapi bapak, ibu, kakek, dan nenek berasal dari Kendari, orang tersebut masih dikategorikan putera daerah. Demikian pula sebaliknya, jika ada orang yang lahir di Kendari, tetapi bapak, ibu, kakek dan nenek berasal dari Jawa tidak serta orang tersebut dapat dikategorikan sebagai putera daerah. Oleh karena itu, tempat kelahiran tidak serta- merta dapat mengubah pengkategorian identitas sebagai putera daerah seseorang.

Suatu pengkategorian yang diturunkan dari pernyataan Munabil di atas, seseorang dapat dikatakan sebagai etnis asli adalah dengan campur baur. Meskipun dengan tegas bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai etnis asli berdasarkan identifikasi mereka dengan garis keturunan, tetapi apakah

memiliki garis keturunan bapak atau ibu? Ada identifikasi keturunan yang lebih kuat dengan garis keturunan bapaknya tetapi ada pula yang mengikuti identifikasi yang lebih kuat dengan mengikuti garis keturunan ibunya. Dalam perkawinan silang antaretnis, jika ada pertanyaan 'kamu itu dari mana', maka biasanya anak tersebut akan menjawab, 'bapak saya dari A dan ibu saya dari B'. Jadi dapat dikatakan, jika memperhatikan asal usul seseorang dapat ganda.

Tersirat pula dari uraian di atas bagaimana cara sosialisasi diri yang dilakukan oleh Munabil ketika pertama kali berhadapan dengan orang. Jika sesama etnis Muna, ia mengaku lebih banyak menggunakan bahasa Muna. Di rumah, karena istrinya juga dari Muna, juga banyak menggunakan bahasa Muna. Dalam aktivitasnya sebagai elite parpol, ia hanya menggunakan bahasa Muna dengan orang-orang Muna yang ada di PDI-P seperti Munajab, La Wama, Darman, St. Saymsiar, La Ode Munasir, La Ode Munadora. Itupun dengan melihat suasananya. Sementara dengan pengurus dari non-Muna, ia cenderung menampilkan dialek bahasa Indonesia sebagai medium komunikasi satu sama lain. Dalam konteks ini, Munabil memilih dan menunjukkan identitasnya dengan memperhatikan situasinya.

Bagi Munabil sendiri, perbedaan antara etnis Muna dan bukan etnis Muna tidak menjadi masalah. Ia toleran terhadap perbedaan-perbedaan latar belakang etnis tersebut, bahkan akan mengelolanya guna menunjang kinerjanya sebagai elite parpol. Dalam interaksinya dengan komunitas lain dari basis etnis lain, ia memosisikan diri setara. Ini berarti ia tidak akan mengklaim bahwa etnis Muna memiliki kebudayaan yang paling sempurna. Dengan sendirinya, hubungan-hubungan yang dilakukan oleh Munabil

terbangun atas prinsip saling menghargai dengan etnis lain, yang pada dasarnya juga merupakan konsep dari perwujudan nilai etnis Muna saling memelihara (*papia-pura*), dan saling mengasihi (*pomoo mologho*). Atau dengan kata lain, menurut pemahaman Munabil, ia mengembangkan membangun parpol di atas jaringan dan hubungan antar etnis yang berbeda.

Munabil mengungkapkannya sebagai berikut :

Jika kita melihat dari hasil sensus kemarin mengenai jumlah penduduk dan etnis yang ada di Kota Kendari, menurutnya penduduk yang paling besar yakni orang Muna ada sekitar 80 %<sup>9</sup> sehingga fokus perhatian lebih mengarahkan pada orang Muna ini. Kami mempunyai kalkulasi dengan berdasar hasil pemilu 1999, pemilih dominan PDI-P yakni orang Muna, Tator, sebagian Bugis dan Tolaki. Para Cina rupanya banyak juga yang memilih kita. Nah, dengan adanya hasil-hasil seperti itu maka kita rekrut orang Muna, dan Tator. Jika kita bertemu dengan orang Tator kami katakan bahwa partai ini perahunya orang Tator. Jika ketemu dengan orang Muna maka kami katakan ini perahunya orang Muna. Untuk orang Tator kita menjual Zeth dan mereka mengenal baik tokoh ini. Lalu mereka katakan kenapa hanya satu, kenapa tidak ditambah. Nah ketika mereka mengatakan itu, saya yah kalau itu itu aspirasi bapak serahkan saja nama itu yang penting itu adalah orang yang bapak anggap sebagai tokoh etnis bapak. Tapi sampai sekarang mereka belum menyerahkan ke Munajib. Jika orang Tolaki kami sudah merekrut pak Buttu Malaka. Untuk Tolaki ini sulit karena sebagian besar mereka ada di Golkar. Untuk di DPRD, Tamrin kita anggap mewakili etnis Tolaki. Sebetulnya orang ini adalah sudah campur baur karena ibunya dari Buton tetapi bapaknya dari Tolaki. Tetapi dengan gebrakan-gebrakannya di DPRD mendapat cukup simpatik dari orang Tolaki. Untuk etnis Buton sebetulnya ada pak Anami, tetapi sampai saat ini belum ada alternatif orang Buton. Yang berat, kita yang dari Muna ini. Soalnya, persaingan antar orang Muna juga berat karena orang Muna berada di partai-partai lain. Di PAN ada Abu Hanifa. Di Golkar, tidak ada orang Muna yang menjadi pengurus teras. Lalu, orang Muna itu kalau berpolitik, tidak melihat lagi saudaranya dimana, karena orang-orang Muna begitu tergiur dengan uang. Siapa yang bisa memenuhinya itu, yah kesitulah aspirasinya (Wawancara, 12 Maret 2003).

<sup>9</sup> Angka prosentase ini sebetulnya tidak benar berdasar data yang dikeluarkan oleh BPS, prosentase etnis yang paling besar populasinya di Kota Kendari untuk daerah perkotaan yakni berturut-turut Bugis, Muna, Tolaki. Sementara daerah pedesaan yakni Tolaki, Muna dan Bugis.

Apa yang diungkapkan oleh Munabil di atas dapat dipahami bahwa ternyata elite parpol mempergunakan cara politik akomodasi dengan cara merekrut tokoh dari masing-masing etniknya. Direkrutnya seseorang menjadi fungsionaris dengan sendirinya membuat orang tersebut berusaha memobilisasi para pengikutnya untuk memilih partai. Hal itu dapat dimaklumi karena kecenderungan umum orang untuk memilih partai digerakkan oleh loyalitas, rasa cinta, rasa hormat, atau rasa takut terhadap elitnya, atau hasrat untuk memperoleh manfaat-manfaat yang pengikut percaya dari elite bersangkutan.

Perilaku akomodatif di atas tidak mengurangi rasa kebanggaannya terhadap perasaan ke-muna-annya. Munabil bangga akan identitas ke-muna-annya. Ia mengungkapkan bahwa, 'orang Muna sangat terbuka, jika orang Muna makan, pintu rumahnya tidak ditutup', katanya. Ini mengandung makna agar orang yang datang berkunjung ke rumahnya dapat langsung bergabung untuk makan bersama dengan tuan rumah. Walau orang Muna itu kalau berbicara besar suaranya, tetapi sesungguhnya hatinya itu lembut. Berbeda dengan orang Buton, mereka itu tertutup, walau kelihatannya seperti orang yang halus dan kalau ngomong tidak keras, tapi hatinya tidak ditahu', ujarnya.

Pernyataan yang terakhir dari Munabil, yaitu tentang orang luar Muna, membangun sebuah kesatuan dari identitas Muna secara umum. Identifikasi orang Muna sebagai orang "keras kalau *ngomong*", tidak dengan sendirinya menempatkan orang Muna sepenuhnya dalam posisi inferior. "Keras *ngomong*", yang dalam konteks budaya lain adalah negatif -seperti kasar-, tetapi di dalam pemaknaan orang Muna sendiri justru menjadi positif, yaitu mengimplikasikan kejujuran.

Menurut Munabil, pekerjaan yang paling banyak disenangi etnis Muna di Kendari lebih mengandalkan "toto" ketimbang "otak". Oleh karena itu, mata pencahariannya lebih banyak terjun di sektor informal. Banyak juga, etnis Muna yang ingin terjun sebagai pedagang, tetapi mereka menghadapi suatu tantangan besar dari etnis Bugis dan Cina.

Pernyataan Munabil di atas dapat diinterpretasikan bahwa keengganan etnis Muna dalam memasuki sektor perdagangan karena ada dominasi etnis lain. Terdapat dua alasan sehingga etnis Muna tidak berhasil menckuni sektor ini. *Pertama*, pada awal-awal kedatangan etnis Muna ke Kendari (sekitar tahun 30'an), kebanyakan mereka bekerja sebagai Munajabuh. Ketika mereka ingin menggeluti bisnis ini, mereka membangun dari permulaan. Sementara saingan-saingan mereka dari etnis Bugis dan etnis Cina, menjadi lebih kuat. *Kedua*, terdapat kekurangan kemauan politis di kalangan pejabat-pejabat pemerintah untuk menghasilkan suatu kebijakan yang terencana guna mendukung pengusaha pribumi dan memberi perlindungan seperti yang diberikan oleh pemerintah kolonial terhadap etnis Cina. Tentu saja kurangnya kemauan politis ini berkaitan dengan posisi politis, ekonomis, dan ideologis etnis Muna ketika berhadapan dengan kelompok etnis lainnya, terutama etnis Tolaki yang menduduki posisi-posisi puncak birokrasi di Kendari.

Etnis Muna tidak punya tradisi yang kuat dan belum punya pengalaman memadai dalam membina hubungan penguasa lokal. Itu belum terjadi, dan karenanya belum banyak etnis Muna yang sukses sebagai pengusaha. Para penguasa lokal di Kendari, bisa memakai kekuasaan politis mereka untuk mempertahankan kepentingan orang-orang keturunan Cina. *Tauke-tauke* Cina

yang kaya membina hubungan-hubungan dengan pejabat-pejabat tinggi untuk melindungi kepentingan-kepentingan mereka. Hubungan-hubungan ini biasanya disebut cukong, yang artinya perantara atau pemberi modal Cina (Mackie, 1976:63).

### **5.6 Pengkategorian Etnis Muna menurut Andika**

Sebagai orang yang berasal dari etnik non Muna, dalam memaknai etnis Muna, Andika cenderung hati-hati. Sebagai etnik yang dikategorikan sebagai 'asli', ia berpendapat bahwa etnis Muna di Kendari memainkan peran penting dalam pembangunan. Kesempatan itu semakin terbuka seiring dengan otonomi daerah.

Dalam pandangan Andika, etnis Muna di Kendari tersebar bekerja di berbagai sektor, tetapi yang menonjol adalah sebagai sopir, buruh-buruh bangunan, tukang pikul. Etnis Muna unggul di sektor ini. Tetapi dalam sektor yang lain, misalnya perdagangan, etnis Muna tidak mampu bersaing dengan etnis Bugis dan Cina.

Sebagai seorang pebisnis, Andika mengungkapkan bahwa etnis Muna selama ini tidak tahan terhadap segala jenis cuaca dan serangan penyakit. Berbeda dengan etnis Bugis, mereka tahan untuk "berpanas-panasan" di pasar. Ia juga memperhatikan bahwa etnis Muna kadang-kadang tidak sanggup melakukan tugas terberat dalam keadaan yang paling sulit. Akhirnya, jika gagal dalam bekerja mereka cepat mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain.

Kegagalan etnis Muna mengembangkan bisnis seperti yang dikemukakan Andika di atas bisa jadi karena tidak banyak orang Muna yang memilih profesi sebagai usahawan. Di kalangan etnis Muna, ada ketidaksenangan menjadi wiraswasta. Ini terkait dengan situasi alam di Muna, daerah asalnya yang pekerjaan utama etnis Muna adalah bertani dan berkebun (Schoorl, 2003). Profesi itu pun tidak banyak mengangkat harkat martabat etnis Muna karena kondisi alamnya yang tidak subur,<sup>19</sup> dan berudara panas. Topografi Pulau Muna secara umum dapat dikatakan sebagai tanah datar dengan sedikit berbukit-bukit. Dari seluruh luas wilayah, 37% berada pada ketinggian antara 0–100 meter dari permukaan laut dan 44% antara 101–500 meter dan selebihnya berada pada ketinggian 501 meter ke atas. Kerja keras dianggap sebagai bukan hal yang baik di tengah udara panas yang membakar di daerah tropis. Akibatnya, banyak etnis Muna yang mununtutnya tetap tinggal di rumah atau meninggalkan Muna.

Di daerahnya yang baru, ia berhadapan dengan daerah yang karakteristik alamnya berbeda. Hal itu menuntut adanya penyesuaian diri terhadap perubahan itu. Akan tetapi, kemampuan untuk menyesuakannya tidak lebih cepat daripada perjuangan untuk kebutuhan hidup di Kendari. Etnis Muna lebih senang memilih bekerja sebagai tukang pikul atau buruh bangunan, karena di pekerjaan itu tidak banyak dituntut kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja.

---

<sup>19</sup> Jenis tanahnya sangat homogen. 87 % dari seluruh luas wilayah adalah jenis mediteran dan 13 % jenis alluvial. Demikian pula jenis batuan sangat homogen. 99 % adalah jenis batuan sedimen

Ada perasaan sarang surut dari etnis lain dalam memandang etnis Muna. Hal itu dapat dilihat dari ekspresi Andika. Kadang-kadang ia senang, tetapi di lain kesempatan ia tidak senang. Perasaan senang Andika terhadap etnis Muna disebabkan mereka tidak tamak dan rakus. Andika mencontohkan sebagai berikut. Jika etnis Muna diberi tanggung jawab, ia akan bekerja dengan semangat, dan bila sewaktu ia sudah mencapai apa yang ditugaskan, ia akan berhenti. Apa yang diungkapkan Andika tersebut, terlihat bahwa etnis Muna pada dasarnya baik budi, mereka dapat puas dengan apa yang telah dicapai, tidak banyak menuntut macam-macam.

Pada kesempatan lain, ada juga perasaan ketidaksenangannya pada etnis Muna. Menurutnya, etnis Muna sangat loyal terhadap sesama etnisnya sendiri. Akibatnya ada sikap-sikap eksklusif atas dasar etnis. Hal itu dirasakan Andika sendiri di PDI-P. Ada perasaan minoritas, dirinya etnis Bugis, di tengah mayoritas pengurus lain dari etnis Muna. Andika mengemukakannya sebagai berikut :

jika saat ini PDI-P dikuasai oleh orang Muna, itu adalah hal yang wajar, saya tidak ngotot, walaupun secara nasional ini tidak sesuai, tapi di daerah ini memang kelihatan lain. Jadi saya ingin mengerti dan dapat menerima realitas. Dengan memahaminya maka saya mengerti apa yang harus dilakukan di partai. Saya juga kan punya logika politik' (wawancara, 5 Maret 2003).

Dapat ditafsirkan bahwa ketidaksenangan Andika adalah perasaan minoritasnya. Hal itu diperburuk oleh perlakuan diskriminatif Munajab (Ketua PDI-P) yang lebih mempercayai Munabil sebagai eksekutor penting di partai. Ia diabaikan sehingga muncul prasangka buruk dalam pikirannya. Ketika ia diperlakukan tidak adil, dalam pandangannya, perlakuan itu tidak sesuai

dengan budaya Bugis yakni budaya *sipatuo sipatokkong*. Padahal, jika diberi kesempatan ia merasa lebih unggul dibanding Munajib. Secara kultural, budaya Bugis yang dianut oleh Andika tidak membenarkan perilaku Munajib.

Selain perilaku diskriminatif Munajib di atas, Andika tidak setuju dengan tuduhan terhadap etnis Bugis yang ingin menjadi "penjajah" di Kendari. Ia mencontohkan dirinya yang berprofesi sebagai wiraswasta, ada karyawannya dari Muna, Buton, Tolaki, dan ia sudah membangun rumah di Kendari. Lebih lanjut diuraikan oleh Andika bahwa dalam aktivitasnya sebagai warga masyarakat di Kelurahan Sodohoa, ia senantiasa aktif dalam setiap momen-momen yang dilaksanakan oleh warga sekitar rumahnya. Karena waktunya yang lebih banyak untuk mengurus usahanya, maka dukungan yang diberikan lebih banyak berupa sumbangan materi.

Apa yang dikemukakan oleh Andika tersebut menunjukkan bahwa ia tidak senang jika dirinya dan etnis Bugis dalam posisi yang seakan tidak berdaya. Ia beranggapan bahwa potensi etnis Bugis di Kendari sangat potensial. Pandangan Andika di atas, tentu bersebrangan dengan pandangan dari etnis asli yang ingin menjadi "tuan rumah di negeri sendiri".

Cara seperti ini sebetulnya bukanlah persoalan membangkitkan kultur asli nenek moyang, dan mempertahankannya mati-matian, melainkan hanya sebuah cara menyiasati persoalan yang muncul dari gesekan atau ketegangan yang muncul dalam batas-batas di antara dua kebudayaan. Etnis asli sebagai tuan rumah menghendaki etnis pendatang untuk menyatu. Sementara itu, etnis pendatang menginginkan untuk tetap bertahan dengan identitas kebudayaan mereka sendiri.

## 5.7 Pola Pengkategorian Elite Parpol

Elite parpol melakukan reproduksi kriteria dalam proses membangun dukungan atau legitimasi. Bagi elite, etnis sebagai alat ampuh untuk mengkategorikan seseorang apa masuk dalam anggotanya atau bukan. Mereka menggunakan berbagai kriteria untuk digolongkan sebagai satu etnis, sebagaimana dilihat dari uraian dibawah ini :

### 5.7.1. Pengkategorian karena Kesamaan Bahasa

Bahasa adalah suatu unsur kebudayaan etnis yang khas. Melalui bahasa pula bisa membangkitkan dan mempertahankan kesadaran suatu etnis dan dapat membedakannya dari etnis yang lain. Karena itu, pandangan Herder yang dikutip oleh Isaacs (1993:124) mengungkapkan bahwa melalui bahasa merupakan salah satu jalan untuk mempelajari karakter nasional melalui sifat-sifat linguistik yang spesifik. Dengan pandangan Herderian inilah maka bahasa bukan saja instrument untuk berkomunikasi namun juga sebenarnya juga untuk mendefinisikan kehidupan itu sendiri.

Mengingat bahasa sebagai pengkategorian penting sebagai satu etnis, maka ada kecenderungan, elite parpol yang pada umumnya dari Muna sering mempergunakan bahasa Muna. Bahasa Muna mempunyai perbedaan dengan bahasa lain dalam hal fonem dan tanda baca, kata ganti diri, awalan/akhiran, kata bilangan, bahasa dalam pergaulan adat, dan pola-pola kalimat. Dengan kata lain, warisan bahasa merupakan tanda (*signs*) dan simbol (*symbols*) untuk membangkitkan kesadaran etnis (*ethnic consciousness*). Melalui bahasa ini,

dapat digunakan untuk mengidentifikasi diri di tengah-tengah etnis lain di Kendari.

Elite parpol dari Muna di Kendari amat sering menggunakan bahasa Muna baik di lingkungan keluarga maupun ketika beraktifitas di sekretariat partai. Dalam beberapa percakapan yang dilakukan di sekretariat, penulis sering menjumpai bahasa yang dipakai adalah campuran bahasa Muna dan bahasa Indonesia. Jika ada etnis lain selain Muna, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Tetapi, jika sesama etnis Muna, bahasa yang dipakai ialah bahasa Muna. Demikian halnya dalam membangun *image* dan komunikasi dengan basis massa dari Muna, maka bahasa Muna seringkali digunakan oleh elite parpol dari Muna. Misalnya, ungkapan *basa basi* ketika bertemu dengan *damai naini dheki bapa* (apa kabar bapak). Dalam pertemuan, silaturahmi, dan konsolidasi, elite parpol menanamkan identitas dirinya sebagai orang Muna. Dalam tradisi sosialisasi, mereka kerap kali membangun *image* bahwa dirinya akan senantiasa menjadi penyambung lidah *wong cilik*, termasuk di dalamnya orang Muna. Pada suatu kesempatan, elite parpol menyebarkan pesan bahwa PDI-P ini merupakan “perahu”-nya orang Muna.

Semua orang Muna, dalam pandangan elite parpol menggambarkan adanya kesadaran untuk menggunakan bahasa daerah, sehingga juga mengidentifikasi diri sebagai orang Muna. Semua menghuni “rumah yang sama”, dalam kerangka kebudayaan yang sama. Dalam kaitan ini, masing-masing orang untuk mengelompok menjadi satu etnis. Dengan kenyataan seperti ini, maka orang yang tidak berbahasa Muna, dapat dianggap orang lain, dalam artian tidak termasuk dalam kategorik etnis Muna.

### 5.7.2. Pengkategorian karena Kesamaan Kultural

Setiap etnis mempunyai latar belakang yang dapat mengetahui asal-usul, dari mana ia datang dan juga mengetahui sejarah tentang etnisnya tersebut. Dengan memperhatikan aspek kesamaan kultural ini maka setiap anggota etnis senantiasa memperhatikan gambaran masa lalunya. Dengan demikian, maka identitas pribadi anggota etnisnya berhubungan dengan identitas kelompok, sehingga identitas itu sendiri bersandar pada sejarah masa lampau.

Seorang elite parpol mengemukakan bahwa yang unik dari identitas etnis Muna karena adanya gua (*cave*). Gua yang ada di Muna, oleh sebagian ilmuwan dipandang sebagai kunci untuk memahami sejarah pertumbuhan etnis Muna, karena melalui peninggalan tersebut bukan hanya sekedar gejala alam yang khas, melainkan lebih dari sesuatu yang merupakan perwujudan dari peradaban etnis Muna. Menurut ilmuwan dari Puslit (Pusat Penelitian Arkeologi Nasional), misalnya telah mengamati jejak-jejak manusia yang ada di goa tersebut. Menurut tim tersebut, lukisan goa di Muna kemungkinan telah muncul hamper 40.000 tahun yang lalu, masa prasejarah perkiraan munculnya seni lukis. Berdasarkan motif lukisan yang diteliti, tim Puslit mengemukakan bahwa lukisan yang ada di goa Muna berasal dari kurun waktu yang relatif muda. Lukisan kuda, perahu layar, pohon kelapa, jagung, dan senjata berMunajabu seperti tombak yang terbuat dari logam menjadi dasar dugaan tersebut. Sebab, objek-objek lukisan tersebut telah mencirikan peradaban yang tidak lagi terlampau primitif.

Keterangan di atas menjadi menarik sebab penggunaan tombak, misalnya dengan asumsi bahwa tombak itu terbuat dari logam mencerminkan pendukung peradaban manusia goa di Muna telah memasuki suatu tahapan teknologi selangkah lebih maju dari teknologi batu. Dengan kata lain, peradaban mereka telah mengalami perubahan dari teknologi batu ke teknologi logam. Hanya saja, pada masa kini sudah tidak ada orang Muna yang tinggal di goa. Tempat tersebut dipromosikan hanya untuk kepentingan pariwisata dalam rangka menunjukkan "keaslian" etnis Muna. Jadi, membandingkan orang Muna masa kini dengan orang Muna yang tinggal di jaman goa dahulu adalah hal yang problematik setidaknya pada zaman modern sekarang ini. Memang penanda-penanda etnis bisa dikatakan cair dan dikonstruksi sesuai dengan konteks sejarah.

Begitulah elite parpol dari Muna mendefinisikan etnisnya, ketika jatidirinya harus diperjelas, maka yang diangkat adalah sesuatu yang khas dari etnisnya. Mereka membanggakan akan peninggalan masa lalu tersebut sebagai sebuah formasi kesadaran dalam kerangka memaknai etnis yang sama, dalam hal ini etnis Muna.

### **5.7.3. Pengkategorian karena Adanya Hubungan Kekkerabatan**

Dalam sistem budaya etnis Muna, ikatan kekerabatan memainkan peranan penting. Ungkapan-ungkapan kekerabatan, seringkali dikonotasikan dari hubungan geneologis. Elite parpol, misalnya, adalah bapak (*patron*) yang melindungi anak buah atau pengikut (*client*). Orang Muna menggunakan ungkapan ini sedikit lebih dekat pada geneologi ketika orang muda memanggil

orang yang lebih tua dengan sebutan *Pak Ode*. Hubungan kekerabatan etnis Muna dapat dikatakan cukup akrab. Misalnya, dua orang mempunyai hubungan keluarga sepupu tiga kali yang dalam bahasa Muna disebut *mohe*. Apabila yang satu lewat di depan rumah dan yang lainnya sedang duduk di muka pintu, yang menegur adalah yang melihat lebih dahulu. Kalau orang yang sedang duduk di muka pintu lewat yang melihat, ia lebih dahulu harus menegur disertai dengan ucapan *okumela nehamat utalu angka dekipada* (hai sepupu tiga kali, kemana engkau akan pergi, singgallah dahulu ke rumah).

Pada hakekatnya pengertian kekerabatan dalam etnis Muna meliputi ikatan hubungan darah, yang berada di sekitar saudara sepupu sekali, sepupu dua kali, sepupu tiga kali dan juga sepupu empat kali. Sedangkan kelima merupakan lingkungan yang jauh, malahan dapat dikatakan sudah diluar lingkungan kekerabatan. Lingkungan yang merupakan sepupu sekali disebut *pisa*, dua kali disebut *topendua*, tiga kali disebut *topentulu*, sedang empat kali disebut *topeapa*. Sedang hubungan dalam garis kelima bernama *topekuna* dan merupakan kerabat yang dianggap berada di luar garis kekerabatan yang ada.

Istilah kekerabatan dapat diterjemahkan dalam bahasa Muna dengan *pobhasitie*, *lewalaka*, dan *tombu*. Dengan *pobhasitie* dimaksud seluruh individu yang mengelompok dalam lingkungan ikatan hubungan darah yang merupakan keseturunan yaitu ikatan hubungan secara sepupu sampai tiga kali. Selanjutnya *pobhasitie*, juga dapat berarti persahabatan dalam satu lingkungan malahan sering pula diartikan sebagai persahabatan. Sedang *lewalaku* berarti kaum kerabat yang turun temurun dan merupakan suatu kelompok yang dikategorikan seketurunan. *Tombu* mempunyai pengertian sekelompok

individu yang masih mempunyai hubungan darah dalam bentuk keturunan serta mendiami areal yang sama.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa kekerabatan dalam bahasan Muna yang berarti mendekati pengertian kekerabatan yang dimaksudkan dalam uraian ini adalah *pahistie*. Selanjutnya dalam sistem kekerabatan terdapat prinsip-prinsip keturunan yang membatasi keanggotaan kelompok kekerabatan itu. Prinsip pembatasan ini bermacam-macam, dalam masyarakat Muna ada tiga yang penting ( Depdikbud, 1986/1987 : 31).

Pertama adalah prinsip *matrilineal*, yaitu kekerabatan melalui wanitanya saja. Ini mengakibatkan bahwa semua kerabat ibu seseorang termasuk anggota kelompok kekerabatannya, sedangkan semua kerabat ayahnya berada diluar. Dalam masyarakat Muna tidak mengenal sistem kekerabatan yang berdasarkan *matrilineal* secara murni. Para ibu dalam keluarga tidak merupakan pemimpin keluarga dan prinsip pengembangan keturunan tidak diperhitungkan menurut garis ibu. Hal itu dapat dilihat bahwa pada beberapa suku keluarga Muna yang kebetulan dari ayah yang mempunyai strata sosial yang berada lebih rendah dari pihak ibu, maka biasanya sang anak dalam kehidupan sosialnya mengikuti garis ibu, khususnya dalam pemakaian gelar kebangsawanan. Seperti diketahui bahwa kaum bangsawan dalam suku Muna dikenal dengan gelar *La Ode* untuk laki-laki/pria, dan *Wa Ode* untuk kaum perempuan/wanita. Dengan demikian apabila sang anak mempunyai ibu dengan gelar *Wa Ode* yang dianggap murni, sedang ayahnya tidak mempunyai gelar *La Ode*, maka sang anak kemungkinan menggunakan gelar kebangsawanan tersebut dalam bentuk gelar *La Ode* atau

*Wa Ode* pada namanya, meskipun keadaan ini tidak berlaku umum, jadi hanya terdapat pada beberapa rumpun keluarga saja

Sementara prinsip keluarga patrilineal adalah perkawinan dari garis keturunan yang mengikuti garis laki-laki Masyarakat Muna tidak menganut sistem patrilineal secara lengkap dan keseluruhan. Pada masyarakat Muna tidaklah terdapat ketentuan yang mengikat, dimana umpamanya perkawinan adalah ideal apabila dilaksanakan menurut garis keturunan di pihak laki-laki. Yang menonjol pada masyarakat Muna adalah ditihat dari pihak ayah sebagai kepala keluarga ialah bahwa dalam setiap keluarga yang ayahnya mempunyai atau berasal dari golongan bangsawan, maka anak-anaknyapun akan tergolong dan dianggap sebagai kaum bangsawan yang dengan demikian dapat mempergunakan gelar kebangsawanan tersebut.

Prinsip bilineal adalah menghitung hubungan kekerabatan melalui pria saja untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu dan melalui wanita saja untuk hak dan kewajiban lain. Menurut penelitian dari Dep. P dan K mengungkapkan bahwa masyarakat Muna nampaknya dalam hubungan kekerabatan bilineal ini.

Dari pandangan-pandangan tentang hubungan kekerabatan di Muna tersebut, kiranya dapat disimpulkan bahwa hal tersebut turut memainkan peranan penting dalam pembentukan perilaku elite parpol. Dengan pendekatan yang dilakukan sebagai elite parpol, dalam hal ini ditarik bahwa ia ingin mencari legitimasi, maka dijumpai elite parpol yang tetap menjunjung tinggi rasa persaudaraan diantara sesama orang Muna. Hal itu dapat diamati dari perilaku yang *La Ode Munadora* yang sangat empati pada orang-orang Muna

yang ada di Kendari. Seringkali, jika ia mampir ke Kendari banyak menyumbang orang Muna yang kesulitan dalam membayar biaya sekolah. Sikap La Ode Munadora tersebut mencerminkan sikap dasar orang Muna, yakni *popia piara*. Dalam nilai *popia-piara* terkandung pengertian bahwa seseorang yang memiliki kelebihan kemampuan, pengetahuan, atau kekayaan perlu memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkannya. Karena sifat dermawannya itu pula, disebagian anggota PDI-P, La Ode Munadora mendapat julukan *sabandara*.



## BAB VI JARINGAN ATAS DASAR ETNISITAS

Dalam studi konstruksi sosial, Berger dan Luckmann melihat bahwa adanya dialektika antara ketiga momen internalisasi, eksternalisasi, dan objektivasi. Sebagaimana yang sudah dipaparkan pada bab terdahulu, momen internalisasi terlihat dalam proses identifikasi "siapa etnis Muna". Sementara itu, momen eksternalisasi dilihat pada proses penyesuaian etnis Muna dalam perubahan politik. Pada bab ini akan dipaparkan momen objektivasi yakni proses pelembagaan etnis dengan fenomena yang dilihat pada pembentukan jaringan atas dasar etnis.

Cara mudah untuk melihat jaringan sosial itu adalah pada proses-proses di organisasi, seperti persaingan/pertarungan, proses rekrutmen, pembentukan PAC, mobilisasi dukungan, dan hubungan-hubungan yang dilakukan oleh elite parpol. Di masing-masing tahap tersebut didapati adanya "kubu-kubu" yang dibangun secara terus-menerus oleh beberapa orang sehingga menimbulkan ikatan yang erat. Hubungan atau kontak yang terbatas inilah oleh yang Mayer (1961), Epstein (1961), Mitchell (1969), dan Suparlan (1978) disebut sebagai jaringan sosial. Sementara itu, Putnam (2000) mengategorikan jaringan atas *bonding* dan *bridging*. *Bonding* adalah ikatan yang lebih bersifat ke dalam, homogen, dan eksklusif. Sementara itu, *bridging* adalah pengikatan ke luar, heterogen, karakteristik ikatan terdiri yang atas berbagai macam latar belakang ([http://socialcomputing/bridging\\_and\\_bo.html](http://socialcomputing/bridging_and_bo.html))

### 6.1 Persaingan Munjab, S.E.- Andika

Kasus persaingan Munjab, S.E yang selanjutnya akan disingkat Munjab melawan Andika merupakan salah satu contoh dari bekerjanya jaringan atas dasar etnis. Berkembangnya jaringan atas dasar etnis tersebut tidak terlepas dari para aktor-aktor di parpol tersebut melalui suatu afiliasi dan gerakan yang mereka bentuk dan melakukan manuver tandingan terhadap lawan politiknya.

Para aktor-aktor penting di parpol menjelang pelaksanaan konfercabsus membentuk atau bergabung dengan kelompok masing-masing telah mempunyai calon ketua.<sup>1</sup> Pada saat itu, ada dua kandidat ketua, yakni Munjab dan Andika. Masing-masing kelompok memiliki afiliasi yang berbeda. Sebelum menguraikan strategi yang ditempuh masing-masing kelompok, dapat diidentifikasi aktor-aktor pendukung<sup>2</sup> yang 'bermain' saat pelaksanaan konferensi cabang khusus (konfercabsus).

---

<sup>1</sup> Calon ketua yang dimaksud disini yakni kader partai yang akan bersaing dalam pemilihan tersebut.

<sup>2</sup> Aktor pendukung yakni para aktivis partai yang ikut secara aktif memobilisasi pendukung guna mendukung seorang calon ketua

Tabel 6.1

## Tokoh Parpol Penting dalam Konferencabsus PDI-P

No	Calon Ketua	No	Tokoh Pendukung
1	Munajab, S.E.	1	La Ode Munadira
2	Andika	2	La Ode Mino
		3	La Tongkuno, S.E.
		4	La Ode Pili, S.H.
		5	Ishak Azis
		6	Ambo Tang
		7	La Ode Kapita

Dari tabel di atas terlihat bahwa masing-masing golongan menunjuk kepada posisi tertentu yang memiliki pengaruh dalam partai. Kelima macam golongan itu yakni wiraswasta, alumni Unhalu, orang kaya atau punya modal, tokoh partai, yakni: Ketua PAC, Ketua DPD, orang yang loyal dengan partai, ada hubungan etnis, dan ada hubungan famili.<sup>3</sup> Oleh karena sangat bervariasinya golongan-golongan ini maka seorang tokoh partai dapat termasuk ke dalam lebih satu golongan. Adapun daftar kesembilan golongan beserta tokoh-tokoh yang termasuk di dalamnya tampak dalam tabel 6.2 di bawah ini.

<sup>3</sup> Hubungan famili yang dimaksud adalah dengan La Ode Munadira

**Tabel 6.2**  
**Tokoh-Tokoh Partai dan Keanggotaannya dalam Lima Macam Golongan**

Kode		Nama Tokoh	Keterangan
A	Wiraswasta	La Ode Munadora	Pengusaha Jati
		Andika	Usaha Hasil Laut
		Ishak Azis	Percetakan
		La Ode Mino	Kontraktor
		La Ode Kapita	Kontraktor
		Ambo Tang	Usaha Toko
B	Alumni Unhalu	Munajab, S.E.	FE Unhalu
		La Tongkuno, S.E.	FE Unhalu
C	Orang Kaya/Punya Modal	La Ode Munadora	
		Andika	
D	Ada Hubungan Famili dengan La Ode Munadora	La Ode Mino	Adik
		La Ode Kapita	Kemenakan
E	Hubungan etnis (Muna)	La Ode Munadora	
		La Ode Mino	
		La Tongkuno, S.E.	
		Munajab, S.E.	
		La Ode Pili, S.H.	
		Munajab, S.E.	
	Hubungan etnis (Bugis)	Andika	
		Ambo Tang	
F	Kader Muda Partai	Munajab, S.E.	36 tahun pada saat pemilihan
		La Ode Pili, S.H.	36 tahun
		La Tongkuno, S.E.	33 tahun
		Andika	38 tahun
		Ambo Tang	31 tahun
		La Ode Kapita	35 tahun

Selanjutnya tabel 6.2 tersebut dapat disusun dalam matrik seperti di bawah ini

**Matrik Tokoh-Tokoh Partai dan Keanggotaannya dalam lima Macam Golongan**

No	Tokoh-Tokoh Partai	Kode Gol.						JML
		A	B	C	D	E	F	
1	La Ode Munadora	X		X	X	V		4
2	La Ode Mino	X			X			2
3	Munajah, S.F.		X			V	X	3
4	Andika	X		X		O	X	4
5	La Tongkuno, S.F.		X			V	X	3
6	Laode Pili, S.H.					V	X	2
7	Ishak Asis	X						1
8	La Ode Kapita	X			X	V	X	4
9	Ambo Tang	X				O	X	3

Keterangan :

- X : Menjadi anggota golongan
- A : Wiraswasta
- B : Alumni Unhalu
- C : Orang kaya/punya modal
- D : Ada hubungan famili dengan La Ode Munadora
- E : Ada hubungan etnis
- V : Muna
- O : Bugis
- F : Kader muda partai (< 40 tahun pada saat pemilihan)

Dari matriks tersebut tampak bahwa dari sembilan orang tokoh parpol, yang bekerja sebagai wiraswasta enam orang, enam orang etnis Muna, dua orang etnis Bugis, dua orang alumni Unhalu, dan dua orang yang mempunyai hubungan famili dengan La Ode Munadora. Analisis jaringan berikut ini berusaha mengungkap golongan yang paling dominan yang didefinisikan paling banyak melibatkan tokoh parpol. Setelah itu akan diidentifikasi siapa tokoh yang paling menonjol pada saat menjelang pemilihan tersebut.

Dari matriks di atas, hanya dua orang yang masuk dalam empat golongan yakni La Ode Munadora<sup>4</sup> dan La Ode Kapita<sup>5</sup>. Keduanya sama-sama etnis Muna dan mempunyai hubungan famili antara satu dengan lainnya. Hal yang membedakan keduanya adalah status kekayaan. La Ode Munadora adalah tokoh partai yang mempunyai uang banyak, sementara La Ode Kapita tokoh partai yang tidak memiliki uang banyak. Dengan basis etnis yang sama disertai perbedaan dalam pemilikan kekayaan, akan menciptakan keluasan pengaruh di kalangan anggota pengikutnya. Artinya, La Ode Munadora mempunyai pengaruh yang lebih kuat dibanding La Ode Kapita.

Ada tiga orang yang menjadi anggota dari lebih dua golongan yakni La Ode Munadora, Andika, dan La Ode Kapita. Adapun tokoh-tokoh lainnya tidak begitu menonjol dibandingkan ketiga tokoh tersebut, karena ia rata-rata menjadi satu atau dua macam golongan saja. Misalnya, Ishak Asis, hanya menjadi satu golongan saja.

Dilihat dari kategori keanggotaan dalam golongan, tampaknya yang paling dominan adalah kelompok wiraswasta dan kelompok etnis Muna. Jika dikaitkan dengan kompetisi dalam arena konfercabsus tersebut, orang yang paling dominan adalah "etnis Muna dengan profesi sebagai wiraswasta". Hanya saja, tidak mudah untuk memenangkan pertarungan karena tidak ada yang bisa memastikan siapa yang bisa tampil sebagai pemenang. Bagi para pendukung kedua kubu di lapangan, situasinya serba tidak pasti. Bagaimana pun, kedua kubu mempunyai strategi untuk memenangkan pertarungan.

---

<sup>4</sup> Ia masuk dalam golongan wiraswasta, orang kaya, orang Muna, dan hubungan famili dengan pengurus lain

<sup>5</sup> Ia masuk dalam golongan wiraswasta, orang Muna, kader muda partai, dan ada hubungan dengan pengurus lain

Strategi utama kubu Munajab dalam pertarungan tersebut adalah dengan mengambil properti etnis untuk menarik simpatik dukungan. Kelompok Munajab berperan mengkonstruksi perbedaan sejarah dan identitas menjadi sesuatu yang aktual dengan memompakan sentimen etnis. Proses pemompaan diawali oleh isu putera daerah. Kubu Munajab kesulitan untuk memobilisasi dukungan karena tidak ditunjang dengan dana yang cukup. Karena itu, kekurangan dana politik diatasi dengan mengipas sentimen etnis. Dengan isu seperti itu Munajab cukup berhasil meyakinkan orang Muna agar mendukungnya sebagai kandidat ketua. Hal itu dapat dilihat pada basis dukungan Munajab yang pertamakali diperoleh dari PAC Poasia.<sup>6</sup> Keberhasilan Munajab meraih dukungan dari La Ode Pili disebabkan keduanya sudah memiliki relasi hubungan pribadi yang baik.

Dengan mendapat dukungan dari La Ode Pili, Munajab kemudian mencari dukungan dari kader partai yang dianggap loyal pada dirinya. Cara yang ditempuhnya adalah mendekati kader partai yang sudah dikenal secara pribadi. Melalui pendekatan *lobbying*, akhirnya Munajab mendapat dukungan dari La Tongkuno, La Ode Kapita, dan La Ode Mino. Ketiganya etnis Muna. Dukungan dari ketiga orang tersebut sangat berarti karena memiliki jaringan yang kuat sampai ke tingkat Pengurus Antar Cabang (PAC). Perjuangan Munajab meyakinkan ketiga orang tersebut dapat dilihat dari uraian berikut ini.

La Tongkuno memberikan dukungan ke Munajab dengan alasan pertemanan, tempat tinggal, dan etnis. Munajab dan La Tongkuno sudah

---

<sup>6</sup> Ketua PAC PDI-P Poasia adalah La Ode Pili, S H, profesinya sebagai pengacara. etnis Muna

berteman sejak keduanya kuliah di Fakultas Ekonomi Unhalu. Lokasi tempat tinggal La Tongkuno berdekatan dengan Munajab, dan juga keduanya etnis Muna. Bergabungnya La Tongkuno cukup penting karena ia berhasil menggaet La Ode Kapita, yang saat itu menjadi Ketua PAC Mandonga, untuk masuk bergabung ke kubu Munajab. Padahal, La Ode Kapita adalah kader partai yang pada awalnya ingin memberikan dukungan kepada Andika karena persamaan profesi yakni sebagai wiraswasta. Hanya karena upaya La Tongkuno La Ode Kapita bergabung ke kubu Munajab. Berikut ini penuturan La Tongkuno, S.E., ia membujuk La Ode Kapita :

“Kapita, demikian ia memanggilnya, kalau kamu mau pilih Andika, kita sepakat saja untuk mendukungnya bulat-bulat yakni dengan suara aklamasi. Tidak usah ada pemilihan. Daripada calon saya dipecundang dimuka umum, lebih baik kita atur saja. Nyatanya ia mau mengikuti ajakan saya.” (wawancara, 11 Agustus 2003)

La Ode Kapita, yang biasa disapa Kapita, didekati oleh kubu Munajab karena posisinya sebagai ketua PAC Mandonga waktu itu sehingga secara otomatis mempunyai hak suara. Posisi Kapita sendiri amat vital. Jika suaranya diberikan pada kubu Andika, dipastikan Munajab kalah dalam pertarungan. Melalui peran La Tongkuno, hubungan Munajab dengan Kapita yang awalnya sebatas hubungan formal dalam urusan organisasi, berubah menjadi hubungan pribadi yang lebih informal .

Kampanye utama kubu Munajab dalam arena konfercabsus adalah dengan memompakan semangat etnis. Kubu Munajab menghembuskan bahwa Munajab merupakan putera daerah, sementara Andika adalah pendatang. Propaganda itu begitu cepat berkembang di kalangan peserta konfercabsus dan

dapat dikatakan mengabaikan peran Andika sebelumnya yang sebetulnya cukup loyal terhadap organisasi. Perkembangan selanjutnya terus menunjukkan bahwa kekuatan Andika menjadi semakin melemah. Ini salah satunya disebabkan oleh meningkatnya propaganda dari aktor yang terus memompakan simbol etnis. Naiknya pengaruh Munajab, bukan saja disebabkan oleh akibat hijrahnya para pendukung yang sebelumnya mendukung Andika, akan tetapi juga disulut oleh langkah aktor yang dikategorikan sebagai oportunis. Dikatakan oportunis karena orientasinya tidak jelas apakah kepada Munajab atau Andika. Orientasinya sangat tergantung pada situasi kepentingan jangka pendek yang ingin diraih. Orang tersebut adalah La Ode Mino.<sup>7</sup> Pada waktu konfercabsus, tokoh ini terlibat aktif di kedua kubu.

Mendekati acara konfercabsus, ia terlibat secara penuh dalam menyusun strategi di kedua kubu. Berbagai pertemuan penting yang digelar di kedua kubu dihadapinya. Pada suatu saat, Andika memperlihatkan “kabinet bayangannya” kepada La Ode Mino jika ia terpilih. Andika memang sengaja

---

<sup>7</sup> Aktor ini merupakan paman dari La Ode Kapita. Munajab juga melihat posisi La Ode Mino sebagai adik kandung La Ode Munadora sehingga merupakan pengimbang dari dukungan La Ode Munadora yang telah memberikan dukungan pada Andika. Munajab mengharapkan dukungan La Ode Mino karena ia mempunyai daya politik yang cukup besar bagi kader-kader PDI-P dan karenanya memiliki jaringan yang cukup mengakar. Jika La Ode Mino dapat dirangkul maka dengan sendirinya Bur dapat memobilisasi dukungan dengan menggunakan jaringan yang dimiliki oleh La Ode Mino. Akan tetapi tidak mudah bagi Bur untuk langsung didukung oleh La Ode Mino. Hal itu disebabkan karena awalnya La Ode Mino, ingin bersikap netral. Siapa pun yang jadi, entah Munajab atau Andika, tidak masalah karena keduanya kader PDI-P yang ketika PDI terpecah keduanya sama-sama konsisten untuk tetap bergabung di PDI Pro Mega. Ia menunggu dan melihat situasi. Sikap itu ternyata didukung dengan baik karena La Ode Mino dapat diterima di kedua kubu, baik di kubu Andika maupun Munajab. La Ode Mino *meliat-liat* perilaku kedua kandidat tersebut. Ia *meliat* perilaku dan ingin melihat komitmen Bur pada organisasi. Tidak ketinggalan, La Ode Mino juga *meliat-liat* Andika. Ia ingin membandingkan ketajaman visi dari kedua kubu dalam membawa organisasi ke depan.

melakukan itu agar La Ode Mino memberikan dukungannya karena dalam komposisi yang disusun ia diporsikan sebagai wakil ketua.

Malang bagi Andika, La Ode Mino tidak senang dengan komposisi tersebut. Ketidaksenangannya dipicu oleh "kabinet bayangan" yang disusun oleh Andika, pengurusnya sebagian besar etnis Bugis. Hanya La Ode Mino dari etnis Muna. Sebagai orang Muna, tentu La Ode Mino tidak senang dengan perilaku Andika tersebut. Di mata La Ode Mino, Andika adalah sosok yang ingin melucuti etnis Muna di PDI-P. La Ode Mino cemas, jika Andika menjadi ketua, daya politik etnis Bugis menjadi kuat di PDI-P dan kemungkinan besar dapat menggantikan dominasi etnis Muna. Hal ini yang menyebabkan sehingga La Ode Mino mendukung Munajab, sebagai satu-satunya jalan untuk tetap menjaga daya saing politik orang Muna di PDI-P. Apa yang dilakukan oleh La Ode Mino ialah suatu proses untuk menghadirkan dan mengaktifkan identitas etnis setelah berjumpa dengan etnis lain. Dukungan yang diperoleh dari kader partai dengan basis etnis Muna, menunjukkan bahwa sesama etnis Muna akan saling mendukung dalam arena-arena penting di organisasi.

Pada paparan berikut digambarkan strategi kubu Andika dalam arena konferencabsus tersebut. Basis utama perjuangan Andika dalam mobilisasi pendukung adalah dengan uang. Melalui pengaruh uang, Andika dapat menggambarkan bonafiditas dirinya di depan para kader partai yang dapat ditafisirkan dalam upaya untuk menarik dukungan dari kader partai yang akan menjadi peserta konferencabsus. Dengan kata lain, Andika melakukan hal

tersebut untuk menunjukkan bahwa melalui uang ia dapat mempengaruhi dan mengikat para kader partai untuk memilih dirinya.

Cara yang dilakukan oleh Andika, bukan dengan memberi langsung kepada kader partai, melainkan melalui cara-cara “dana politik”. Banyak pertemuan atau sekedar *kongko-kongko* di *café*, Kendari Beach, dan warung makan yang semua biayanya ditanggung oleh Andika Hasan. Tidak diperoleh angka yang pasti berapa besar jumlah uang yang dikeluarkan dalam rangka perhelatan menyongsong konferencabsus PDI-P. Hanya saja salah seorang pendukung Andika memberi perkiraan sepuluh juta hingga lima belas juta rupiah yang dihabiskan oleh Andika menghadapi momen tersebut.

Dengan preferensi uang pula, Andika mencari dukungan kepada sejumlah fungsionaris PAC. Ia mendekati Ishak Azis, ketua PAC Baruga. Antara Andika dengan Ishak Azis, sama-sama menjadi wiraswasta. Hanya bedanya, Ishak Azis masih masuk dalam berkategori wiraswasta tipe bermodal dengkul,<sup>8</sup> sementara Andika berkategori wiraswasta bermodal besar. Bagi Ishak Azis, salah satu alasan sehingga mendukung Andika adalah mengharapkan dapat menunjang mata pencahariannya sebagai wiraswasta. Dengan kelebihan Andika tersebut, ia berupaya untuk membujuk Ishak Azis untuk mendukung dirinya. Upaya tersebut memang berhasil karena Ishak Azis orang kedua setelah Ambo Tang yang secara mencolok memberikan dukungan kepada Andika.

---

<sup>8</sup> Dalam pengamatan wiraswasta yang diteliti yakni usaha sablon /percetakan dalam skala kecil. Di rumahnya yang sekaligus dijadikan tempat usaha hanya tersedia peralatan untuk sablon seadanya

Atas dasar preferensi yang juga, Andika mendapat dukungan dari La Ode Munadora<sup>9</sup>, etnis Muna, yang menjabat sebagai ketua DPD PDI-P Sulawesi Tenggara. Hanya saja saat itu, kedudukan La Ode Munadora agak sulit. Apa pun pengaruh yang dimiliki, pengaruh itu tidak berakar dalam keseluruhan peserta. Figur ini memang termasuk *kuomu* di Muna, tetapi pada arena konferencabsus ia ditentang oleh adiknya sendiri La Ode Mino. Maka tidak mengherankan kalau ia mengalami kesukaran lebih besar dalam menghimpun pengikut yang setia pada saat konferencabsus tersebut. Akhirnya, Munajab tidak mendapat kesukaran dan banyak mengendalikan suara yang ada di PAC karena berhasil melumpuhkan kharisma La Ode Munadora. Kedudukan Munajab semakin kokoh karena bergabungnya La Ode Mino.

Persaingan kakak-beradik (La Ode Munadora dan La Ode Mino) dimanfaatkan oleh Munajab untuk menggalang kekuatan-kekuatan yang sudah dibangun sebelumnya oleh Andika. Beberapa orang yang tidak fanatik dijanjikan posisi dalam struktur pengurus. Bagi orang yang belum pernah berpartai, tawaran seperti itu merupakan perangsang yang cukup kuat untuk memberikan dukungan. Akibatnya, beberapa pendukung Andika terpecah. Ada yang memang tetap loyal, seperti Ambo Tang, namun beberapa orang langsung pindah dukungan.

Dengan demikian, upaya Andika untuk memobilisasi dukungan melalui cara yang dari para kader partai gagal ia dikalahkan oleh strategi

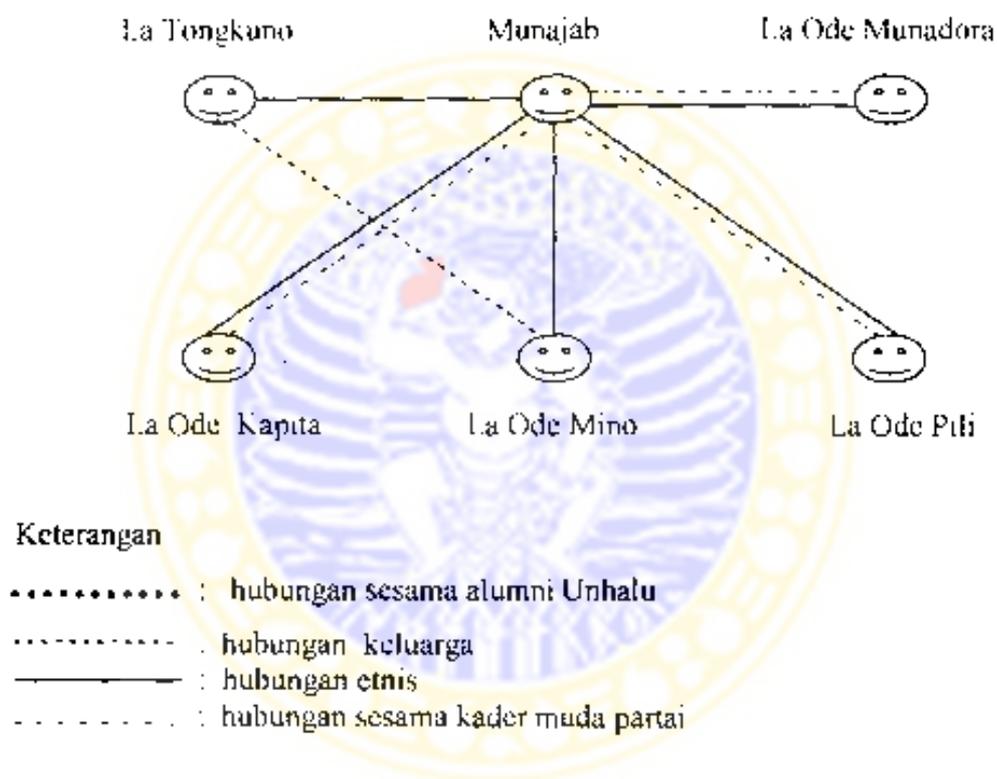
---

<sup>9</sup> Berdasarkan wawancara peneliti, bahwa alasan kuat sehingga ia mendukung Andika karena diharapkan organisasi dapat lebih mandiri karena figur ini sudah mapan yang memiliki keunggulan yang ia membandingkan dengan sosok Munajab yang dilukiskannya akan mengelola organisasi dengan "*mendaki gunung*". Istilah ini populer di kalangan aktifis jika seorang yang menjalankan aktifitasnya sebagai pengurus penting mencari dana

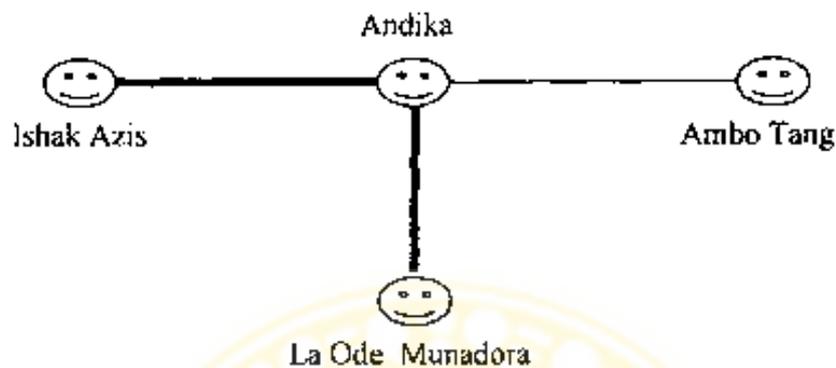
Munjab yang memobilisasi dukungan melalui saluran etnis. Keampuhan strategi Munjab tersebut dapat dikatakan sebagai cara cemerlang untuk mencegah Andika meraih posisi ketua partai. Agar lebih jelas jaringan yang dimiliki oleh Munjab dan Andika dapat dilihat pada gambar 1 dan gambar 2.

**Gambar 1**

**Jaringan Munjab, S.E. dengan Tokoh-Tokoh Partai**



**Gambar 2**  
**Jaringan Andika dengan Tokoh-Tokoh Partai**



Keterangan :

- \_\_\_\_\_ : hubungan etnis  
 \_\_\_\_\_ : hubungan sesama wiraswasta

Gambar 1 memperlihatkan jaringan pribadi yang dimiliki Munajab. Ada nama La Tongkuno, La Ode Kapita, La Ode Mino, dan La Ode Munadora. Hubungan yang tercipta di antara keempat orang tersebut lebih banyak karena atas dasar persamaan latar belakang etnis. Sementara gambar 2 memperlihatkan jaringan pribadi yang dimiliki Andika. Dari gambar tersebut tampak bahwa ada tiga tokoh partai yang dekat secara pribadi dengan Andika. Keempat orang tersebut yakni La Ode Munadora, Ishak Azis, dan Ambo Tang. Hubungan yang tercipta dengan ketiganya karena sama-sama menggeluti wiraswasta. Hubungan yang lebih dalam yakni dengan Ambo Tang karena selain sama-sama menggeluti wiraswasta juga karena sama-sama etnis Bugis.

Berdasarkan ciri-ciri interaksional jaringan Andika dengan ketiga jaringannya tersebut bersifat nonmaterial karena didasarkan hubungan

kesejawatan dalam pekerjaan atau aktivitas organisasi dan etnis. Dari arah interaksi yang terjadi, hubungan antara Andika dengan ketiga tokoh itu mempunyai ciri yang tidak seimbang. La Ode Munadora dan Andika orang yang punya modal kuat, sementara Ishak Azis dan Ambo Tang tidak terlalu kuat. Ketidakseimbangan juga terjadi pada usia, yakni La Ode Munadora dan Ishak Azis tersebut 40 tahun pada saat pemilihan, sedangkan Ambo Tang di bawah 40 tahun. Kesenjangan juga terjadi karena perbedaan posisi yang jauh. La Ode Munadora sebagai Ketua DPD Wilayah, Ishak Azis dan Ambo Tang Ketua PAC. Akibatnya, bisa jadi hubungan mereka berlangsung dalam satu arah saja.

Dari lamanya terjadi interaksi, hubungan Andika dengan ketiga tokoh tersebut relatif sebentar. Hubungan itu hilang setelah tugas-tugas organisasi selesai dilaksanakan. Hubungan-hubungan yang terjalin hanya digunakan untuk mengalirkan informasi agar komunikasi dengan mereka berjalan lancar, sehingga tugas-tugas organisasi dapat terjalin dengan baik.

Dari ciri intensitas interaksi tampak bahwa hubungan antara Andika dengan para tokoh parpol tidak didasari hubungan yang kokoh, yang memungkinkan munculnya kesadaran satu pihak untuk melakukan kewajiban-kewajiban bagi kelompoknya. Yang ada ialah sebatas hubungan-hubungan di organisasi. Hubungan seperti ini mempunyai intensitas yang rendah. Hubungan dengan intensitas yang tinggi hanya terjadi dengan Ambo Tang karena adanya hubungan etnis dan wiraswasta. Ambo Tang sering kontak dengan Andika karena tempat tinggal Andika yakni di Sodohoa, sedangkan Ambo Tang di Gunung Potong, kurang lebih satu kilometer. Dibandingkan semua tokoh partai

yang ada, jarak tempat tinggal Ambo Tang yang paling dekat. Ambo Tang dengan suasana santai dapat berkunjung ke rumah Andika untuk berbicara urusan organisasi, wiraswasta, atau sekedar silaturahmi biasa saja.

Dalam hubungan itu, frekuensi relasi antara Andika dengan tokoh parpol yang lain relatif tidak banyak terjadi. Andika dengan profesi utamanya wiraswasta yang bergerak di bidang hasil laut yang terkadang ke pulau-pulau sehingga meninggalkan tempat sampai dua minggu lamanya. La Ode Munadora saja yang merupakan jaringan pribadi yang dimiliki oleh Munajab tidak begitu intens melakukan kontak karena kesibukannya mengurus usahanya di Muna.

Selanjutnya, dari ciri frekuensi atau banyaknya interaksi, boleh jadi hubungan Munajab dan La Tongkunolah yang mempunyai frekuensi tertinggi. Akan tetapi, perlu dicatat di sini bahwa tidak berarti tingginya intensitas akan berpengaruh pada kualitas hubungan yang terjadi. Hanya saja, hubungan pribadi Munajab dengan kelima tokoh sangat intensif dan teratur. Selain itu, di antara orang-orang yang terlibat dalam jaringan tersebut mempunyai hubungan yang akrab, karena tidak lebarnya status yang dimiliki. Mereka rata-rata berumur di bawah 40 tahun dan sesama aktivis DPC. Secara singkat, perbedaan karakteristik jaringan keduanya dapat dilihat tabel dibawah ini

Tabel 6.3

## Perbedaan Karakteristik Jaringan Munajab dan Andika

Kubu	Frekuensi	Orientasi	Sifat	Posisi	Basis
Munajab	Intens, Tinggi	Non Material	Emosional	Equal	Etnis
Andika	Tidak teratur, Rendah	Material	Rasional	Senjang	Profesi, Pekerjaan

Dari kasus persaingan di atas, maka terlihat bahwa para aktor berperan penting dalam membangkitkan sentimen etnis dengan cara mengeksploitasi perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan elite yang berlatang belakang sosial Bugis. Berkat peran aktor tersebut, etnisitas yang sebelumnya hanya simbol-simbol, akhirnya menjadi hidup dan konkret seperti “bekerja” dalam jaringan.

Keberhasilan Munajab dan jaringannya memperlihatkan pentingnya keterampilan pribadi dalam memompakan sentimen etnis. Senada dengan hasil penelitian Liddle dalam kajiannya di Simalungun menunjukkan bahwa politisi yang sukses adalah yang dapat menumbuhkan keikutsertaan anggota dalam suatu partai politik. Dalam kasus Munajab, ia adalah orang yang mudah didekati, dan dapat diandalkan oleh kalangan etnisnya pada saat membutuhkan keahliannya. Di mata para elite non Muna, Munajab bisa merupakan cerita ter-Munajabuk dalam kepemimpinan PDI-P. Ia lebih banyak mencurahkan perhatian kepada pribadi, etnis Muna dibandingkan perhatiannya kepada kebijakan dan platform partai

### 6.3 Analisis Jaringan

Setelah penulis mengemukakan tentang jaringan sosial Munajab di jajaran struktur pengurus, pada bagian berikut ini diuraikan analisis jaringan. Sebagaimana diuraikan oleh Mitchell (1969:1--2) bahwa secara analitis jaringan sosial adalah suatu bentuk hubungan saling keterikatan yang bersifat khusus di antara sekelompok orang tertentu, dengan ciri-ciri bahwa hubungan saling keterikatan itu secara keseluruhan dapat digunakan untuk menginterpretasikan tingkah laku sosial dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, penggunaan konsep jaringan sosial secara analitis harus memperhatikan aspek hubungan perseorangan, yaitu hubungan-hubungan yang dimiliki oleh seorang individu dengan individu yang lain.

Jika dianalisis menurut ciri-ciri sebuah jaringan sosial, maka dapat dijelaskan perilaku Munajab dalam jaringan yang terbentuk itu. Dari ciri-ciri interaksional sebuah jaringan sosial dapat dijelaskan mengenai sifat hubungan antarindividu, tingkah laku individu dalam berhubungan dengan individu yang lain, serta bagaimana proses interaksi yang terjadi. Adapun ciri-ciri interaksional sebuah jaringan sosial meliputi : isi, arah, lama, intensitas dan banyaknya interaksi yang terjadi.

#### 6.3.1 Hubungan Munajab-Jajaran Pengurus DPC

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika perkembangan jaringan sangat ditentukan oleh faktor figur dan hubungan. Terdapat setidaknya dua figur kuat yang memberi sumbangan besar kepada pertumbuhan jaringan di PDI-P, yakni Munajab dan La Ode Munadora

Kekuatan figur Munajab dalam mengembangkan jaringan terlihat bukan hanya dilihat pada saat rekrutmen pengurus DPC, tetapi juga sampai pemekaran Pengurus Anak Cabang (PAC). Di jajaran pengurus, Munajab memiliki pengurus yang sudah lama saling kenal. Interaksi terjadi relatif lebih mudah terjadi karena sebelumnya telah saling kenal satu sama lain. Dan seluruh pengurus yang direkrut oleh Munajab, semua sudah dikenalnya secara pribadi karena ada hubungan keluarga, persamaan organisasi, dan hubungan sesama alumni PT. La Ode Abd. Sima dan St. Wuna merupakan sosok pengurus yang mempunyai pertalian keluarga. Zeth Sialla dan Buttu Malaka sudah dikenal Munajab sejak mahasiswa karena pernah kuliah di FE Unhalu. Bahkan Zeth Sialla, adalah sahabat akrab karena teman angkatan (1982) di Unhalu, juga aktif di organisasi FKPPi dan AMPI. Adapun La Tobelo yang kuliah di FISIP Unhalu, sering bertemu Munajab di Resimen Mahasiswa (Menwa) Unhalu.

Ketika awal Munajab memimpin organisasi, ia mengendalikan partai dari kediamannya di Jl. Sawerigading Mandonga.<sup>19</sup> Belum ada sekretariat partai, sehingga tempat tinggalnya menjadi "rumah bersama" bagi pengurus partai, dan berbagai simpatisan partai yang ingin berkonsultasi atau meminta bantuan dari Munajab. Dengan pusat pengambilan partai di rumah Munajab, dapat dirumuskan bahwa wujud tindakan dan gaya kepemimpinannya sangat mempribadi (*personalized*). Tata cara semacam itu memberikan peluang baginya untuk mempraktikkan sepenuhnya kemampuan dalam membangun

---

<sup>19</sup> Letak rumahnya tidak berada di pinggir jalan raya utama. Penulis memperkirakan jaraknya dari jalan raya utama sekitar 900 m - 1.000 m dengan lokasi yang berada di ketinggian. Jika berjalan kaki waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tempat tinggalnya 15-20 menit.

jaringan pribadi Ia selalu ingin ramah dan penuh perhatian kepada setiap pengurusnya. Dengan cara seperti itu, Munajab mampu membangun jaringan dengan para pengurus yang merasa berhutang budi kepadanya,<sup>11</sup> bukan kepada PDI-P. Jaringan yang dimiliki Munajab sangat membantunya untuk memenangkan pertarungan dengan Andika maupun untuk mengelola organisasi.

Lebih dalam lagi, peneliti menelusuri jaringan antara sesama pengurus yang mempunyai kesamaan etnis. Dari jaringan yang ada, hanya dua orang pengurus yang bukan dari etnis Muna yakni Zeth Sialla (etnis Tator) dan Andika (etnis Bugis). Yang lain berasal dari etnis Muna yakni Munabil, St. Wuna, La Tongkuno, La Ode Pili, Wa Ode Muna Darma, La Tobelo. Dari pengurus yang etnis Muna, ada yang lebih 'dalam' karena sama-sama lulusan FE Unhalu (La Tongkuno), dan ada pula karena hubungan keluarga (St. Wuna dan La Ode Siwa). Adapun proses dari terbentuknya jaringan atas dasar etnis dapat diringkas sebagai berikut. Para pengurus dari Muna mengandalkan Munajab yang mempunyai latar belakang etnis Muna untuk mengarahkan tindakan mereka dalam hubungan-hubungan antaretnis secara umum. Munajab berhak untuk mendesak mengeliminasi kelompok etnis lain untuk menguasai posisi-posisi penting di organisasi.

Perkawanan atas etnis menyajikan medium yang melembaga yang digunakan oleh Munajab untuk memerintah di PDI-P. Isu yang sering dilontarkan oleh Munajab dan kelompoknya adalah perlunya putera daerah

---

<sup>11</sup> Kesetiaan kepada Munajab amat kuat di kalangan pengurus yang pernah dibantu, seperti St. Wuna. Dalam suatu wawancara yang penulis lakukan, Dia secara terang-terangan memuji kelebihan Munajab sebagai ketua partai

diberi kedudukan strategis. Akibatnya stercotip dan praduga berkembang dan menyebar di kalangan anggota etnis lain seputar isu tersebut. Mereka mengerti situasi kehidupan nyata yang mereka alami. Lebih jauh lagi, ada sarana penting lain yang membuat jaringan di dalamnya itu semakin solid yakni kesamaan di bidang bisnis/ekonomi. Granovetter (dalam Hamilton, 1996:180) menyimpulkan bahwa faktor bisnis memainkan peranan krusial dalam menghubungkan orang dalam jaringan.

Penelitian penulis terhadap antarelite mendukung hal tersebut. Di jajaran pengurus PDI-P, ada beberapa pengurus yang sudah mempunyai badan usaha, seperti La Tobelo. Nama perusahaannya, yakni CV. Module Grup. Pada tahun anggaran 2003/2004 ia ikut tender pada berbagai proyek yang akan dilaksanakan di lingkup Pemkot Kendari. Guna memperlancar kegiatan tersebut, La Tobelo berapa kali bertemu dengan Munjab di Kantor DPRD di ruang komisi tempat Munjab bekerja yang tidak dihadiri oleh teman partai yang lain.<sup>12</sup> Ketika hal itu ditanyakan oleh peneliti, mengapa Munjab dan Karim melakukan pertemuan yang tidak dihadiri oleh teman-teman partai lain, Munjab menjawab sifat pertemuan rahasia karena membahas alokasi proyek untuk fraksi. Dikatakannya, jatah untuk fraksi tiap tahun anggaran hanya satu.<sup>13</sup>

---

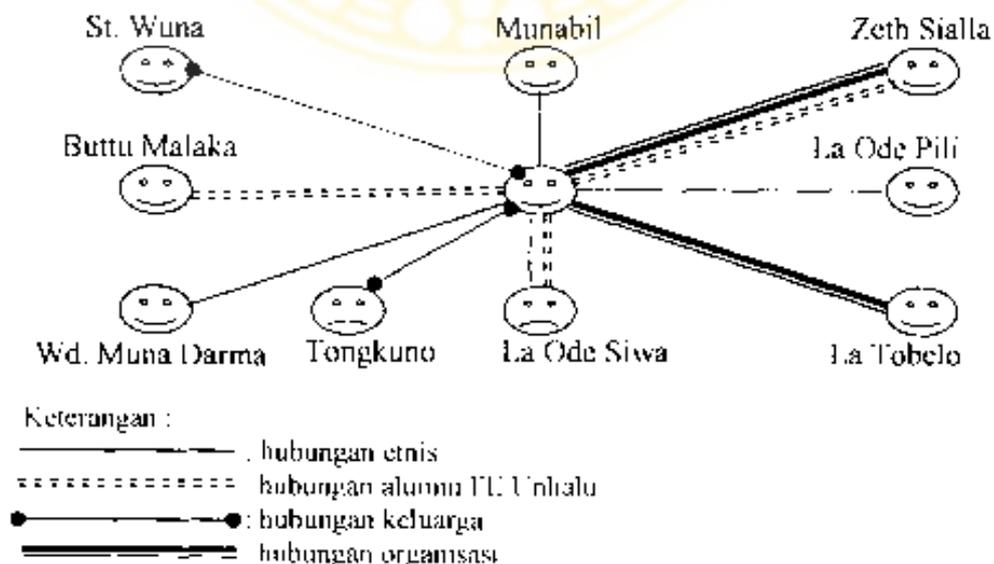
<sup>12</sup> Ketika penelitian berlangsung, peneliti sering bertemu dengan La Tobelo di ruangan Munjab pada Komisi A, tempat Munjab bergabung. Jika Karim datang, biasanya ia hanya berdiskusi tentang informasi tata cara pengajuan penawaran, besar anggaran proyek yang akan diikuti. Biasanya Munjab memberikan informasi umum tentang nama proyek bersangkutan dan memberikan informasi tentang persyaratan untuk ikut di tender pada proyek yang akan diikuti.

<sup>13</sup> Saat penelitian berlangsung, APBD Kota Kendari T A 2002/2003 baru saja disahkan menjadi Perda.

Masuknya La Tobelo dalam jaringan pribadi Munajab, sebetulnya semakin memperkokoh kedudukannya sebagai ketua parpol. Saling silang dan saling terkaitnya para elite parpol, menjadikan jaringan itu semakin rumit dan kompleks. Hal itu disebabkan karena elite parpol yang melakukan jaringan atas dasar etnis, tetapi pada saat yang sama, spektrumnya juga merambah atas dasar bisnis.

Karena alasan itu penulis cukup aman untuk menarik kesimpulan bahwa Munajab mempunyai jaringan pribadi yang multipleks dengan pengurus DPC yang lain. Ada yang dekat karena sesama alumni PT, ada yang karena keluarga, dan *vis a vis* etnis. Hubungan seperti itu menunjukkan bahwa seorang elite selalu membuat mata rantai dengan orang lain, dan akhirnya ia menjadi titik sentral di pusat jaringan tersebut. Saling silang terkaitnya Munajab dengan pengurus DPC, dapat dilihat pada gambar 3 berikut.

**Gambar 3**  
**Jaringan Pribadi Munajab dengan Jaringan Pengurus Lain di PDI-P**



### 6.3.2 Hubungan Munajab- Pengurus PAC

Bukan hanya di tingkat DPC Munajab berusaha ingin menjadi 'pusat dari jaringan', tetapi juga di tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC) Karena itu, Munajab dalam menyeleksi pengurus PAC mencari orang yang dapat dipercaya dan tidak meragukan.<sup>14</sup> Kepercayaan itu membuat Munajab yakin bahwa pengurus yang akan direkrutnya bersedia menjadi partner. Ia akan mafhum pada nilai-nilai dan platform organisasi. Kedudukan Munajab sebagai Ketua DPC menguntungkan baginya dalam menyeleksi orang dengan kriteria tersebut. Semua itu merupakan unsur-unsur pokok yang melekat pada modal sosial yang dimiliki oleh organisasi. Coleman (1986:123) mengatakan bahwa nilai utama dari modal sosial terletak pada nilai-nilai struktur sosial tempat para aktor bekerja dan dipakai oleh para aktor sebagai sumber daya untuk mewujudkan kepentingannya.

Diskusi mengenai pembentukan PAC sudah dimulai awal tahun 2003. Dengan dibantu oleh Munabil, ada beberapa kriteria yang dirumuskan untuk menyeleksi pengurus baru, khususnya untuk PAC yang baru dibentuk yakni PAC Kec. Abeli dan PAC Kec. Kendari Barat. Munabil mengatakan sebagai berikut:

“ Untuk Kendari Barat kami sengaja pak Manuru karena ia termasuk senior di wilayah tersebut. Calon yang ada di Kendari Barat adalah dua yakni pak Arudin dan pak Manuru. Kami ke pak Arudin, ia setuju karena pak Azis itu juga ponakan dari Munajab (ketua DPC PDI-P Kota Kendari). Lalu untuk Kecamatan Abeli kita menunjuk pak Gamilu

<sup>14</sup> Pada saat penelitian berlangsung ada beberapa PAC yang akan di reposisi karena masa jabatannya sudah berakhir. Ada juga penambahan PAC sebagai konsekuensi dari pemekaran wilayah kecamatan di Kota Kendari

karena sebelumnya ia salah satu pengurus PAC Poasia lalu kita drop turun. Praktisnya, orang-orang yang menjadi pengurus PAC adalah sesuai dengan wilayah masing-masing” (wawancara, 3 Maret 2003)

Di kedua PAC tersebut, intervensi pengurus DPC sangat dominan untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua di masing-masing PAC. Ketua PAC Kecamatan Kendari Barat, La Manuru, S.E.<sup>15</sup> ditunjuk langsung oleh pengurus DPC, La Manuru, etnis Muna sekaligus kemenakan Munajab, dengan pertimbangan ia “senior”. Demikian halnya Ketua PAC Kec. Abeli, Munano, S.Pd.<sup>16</sup> etnis Muna ditugasi oleh DPC menjadi Ketua partai dengan pertimbangan ia pernah menjadi Pengurus PAC Kec. Poasia

Yang menarik, penunjukan Ketua PAC yang baru (PAC Kendari Barat dan PAC Abeli) didasarkan atas kesamaan etnis, yakni Muna. Ini merupakan salah satu cara yang digunakan oleh Munajab untuk memobilisasi etnis Muna pada saat pemilu 2004. Dengan semakin dekatnya pemilu 2004, di bawah kepemimpinan Munajab, etnis menjadi alat untuk memperoleh legitimasi dari seluruh komponen PAC. Walaupun senantiasa Munajab mengemukakan bahwa platform partai adalah nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial, namun struktur internal partai tidaklah menggambarkan hal tersebut. Munajab mengaku bahwa kedua ketua di atas sudah diseleksi secara teliti, tetapi dalam penunjukan ketua tersebut tampak bahwa Munajab ingin menjadikan PAC itu

<sup>15</sup> Padahal figur ini belum mempunyai pengalaman memadai dalam politik. Ketika kuliah aktivitasnya sebagai relawan LEPMIL dan reporter radio Suara Alam. Dalam pengakuannya kepada penulis, Munajab yang menawari jabatan Ketua PAC Kendari Barat

<sup>16</sup> Sama halnya dengan La Manuru, figur ini juga masih miskin pengalaman dalam dunia politik. Ketika menjadi mahasiswa, aktivitasnya hanya sebatas kuliah saja. Ia total terjun ke dunia politik setelah menyelesaikan studinya di FKIP Unhalu. Dalam pengakuannya kepada penulis, ia ditawarkan untuk menjadi Ketua PAC Abeli dari Kapnalao (Mantan Ketua PAC Poasia). Alasan Kapnalao saat itu, organisasi kesulitan kader dalam mencari figur Ketua PAC

sebagai perpanjangan tangan atas kekuasaan yang dimilikinya. Tampak bahwa kedua orang yang ditunjuk tersebut adalah figur yang mempunyai “keahlian untuk melakukan apa yang diinginkan majikan”. Tidak ayal, tindakan yang dilakukan oleh Munajab tersebut mendapat reaksi dari Andika. Ia membuat plesetan bahwa PDI-P adalah singkatan dari, “Partai Demokrasi Indonesia-Pribadi”.

Sekalipun tidak pernah Andika mengungkapkan kekecewaannya secara terbuka, tetapi perilakunya menjelang persiapan pemilu 2004 menunjukkan adanya kecurigaan bahwa ia ingin menjauhkan diri dari segala aktivitas partai. Ia jarang ke sekretariat dan dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh partai, ia jarang menghadirinya. Munajab juga kesulitan untuk menggantinya karena efektifitasnya diragukan, dan juga tindakan itu tidak strategis.

Imbas dari permainan Munajab yang mengambil properti etnis dalam memperkuat legitimasinya di tingkat DPC berpengaruh pada perilaku pada elite parpol di tingkat PAC. Hal itu terlihat pada konsolidasi PAC yang sudah habis masa jabatannya. Ketua lama, dengan berbagai macam alasan, tidak ingin lagi menjadi Ketua PAC. Mekanisme pergantian ketua dilakukan dalam forum Musyawarah Cabang Khusus. Permainan etnis terjadi dengan kasat mata karena pengganti Ketua PAC lama mempunyai latar belakang etnis yang sama dengan Ketua PAC baru. PAC Soropia, La Ode Pili, S.H., (etnis Muna) menggantikan Kapitalao (etnis Muna). PAC Kecamatan Kendari Ferry Malleppe (etnis Bugis) menggantikan Ambo Tang (etnis Bugis). PAC Mandonga La Ode Munasir (etnis Muna) menggantikan La Ode Kapita (etnis Muna). PAC Baruga. Guslan (etnis Tolaki) menggantikan Abd. Azis (etnis

Tator). Adapun nama Ketua dan Sekretaris Partai hasil konsolidasi pengurus dapat dilihat pada tabel 6.6 berikut.

**Tabel 6.6**  
**Nama Ketua dan Sekretaris Hasil Konsolidasi Organisasi**

Pengurus Anak Cabang (PAC)	Nama Ketua	Nama Sekretaris	Keterangan
Kendari	Ferry Malleppe (Bugis)	Saleng Beddu (Bugis)	Disahkan oleh Pengurus DPD No.004/118/DPD/KPTS/VIII/2003
Mandongga	La Ode Munasir (Muna)	Irfan Ido, S.P., (Muna)	Disahkan oleh Pengurus DPD No.001/118/DPD/KPTS/VIII/2003
Kendari Barat	La Manuru, S.F., (Muna)	La Bonto Lasamana (Muna)	Disahkan oleh Pengurus DPD No.005/118/DPD/KPTS/VIII/2003
Poasia	La Ode Pili, S.H., (Muna)	La Ode Mubarak Smo, S.P., (Muna)	Disahkan oleh Pengurus DPD No.003/118/DPD/KPTS/VIII/2003
Abeli	Munano, S.Pd (Muna)	Ali Jaiz (Muna)	Disahkan oleh Pengurus DPD No.006/118/DPD/KPTS/VIII/2003
Baruga	Guslan (Tolaki)	Aldryn (Tator)	Disahkan oleh Pengurus DPD No.002/118/DPD/KPTS/VIII/2003

Sumber : Sekretariat DPC PDI-P Kota Kendari, 2004

Dengan komposisi seperti di atas, elite parpol pada level PAC saat ini benar-benar dikuasai oleh orang Muna. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Munajab, tampaknya ia berhasil untuk mengkonsolidasikan semua kekuatan-kekuatan yang ada, sehingga dengan demikian orang-orang yang duduk dalam jabatan-jabatan strategis, seperti pengurus DPC, anggota DCT, dan pengurus PAC, didominasi oleh etnis Muna. Ini tentu saja bertentangan dengan apa yang pernah disarankan Lijphart (dalam Snyder, 2004) dengan ide *consociational democracy* yang dalam ide ini terdapat gagasan adanya sistem tawar-menawar antarpimpinan etnis, dan penghormatan terhadap semua anggota kelompok.

Berdasarkan pengakuan Munajab, hubungannya dengan PAC dilakukan pada rapat-rapat partai yang mengundang PAC. Biasanya PAC dilibatkan pada momen-momen penting di organisasi. Berikut ini arena-arena

di organisasi yang melibatkan PAC yakni penentuan delegasi untuk mengikuti kongres dan permintaan nama bakal calon walikota Kendari Periode 2001--2005. Munajab menurulkannya sebagai berikut :

“ Pada waktu itu, DPC mengundang semua PAC yang ada guna mengambil keputusan siapa delegasi yang akan mewakili DPC Kendari pada sat Kongres. PAC sengaja dilibatkan karena saat itu banyak anggota yang mau berangkat. Adapun kemampuan organisasi untuk membiayai agak terbatas yakni hanya 2 orang. Jika ingin berangkat dengan biaya sendiri tidak masalah. Untuk menjamin objektivitasnya, yang pimpin rapat saat itu, yakni Hermanto, SH, M. Hum dari DPD Wilayah. Akhirnya peserta rapat secara aklamasi mempercayakan kepada Saya (maksudnya Munajab) dan Erwin untuk mewakili DPC mengikuti kongres tersebut. Pada momen penjaringan nama-nama bakal calon Walikota, kita juga meminta nama-nama calon walikota Kendari. Setelah surat dikirim, ternyata ada beberapa pengurus PAC yang datang menemuinya di Kantor dan meminta informasi tentang peta kekuatan masing-masing calon. Saya gambarkan, dan saking bersemangatnya ada PAC yang langsung ke DPRD menyampaikan aspirasinya tanpa melalui DPC lagi” (wawancara, 17 Maret 2003).

Diakui oleh Munajab bahwa tidak ada jadwal khusus dari pertemuan yang melibatkan PAC tersebut. Biasanya rapat diadakan jika ada hal penting. Rapat itu sendiri penting karena banyak masalah yang perlu untuk dibicarakan bersama. Dalam rapat-rapat tersebut Munajab kadang-kadang mempraktikkan strategi ala gelang karet. “*Kadung dilepas kadung ditarik. Ia lepas pada saat jika ingin mengetahui lebih dalam apa masalah yang dihadapi oleh PAC tersebut. Pada kesempatan lain, ia menariknya jika PAC tersebut tidak paham betul persoalan yang dihadapi. Pada saat-saat tertentu, dengan kapasitasnya sebagai ketua partai, ia mengerahkan kekuasaannya tingkat terakur menggunakan alasan ‘instruksi dari DPP’ dan dengan demikian diskusi ditutup. Momen yang dimaksud Munajab adalah sosialisasi garis partai tentang mekanisme pencalonan calon anggota legislatif seperti sudah*

dipaparkan penulis pada bagian lain tulisan ini. Sayang penelitian ini tidak banyak waktu untuk mengungkap bagaimana respons PAC menghadapi tekanan seperti itu.

### 6.3.3 Hubungan Munjab - Basis Massa

Salah satu hal yang cukup krusial yang dihadapi oleh elite parpol adalah bagaimana mendapatkan legitimasi dari para pengikutnya. Anggota massa pengikut yang terdiri atas berbagai latar belakang sosial seperti agama, etnis dan gender memerlukan cara pendekatan tersendiri dan tidak dapat digeneralisasikan begitu saja. Tidak dapat diketahui dengan pasti berapa jumlah komposisi berdasarkan etnis, agama, dan gender para pendukung Munjab dan partai. Akan tetapi dapat diduga adanya kecenderungan bahwa latar belakang anggota massa pengikut cukup bervariasi dengan latar belakang etnis, agama, dan gender. Perbedaan etnis, misalnya, bisa saja dijumpai adanya anggota massa pengikut yang merasa identitasnya kurang dihargai dan mereka belum merasa memperoleh alokasi yang memadai dari elite parpolnya.

Elite parpol yang ada sekarang ini sadar bahwa etnis bisa menjadi medium penting yang dapat mempertemukan (menyambungkan) dirinya dengan basis massanya. Pada tataran empiris dijumpai hubungan yang terjalin tersebut lebih banyak atas dasar perkawanan satu sama lain. Hubungan antara elite-anggota massa lebih bersifat pribadi, seperti ia 'wajib' hadir pada acara-acara kematian, atau undangan pernikahan, dan sunatan pengikutnya. Setiap kerumunan orang di tempat-tempat tertentu ia menegurnya dengan sapaan *damar namu dheki bupat* (panggilan sapaan basa basi) suatu istilah

yang sudah sangat familiar bagi orang Muna. Karena posisi pribadinya yang sering dipertaruhkan, Munajab kadang harus menanggung resiko untuk mengeluarkan sejumlah biaya politik guna tetap menjaga kesetiaan emosional pengikutnya.<sup>17</sup> Selama penelitian berlangsung, tidak jarang Munajab sering membelikan rokok atau terkadang memberi uang kepada pengikutnya untuk membeli *kameko*. 'Kewajiban pribadi' tersebut bermanfaat guna menopang karier elite, atau setidaknya-tidaknya membuat pengikut tersebut dapat disuruh melakukan atau tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu.

Lebih lanjut, Munajab menggambarkan strategi umum partai dalam usaha mendekatkan diri dengan para pemilih, seperti paparan berikut :

" Sosialisasi terus kita intensifkan terutama bagi pemilih pemula. Kami sudah sosialisasi tanda gambar dulu. Ada yang mempersoalkan bahwa itu sudah curi start. Tetapi pertanggungjawaban kita adalah itu hanya sosialisasi belaka karena dalam tanda gambar itu belum ada nomor partai. Nah, coba lihat bendera kami kan belum ada ada nomornya sama dengan partai-partai lain yang juga sudah memasang tapi belum dicantumkan nomor partai. Kami lebih memfokuskan pada pemilih pemula karena mereka lebih mempunyai kemampuan untuk menyerap informasi ketimbang pemilih-pemilih tradisional. Tetapi inikan bukan pekerjaan yang mudah karena kami belum sempat membangun fondasi yang selama 32 tahun hancur. Fondasi dalam sebuah partai itu kan dibentuk kalau orang-orang dalam partai menjiwai betul ideologi partai dan semangat partai yakni semangat kemerdekaan. Nah, dalam waktu dekat ini kita akan mencoba meningkatkan wawasan mereka lalu kita memberi penjelasan. Kita kan melihat bahwa ini butuh proses yang panjang tetapi inikan kita hanya bagaimana menstimulus. Nah dalam 10 tahun kedepan kita dapat mengelola partai maka dengan sendirinya kita akan mengelola kepentingan partai itu berarti mengelola kepentingan rakyat banyak. Nah, kalau ada anggota anggota DPRD bahwa yang mereka kelola disitu adalah hak-hak rakyat sehingga mereka tidak lagi terpisah. Yang sekarang ini terjadi bahwa mereka seolah duduk di DPRD saya ini wakil rakyat sehingga sering

<sup>17</sup> Dalam suatu kesempatan, Munajab mengeluh kepada penulis mengenai terlalu sedikit rekan-rekannya di kalangan pengurus partai yang siap berkorban demi partai. Ia memberi ilustrasi jika ingin menjadi elite di PDI-P sama seperti dengan "menyusui bayi". Untuk menyusui bayi itu memerlukan susu penuh vitamin, sementara kebanyakan elite lain sangat enggan memberikan vitamin.

mengatasnamakan rakyat. Padahal sebenarnya mereka itu adalah memperjuangkan hak-hak sipil sehingga sebelum memutuskan sesuatu tanya dulu. bagaimana ini. Nah ini berarti antara rakyat dengan wakilnya itu sudah tidak ada jarak lagi. Nah, kita harapkan kedepan itu akan begitu". (wawancara, 12 Maret 2003).

Banyak ragam yang dilakukan oleh Munjab dan elite partai lain untuk mendekati diri dengan massa pengikutnya. Yang paling umum adalah penyebaran tanda gambar partai, pamflet, sticker, dan poster. Tanda gambar tersebut banyak dipasang di jalan-jalan utama, pagar rumah pribadi, bangunan-bangunan publik, iklan di koran dan televisi lokal, kalender, tiang-tiang listrik, decker, dan tempat-tempat strategis lainnya. Media untuk sosialisasi sering bisa dengan kampanye terbuka di lapangan atau pertemuan dengan skala yang lebih terbatas.

Terjadi perubahan penting dalam pola sosialisasi pemilu pada saat kampanye pemilu 2004 yang lalu. Perubahan itu menyangkut merosotnya kegiatan kampanye,<sup>18</sup> sehingga timbul kesan bahwa semangat berkapampanye di sebagian jurkam sudah kendur. Munjab menyadari kemungkinan terkecoh dengan mudahnya massa untuk menerima baju kaos dan datang untuk mendengarkan pidato-pidato politik para jurkam partai. Ia mencontohkan, kehadiran massa pada suatu kampanye bukanlah ukuran bagi kekuatan partai – karena orang datang untuk ikut menikmati suasana keramaian, atau sekedar karena ada kawan yang mengajaknya. Kegiatan sosialisasi partai pada kampanye 2004 lebih mengandalkan pertemuan yang lebih kecil di tempat terbatas, misalnya dilaksanakan di rumah kader partai atau di aula tertentu

---

<sup>18</sup> Dari jadwal kampanye yang dikeluarkan oleh KPUJ Kota Kendari beberapa kali PDI-P tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan tersebut

Dengan teknik pertemuan seperti itu, lebih mudah bagi Munjab dan elite parpol lain untuk menanamkan kedalam pikiran para massa kaitan antara partai tersebut dengan caleg yang akan duduk di DPRD Kota.

Upaya paling serius dari elite parpol untuk mendekati dengan basis massanya adalah dengan distribusi kartu anggota sebanyak mungkin.<sup>19</sup> Kartu anggota, sekali pun diperoleh tanpa uang pendaftaran atau iuran wajib, tampaknya menciptakan ikatan yang efektif. Bila dukungan seorang warga telah berhadil diperoleh, betapa pun besar keihlasan warga itu, dukungan tersebut masih dibuat lebih kukuh lagi dengan memberinya kartu anggota. Penerimaan anggota baru tidak pernah disertai pengambilan sumpah, tetapi khasiat kartu anggota serupa dengan sumpah.

Dalam hari-hari terakhir menjelang masa kampanye yang telah ditentukan oleh KPUD, elite parpol memusatkan tenaga pada tata cara pencoblosan di semua wilayah daerah pemilihan. Kampanye partai diakhiri dengan kunjungan pribadi-pribadi ke rumah-rumah kader partai untuk memastikan pilihannya. Ada pula rumah yang dikunjungi pada orang yang pilihannya dianggap masih ragu, dan bisa dibujuk untuk mengubah sikap.

Satu isu utama yang muncul di sebagian massa adalah apakah Munjab dan elite parpol yang ada di PDI-P sanggup menyediakan pekerjaan dan peluang usaha bagi mereka. Jika digeneralisasikan, keinginan massa tersebut adalah kebutuhan adanya patronase di tubuh PDI-P. Patronase bukan sekedar kebutuhan politis, tetapi merupakan budaya yang sudah sangat mengakar

---

<sup>19</sup> Sulit memperkirakan dengan pasti berapa jumlah kartu anggota yang dikeluarkan oleh elite parpol. Penyebabnya karena selain DPD Propinsi mencetak dan menyebarluaskan kartu anggota, tetapi juga kartu anggota juga dicetak dan disebarluaskan oleh PAC Kecamatan, dan para caleg setiap kampanye dan sosialisasi juga kerap membagikan kartu anggota.

dalam kehidupan masyarakat tradisional Indonesia. Di kalangan anggota PDI-P tumbuh suatu sikap bahwa elitnya mempunyai kewajiban untuk mendistribusikan kemakmuran. Kalangan anggota berharap agar Munajab selaku elite dapat memanfaatkan kedudukannya untuk memberi kesempatan bagi para pendukungnya. Munajab yang menjadi anggota DPRD Kota Kendari diharapkan semakin berharga karena dapat meningkatkan status, memberikan jaminan tersedianya lapangan pekerjaan, dan kemampuan bertindak sebagai pengayom bagi kelompok etnisnya.

#### **6.3.4 Koneksi-Koneksi Politik**

Elite parpol memiliki sejumlah koneksi-koneksi politik dengan sesama birokrat, atau orang penting lainnya. Meskipun sulit membuktikan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi sulit dibayangkan bahwa tanpa ada koneksi elite parpol akan mendapat banyak informasi penting dan rahasia dari sejumlah kalangan. Proses koneksi dapat terjadi karena elite parpol yang kebetulan menjadi anggota DPRD dapat mengakses dengan pusat kekuasaan yang ada di tingkat lokal. Melalui koneksinya ia mendapat jatah proyek dari sejumlah pimro yang ada di lingkungan pemkot. Elite parpol sudah semakin lincah untuk memperoleh informasi terbatas tentang proyek-proyek yang bisa dikerjakan.

Munajab berhasil memperoleh pekerjaan. Tampaknya setiap tahun anggaran, walikota/wakil walikota yang mengelola kekuasaan di lingkungan pemkot membagikan proyek kepada semua golongan politik yang ada. Dengan bendera CV. Module Group, Munajab bersama fungsionaris partai lainnya, Ia

Tobulo kerap menggarap proyek yang dianggap sebagai jatah "Fraksi" yang ada di DPRD Kota Kendari. Berdasarkan informasi dari La Tobulo, dalam tahun anggaran 2003, perusahaannya mengerjakan proyek yang berasal dari Belanja Pembangunan yakni Pemeliharaan tanaman dan penghijauan di kawasan *Kenduri Beach* dengan total anggaran Rp. 25.000.000,-, Rehab dan Penataan/Pematangan tanah Komplek Olahraga Wua-Wua sebesar Rp. 75.000.000,-

Koneksi dengan birokrasi semakin menentukan keberadaan elite parpol. Sebagai elite parpol yang memiliki koneksi di lingkungan birokrasi, Munajab dapat memperoleh keuntungan karena mudah mengakses informasi tentang proyek-proyek yang bisa dikerjakan. Itu hanya dapat diperoleh karena ia mempunyai "orang dalam". Sementara orang lain, tidak mudah mengakses informasi tersebut karena harus mengikuti prosedur resmi. Munajab kadang-kadang melakukan kontak dengan "perantara-perantara" jika ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih besar. Ia juga kadang melakukan pertukaran informal yang penuh siasat untuk mendapatkan proyek dengan keuntungan timbal balik. Keterampilan untuk membangun jaringan dalam bentuk koneksi tersebut bisa saja dilakukan guna membantu orang lain, sekaligus memanfaatkan posisinya untuk memperkaya diri sendiri. Situasi seperti itu telah memaksa Munajab untuk menggunakan "taktik gerilya" dalam kegiatannya guna masuk dalam lingkaran birokrasi dan pejabat lokal.

Dalam suatu kesempatan, Munajab mengatakan bahwa ia mencari koneksi untuk "menjaga diri". Ungkapan Munajab, jika ditafsirkan mengandung arti bahwa latar belakang keputusannya mencari koneksi karena

ada kekhawatiran ia tidak mampu bersaing dengan orang lain dalam arena yang ada. Jika diperhatikan, *trend* untuk mencari koneksi di birokrasi bukan hanya dilakukan oleh Munajab. Ir. Yani Muluk adalah contoh dari elite Partai Golkar yang juga mempunyai koneksi kuat di jajaran birokrasi.<sup>20</sup> Ada pula elite parpol dari Partai Bulan Bintang yakni Haskar Hafid, S.P., yang mampu membina hubungan dengan birokrasi dan terus memelihara koneksi dengan mereka. Seperti Yani Muluk, ia pun berhasil memelihara saluran untuk memperoleh pekerjaan.

Jadi, ada pola yang sama dalam penyebaran *trend* ini di kalangan elite parpol lokal. Dengan kata lain, ada penularan sosial. Keputusan yang diambil oleh Munajab dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan tindakan yang diambil menjalankan dan memperkuat efek secara kolektif. Karena informasi mengalir dalam jaringan, ada proses pengambilan keputusan yang cepat dalam jaringan tersebut.

Selain mencari koneksi di lingkungan birokrasi, ada pula koneksi di lingkungan organisasi. Koneksi penting Munajab dalam organisasi adalah La Ode Munadora, ketua DPD PDI-P Sultra. Keduanya sama-sama etnis Muna. Secara moral La Ode Munadora ingin menjadi 'bapak' yang baik bagi setiap DPC yang ada. Pada saat pemilihan Walikota yang lalu, berdasarkan informasi yang peneliti peroleh La Ode Munadora rela *merogoh kocek* pribadinya dan

---

<sup>20</sup> Ia kerap kali mendapat borongan pekerjaan seperti pembuatan *decker*, rehab bangunan, dan suplai ATK ke kantor tertentu. Yang menjalankan roda bisnis adalah perusahaan CV Yusmar, yang Direkturnya adalah Ir. Zulkarnain Muluk, adik kandungnya sendiri. Semua pekerjaan yang didapat karena ada koneksi, sementara bagi yang tidak punya koneksi, sukar untuk mendapat pekerjaan.

memberinya uang masing-masing sebesar Rp. 35 Juta<sup>21</sup> kepada setiap anggota DPRD dari Fraksi F-PDIP. Langkah ini dilakukan untuk menjaga agar kader-kader PDI-P tidak terjebak dalam *money politics*.

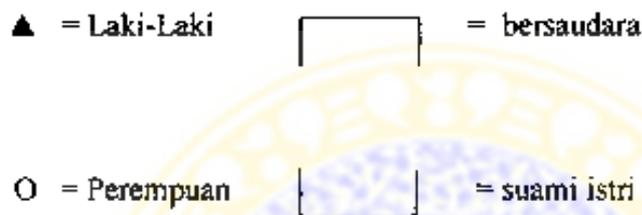
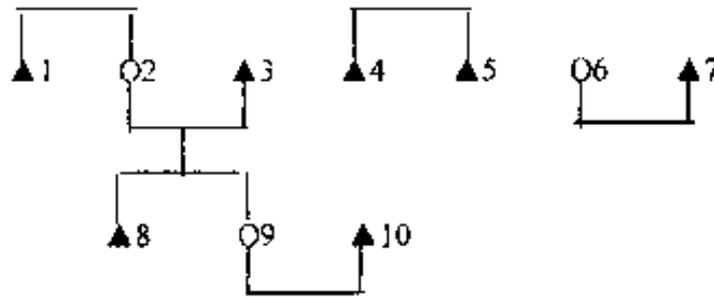
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa satu faktor yang sifatnya menentukan muncul, kemampuan seorang elite parpol dalam mengembangkan koneksi adalah kemampuannya untuk memperoleh "jatah" yang alokasinya dikontrol oleh pejabat. Yang memperoleh keuntungan dari keadaan itu adalah aktor yang menguasai jalur-jalur singkat dan kontak dengan para pejabat tersebut. Hanya saja resiko seperti itu tetap ada. Jika ator tersebut sangat tergantung dengan pejabat tersebut, tentu hal tersebut sangat rawan oleh setiap perubahan politik. Uraian yang terakhir tidak akan banyak dibicarakan dalam tulisan ini.

#### **6.4 Hubungan Kekerabatan antara Seseorang dengan Pengurus PDI-P**

Di dalam keluarga besar PDI-P, ada beberapa pengurus yang mempunyai hubungan kekerabatan satu sama lain. La Ode Munadora Pedansa sebagai pengurus PDI-P Propinsi Sulawesi Tenggara mempunyai hubungan keluarga dengan La Ode Ndoria (Ketua PAC PDI-P Mandonga). Adapun hubungan antara keduanya yakni seperti dalam diagram dibawah ini.

---

<sup>21</sup> Bukan hanya anggota DPRD Kota Kendari yang diperlakukan seperti itu. Pada pemilihan Gubernur yang lalu, La Ode Munadora juga memberi uang Rp. 75 Juta kepada setiap anggota DPRD Propinsi dari F-PDIP supaya tidak terpancing dengan permainan *money politics*. Langkah serupa juga dilakukan pada pemilihan Walikota Bau-Bau, informasi yang peneliti peroleh kalau jumlah uang yang diserahkan yakni Rp. 35 Juta per orang, sama dengan jumlah untuk anggota DPRD Kota Kendari.



#### Keterangan

- No. 1 : La Ode Munadora  
 2 : Wa Ode Munima Pedansa  
 3 : La Ode Sakai  
 4 : La Ode Hasid Pedansa  
 5 : La Ode Mino  
 6 : Wa Ode Tasima  
 7 : La Ode Sefu  
 8 : La Ode Kapita  
 9 : Wa Ode Hasnah  
 10 : La Ode Munasir

Dari gambar tersebut terlihat bahwa keluarga besar La Ode Pedansa berkiprah penting di PDI-P. La Ode Munadora sebagai Ketua PDI-P provinsi Sulawesi Tenggara. Adiknya, La Ode Hasid Pedansa menjadi anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara hasil pemilu 1999 dan pada pemilu 2004 menjadi caleg dengan menempati nomor urut pertama DPRD Propinsi daerah pemilihan Kota Kendari dan Konseil. Adik iparnya, La Ode Sefu menjadi anggota DPRD

Kabupaten Muna hasil Pemilu 1999 dan untuk pemilu 2004 menjadi caleg PDI-P Kabupaten Muna nomor urut pertama daerah pemilihan Katobu. Ia juga mempunyai kemenangan ipar yakni dengan La Ode Munasir (Ketua PAC PDI-P Mandonga), di samping kemenangan langsungnya yakni La Ode Kapita (mantan Ketua PAC PDI-P Mandonga).

Biasanya dalam ikatan kekerabatan, keanggotaannya didasarkan pada keaslian dari hubungan keturunan. Dengan jalan pikiran seperti itu, dapat diduga bahwa organisasi PDI-P merupakan suatu jaringan yang di dalamnya terdapat hubungan kekerabatan tertentu. Hubungan kerja antara La Ode Munadora dengan para pengurus yang lain ibarat "bapak" dengan "anak". La Ode Munadora adalah bertindak sebagai "bapak", dan pengurus yang dipilih dan diangkat sebagai "anak". Para pengurus yang diangkat tersebut diperlakukan sebagai pembantu dalam organisasi untuk menjaga "saudara-saudara" yang lain. Kendati para pengurus punya pikiran dan pendapat sendiri, mereka diharapkan cukup matang untuk mengendalikan diri dan senantiasa patuh terhadap petunjuk dari La Ode Munadora.

Hubungan "bapak-anak" menimbulkan adanya otoritas yang paternalistik. "Sang bapak" sebagai patron memberikan perlindungan bantuan materiil kepada "anaknyanya".<sup>22</sup> Sebagai imbalannya, "anak" akan memberikan dukungan dan loyalitasnya kepada Bapak. Dengan demikian, kultur yang ada

---

<sup>22</sup> Bandingkan uraian dengan uraian Scott yang mengemukakan bahwa pada kebanyakan masyarakat di Asia Tenggara hubungan patron-klien didasarkan atas pertimbangan untung rugi, lihat misalnya "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia", dalam *American Political Science Review*, Vol. 58, September 1975, hal. 1028. Pola hubungan patron-klien yang lebih canggih di Indonesia telah dilukiskan oleh Karl D Jackson dalam tulisannya "Traditional Authority and National Integration: The Darul Ulum Islam Rebellion in West Java", *Ph.D Dissertation*, Massachusetts Institute of Technology (MIT), London, 1971

di PDI-P, keterlibatan anggota dalam partai berarti mengikat diri kepada "bapak" dan merasa berkewajiban untuk mendukungnya dalam segala hal. Ikatan-ikatan sosial seperti itu menjadi landasan bagi pembentukan kekuasaan elite parpol, yang berarti bahwa elite parpol mengembangkan pengikut yang merasa berhutang budi.

Apa yang terjadi di PDI-P, adalah bekerjanya "keluarga" yang sebetulnya bukan hal baru dalam fenomena politik di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari pandangan Ruth Mc. Vey (dalam Shiraishi, 2001:122) bahwa suatu kelompok atau organisasi merupakan "suatu keluarga besar". Hal tersebut dalam masyarakat Indonesia modern, keberadaannya amat kokoh. Dapat dikatakan bahwa berdasarkan pertalian kekerabatan yang terjadi di kalangan elite PDI-P, perbenturan kepentingan di antara sesama pengurus tidak mengarah pada konflik serius yang dapat mengganggu kinerja partai. Sulit untuk dibantah bahwa keberhasilan ini erat hubungannya dengan pengendalian elite atau kekuatan etnis lain di tubuh partai. Akhirnya, sumber daya yang ada di organisasi dapat digunakan atau merangkul kelompok etnis lain yang berpotensi menjadi bagian dari oposisi di organisasi.

#### **6.5 Modal Sosial di PDI-P : Kuat *Bonding*, Lemah *Bridging***

Modal sosial adalah adanya kebersamaan dan kerekatan sosial yang ada dalam sebuah organisasi. Kebersamaan dan kerekatan yang baik di antara anggota organisasi tersebut akan menciptakan jaringan. Dalam uraian tentang jaringan pada sub bab di atas telah dipaparkan bahwa bekerjanya jaringan yang

dibentuk oleh elite parpol tersebut diawali oleh tumbuhnya kepercayaan yang diberikan pada orang tertentu. Kepercayaan itu tumbuh bisa dengan berbagai alasan, misalnya karena adanya persamaan etnis, pertemanan, kerabat, dan keluarga. Alasan untuk membentuk jaringan karena adanya sentimen emosional dan merasa senasib. Relevansinya modal sosial dalam organisasi seperti di PDI-P itu amat kuat karena modal sosial organisasi ini pada masa orde baru tergerus dan terkikis akibat konflik internal yang sering terjadi.<sup>23</sup>

Dalam kasus di PDI-P, jaringan dikendalikan terutama melalui hubungan etnis. Elite parpol akan menempatkan orang yang sama etnisnya pada posisi yang berpengaruh dalam parpol dan dari situ orang-orang yang ditempatkan tersebut dapat mengembangkan "karier politiknya" sekaligus menjaga kepentingan elitnya. Tanpa dukungan elite parpol, kemajuan "karier politik" seorang anggota partai amat sulit dicapai. Dalam keadaan seperti itu, umumnya terjadi tawar-menawar "tak terucap" antara "elite parpol" dengan "massa pengikut" yang menjamin keuntungan keduanya. Elite parpol mengandalkan massa pengikutnya untuk menyuarakan pandangan serta kepentingannya, sedangkan massa pengikutnya tergantung pada elite parpol dalam hal otoritas serta keamanan dirinya. Hal itu dimungkinkan karena elitelah yang berhak mendesak dan mengeliminasi kelompok etnis lain yang akan mendominasi sumber daya di organisasi.

---

<sup>23</sup> Sepanjang rezim orde baru, konflik etnis modern terjadi di internal partai puncaknya terjadi pada Kasus kelompok Megawati versus kelompok Fatimah Achmad yang berimplikasi sampai di tingkat DPD, DPC dan PAC. Konflik tersebut diperparah oleh belum adanya konsensus internal partai yang diatur dalam AD/ART mengenai mekanisme politik yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai "aturan main" dalam setiap konferda maupun konterecab, sehingga dapat terhindar dari konflik dan jalan buntu.

Sebagaimana lazimnya di sebuah jaringan, dalam keadaan yang utuh orang-orang yang ada merupakan salah satu kekuatan. Hal itu merupakan kekuatan ampuh karena ikatan yang dibentuk atas dasar persamaan etnis selalu berkembang dalam kuantitas, apalagi jika dibarengi dengan berkembangnya secara kualitas maka dengan sendirinya jaringan sosialnya berkembang sangat luas.

Bagi elite parpol sendiri, persamaan latar belakang sosial akan 'dimanfaatkan' dalam momen-momen tertentu. Pemanfaatan itu merupakan salah satu pilihan bagi elite parpol terhadap pemahamannya atas etnis. Kesadarannya sebagai orang Muna tidak terlepas dari kebudayaan Muna secara umum. Hal itu dapat dilihat misalnya dalam momen-momen penting di parpol. Melaksanakan pertemuan yang melibatkan massa banyak, mendistribusikan tanda gambar partai, membagikan selebaran/pamflet/brosur, menambah simpatisan, konsolidasi organisasi, melatih untuk mencoblos, kunjungan ke rumah-rumah, sampai mobilisasi orang untuk keperluan kampanye. Semua momen tersebut membutuhkan orang yang setia dan dapat dipercaya. Elite parpol yang tidak punya jaringan yang luas sampai ke anak ranting, dan berharap dapat menjangkau massa melalui media massa saja, biasanya akan gagal- meski elite parpol tersebut punya uang dan kekuasaan dalam pemerintahan.

Dari sejumlah pemanfaatan yang telah disebutkan di atas, yang paling menonjol adalah mobilisasi massa yang dilakukan oleh tim sukses. Para elite parpol jika ada jadwal kampanye, awalnya akan menghubungi tim sukses yakni para kader partai yang biasanya mempunyai latar belakang etnis yang

sama dengan elite parpolnya. Dengan kontak dengan para tim sukses ini semakin terbentur jaringannya yang khas pada masing-masing anggota. Munculnya tim sukses tersebut, bisa jadi akan semakin kompleks karena ada penambahan anggota di lapangan yang bisa berasal dari latar belakang sosial yang berbeda dari segi etnis, agama, dan gender. Jika dihubungkan dengan konteks organisasi, hal tersebut merupakan modal sosial karena dapat digerakkan dan dimobilisasi. Jenis ikatan seperti di atas dikatakan oleh Putnam (2000) sebagai *bonding social capital* yakni ikatan-ikatan sosial diantara para anggotanya yang berasal dari segmen yang sama (etnis dll).

Kecenderungan terjadinya *bonding* yang kuat di antara elite PDI-P sendiri disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, faktor migrasi etnis pendatang, khususnya Bugis Makassar yang ingin menjadi "penguasa di kampung orang" sehingga memunculkan kompetisi terselubung antara elite etnis pendatang dengan elite etnis asli. Kedua, faktor budaya lokal Muna yang memungkinkan orang Muna untuk menyatukan diri kedalam solidaritas kelompok yang kuat. Ketiga, faktor Munajab sendiri yakni orang yang lebih realistis dan ingin cepat mengambil keputusan karena terbiasa berhadapan dengan masalah-masalah genting di lapangan. Hal itu yang membuat Munajab tidak merasa perlu untuk banyak menyebarkan pola-pola relasi yang lebih luas lagi.

Modal sosial *bonding* yang kuat di PDI-P, tidak diimbangi dengan modal sosial *bridging* yakni adanya ikatan persilangan, antar pembilahan sosial. Ditengah suasana politik yang amat kompetitif, legitimasi elite parpol tidak hanya ditentukan hanya dari satu kelompok saja, tetapi juga sudah harus menyebar di kelompok-kelompok lain. Para pemilih banyak yang semakin

skeptis dan pesimis terhadap elitennya yang dianggap tidak mampu membawa perubahan dan mencoba mengambil jarak dari elitennya serta membuat kalkulasinya sendiri. Demikian pula ada orang atau kelompok yang sudah kecewa karena sakit hati dan tidak ingin diperalat lagi oleh elite tersebut.

Dalam kondisi yang seperti itu dibutuhkan figur yang mampu menjadi jembatan (*bridging*) dengan anggota-anggota lain yang berasal dari sub kelompok berbeda. Sayangnya, di tubuh PDI-P, sosok itu tidak banyak dijumpai. Yang ada adalah para elite yang sedang asyik-asyiknya hanya memperkuat ikatan ke dalam saja atas dasar etnis, pertemanan, dan kekerabatan.

Elite parpol yang hanya mengandalkan basis dukungan pada satu kelompok saja, cepat atau lambat akan terpinggirkan. Elite yang kokoh adalah elite yang mampu untuk melakukan hubungan sosial secara menyebar, jamak, dan heterogen. Dengan demikian, seorang elite akan mempunyai basis yang kuat sekali apabila ditopang oleh banyak kubu. Oleh sebab itu seorang elite harus pandai mempertahankan jaringan yang dimilikinya. Faktor ini bisa jadi akan mengalahkan modal lain, seperti uang, kekuasaan, dan kekayaan.

Bagaimanapun juga, modal sosial *bonding* yang kuat akan menghasilkan kepercayaan hanya pada satu kelompok saja, tetapi pada saat yang sama modal sosial itu meningkatkan ketidakpercayaan pada kelompok yang lain. Inilah yang menjadi masalah di PDI-P, modal sosial *bonding* yang kuat tidak diimbangi oleh *bridging* yang kuat pula. *Bonding* yang kuat, dan *bridging* yang lemah mengakibatkan kepercayaan dan pertukaran hanya di

## BAB VII

### ANALISIS

Uraian pada bagian ini bermaksud dengan mengacu kembali pada bagian sebelumnya, baik dari perspektif penelitian teori maupun dari hasil-hasil penelitian lapangan. Hal ini penulis tempuh agar kontribusi teoritik penelitian ini menjadi lebih jelas.

#### 7.1 Interpretasi Hasil Penelitian

Dengan segala kekurangan dan kelebihanannya, pembahasan sebelumnya telah berupaya memaparkan secara komprehensif temuan lapangan tentang pengkategorian elite parpol tentang etnisitas. Dalam teori konstruksi sosial, hal tersebut dinamakan *first order understanding*. Untuk mendapatkan pengkategorian yang lebih utuh, pada bagian ini akan dikemukakan interpretasi dari penulis sebagai upaya mencapai *second order understanding*.

Data lapangan menunjukkan bahwa kendati terdapat sejumlah variasi dalam pengkategorian yang dikemukakan oleh elite parpol, namun pada dasarnya sebagian besar dari mereka memberi makna etnis Muna sebagai, "suatu etnis yang mempunyai ciri khas tersendiri dan keanggotaannya didasarkan atas kelahiran, tempat tinggal, geneologis, dan darah". Dengan mengacu pada hal tersebut, bisa disimpulkan bahwa elite Muna mendefinisikan dirinya sebagai etnis Muna jika lahir di Muna atau bertempat tinggal di Muna, orang tuanya dari Muna atau mempunyai darah Muna. Dengan pengkategorian demikian, maka pengakuan ke-Muna-an paling dapat diungkapkan melalui alasan-alasan objektif melalui atribut Muna seperti nama, bahasa, dan bentuk tubuh (termasuk warna kulit). Selain kriteria objektif, pengkategorian

seseorang dapat secara subjektif yakni seseorang digolongkan satu etnis jika ada pengakuan dari diri sendiri atau orang lain mengakui orang tersebut.

Bagi orang Muna sendiri, identitas etnis tidak mudah untuk dihilangkan, tetapi justru dibangkitkan kembali. Sentimen etnisitas dapat dibangkitkan karena mempunyai fungsi yakni internal dan eksternal. Secara internal fungsi etnis untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan "siapa dirinya" di tengah alam semesta yang sering ambiguitas. Dalam posisi yang demikian, fungsi etnis adalah menyatukan orang-orang ke dalam satu kelompok, mencegah integrasi, memperkuat, dan menjaga kesinambungan budaya kelompok etnis. Keterikatan sebagai satu kelompok etnis memperkuat rasa kita (*in group*) dan berbeda dengan orang mereka (*out group*). Seperti yang dikemukakan oleh Simmel (dalam Jhonson, 1986:272) bahwa tiap-tiap kelompok etnis berkeyakinan bahwa peraturan, tata tertib dan budaya etnisnya yang paling baik. Sikap itu menimbulkan intoleransi atau oposisi terhadap kelompok lain, prasangka, penafsiran dan sebagainya.

Sementara itu secara eksternal, fungsi etnis adalah untuk legitimasi seseorang yang dikembangkan dalam bentuk-bentuk ekspresi etnis tertentu. Etnis dapat menjadi penegas identitas, dan dalam kondisi seperti itu, etnis dimanfaatkan oleh elite untuk memobilisasi karena sentimen-sentimen etnis mudah mengikat orang yang berbuat seakan-akan "kepentingan etnisnya".

Tampak bahwa elite parpol di Kendari, memiliki kecenderungan untuk membangkitkan etnisitas, baik untuk penggunaan dalam rekrutmen pengurus yang merepresentasikan kelompok etnisnya dalam jabatan strategis, pembentukan jaringan atas dasar etnis, mobilisasi dukungan kelompok etnis

tertentu. Tindakan dan elite parpol di atas dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk memperoleh dukungan dari anggota pengikutnya.

Hal itu dimungkinkan oleh watak oligarkhi para elite parpol yang terkombinasi dengan mandulnya pelembagaan partai. Perilaku elite parpol membangkitkan yang dimaksudkan dalam konteks ini yakni perilaku yang senantiasa hanya mementingkan kelompok saja. Padahal pernyataan formal AD/ART Parpol pada umumnya tidak menyatakan kaitannya dengan suatu etnis tertentu saja. Malahan yang dituntut adalah keharusan tumbuhnya nasionalisme. Perjalanan nasionalisme itu yang di satu sisi disemangati oleh suatu imajinasi yang mencoba ingin melakukan upaya pembentukan identitas baru partai yang bercorak inklusif, tetapi disisi lain cita-cita normatif ideal itu tidak kunjung tiba dalam realitas perpolitikan kehidupan parpol. Alih-alih merealisasikan imajinasi bersama elite parpol untuk memikirkan kepentingan bersama dan nasionalisme, realitas perilaku elite parpol lebih merupakan replika dari keberlanjutan masa lalu yang berbau kolonial, yang berujung pada kegagalan merealisasikan kepentingan bersama. Bila demikian, maka jelaslah bahwa ideologi partai lebih difungsikan sebagai kamufase kepentingan elite parpol untuk meraih dukungan dari massa secara mudah dan murah lewat jalur jaringan atas dasar etnis.

Kecenderungan untuk mengutamakan dan mendahulukan kepentingan pribadi dan/atau kelompok di balik pilihan sikap dan perilaku elite parpol, merupakan salah satu faktor penting yang bisa menjelaskan latar belakang sehingga membangkitkan etnisitas dalam panggung parpol.

Agar tetap berkuasa, elite parpol harus dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan, baik supra dan intern organisasi sendiri. Di tingkat supra organisasi, elite parpol perlu mempunyai sejumlah jaringan baik kepada pejabat di lingkup birokrasi, antarpimpinan parpol atau pengurus DPP di Jakarta. Jaringan-jaringan itu pada suatu saat akan dibutuhkan jika ada keperluan-keperluan mendesak. Di lingkup intern partai, elite parpol banyak memecahkan masalah dengan mengandalkan kemampuan persuasi dan membujuk. Hal itu tidak susah dilakukan karena orang-orang yang ada di sekelilingnya sudah berkerumun orang yang setia dengannya, individu-individu yang bisa dipercaya, entah karena sama-sama kuliah di Unhalu, aktif di organisasi Menwa, dan *vis a vis* sebagian besar orang Muna.

Langkah serupa juga dilakukan elite parpol ketika membangun jaringan dengan basis massanya. Ia mengerti cara-cara lokal untuk bergaul dengan para pendukungnya, tidak *pangkia* dengan membelikan rokok, *kameko* sampai cara halus menyapa *damai naini dhecki bapa*.

Dapat dikatakan, politik di parpol masih "dipribadikan". Artinya, aktivitasnya berpusat pada sosok elite parpol. Elitelah yang mengembangkan hubungan dengan pribadi-pribadi strategis di dalam dan supra organisasi. Jaringan bisa bersifat horizontal seperti teman-temannya di organisasi, namun juga vertikal seperti hubungan dengan para birokrat, DPP, dan orang lain. Pola hubungan ini dilaksanakan dengan cara direncanakan (*by design*) atau sambil lalu (*by accident*).

Dengan merujuk pada fenomena di atas, pertanyaannya kemudian : secara teoritis apa "makna" dari temuan studi ini utamanya dalam menjelaskan

perspektif elite parpol dalam menyikapi fenomena etnisitas di daerah? Seperti telah dikemukakan dalam perspektif teori di depan, bahwa secara teoritis perspektif pembahasan etnisitas dibedakan kedalam kedua kategori utama, yaitu primordialist dan instrumentalist. Bila dua perspektif utama dijadikan sebagai "indikator" dalam menjelaskan "makna" dari temuan studi ini, utamanya dalam menjelaskan perspektif elite parpol dalam menyikapi fenomena etnisitas di tingkat lokal.

Primordialist adalah seperti yang dikemukakan oleh Parsons (dalam Henry, 1976:380) yakni sesuatu alamiah yang *mempunyai pattern variables, roles are based on ascription, particularism, diffuseness, collectivity orientalism, and effectivity*. Dengan kata lain, pendekatan primordial adalah suatu kenyataan sosial secara alamiah dan basis utamanya adalah adanya kesamaan biologis, etnis, dan agama. Sementara perspektif instrumentalist memandang bahwa etnisitas merupakan upaya dari individu untuk merespons, memiliki sikap pragmatis, dan merasionalkan lingkungan. Etnisitas bagi kaum instrumentalist adalah sesuatu yang tidak alamiah karena merupakan sumber politik, sarana kohesi bagi orang yang dipromosikan guna memfasilitasi artikulasi politik dari kepentingan orang dan kelompok. Hasilnya adalah suatu arena politik tawar-menawar dalam situasi plural (Brown, 1998:xvii). Dengan demikian etnisitas adalah sesuatu yang *manipulated constructed*.

Bila dua perspektif utama dijadikan indikator dalam menjelaskan "makna" dari temuan lapangan, maka secara umum dapat dikatakan bahwa pengkategorian elite parpol masih sangat kental dipengaruhi oleh atau bahkan didasarkan pada manipulasi/hasil konstruksi. Indikasi akan hal ini terlihat dari

antara lain perilaku elite politik yang mengetnikkan politik dan menjadikan etnis untuk mengikat anggota-anggotanya.

Dengan pengkategorian seperti itu, maka kemudian mendorong elite parpol berupaya mengorganisir atas dasar etnis. Hal itu dimungkinkan karena isu etnik yang lebih mudah untuk kepentingan mobilisasi. Jalur yang ditempuh adalah politik karena kelompok-kelompok komunal biasanya lebih terorganisir untuk aksi-aksi politik dan lebih mampu mempertahankan usahanya dibandingkan kelompok-kelompok penekan lainnya. Politik dalam masyarakat demikian, secara alami mengikut garis etnik.

Sekalipun perspektif instrumental sangat menonjol dalam studi ini, tetapi tidak berarti perspektif primordialis tidak ada. Perspektif primordialis juga muncul karena adanya kesadaran kultural yang diperoleh dari bekerjanya institusi sosial paling dasar seperti kepercayaan, komunitas, klan dimana mereka lahir, kecil dan dibesarkan. Sentimen demikian merupakan kesadaran identitas paling dasar yang ada mendahului segala macam bentuk identitas lainnya, seperti kelas, partai politik dan merupakan yang *given* tanpa ada yang bisa menolaknya (Isaacs, 1975:5)

Meski kedua perspektif di atas berbeda, namun intinya pada dasarnya sama. Perspektif *instrumentalist* dan *primordialist* hanya beda pada soal siapa lebih *dominant* berperan membentuk identitas etnis dan bagaimana keduanya bekerja. Perspektif *instrumentalist* menekankan pentingnya elite, sementara *primordialist* menekankan bahwa konstruksi etnis merupakan hasil produksi bersama, baik elite dan massa. *Instrumentalist* bekerja pada adanya kalkulasi

rasional untuk kepentingan tertentu, sementara *primordialist* sepenuhnya bekerja dalam kesadaran kultural.

## 7.2 Memahami Konstruksi Sosial Elite Tentang Etnis Muna

### 7.2.1 Etnis Muna : Penanda-Penanda Penting

Suatu etnis adalah golongan sosial yang khusus, yang askriptif, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Kekhususan dari suatu etnis sebagai sebuah golongan sosial ditandai oleh ciri-cirinya, yaitu diperoleh secara askriptif atau didapat begitu saja bersama dengan kelahirannya, muncul dalam interaksi berdasarkan atas adanya pengakuan oleh warga etnis yang bersangkutan dan diakui oleh warga etnis yang lainnya. Suatu etnis merupakan ciri-ciri yang umum dan mendasar berkenaan dengan asal muasal manusia, yang digunakan sebagai acuan bagi identitas atau jati diri pribadi atau kelompoknya, yang tidak dapat seenaknya dibuang atau ditiadakan. Karena ciri-ciri tersebut melekat hidup bersama dengan keberadaannya sejak kelahirannya (Barth, 1969:9).

Sama halnya dengan kelompok etnis yang lain, etnis Muna juga mempunyai ciri tersendiri. Etnis Muna mempunyai ciri seperti mempunyai latar belakang sejarah, bahasa, dan kebudayaan. Melalui ciri itu kemudian membentuk suatu sistem etnis yang digunakan sebagai acuan atau sebagai pedoman untuk hidup sebagai warga suatu etnis yang bersangkutan.

Melalui latar belakang sejarah etnis Muna, akan dapat diketahui identifikasi etnis Muna yang sebenarnya. Dalam tradisi lisan orang Muna mengungkapkan bahwa penduduk pertama pulau Muna adalah pengikut (awak kapal) dari sawerigading putera Raja Luwu. Dalam zaman purba, hanya ada

air. Pada suatu hari, seorang bernama "Sawirigadi", putra Lakina Raja Luwu yang dilahirkan oleh ibunya bersama ayam kuning - itu berarti ia adalah seorang maha suatu makhluk dari tingkat adikodrati berperahu di atas laut ini. Perahunya menabrak suatu gundukan dasar laut yang agak dangkal. Dasar laut tersebut tiba-tiba muncul ke permukaan laut membentuk daratan yang luas. Sawirigadi dapat berjalan di atas daratan itu hingga ke pantai, selanjutnya menuju ke tanah airnya. Tempat dimana perahu sawirigadi terdampar itu masih ditunjukkan sekarang ini karena di atas tempat itu terletak suatu batu besar dalam bentuk perahu. Daratan luas ini kini disebut Pulau Muna. Lakina Luwu mengirim kelompok orang untuk mencari perahu Sawirigadi. Sebagian dari kelompok itu langsung menetap di Muna, di kampung Wamilei, dan dengan demikian mereka menjadi penghuni pertama Pulau Muna. Beberapa diantara mereka pulang ke tanah airnya untuk menjemput istri dan anak-anak mereka. Mereka yang telah menetap disitu, melalui musyawarah mufakat, memilih seorang kepala kampung. Kepala kampung itu mereka beri gelar "Mino".

Pada awalnya penduduk Muna tinggal dalam satu kampung. Akan tetapi, karena jumlah mereka terus bertambah, mereka lambat laun menghuni empat kampung yang menjadi empat daerah. Mereka mengembangkan suatu sistem pemerintahan, mirip dengan sistem kerajaan Muna. Etnis Muna, terutama etnis Muna Tengah (karena Muna Utara menjadi kerajaan tersendiri, Tiworo, dan Muna Selatan, antara lain Lolibu dan Wale-ale, juga menjadi kerajaan-kerajaan tersendiri dengan masing-masing tradisi), dipimpin oleh *sarana wana* yang diketuai oleh *ompato (Lakina Muna)*, raja, penguasa, yang terpilih. Anggota-anggota dewan lain adalah pegawai-pegawai seperti 4 (empat) kepala daerah *ghoeramo*, 1 (satu) *bhanto balawo*, 1 (satu) *muntarano*

*bitara* dan 2 (dua) *kapitulae*. Jika anggota-anggota dewan bertengkar, misalnya tentang penggantian *omputo*, Sultan Buton sering kali memainkan peran yang menentukan.

Sesudah Ternate tidak lagi menguasai Buton dan Muna, hubungan antara Buton dan Muna bisa dianggap sebagai hubungan kakak-adik. Hal itu mempunyai akar historis : “ ketika menduduki jabatan Raja Buton, sebagai raja ke-6, Lakilaponto mempersatukan Muna dengan Buton. Hal itu karena ia sendiri adalah putra Raja Muna, yang diangkat menjadi Raja Buton. Lakilaponto adalah anak Raja Muna yang ke-2 yang bernama Sugilaenda. Menurut riwayat yang diturunkan secara lisan, ia dijadikan menantu oleh Raja Buton, Mulae, sebagai imbalan atas jasanya mengalahkan musuh Buton, Labolontio. Setelah Raja Mulae meninggal, ia dinobatkan menjadi raja. Dan, sebagai anak Raja Muna, maka sepeninggal ayahnya ia mempersatukan Muna dengan Buton. Menurut A. Ligtoet, sejak awal abad ke-17, Muna seringkali menjadi medan perang antara Raja Goa, Makassar, Raja Ternate, dan VOC. Walaupun demikian, Ligtoet juga menulis : “tidak ada tanda-tanda bahwa orang-orang Portugis mencoba untuk menetap di Pulau Buton”.

Secara resmi Muna merupakan satu dari empat distrik wilayah Kesultanan Buton. Tetapi, mungkin karena Muna dulu berdaulat dan baru kemudian hari menjadi bagian dari Buton, penguasa Muna tidak berhak untuk mengikuti pemilihan Sultan Buton (de Jong, 2000: 67). Kekuasaan di Muna Selatan dalam tangan Buton. “Sebagai contohnya, walau dikatakan Lolibu mempunyai raja sendiri, namun sebenarnya Mantri Lanto, yang memerintah di

dalam kampung itu, bukan bawahan Raja Lolibu. Kampung itu memang betul terletak di Pulau Muna, tetapi tidak berada di bawah perintah Raja Muna.

Salah satu penanda penting lain dari etnis Muna yakni bahasa daerah yang dipergunakan yakni bahasa Muna. Keadaan bahasa Muna, rumit sekali. Hal itu disebabkan karena ada 3 dialek yang merupakan rumpun bahasa Muna yakni *Bahasa Labora*, *Bahasa Bubu* dan *Bahasa Wuna Ghoera*. Dari ketiga dialek tersebut, yang paling banyak dipergunakan adalah rumpun *Bahasa Wuna Ghoera*. Hal itu disebabkan karena selain yang paling banyak penganutnya, juga karena bahasa ini digunakan untuk bahasa pergaulan dan bahasa dalam pemerintahan yang digunakan di Kerajaan Muna masa lampau (Wa Ode Ibu, tanpa tahun, :3).

Hal yang menonjol pula dari etnis Muna yakni masih kuatnya fungsi kekerabatan. Dalam etnis Muna, kekerabatan dalam meliputi ikatan hubungan darah, yang berada di sekitar saudara sepupu sekali, sepupu dua kali, sepupu tiga kali dan juga sepupu empat kali. Sedangkan kelima merupakan lingkungan yang jauh, malahan dapat dikatakan sudah diluar lingkungan kekerabatan. Lingkungan yang merupakan sepupu sekali disebut *pisa*, dua kali disebut *topendua*, tiga kali disebut *topentulu*, sedang empat kali disebut *topeapa*. Sedang hubungan dalam garis kelima bernama *topekuna* dan merupakan kerabat yang dianggap berada di luar garis kekerabatan yang ada.

Istilah kekerabatan dapat diterjemahkan dalam bahasa Muna dengan *pobhasite*, *lewalaka*, dan *tombu*. Dengan *pobhasite* dimaksud seluruh individu yang mengelompok dalam lingkungan ikatan hubungan darah yang merupakan keseturunan yaitu ikatan hubungan secara sepupu sampai tiga kali. Selanjutnya *pobhasite*, juga dapat berarti persahabatan dalam satu lingkungan

malahan sering pula diartikan sebagai persahabatan. Sedang *lewalaka* berarti kaum kerabat yang turun temurun dan merupakan suatu kelompok yang dikategorikan seketurunan. *Timba* mempunyai pengertian sekelompok individu yang masih mempunyai hubungan darah dalam bentuk keturunan serta mendiami areal yang sama.

### 7.2.2 Konstruksi Sosial Elite Atas Etnisitas

Dari uraian di atas maka etnis Muna yang dimaksud dalam disertasi ini adalah pengetahuan kolektif tentang asal usul, sejarah, dan bahasa Muna, yang dikonstruksi lewat pengimajinasian aktor dan serangkaian interaksi dari orang Muna-bukan Muna. Kemudian, elite yang membangkitkan etnisitas yang dimaksud dalam disertasi ini adalah tumbuhnya keadaran etnis dari anggota suatu kelompok. Aktor utama yang membangkitkan tersebut yakni elite kepada anggota pengikutnya agar memilih orang asal muasal yang sama entah karena sedarah, satu keturunan, dan tempat tinggal dalam momen-momen politik. Anggota pengikut yang dibangkitkan perasaan etnisnya meresponsnya karena ada keyakinan bahwa dengan latar belakang sosial etnis yang sama maka kepentingan dan aspirasi politiknya dapat diperjuangkan oleh elite yang ia pilih. Pemompaan etnisitas diciptakan, dipertahankan, dan diubah melalui tindakan dan interaksi manusia.

Etnis Muna yang dimaksud dikonstruksi lewat proses dialektis secara simultan apa yang dikatakan oleh Berger dan Luckman (1990:185). dimaksud dengan proses dialektika yang berlangsung terus menerus dan terdiri dari tiga momen. eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Etnis Muna dalam

kenyataannya, berada sebagai kenyataan objektif maupun subjektif, dengan demikian setiap penafsiran terhadap suatu masalah haruslah mencakup kedua kenyataan ini, yang oleh Berger dan Luckman juga mengatakan, sejauh yang menyangkut fenomena masyarakat, momen-momen itu tidak dapat dipikirkan sebagai sesuatu yang berlangsung dalam suatu urutan waktu. Yang benar adalah, masyarakat dan setiap bagian darinya secara serentak dikarakterisasi oleh ketiga momen itu, sehingga setiap analisis yang hanya melihat salah satu dari ketiga momen itu adalah tidak memadai. Hal itu juga berlaku bagi anggota masyarakat secara individual, yang secara serentak mengeksternalisasi keberadaannya sendiri ke dalam dunia sosial dan menginternalisasi keberadaannya sebagai suatu kenyataan objektif.

Pendek kata, manusia merupakan instrument dalam menciptakan realitas sosial objektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana ia mempengaruhinya melalui proses internalisasi, yang mencerminkan realitas subjektif (Berger dan Luckmann, 1990:61). Kontruksi dari aktor yang membangkitkan simbol etnis sebenarnya telah menghasilkan realitas kehidupan sehari-hari yang memiliki dimensi subjektif dan objektif, lewat proses eksternalisasi. Namun harus diingat bahwa bagaimanapun meyakinkan tampaknya bagi individu, objektivitas dunia kelembagaan adalah objektivitas yang dibuat dan dibangun oleh manusia. Proses dengan mana produk-produk aktivitas manusia yang dieksternalisasi itu memperoleh sifat objektif disebut objektivasi (Berger dan Luckmann, 1990:87). Menjadi tugas penulis untuk melakukan pembacaan ulang melalui perspektif teori tertentu dalam menjelaskan fenomena lapangan.

### 7.2.2.1 Internalisasi

Internalisasi dalam arti umum merupakan dasar bagi pengkategorian mengenai "sesama saya", yaitu pengkategorian individu dan orang lain serta pengkategorian mengenai dunia sebagai sesuatu yang memahami dari kenyataan sosial. Pengkategorian ini bukanlah merupakan hasil dari penciptaan makna secara otonom oleh individu-individu yang tersosialisasi, melainkan dimulai dengan individu yang "mengambil alih" dunia itu, individu dapat memodifikasi dunia tersebut bahkan dapat menciptakan kembali dunia secara kreatif. Dalam konteks ini, Berger dan Luckmann (1990:186) mengatakan, bagaimanapun juga dalam bentuk internalisasi yang kompleks, individu tersebut tidak hanya memahami proses-proses subjektif orang lain, melainkan juga memahami dunia dimana ia hidup di dunia itu menjadi dunia lainnya.

Salah satu contoh dari elite parpol yang sangat memahami dunianya adalah La Ode Rifai Pedansa, Ketua PDI-P Wilayah Sulawesi Tenggara. Ia lahir di Muna, suatu daerah yang awalnya merupakan bagian dari kesultanan Buton. Beberapa waktu kemudian, daerah ini tumbuh menjadi kerajaan sendiri, bahkan salah satu rajanya yakni Lakiloponto diangkat menjadi raja Buton dengan gelar Sultan Murhum. Dari kebesaran pengaruh Lakiloponto ini kemudian, di sebagian besar orang Muna mempercayai bahwa ia juga diberi gelar pahlawan di etnik Tolaki dengan sebutan Haluoleo. Dengan latar belakang sejarah ini, maka etnis Muna kemudian merasa lebih superior dibanding dengan etnis lain yang ada di Sulawesi Tenggara.

La Ode Rifai Pedansa mengaku banyak memahami budaya Muna dari lingkungan keluarganya, terutama dari kedua orang tuanya. Orang tuanya yang

termasuk salah satu keturunan raja di Muna, dengan demikian maka ia memperoleh status kelompok *waluka* di Muna. Dengan status yang ia peroleh, ia tumbuh dalam keluarga yang sangat menghargai budaya Muna. Gelar La Ode dipasang di depan namanya, dan dikalangan politisi lain, termasuk Megawati, Ketua PDI-P, namanya disapa dengan *Pak Ode*. Di rumahnya, bahasa Muna menjadi bahasa pengantar sehari-hari. Dengan bahasa Muna ia melakukan musyawarah kalau ada masalah dalam keluarga.

Sebagai ketua partai dengan latarbelakang sosial etnis Muna, ia menjadikan rumahnya yang terletak di Jalan Kamboja No. 6 Kendari sekaligus tempat melaksanakan aktivitas sebagai ketua partai. Di tempat itu, ia bersama istri dan anak-anaknya tinggal. Tempat itu, tidaklah dikatakan mewah untuk ukuran sebuah rumah ketua partai. Ada 4 buah kamar tidur. Ruangan yang paling luas adalah ruang tamu. Di tempat inilah ia banyak menerima tamu. Suasana informal banyak tercipta, karena ia hanya memakai sarung dan kadang tidak memakai baju ketika berbincang dengan para tamu. Orang yang datang bertamu sebagian besar adalah dari Muna.

Karena kedekatan dengan etnis Muna, pikirannya membuncah ketika mengetahui bahwa ada elite dari etnis lain yang menjadi kompetitor dalam persaingan memperebutkan jabatan ketua di parpol. Ia menjadi cemas, jika etnis lain tampil sebagai ketua parpol, daya politik etnis Muna menjadi lemah digantikan oleh etnis lain. La Ode Rivai adalah salah satu contoh sosok yang merasakan adanya hegemoni etnis lain di Kendari. Dalam kondisi yang seperti itu, ia berkeinginan untuk mengimbangi hegemoni etnis lain dan mencari peluang untuk memberi akses kepada orang Muna di arena politik lokal.

Ternyata pengalaman dan pengkategorian yang dilihatnya membuat elite parpol memotivasi untuk merefleksikan sebuah realitas sosial. Hal itu ditunjang oleh kenyataan banyak orang Muna, seringkali ikatan etnis lebih disukai dari ikatan-ikatan lain seperti atas dasar profesi.

Dalam konteks studi etnisitas, perilaku di atas dapat dikatakan sebagai kebangkitan etnisitas suatu etnis. Kebangkitan etnisitas etnis Muna karena ada dua faktor yaitu adanya kolonialisme internal, dan kompetisi (ekonomi dan politik). Pengkategorian dari elite parpol dari kondisi itu adalah bahwa posisi etnis Muna "kalah dan terpuruk" dibanding etnis lain. Kekalahan yang dirasakan oleh etnis Muna menyebabkan merosotnya koalisi multi etnik, karena masing-masing etnik memperkuat posisi. Akhirnya, prosedur dalam demokrasi yang seharusnya ditaati, tetapi yang ada adalah tindakan manipulasi.

Sebagai akibat kebangkitan etnisitas etnis Muna, maka para anggota etnis Muna menciptakan dan menetapkan batas-batas sosial suatu kelompok etnis. Artinya, berdasarkan atas batas-batas etnis tersebut, anggota etnis membedakan diri dengan orang yang berbeda, dan menggolongkan sejumlah orang yang tergolong "kita" dari suatu kelompok etnis yang dapat dibedakan dengan "mereka". Melalui batas-batas sosial ini stereotip yang dipunyai oleh masing-masing satu etnis mengenai satu sama lainnya menjadi lestari, karena melalui dan didalam stereotip inilah perbedaan-perbedaan etnis yang berbeda itu terwujudkan. Perbedaan antar etnis kemudian menjadikan anggota etnis Muna menyadari bahwa di luar etnisnya terdapat etnis lain. Dalam teori konstruksi sosial, momen ini disebut sebagai tahapan internalisasi yakni proses melakukan identifikasi diri di dalam dunia sosio kulturalnya. Realitas sosial itu

berada di dalam diri manusia dan dengan cara itu maka diri manusia akan teridentifikasi di dalam dunia sosial kulturalnya. Internalisasi merupakan momen penarikan realitas sosial ke dalam diri atau realitas sosial menjadi kenyataan subjektif.

#### 7.2.2.2 Eksternalisasi

Tahap eksternalisasi merupakan momen adaptasi diri dengan dunia sosial kultural. Dalam momen ini, sarana yang digunakan adalah bahasa dan tindakan. Manusia menggunakan bahasa untuk melakukan adaptasi dengan dunia sosial kulturalnya dan kemudian tindakannya juga disesuaikan dengan dunia sosial kulturalnya. Pada momen ini, terkadang dijumpai orang yang mampu beradaptasi dan juga ada yang tidak mampu beradaptasi. Secara konseptual, momen penyesuaian diri dengan dunia sosial kultural dapat digambarkan dari proses dibawah ini

Secara kodrati, manusia memiliki kecenderungan untuk mengelompok. Artinya, manusia akan selalu berada di dalam kelompok, yang kebanyakan didasarkan atas rasa se identitas. Sekat interaksi tidak dijumpai jika manusia berada didalam identitas yang sama. Jika sesama etnis Muna, secara leluasa dapat melakukan interaksi yang intensif. Tetapi jika interaksi antara orang Muna dan Bugis misalnya, akan terbatas pada persoalan-persoalan segmental. Dalam segmen tertentu bisa berkomunikasi tetapi didalam segmen lain akan membatasi diri

Lapisan etnis Muna mempunyai batas yang jelas (*order line*) dengan etnis lain, antara lain dilihat dari perbedaan bahasa, sejarah, dan kekerabatan. Ada beberapa stereotype tentang orang Muna, misalnya asal usulnya dianggap

sama dengan Buton. bicaranya keras, cenderung oportunist, dan sebagainya. Sebaliknya, orang Muna juga punya cara pandang tertentu terhadap etnis yang ada di Sulawesi Tenggara. Sejarah perkembangan di Kota Kendari kemudian menunjukkan adanya penegasan perbedaan mata pencaharian. Orang Cina, Arab, dan Bugis dengan mudah menguasai sector perdagangan. Orang Tolaki dengan mudahnya menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan birokrat pemerintah kota Kendari. Sementara orang Muna hanya menempati pos-pos penting di parpol.

Selanjutnya, dalam interaksi elite Muna-Bukan Muna tersebut, dari data lapangan menunjukkan adanya koperatif dan kompetitif. Fenomena koperatif yakni dapat dipandang sebagai keberhasilan dari segenap elite yang ada untuk bekerja sama mengeliminir perbedaan yang ada. Sementara interaksi yang kompetitif, pada tataran lokal yakni kompetisi antara etnis asli versus etnis pendatang; tataran nasional kompetisi Jawa versus Luar Jawa; tataran internasional sosialisme versus kapitalisme; tataran nilai antara sosio komunalisme versus kapitalisme; Pada tahapan ini terkadang dijumpai ada orang yang mampu untuk beradaptasi dengan etnis lain dan ada juga yang tidak mampu beradaptasi.

### 7.2.2.3 Objektivasi

Dalam konteks studi etnisitas, serangkaian interaksi antar etnis membawa masing-masing etnis untuk memberi dan menerima kebudayaan suatu etnis. Akibatnya, akan menghasilkan dunia sosial antar subjek kedalaman diri etnis sebagai suatu kenyataan objektif. Disini, kenyataan objektif yang dimaksud yakni berorientasi lewat interaksi sosial antar etnis Muna tetap

mempertahankan identitas etnisnya, dan demikian pula sebaliknya, etnis non Muna tidak menapikan identitas etnisnya.

Tindakan membangkitkan perasaan etnisitas, oleh sebagian elite melakukannya dalam suatu pelebagaan yaitu proses untuk membangun kesadaran menjadi tindakan. Di dalam proses pelebagaan etnis tersebut, nilai-nilai yang menjadi pedoman di dalam melakukan interpretasi terhadap tindakan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan sehingga apa yang disadari adalah apa yang dilakukan. Momen ini dinamakan objektivasi.

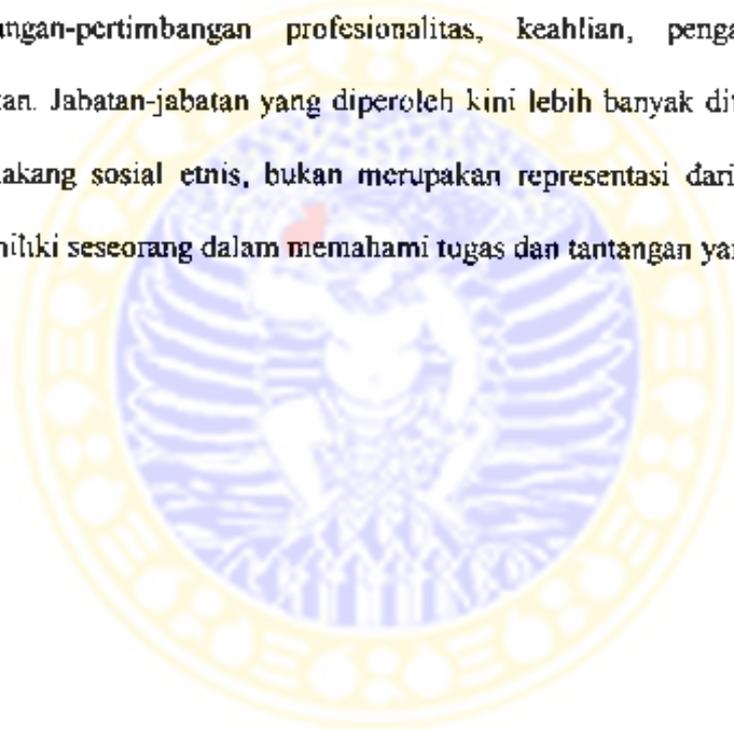
Fenomena bangkitnya etnisitas di arena politik lokal kini benar-benar merebak seiring dengan melemahnya pemerintah pusat sehingga posisi orang daerah menjadi lebih tinggi. Aktor-aktor kunci yang dulunya banyak “droping” dari pusat, kini sudah digeser oleh penduduk asli yang ada di daerah. Masyarakat di daerah ramai-ramai menuntut calon-calon gubernur, walikota, sampai dengan pengisian jabatan ketua partai hendaknya berasal dari penduduk asli. Itulah konteks yang melatarbelakangi sehingga Burhanuddin, S.E., dan La Ode Rifa’i Pedansa berhasil menduduki singgasana Ketua Parpol di PDI-P.

Langkah untuk menempatkan penduduk asli untuk menduduki jabatan-jabatan penting di daerah dengan dalih bahwa mereka “mengenal dan dikenal masyarakat di daerahnya”. Lebih dari itu, penempatan mereka dimaksudkan sebagai representasi etnis di arena politik lokal, disamping telah menunjukkan kriteria untuk memimpin parpol.

Penduduk asli yang dianggap mampu untuk memperjuangkan aspirasi daerah, sehingga ia dianggap punya pengaruh untuk urusan-urusan warga dari etnisnya di kampung asal. Ketika penerimaan PNS, misalnya, tidak sedikit

warga dari etnisnya di daerah asal yang datang ke kota untuk menggolkan anaknya atau sanak saudara yang tengah menjalani tes PNS. Maksudnya, agar elitnya yang mempunyai basis sosial etnis yang sama dan kini sudah mempunyai pengaruh untuk “melobi” pejabat yang ada di kota.

Dalam prakteknya, di arena-arena politik lokal saat ini banyak pemilihan gubernur, bupati, ketua parpol, pengangkatan pejabat di birokrasi sampai penerimaan CPNS lebih ditentukan oleh pertimbangan etnis, dibanding pertimbangan-pertimbangan profesionalitas, keahlian, pengalaman, dan pendidikan. Jabatan-jabatan yang diperoleh kini lebih banyak ditentukan oleh latar belakang sosial etnis, bukan merupakan representasi dari kemampuan yang dimiliki seseorang dalam memahami tugas dan tantangan yang dihadapi.



**Tabel 7.1**  
**Dialektika Internalisasi, Eksternalisasi, dan Objektivasi**

Momen	Proses	Fenomena
Internalisasi	Identifikasi diri dengan dunia sosio kultural	Adanya penggolongan sosial yang berbasis etnis sehingga ciri-ciri etnis berbeda satu sama lain seperti terlihat dari nama, bahasa, bentuk tubuh dll. Penggolongan itu muncul karena adanya kompetitor dari etnis lain dalam persaingan memperebutkan jabatan dalam parpol dll.
Eksternalisasi	Adaptasi diri dengan dunia sosial	Sekat interaksi tidak dijumpai jika manusia berada didalam identitas yang sama. Jika sesama etnis, secara leluasa dapat melakukan interaksi yang intensif. Tetapi jika etnis yang berbeda, interaksi akan terbatas pada persoalan-persoalan segmental.
Objektivasi	Pelebagaan etnis yaitu proses untuk membangun kesadaran menjadi tindakan	Pelebagaan diwujudkan dalam pembentukan jaringan atas dasar etnis. Anggotanya yang direkrut masuk dalam jaringan adalah homogen dari latar belakang etnisnya.

Tindakan elite mulai tahap internalisasi yang hanya berupa pengkategorian (internalisasi) untuk sampai ke pelebagaan (objektivasi) yang ingin membangkitkan semangat etnisitas tidak begitu saja dapat dilaksanakan. Ada prasyarat yang harus dipenuhi agar tindakannya itu berproses menuju ke arah tersebut. Berbeda dengan konstruksi pemikiran dengan parameter kuantitatif, seperti ekonomi yang lebih mudah dikompromikan, maka konstruksi pemikiran dengan parameter kualitatif seperti etnik lebih sulit dikompromikan. Persoalan ekonomi lebih memungkinkan untuk dicari titik

temu lewat proses tawar-menawar; sedangkan persoalan etnik, sulit dicari titik temu, karena *public goods* bagi satu komunitas artinya menjadi *public bad* bagi komunitas lainnya. Seperti dinyatakan Rabushka dan Shepsle dalam masyarakat majemuk ternyata koalisi multi-etnik tidaklah stabil. Kerjasama multi-etnik bisa digalang hanya pada saat menghadapi musuh bersama, seperti penjajah. Namun, setelah kemerdekaan, berkembang ambigu, karena beberapa tokoh nasional secara konsisten tetap menyuarakan koalisi multi-etnik, di sisi lain bermunculan elite parpol yang menyuarakan ikatan etnis untuk menjaring massa dalam pemilu. Para elite parpol semakin lantang menyerukan pentingnya etnisitas.

Dengan memperhatikan gagasan dan perilaku elite parpol dari Muna dapat dikatakan sangat berorientasi pada penempatan posisi etnisnya tetapi kurang memandang secara komprehensif. Perilaku seperti itu dapat dianggap sebagai bagian dari sejarah perjalanan hidupnya di parpol, karena dalam perjalanan partai, orang Muna lah yang mengalami pahit getirnya mengelola organisasi. Pada saat yang sama ketika tiba-tiba era otonomi daerah memberi kesempatan untuk memperbaiki posisi dirinya.

Perilaku elite parpol dapatlah dipahami sebagai salah satu cara untuk tetap menjaga posisi dan kedudukannya. Jika fungsi etnis dijalankan, maka etnis menjadi faktor penggerak perubahan yang bersifat transformatif bagi pencerahan peradaban. Tetapi, dalam kenyataannya, etnis di tangan elite parpol berjalan dengan hukumnya sendiri. Kekuasaan demi kekuasaan, sedangkan etnis tidak lebih sekedar faktor legitimasi. Disini etnis tersubordinasi oleh dominasi kekuatan politik (politisasi etnis).

## BAB VIII

### SIMPULAN

Etnisitas apabila benar-benar berfungsi dalam kehidupan politik, maka akan menjadi faktor penggerak perubahan yang bersifat transformatif bagi pencerahan peradaban. Etnisitas akan bermakna setelah dioperasikan oleh aktor-aktor yang ada didalamnya yang membentuk dan dibentuk oleh realitas di mana ia berada. Oleh karena itu fokus studi ini ingin mengetahui makna etnisitas. Setelah melalui serangkaian kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data hingga interpretasi di lapangan, ada dua simpulan pokok yakni seperti diuraikan dibawah ini.

#### 8.1 Simpulan

*Pertama*, elite parpol Muna memiliki kecenderungan menggunakan kriteria kelahiran, hubungan darah, dan kekerabatan untuk digolongkan suatu etnis. Karena itu, secara nyata yang dilihat tergolong satu etnis adalah satuan biologis yaitu keluarga, kelompok, kerabat, klen, komuniti, dan masyarakat.

Tampak bahwa meski elite parpol Muna meski berada di Masyarakat Kota Kendari, tetapi perilakunya dapat mengembangkan identitas ke-Munanya. Hal itu dimungkinkan karena Kota Kendari sebagai daerah yang tidak mengenal adanya kebudayaan etnis dominan sehingga menghasilkan adanya sekelompok etnis dengan masing-masing kebudayaannya yang relatif otonom dan dominan dalam wilayah tinggal masing-masing. Dalam keadaan demikian, masing-masing etnis dapat membangkitkan perasaan etnisnya melalui elite yang menduduki posisi-posisi kunci. Hal itu dapat dilihat dari tindakan mereka yang *local subjects*. Perilaku elite yang membangkitkan perasaan etnis

dilakukan untuk merebut dan mempertahankan posisi-posisinya. Perasaan etnis dibangkitkan melalui propaganda dengan sebutan "putera daerah" bagi "orang asli" yang menghendaki kekuasaan di tangan mereka. Jadi sebetulnya, elite membangkitkan etnis sebagai alat untuk penggalangan politik- guna memenuhi kepentingan politiknya. Atas dasar itu, maka dapat dikemukakan bahwa apabila ditilik secara lebih dalam, maka politik yang berdasarkan etnis dapat dipandang rasional - yakni motif untuk memobilisasi massa berdasarkan etnis dilandasi oleh kepentingan yang diperhitungkan dan pertimbangan rasional.

*Kedua*, dalam prakteknya elite parpol berusaha agar etnisnya dapat menduduki posisi dalam masyarakat dan daerah Kendari. Sarana utama untuk mewujudkannya adalah melalui jaringan yang ada di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Di wadah inilah yang paling banyak merekrut orang Muna untuk menjadi pengurus partai. Elite dari Muna memanfaatkan organisasi ini untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi orang Muna. Banyak orang Muna yang menduduki posisi-posisi penting di organisasi dan mengendatikan jalannya partai sehari-hari. Dengan demikian, partai ini telah memungkinkan orang Muna untuk memapankan kelompok mereka melalui wewenang yang dimiliki untuk mempertahankan kepemimpinan orang Muna di tengah masyarakat Kendari.

## 8.2 Implikasi Teoretik

Kajian Liddle tentang *ethnicity, party and national integration: an Indonesian case study (1970)* menggambarkan adanya aspek etnisitas dalam politik. Kajian Liddle sesungguhnya menjadi jendela bagi kajian tentang

etnisitas dan politik di Indonesia. Banyak studi yang dapat dikategorikan sama dengan dengan kajian Liddle itu, seperti Harvey (1984). Dalam kajiannya, ia menggambarkan bahwa agar pemberontakan di Sulawesi Selatan mendapat dukungan rakyat, Kahar Muzakkar membangkitkan etnisitas dengan cara menumbuhkan perasaan anti Jawa sehingga karena tuntutan itulah migrasi dari Jawa dihentikan pada tahun 50'an.

Meskipun Bahar (1997) tidak terang-terangan mengungkapkan tentang kebangkitan etnisitas dalam studinya, tetapi justru ia mengambil setting baru dalam studinya, yakni elite nasional. Menurutnya, pada masa orde lama, dwitunggal Soekarno-Hatta dalam membangun kekuasaannya sebagai elite senantiasa memperhatikan kepentingan etnik di daerah. Soekarno memperhatikan dan menangani pulau Jawa, sementara Hatta menangani pulau luar Jawa.

Studi lain yang juga bermuansa kebangkitan etnisitas dari perspektif konflik etnik dapat dilihat dari tulisan dari Diamond dan Plattner (1998), Horowitz (1998), Stockwell (2000), dan Snyder (2000). Diamond dan Plattner menyimpulkan bahwa para politikus memanfaatkan konflik etnik demi keuntungan mereka secara langsung. Masih dari perspektif yang sama, Horowitz menemukan bahwa elite di Kenya dalam situasi konflik etnik mampu menolak keikutsertaan kelompok etnis tertentu untuk ikut serta dalam pemerintahan. Stockwell (2000) melihat bahwa elite di Guyana memainkan kartu etnik yang kemudian digunakan sebagai faktor untuk mengakomodasi etnik yang ada dan mengkonstruksi rezim atas dasar etnik. Snyder (2000) menemukan bahwa elite yang merencanakan konflik etnik untuk membelokkan demokratisasi.

Studi lain adalah tulisan van Klinken (2001) yang mengkaji perilaku elite etnis di Kalimantan Tengah. Elite etnis di daerah tersebut membangkitkan etnis sebagai kendaraan politiknya melalui asosiasi etnik Lembaga Musyawarah Dayak Kalimantan Tengah (LMDKT). Asosiasi tersebut menjadi kekuatan real di balik layar sehingga dunia kepartaian menjadi tertandingi. Hal itu bisa jadi disebabkan karena aliran uang, komunikasi, dan wewenang seluruhnya informal serta tidak kasat mata.

Berbagai kajian di atas menghasilkan konsep yang sama yakni pemanfaatan etnisitas (*constructed ethnicity*) dengan pendekatan yang berbeda. Liddle melalui pendekatan kepartaian, Diamond dan Plattner, Horowitz, Stockwell, Snyder melalui pendekatan konflik etnis. Klinken dengan pendekatan asosiasi etnis. Konsep *constructed ethnicity* jelas mengandung kelemahan, sebab mengabaikan unsur-unsur primordial yang selalu tampil dalam setiap etnis, baik sebagai *marker* maupun sumber nasionalisme etnis. Kajian tentang *constructed ethnicity* juga menyisakan persoalan pada aras nilai yang ada pada setiap etnis.

Kajian *constructed ethnicity* yang menggunakan konstruksi sosial ini menghasilkan temuan yakni para aktor menggolongkan seseorang satu etnis dengan wacana putera daerah dengan kriteria adanya persamaan darah, geneologis, tempat tinggal, dan budaya sebagai hasil hasil konstruksi bersama antara agen (elite parpol) dengan masyarakat dalam sebuah proses dialektika yang terjadi terus menerus. Wacana putera daerah ini memiliki keunikan, karena tidak bercorak romantisasi kultur asli nenek moyang akan tetapi sebenarnya perilaku yang khas yaitu pemompaan sentiment etnis sebagai salah satu cara menyiasati problem yang muncul dari gesekan atau ketegangan

dalam batas-batas di antara dua atau lebih kelompok etnis. Akibat perilaku tersebut secara nyata terlihat bukan hanya di tingkat wacana, tetapi juga dalam perilaku.

Wacana putera daerah adalah bersifat lokal sebagai hasil konstruksi bersama antara elite dengan latar belakang etnis yang berbeda dalam sebuah proses dialektika terus menerus dengan melembagakannya melalui suatu medium jaringan (*network*) atas dasar etnis di antara elite. Penggunaan etnisitas menjadi salah satu preferensi utama dari elite, sehingga melahirkan fenomena apa yang dikatakan oleh Shepsle dan Rabushka sebagai etnisisasi kebijakan publik.

Fenomena di atas diawali sejak Propinsi Sulawesi Tenggara berpisah dari Sulawesi Selatan pada tahun 60'an. Sejak saat itu, etnisitas diproduksi secara massal dan menyebar di panggung politik lokal dalam satu gerakan *indigenum-isasi*. Fenomena itu terus berlanjut hingga memasuki era otonomi daerah pada akhir tahun 90'an yang telah memberikan kesempatan kepada aktor di tingkat lokal untuk lebih menuntut agar putera daerah diberi posisi strategis untuk menduduki jabatan-jabatan puncak (gubernur/bupati/walikota/wakil walikota) sampai melobar ke pengisian jabatan-jabatan teknis administrasi.

Implikasi dari semua itu, gerakan *indigenum-isasi* yang meningkat hingga memasuki era reformasi, telah mengorbitkan orang Muna ke dalam jabatan-jabatan yang lebih penting di parpol. Para elite parpol dari Muna cenderung mengambil nilai-nilai suatu etnis dengan penuh gairah. Mereka yang digolongkan oleh Barth (1969) sebagai penduduk asli (*indigenous people*) memiliki dorongan untuk tetap mempertahankan kekuasaan. Jadi

negara bukan *constraim* bagi penduduk asli untuk memasuki arena dunia politik lokal. Sejalan dengan itu semua, secara pragmatis etnis menjadi semakin menyebar. Etnisitas tidak hanya menjadi simbol identitas seseorang, tetapi juga muncul sebagai pengikat solidaritas dari suatu komunitas. Dengan kata lain etnisitas tidak hanya dikenakan pada ranah individu, tetapi juga pada ranah publik. Perilaku yang ditampilkan oleh elite parpol di PDI-P pada dasarnya memiliki ciri dari masyarakat majemuk seperti yang dikemukakan oleh Rabushka dan Shepsle (1979). *Pertama*, mencoba membangkitkan kembali etnis sebagai preferensi perilaku termasuk didalamnya kriteria etnis dijadikan alasan utama bagi elite untuk menentukan siapa yang tersingkir dan siapa yang bertahan; *kedua*, pada awalnya elite mencoba membangun koalisi koalisi multietnik, tetapi hal itu tidak bertahan lama dan menjadi tidak lagi penting. Elite PDI-P ingin membangun partai dengan mengkomodasi semua etnis penting yang ada di Sulawesi Tenggara. Akan tetapi koalisi itu tidak dapat dipertahankan karena elite parpol lebih mementingkan dan mendahulukan etnis Muna dibanding etnis lain yang ada. Elite PDI-P mempergunakan kriteria etnis untuk menentukan siapa yang tersingkir dan siapa yang bertahan.

Melalui tindakan yang memanfaatkan etnisitas ini, para elite kemudian melakukan sejumlah siasat untuk memenangkan arena permainan. Yang terjadi kemudian adalah "seni tipu menipu" telah menggantikan "seni untuk memerintah". Koalisi, aliansi dan semacam yang dibentuk bukan atas dasar ideologi, program atau platform tetapi oleh kepentingan etnis. Kemampuan elite dalam meracik (*crafting*) sentiment etnis di organisasi menghasilkan demokrasi yang elitis dan oligarkhis

Diletakkan dalam konteks siasat di atas menjadikan mereka berada posisi yang saling berkompetisi, yakni etnik Muna yang bersaing dengan etnis lain, khususnya etnik Bugis. Posisi keduanya menjadikan orang Muna memahami bahwa didalam dirinya terdapat kebudayaan Muna, dan atribut-atribut etnis Muna. Sementara distisi lain, orang yang diluar dari kelompok etnisnya dianggap sebagai pesaing. Pemahaman bersama demikian ini diinternalisir ke dalam kesadaran diri orang Muna. Ini berarti bahwa orang Muna yang dimaksud telah terpisah dengan tegas (*order line*) dengan kelompok etnis lain. Tetapi dalam situasi perseteruan itu, tidak mengarah untuk melakukan pembersihan etnis (*genocide*) yang satu dengan etnis yang lain karena pada momen lain masing-masing etnik berbaur satu sama lain.

Dengan situasi yang baur seperti itu, maka konsep *melting pot* dari Glazer dan Moynihan (1976) yang menyatakan bahwa identitas budaya etnis lain melebur pada budaya etnis lain menjadi sulit untuk digunakan. Bagaimana elite parpol dari etnis tertentu dikatakan tidak membaur, padahal mereka juga mengakui eksistensi etnis yang lain. Sebaliknya mereka tetap akomodatif terhadap etnis lain meski dalam komposisi yang tidakimbang. Sebagian mereka bahkan sangat ingin akomodatif dengan etnis lain.

Oleh karena itu, dalam konteks studi etnisitas, perspektif instrumentalist yang memandang bahwa etnis adalah dimanfaatkan lebih memadai untuk memahami perilaku elite parpol. Perspektif ini kemudian melahirkan varian *constructed manipulation*, yakni etnis yang dimanfaatkan dimanipulasi, bukan pada sumber nilai-nilai suatu etnis.

Hal ini sebagai implikasi dari propaganda elite yang membangkitkan etnisitas, yang memandang bahwa etnisnya adalah *powerless, inferior*

dibanding dengan etnis lain. Karena itu teori kebangkitan etnis seperti yang telah dikemukakan oleh Gellner (1965), Mughan (1973), Hechter (1974), Depres (1975) dan Horowitz (1971) terbukti dalam penelitian ini. Setiap etnis lain yang mencoba untuk menggantikan dominasi dari etnisnya, maka elite dari etnis yang akan disingkirkan akan mencoba membangkitkan sentiment etnis.

Perilaku membangkitkan etnisitas, pada dasarnya merupakan hasil negosiasi antara satu individu dengan individu lainnya. Dia dipahami secara terbagi antara satu dengan lainnya melalui ritus-ritus yang terus menerus dilakukan, sehingga membentuk tindakan yang terbagi tersebut. Karena etnis adalah *common knowledge*, maka hakekat etnis adalah hasil konstruksi bersama melalui pengkategorian di antara individu-individu melalui institusionalisasi.

Dalam proses eksternalisasi, hakekat etnis adalah konstruksi sosial. Di dalam fase ini terdapat penyesuaian diri dengan norma etnis yang telah diinterpretasikan oleh elite. Di dalam proses penyesuaian ini tentu saja terdapat problem penyesuaian atau yang disebut sebagai penyimpangan sosial. Adaptasi dengan dunia sosio kultural memanfaatkan bahasa dan tindakan.

Pada tataran obyektivasi, etnis adalah suatu usaha manusia untuk membentuk suatu jaringan. Melalui medium jaringan ini maka individu dengan latar belakang etnis yang sama berpartisipasi dengan cara saling menukarkan informasi, koordinasi, dan memecahkan masalah yang timbul. Dalam konsepsi Berger, tindakan itu sebagai legitimasi, yaitu "pengetahuan yang diobyektivasikan secara sosial yang bertindak untuk menjelaskan dan membenarkan tatanan sosial.

Pada tataran internalisasi, momen yang terjadi adalah identifikasi diri dengan dunia sosio kultural. Inti dari teori Berger adalah dialektika antara *self* dan *other* atau diri dalam hubungannya dengan dunia sosial. Dalam perubahan menuju ke arah modernisasi atau dalam pembentukan imaji nasionalisme, tetapi suatu hal yang tetap muncul adalah suatu perilaku yang tetap memompakan sentiment etnis. Dari kerangka konseptual ini, pemilahan *self* dan *other* yang sangat ketat akan menemui kendala empiris. Jadi didalam dialektika itu mesti ditemukan wadah yang dapat mewedahi terpeliharanya aura semangat individu.

Dengan konsepsi tersebut, maka dapat alasan utama sehingga elite membangkitkan etnis, yakni adanya tindakan *the other* terhadap *the self*. Dalam perspektif berpikir Berger, pemanfaatan etnisitas itu dikaitkan karena adanya *the other*. Singkatnya, membangkitkan etnisitas karena ada *the other* yang juga bermain di ranah kekuasaan. Karena itu peminggiran *the other* merupakan suatu cita-cita yang harus diimplementasikan tanpa syarat. Hal inilah yang menjadi justifikasi para elite menurut perspektif Berger. Elite parpol membangkitkan etnis karena ada etnis lain yang ada di PDI-P yang juga ingin menjadi Ketua PDI-P. Kemampuan uang dari etnis Bugis tersebut lebih banyak dibanding calon dari elite etnis Muna. Dalam komposisi pengurus bayangan yang disusun oleh etnis Bugis didominasi oleh etnis Bugis. Teori dari Berger dan Luckmann terbukti dalam penelitian ini.

Bagaimanapun elite parpol dalam memaknai etnisitas dalam arena politik lokal di Kendari dapat menimbulkan loyalitas atas dasar etnisitas di kalangan anggota pengikutnya. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa faktor etnisitas yang mempengaruhi kesetiaan dan perilaku politik.

Dengan merujuk pada hasil penelitian Liddle loyalitas etnis juga terjadi pada dunia parpol. Misalnya, anggota PNI, pengikut setianya etnis Jawa, Batak Tapanuli Utara. Anggota-anggota Parkindo kebanyakan dari etnis Batak Tapanuli Utara, Masyumi beranggotakan etnis Tapanuli Selatan dan beberapa etnis kelompok tertentu. Jelaslah Liddle melihat bahwa ada pemilih tradisional atas dasar etnis. Kesamaan penelitian ini dengan Liddle yakni faktor etnisitas menjadi hal penting dalam partai politik. Perbedaannya, yakni Liddle tidak melihat seberapa kuat etnis itu dikelola oleh dan melalui apa etnis itu disebarkan atau ditanamkan. Dalam penelitian ini, temuan empiris terlihat bahwa elite yang memompakan etnis kepada anggota sehingga dapat setia dan menjadi anggota dari jaringan yang dibentuk oleh elite bersangkutan. Dengan kata lain temuan penelitian ini menyempurnakan dari temuan Liddle.

Sementara itu, ditempatkan dalam perspektif imajiner dapat dikatakan bahwa elite membayangkan adanya kriteria-kriteria tertentu sehingga seseorang masuk dalam rumpun etnisnya. Meskipun imajiner, ini berbeda dengan konsep komunitas yang dibayangkan (*imagined communiti*) dari Anderson (1991) karena komunitas yang dibayangkan bukan sebuah pembayangan suatu kebangsaan, tetapi suatu etnis, yaitu komunitas yang dibayangkan karena adanya persamaan darah, kelahiran, tempat kelahiran, dan geneologis.

Merujuk implikasi teoretik tersebut, pada tataran praktis perlu dipikirkan membangun hubungan antaretnis di dalam masyarakat multietnik dan multikultural maka perlu dikembangkan suatu akulturasi majemuk. Ada kekhawatiran saya, sudah muncul persaingan yang tajam antara etnis pendatang dengan etnis asli sebagai akibat dari gejala *streetipe* di kalangan

etnis masing-masing. Kini sudah seharusnya kalangan Perguruan Tinggi mengembangkan pusat-pusat kajian untuk menyelesaikan sejumlah konflik yang berdasarkan etnis. Selain itu juga perlu mengembangkan kurikulum khusus yang membahas etnisitas sebagai mata kuliah interdisiplin misalnya sosiologi etnisitas, antropologi etnisitas, politik etnisitas.



### DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G., 1974. *Comparative Politics to Day: A World View*. Boston: Little & Brown Company.
- Anderson, Benedict, 2001. *Imagined Communities* (terj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Isist.
- Anderson, Benedict, 2000. *Kuasa Kata: Jelajah-Jelajah Budaya Politik di Indonesia*,(terj.). Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Antweiler, Christopher,. "Transethnic Identity and Urban Cognition in Makassar: Regionalism and the Empowering Potential of Local Knowledge", *Antropologi Indonesia*, Th.XXVI,No.65, Tahun 2001, Mei-Agustus.
- Atkinson, Paul (ed). 2001. *Handbooks of Ethnography*. London/New Deli: Sage Publication.
- A. Witton, Ronald, 1971. "Regionalism and Development in Indonesia", *Disertasi*, tidak diterbitkan.
- Bahar, Safruddin, 1997."Elite dan Etik Serta Negara Indonesia",*Prisma* No.4,April-Mei,Jakarta: LP3ES.
- Barth, Fredrik, 1988. *Kelompok Etnik dan Batasannya Tatanan Sosial dari Perbedaan Kebudayaan*, (terj.). Jakarta: UI Press.
- Baso, Ahmad, 2002. *Plesetan Lokalitas Politik Pribumisasi Islam*. Jakarta: Desantara.
- Batoa, La Kimi, 1990. *Sejarah Kerajaan Muna*. Raha:Yusral Publishing.
- Bell, Daniel, 1976."Ethnicity and Social", dalam Glazer & Moynihan (ed.), *Ethnicity, Theory and Experience*. Cambridge,Massachusetts and London: Harvard University Press.
- Berger, Peter & Luckmann, Thomas,1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan Sosial: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, (terj.). Jakarta: LP3ES.
- Boissevain, Jeremy,"NetworkAnalysis: A Reappraisal". *Current Antropologi*, Vol.20, No.2, Juni, 1979.
- Bonacich, Eda, 1979."The Past,Present and Future of Split Labor Market Theory", dalam Cora B.Maret & Cheryl Leggon (ed.). *Research in Race and Ethnic Relations*, Vol.1, Greenwich,Conn: JAI Press.

- Bottomore, T.B. 1964. *Elites and Society*. New York: Basic Books inc. Publisher.
- Brown, David, 1998. *The State and Ethnic Politics in Southeast Asia*. London and New York: Routledge.
- Bruner, Edward, 1999. "Kerabat dan bukan Kerabat", dalam T.O. Ihromi *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Burhanuddin, 1988. "Anca dan Baba", dalam Bambang Pranowo, et al. *Streetip Etnik, Asimilasi, Integrasi Sosial*, Jakarta: PT. Pustaka Grafika Kita.
- Burton, Michael, 1992. "Introduction : Elite and Democratic Regimes", dalam Michael Burton, *Elite and Democratic Consolidation in Latin America & South Eropu*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Chilcote, Ronald, 1981. *Theories of Comparative Politics, The Search For a Paradigm*. Bulder Colorado: Westview Press
- Cohen, Abner, 1981. *The Politics of Elite Culture*. Berkley & Los Angeles.
- Conk, George, 1987. *The Philosophical Antropological of George Herbert Mead*. New York: P.Lang.
- Connor, Walker, "Nation Building or Nation Destroying", *World Politics*, Vol 24, No.3, 1972, h. 17-40.
- Connor, Walker, 1994. *Ethnonationalism: The Quest of for Understanding*. Princenton University Press.
- Cox, Jonathan, Schutz's, 1988. *Theory of Relevance: A Phenomenologic Critique*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Depdikbud Sultra. 1979. *Dampak Modernisasi terhadap Hubungan Kekerabatan di Sulawesi Tenggara*
- Depdikbud Sultra, 1978. *Sejarah Kebangkitan Nasional di Daerah-Daerah Sultra*.
- Depdikbud Sultra, 1985. *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Sultra*.
- Depdikbud Sultra. 1986. *Arsitektur Tradisional Daerah Sultra*.
- Depdikbud Sultra. 1987. *Perkampungan di Daerah Perkotaan Sebagai Wujud Proses Adaptasi Sosial Daerah Sultra*.
- De Jong, Kees, 2000. *Menjadikan Segala-Galanya Baik* Yogyakarta: Kanisius.

- Diamond, Larry & Platner, Marc, 1994. *Nasionalisme, Konflik Etnik dan Demokrasi* (terj.). Bandung: ITB.
- Dirk, Nicholas. Eley, Geoff; Ortner, Sherry, 1992. *Culture Power History: A Reader in Contemporary Sosial Theory*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press
- Dirjosanjoto, Pradjarta, 1999. *Memelihara Umat: Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa*. Yogyakarta: Lkis.
- DPP PDI-P, 2001 *Jejak Langkah 27 Tahun dari PDI ke PDI-P*, Jakarta: PDI-P
- Dulyakasem, Uthai, 1989. "Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme Etnis", dalam Taufik Abdullah (ed.), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Dunne, Michael and Tiziano, Bonazzi (ed.), 1995. *Citizenship and Rights in Multicultural Societies*. Staffordshier: Keele University Press.
- Duverger, Maurice, 1998. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- E. Hale, Henry, "Explaining Ethnicity", tulisan dalam *Comparative Political Studies*, Vol 37 No.4, May 2004, h. 454 - 485.
- Eller, Jack, David, 1999. *From Culture to Ethnicity Conflict: An Antropological Perspective on International Conflict*. Ann Arbor MI: University of Michigan Press.
- Emerson, Donald K, 1985. "Kesimpulan: Pedoman Pengelolaan Aspek Manusia Dalam Penelitian Masyarakat", dalam Koentjaraningrat & Donald K. Emerson, *Aspek Manusia Dalam Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Enloe, Chyntia H, 1973. *Ethnic Conflict and Political Development*. Boston: Little, Brown and Company.
- Epstein, et.al, 1978. *Ethnicity and Identity, Three Studies in Ethnicity*. London: Tavistocks Publications, Aldiness Publishing Company, Chicago
- Eriksen, Holland, Thomas, 1993. *Ethnicity and Nationalism*. London-Boulder: Colorado Pluto Press.
- Evers, Dieter & Korf, Rudjcr, 2002. *Urbanisme di Asia Tenggara: Makna dan Kekuatan dalam Ruang-Ruang Sosial* Jakarta Yayasan Obor Indonesia.
- Feagen, Joe R & Feagen, Clairece B, 1996. *Racial and Ethnic, Racial and Ethnic Relations*. New Jersey: Prentice Hall.

- Furnivall, Jhon, 1939. *Netherlands India: A Study of Plural Economy*. Cambridge University Press.
- Geertz, Clifford, 1992. *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- , 1963. 'The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics New States' dalam Clifford Geertz, *Old Societies and New States*. New York.
- Gellner, Ernest, 1964. *Thought and Change*. London: Weidenfeld and Nicholson.
- Giddens, Anthony, 1984. *The Constitution of Society: Outline of The Theory of Structure and Contradiction*. Cambridge. Politiy Press.
- Glazer & Moynihan (ed.), 1976. *Ethnicity, Theory and Experience*. Cambridge, Massachusetts And London: Harvard University Press.
- , 1974. *Beyond the Melting Pot*. Cambridge, Mass: MIT Press.
- Granoveter, 1985. *The Downside of Social Capital*. Westport, CT: Greenwood Press.
- Gurr, Robert, Ted, 1970. *Why Men Rebel*. Princenton: Princenton University Press.
- J. Whittan, Anthony; Mustafa, Muslimin; Henderson, G.S., 1987. *Ekologi Sulawesi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamilton, Gary, 1994. *Menguak Jaringan Bisnis di Asia Timur dan Tenggara*. Jakarta: Gramedia.
- Handelman, Don. "Contradictions Between Citizenship and Nationality: Their Consequence for Ethnicity and Inequality in Israel", *International Journal of Politics, Culture and Society*, Vol. 7, No. 3, 1994, hal. 12-36.
- Haryanto, 1990. *Elite, Massa, dan Konflik: Suatu Kajian Awal*. Yogyakarta: PAU UGM.
- Harvey, Barbara Sillars, 1984. *Permesta: Pemberotakan Setengah Hati*. Jakarta: Grafiti Press.
- Hechter, M, "The Political Economy of Ethnic Change", tulisan dalam <http://www.ch.net.xincongres.cd/papers/27/ordchi201.pdf>.
- Henry, Frances, 1976. *Ethnicity in The America*. Netherlands. Moutan.

- Hidayah, Zulyani, 1997. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Hidayat, Syarif "Dilema Otonomi Daerah: Perluasan Wewenang vs Wewenang Elite Daerah", *Analisis CSIS*, 2000 tahun XXIX, h. 20-36.
- Hikam, Muhammad, 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.
- Horowitz, Donald D. 1985. *Ethnic Group in Conflict*. Los Angeles: University of California Press.
- Huntington, S & Nelson, Joan, 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ibu, La Ode. tanpa tahun. *Embrio Tata Bahasa Wuna*
- Ihromi, TO, 1999. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Isaacs, Harold R, 1993. *Pemujaan Terhadap Kelompok Etnis*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jay, Robert, 1969. *Javanese Villagers: Social Relations in Rural Modyokuto*. Cambridge: MIT.
- J. Murray, Alison, 1995. *Pedagang Jalanan dan Pelacur Jakarta: Sebuah Kajian Antropologi Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Jhonson, Doyle, P, 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid I dan Jilid II* ). Jakarta: PT. Gramedia
- Kahn, Joel, 1998. *Southeast Asian Identities: Culture and The Politics of Representation in Indonesia, Malaysia, Singapura, and Thailand*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.
- Kana, Nico; Dirdjosanjoto, Pradjarta; Suwondo, Kutut, 2001. *Dinamika Politik Lokal di Indonesia, Perubahan, Tantangan dan Harapan*. Salatiga: Percik Press & The Ford Foundations.
- Kartodirdjo, Sartono (ed.) 1983 *Elite dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta LP3ES.
- Kleden, Iqnes, 1999. "Stratifikasi Etnis dan Diskriminasi", dalam Moch Sa'dun. *Pri-Non Pri: Mencari Format Baru Pembauran*, Jakarta. CIDES.
- Kuper, Adam & Kuper, Jessica, 2000. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Gramedia

- Kelas, James G, 1998. *The Politics of Nationalism and Ethnicity*. London: Macmillan Publishing.
- Keller, Suzanne, 1986. *Penguasa dan Kelompok Elite: Peran Elite Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: CV.Rajawali.
- Kingstone, Margo, 1984. "On The Campaign Trail" dalam Robert Manne (ed.), *Two Nations: The Cause and Effect of The Rise of The One Nation Party in Australia*, Melbourne: Bookman Press.
- Konggoasa, tanpa tahun. *Sulawesi Tenggara dari Zaman ke Zaman*.
- La Ode, M.D, 1997. *Tiga Muka Etnis Cina-Indonesia Fenomena di Kalimantan Barat (Perspektif Ketahanan Nasional)*. Bandung: Bigraf Publishing
- Lay, Cornelis (ed), 2001. *Nasionalisme Etnisitas Pertaruhan Sebuah Wacana Kebangsaan*. Yogyakarta: DIANI/Interfidei.
- Legg, Kieth R., 1983. *Tuan, Hamba, dan Politisi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Leiressa, R.Z, 1997. *PRRI Permesta Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Jakarta: Grafiti.
- Liddle, William, 1970. *Ethnicity, Party and National Integration: An Indonesian Case Study*. New Haven and London: Yale University.
- , 1996. "Evolusi dari Atas, Pemimpin Nasional dan Pembangunan Daerah di Indonesia", tulisan dalam Sartono Kartodirdjo, *Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Lincoln, Yvonna & Guba, Egon, 1985. *Naturalistic Inquiry*. London: Sage Publication.
- Lipschutz, Ronnie, 1998. *The Myth of Ethnic Conflict: Politics, Economics, and Cultural Violence*. California. University Berkley.
- Mackie, J.A.C, "Harta dan Kuasa dalam Masa Orde Baru", *Prisma*, No.2, Februari, 1984, h. 17-26.
- , 1976. "Anti-Chinese Out Breaks in Indonesia, 1959 - 1978", dalam J.A.C. Mackie (ed ), *The Chinese in Indonesia, Honolulu: The University of Hawaii*.
- Mangenda, Burhan, 1991. *East Kalimantan: The Decline of Commercial Aristocracy*. Cornell: Modern Indonesia Project.
- Manne, Ribert (ed ), 1998. *Two Nations: The Cause and Effect of The Rise of the Nation Party in Australia*. Moulharne: Bookman Press.

- Marger, Martin, 1987. *Elites and Masses*. California: Wadsworth Publishing Company Belmont.
- Mansurnoor, Arifin, "Ulama and Rural Developmen in Madura Indonesia", *Sajorn*, Vol.7 No.1.
- Mas'ood, Mohtar & Mac Andrews, Colin, 2000. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjahmada Press.
- Mas'ood, Mohtar, 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES.
- Maunati, Yekti, 2004. *Identitas Dayak Komidifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjahmada Press.
- Mellon, Carnagie, "Visualyng Social Networks", dalam <http://www.Networks.lum>.
- Mitchell, J.C.,1969. *Social Networks in Urban Situations*. Manchester University Press.
- ,1974, "Perception of Ethnicity and Ethnic Behavior: An Empirical Exploration", dalam Abner Cohen (ed.), *Urban Ethnicity*. London/New York/ Sydney/Toronto: Travistock Publications.
- Mortimer, Edward & Fine, Robert,1999. *People, Nation and State: The Meaning of Ethnicity and Nationalism*. London/New York: I.B. Tauris Publishers.
- ,1973. *Showcase State, The Ilusion of Indonesia'us Accelerated Modernizaions*. Sydney. Angus and Robertson.
- Mostov, Julie,1993. *Democracy and the Politics of National Identity*. Cambridge: Blackwell Publishers.
- Mulyana, Dedy, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunkasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Rosda.
- Nasikun, 2003,"Konsosiasionalisme dan Transisi Demokratis dalam Masyarakat Majemuk", tulisan dalam A.E Priyono dkk, *Gerakan demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto*, Jakarta: Demos.
- Nasution, S, 1988 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Norris, Pippa, 1997. *Passage to Power: Legislative Recruitment in Advanced Democracies*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Noeng, Muhajir, 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Telaah Positivistik Rasionalistik dan Phenomenologik*. Yogyakarta: Trake Sarasin.
- Oetomo, Dede, 1995. "Penelitian Kualitatif", dalam Bagong Suyanto, et.al, *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Parera, Frans M, 1990. "Menyingkap Misteri Manusia sebagai Homo Faber", dalam Peter Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan* (terj.) Jakarta: LP3ES.
- Patton, Quinn, Michael, 1990. *Qualitative Evaluations and Research Methods*. Newbury Park: Sage Publications.
- P. Cohen, Anthony, 2000. *Signifying Identities Antropological Perspective on Boundaries and Contested Values*. USA dan Canada: Routledge.
- Peter, Guy, 1978. *The Politics of Bureaucracy*. New York: Longman Inc.
- Poloma, Margaret, 1994. *Sosiologi Kontemporer* (terj.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Putnam, Robert, 1987. "Toward Explaining Military Intervention in America Latin", *World Politics*, No.20, Oktober.
- , 1971. "Studying Elite Political Culture: The Case of Ideology", *The American Political Review*, Vol.LXV, September.
- , "The Prosperous Community: Social Capital and Public Life", dalam <http://social.computing.bridging.and.bo.html>.
- Rabushka, Alvin & Shepsle, Kenneth, 1972. *Politics in Plural Societies: a Theory of Democratic Instability*. Colombos Ohio: Charles E. Merrill.
- Rahim, Rahman, 1988. *Nilai-Nilai Kebudayaan Bugis*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Rauf, La Ode, 1999. *Peranan Elite dalam Proses Modernisasi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rex, Jhon, "The Place of Language in the Theory of Ethnicity and Nationalism and Migration", dalam [http://www.Sollors.at/Theories\\_of\\_Ethnicity.html](http://www.Sollors.at/Theories_of_Ethnicity.html).
- Richard, Michael, 1997. *Tourism, Ethnicity and the State in Asian Pacific Societies*.
- Ritzer, George, 1992. *Sociological Theory*. New York: Mc.Graww Hill, Inc.
- , 1988. *Contemporary Sociological Theory*. New York: Alfred Knopp.

- , 1985. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (terj.) Jakarta: CV. Rajawali.
- Ritzer, George & Smart, Barry (ed.), 2001. *Handbook of Social Theory*. London/New Delhi.
- Rothchild, Donald, 1976, "Ethnicity and conflict Resolution", *World Politics*, No.2, Maret.
- Rudyansjah, Tony, 1997, "Kaomu, Papara dan Walaka: Suatu Kajian Mengenai Struktur dan Ideologi Kekuasaan di Kesultanan Wolio", *Antropologi Indonesia*, No.52.
- Runturambi, J.S, "Jaringan Sosial Sebagai Strategi Pekerja Menghadapi Pihak Otoritas", *Makalah*. Dibacakan pada Simposium International II Antropologi, Padang, 18-21 Juli 2001.
- Sahlins, Marshall, 1976. *Stone Age Economics*. London: Tavistock Publication.
- Schermerhooon, R.A., 1978. *Ethnic Plurality in India*. Tucson Arizona: University of Arizona Press.
- , 1970. *Comparative Ethnic Relations: A Framework for Theory and Research*. New York: Random House.
- Schoorl, J.W. 2003. *Sejarah, Kebudayaan dan Kekuasaan Buton*. Jakarta: Jambatan.
- Scott, James C., 1977. "Patron-Client Political Change in Southeast Asia", dalam *Friends, Followers and Factions*. London: University of California Press.
- Skinner, G. William, "The Nature of Loyalties in Rural Indonesia", 1973, dalam G. William Skinner (ed.), *Local, Ethnic, and National Loyalties in Village Indonesia: A Symposium*.
- , 1980. "Change and Persistence in Chinese Culture Overseas", dalam *Journal of the South East Society*.
- Smith, A.D, 2003. *Nasionalisme: Teori, Ideologi, Sejarah*. Jakarta: Erlangga.
- Snyder, Jack, 2000. *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict*. New York/London: WW.Norton.
- Spradley, James, 1997. *Metode Etnografi* Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Stockwell, Robert, "Democracy and Ethnic Conflict: A Comparative Analysis of Fiji, Guyana, Mauritius, and Trinidad", dalam <http://www.Grofman.stockwellpaper-CSD>.
- Strauss, Anselm & Corbin, 1997. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Teknik dan Teori (Grounded)* (terj.). Surabaya: Bina Ilmu.
- Sullivan, Jhon, "Kampung and State: The Role of Government in The Development of Urban Community in Yogyakarta", tulisan dalam *Indonesia*. Cornell Southeast Asia Program.
- Sumaryono, F. 1999. *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta. Kanisius.
- Suparlan, Parsudi. "Javanese Ethnic Association in Suriname", *Journal of Steward Anthropological Society*, Volume 7, No.1, 1975, h.2-11.
- , 1988. "Jaringan Sosial", *Bulletin*, Thn.III/1988, Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM.
- , 2003. *Hubungan Antar-Sukubangsa*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Suptomo, Ade. 2002. "Jamin: Konstruksi Sosial Tentang Proses Integrasi Suku Bangsa Jawa dengan Minangkabau di Sitiung Sumatera Barat". *Disertasi*, tidak diterbitkan, Yogyakarta: UGM.
- Surbakti, Ramlan. tanpa tahun. *Himpunan Teori-Teori Politik*. Surabaya: FISIP Unair.
- , "Implikasi UU Politik Terhadap Politik Lokal", *Widyapraya*, No.32, Tahun XXII, 1999.
- Sutherland, Heather. 1983. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Syahra, Rusydi. "Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi", tulisan dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume V No. 1, 2003., h. 1-22.
- Tarimana, Abdurrauf. 1989. *Kebudayaan Tolaki*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Touwen dan Bouwsma. 1988 "Kepala Desa Madura: Dari Boneka Menjadi Penguasa", dalam Philip Quarces van Ufford, *Kepemimpinan Lokal dan Implementasi Program* (terj.). Jakarta: PT.Gramedia.
- Trafers. 1974. *Het Landshap Larwoet*, KNAG Twedeserte.
- Usman. Sunyoto. "Struktur Interaksi Kelompok Elite dalam Pembangunan, Penelitian di Tiga Desa Santri", *Prisma*. No 6, Juni, 1991, h.12-20.

- 1990. *Elite dalam Perspektif Sosiologi*. Yogyakarta: UGM.
- Van Den Berghe, Pierre. 1981. *Essays in Comparative Sociology*. New York: Basic Books
- Van Klinken, Gerry. 2003. "Desentralisasi, Kekerasan dan Demokrasi Akar-Akar Kolonial Konflik Etnis di Indonesia", tulisan dalam A.F. Priyono dkk, *Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto*. Jakarta: Demos.
- Van Niel, Robert, 1992. *Munculnya Elite Modern di Indonesia* (terj.). Jakarta: Pustaka Jaya.
- Warnaen, Suwarsih, 2002. *Stereotip Etnik dalam Masyarakat Multietnis*. Yogyakarta: Multi Bangsa.
- Waters, Malcolm, 1994. *Modern Sociological Theory*. London: Sage Publications.
- Weiner, Myron & Huntington, Samuel, 1987. *Understanding Political Development*. Boston: Little Brown and Company.
- Whittan, Anthony; Mustafa, Muslimin; Henderson, 1987. *Ekologi Sulawesi*. Jakarta: LP3ES.
- Wilson, A. Jeyaratman, 1998. "Tribalism and Elites in A Democratic State dalam Kenneth Christie (ed.) *Ethnic Conflict, Tribal Politics a Global Perspective*. Great Britain: Curzon Press.
- Wijaya, Albert, 1988. *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES.
- Wooldridge, Michael, 1998, "A Pathology in The Political Process", dalam Robert Manne (ed.), *Two Nations: The Case and Effect of The Rise of The One Nation Party in Australia*, Melbourne: Bookman Press.

### Dokumen dan Surat Kabar

- A Ligvoet Boeton, 1877.
- Quarles de Quarles, *Memories Gouvernor Celebes*, 4 Agustus 1910.
- *Volstelling*, 1930, Buku V.
- AD/ART PDI-P.
- SK DPP PDI-P NO. 304/A/DPP/2004.
- SK F-PG No. Kep-03/TPG-DPRD/X/2002.
- Permendagri No. 3/1997.
- PP 151/2000.
- Berita Acara Rapat DPRD Kodya Kendari.
- Keputusan DPRD Kota Kendari No.15/Pimp.DPRD/2001 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Periode 2001--2006.
- Keputusan DPRD No.2/DPRD/2001 Tentang Peraturan Tata Tertib Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberberhentian Walikota/Wakil Walikota Kendari Periode 2001—2006.
- Dokumen Hasil Proses Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Kendari Periode 2001 -2006.
- Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 17/575 tanggal 16 Agustus 2001.
- UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- Surat Keputusan Nomor 371 tahun 2001 tentang Pembatalan Keputusan DPRD Kota Kendari Periode 2001—2006.
- Dokumentasi DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara.
- *Kendari Pos*, 10 Agustus 2001, 19 September 2001.
- *Kendari Ekspres*, 19 September 2001.
- *Kompas*, 24 September 2003, 17 September 2003.
- *Yayasan Bhakti Nusantara*, 1998. Sulawesi Tenggara.

## GLOSSARY

Papalele	: Pedagang perantara
Kannasa	: Ikan diawetkan dengan garam
Anakia	: Golongan bagsawan/turunan dari istana orang Tolaki
To'oneleu	: Penduduk pendatang
Mbuwonua	: Penduduk negeri yang punya negeri
Ponggawa	: Mokole di Tongauna yang dijabat oleh Bunggasi
Kapitan	: Mokole di Wawotobi yang dijabat oleh Lasandara
Sapati	: Mokole di Abuki yang dijabat oleh Ronga
Sangia	: Mokole di Ranomeeto yang dijabat oleh Tekaka
Mokole	: Kepala pemerintahan dalam lingkup distrik
Sulemandara	: Mokole di Pondidaha yang dijabat oleh Saranani
Sando	: Dukun yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit
Todu	: Orang yang menguasai seluk beluk berbagai tanda yang tidak baik
Tamalaki	: Orang yang berfungsi untuk mempertahankan dan menjaga seluruh wilayah
Tono motuo	: Pemimpin wilayah yang berfungsi mengatur dan mengendalikan kehidupan masyarakat
Pabitara	: Orang kedua setelah tonomotuo yang berfungsi dalam menyelesaikan sengketa dalam peradilan
Anakia	: Golongan bangsawan/turunan dari etnis Tolaki
Puutubu	: Anakia dari wilayah bawahan
To'ono dadio	: Golongan menengah dari etnik Tolaki
Ata	: Golongan lapisan bawah
Kaomu	: Golongan dalam etnik Muna dan Buton yang menjalankan kekuasaan eksekutif
Walaka	: Golongan dalam etnik Muna dan Buton yang menjalankan fungsi sebagai perencana
Anangkolaki	: Golongan dalam etnik Muna yang merupakan anak dari isteri selir
Papara	: Golongan rakyat
Lulo	: Tarian khas dalam etnik Tolaki
Kino	: Gelar yang diberikan kepada golongan kaomu ketika memegang suatu jabatan
Meno	: Gelar yang diberikan ketika golongan lain (selain kaomu) yang memegang suatu jabatan
Omputo	: Raja
Kinogama	: Pemimpin keagamaan
Kapitalao	: Panglima
Kapita	: Pengawal istana

<b>Dasa</b>	: Tanah yang diberikan kepada seseorang karena jasa
<b>Bhonto balano</b>	: Pembantu utama raja
<b>Mintarano bhitara</b>	: Hakim
<b>Koghoerano</b>	: Kepala-kepala wilayah
<b>Modhino kampo</b>	: Petugas agama terendah di tingkat kampung
<b>Mokimo</b>	: Pembantu pejabat agama
<b>Boka</b>	: Uang mahar untuk sesame golongan kaum
<b>Liano bahutura</b>	: Bagian dalam perahu menjadi liang
<b>Beteno ne tombula</b>	: Muncul dari pohon bamboo
<b>Pisa</b>	: Sepupu satu kali
<b>Topendua</b>	: Sepupu dua kali
<b>Topentolu</b>	: Sepupu tiga kali
<b>Topeapa</b>	: Sepupu empat kali
<b>Lambu</b>	: Keluarga inti di Muna
<b>Tombu</b>	: Kelompok kekerabatan yang lebih besar dari lambu
<b>Siwulu</b>	: Kelompok kekerabatan yang lebih besar dari tombu
<b>Bhasite momaho</b>	: Famili dekat
<b>Bhasite kodoho</b>	: Famili jauh

